Ahmad Nashih Luthfi's Melacak Sejarah Pemikiran Agraria is an important and useful work. The first part of the book traces the various traditions of agrarian research from the colonial period to the present, in the context of shifting agrarian policies. The second part of the book explores the intellectual biographies of Professor Sajogyo and Dr. Gunawan Wiradi, as two exemplary leading figures in the emergence of the 'Bogor school' of critical agrarian studies. In this way the author has made a truly original contribution to our understanding of Indonesian agrarian studies.

Ben White, *Professor of Rural Sociology, International Institute of Social Studies (ISS), The Hague.*

Buku ini membuka mata saya pada cara lain untuk berilmu, yang kini tidak biasa lagi. Biografi Sajogyo dan Gunawan Wiradi ini menghadapkan pembaca dengan dua ilmuwan yang menjadi besar tanpa mengorbankan kemanusiaannya. Lain dengan teknokrat yang sekarang ini, yang meneliti atas dasar pesanan dari atas, penelitian mereka berakar dalam rakyat. Ia bergerak dari keterlibatan pribadi dalam upaya utopis pembebasan.

Gerry van Klinken, *peneliti senior di KITLV, Leiden, Belanda.*

Bagi para Agrarista, yakni mereka yang menjadi pengusung agenda Reforma Agraria, buku ini wajib dipelajari, termasuk untuk mendapatkan inspirasi. Saya sendiri menikmatinya sebagai suatu pertemuan intelektual yang amat mengasyikan, terutama untuk memikirkan batas-batas dan cara bagaimana para guru yang berumah di lembaga akademis dapat berkiprah dalam mengungkap dan menganalisa kenyataan hidup rakyat pedesaan, menyuarakan kritik, dan menyampaikan gagasan perubahan yang layak untuk ditempuh.

Noer Fauzi, *kandidat Ph.D di University Berkeley, California*

Buku ini sebenarnya telah memberi pengetahuan luas tentang perkembangan pemikiran agraria di Indonesia di luar dua tokoh dari Institut Pertanian Bogor itu semata, dan sekaligus perkembangan pemikiran dalam sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia.

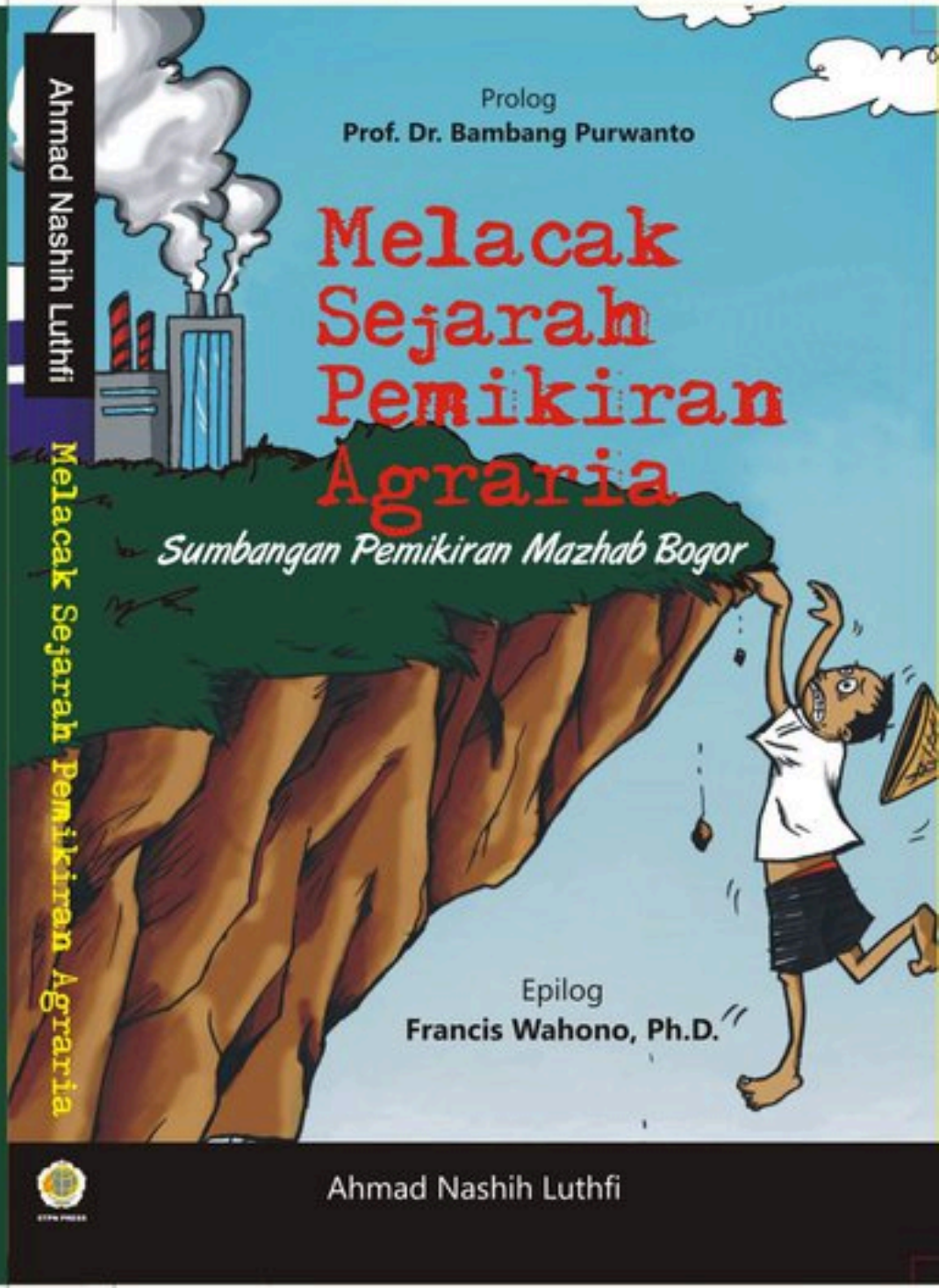
Bambang Purwanto, *Guru Besar Sejarah UGM*

Diterbitkan atas kerjasama

STPN PRESS

SAINS

Pustaka Ifada



Ahmad Nashih Luthfi's *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria* is an important and useful work. Based on a wide-ranging study of secondary sources, and also on interviews with senior agrarian scholars, the book makes two important contributions to Indonesian agrarian studies.

The first part of the book traces the various traditions of agrarian research from the colonial period to the present, in the context of shifting agrarian policies. In these chapters the author has summarized many important but little-known studies from Indonesia's late-colonial and early independence period (1920s – 1970s).

The second part of the book explores the intellectual biographies of Professor Sajogyo and Dr. Gunawan Wiradi, as two exemplary leading figures in the emergence of the 'Bogor School' of critical agrarian studies. These two scholars, and others of the 'Bogor School', have consistently opposed the longstanding elitist tradition in agrarian research and policy, insisting on the need for attention to the structural problems which maintain and reinforce rural poverty, and arguing for agrarian reforms to correct the unequal agrarian structures left behind by colonialism and further distorted by developments in the neoliberal era.

In this way the author has made a truly original contribution to our understanding of Indonesian agrarian studies. This book will be essential background reading for young scholars, practitioners and activists interested in problems of agrarian transition and rural poverty in Indonesia.

Ben White, *Professor of Rural Sociology, International Institute of Social Studies (ISS), The Hague.*

Buku ini menyediakan cara merekonstruksi satu mazhab pemikiran agraria Indonesia yang orisinil dan pernah sangat berpengaruh dalam dunia akademik, kebijakan pemerintah, dan gerakan sosial pada masanya. Buku ini secara apik mampu menjelaskannya melalui penelusuran riwayat hidup pemulainya, andil dari karya-karya mereka, dan konteks dimana mereka berkiprah.

Persoalan agraria yang Indonesia hadapi sekarang ini bukan sekedar menuntut kerja yang lebih keras dan lebih banyak. Lebih dari itu, diperlukan cara yang lebih baik dan segar untuk mengerti masalah agrarian yang telah diungkap, dan juga tentunya yang tidak atau belum mau/sanggup/boleh ter(di)ungkap. Masalah agraria ini tak bisa dilepaskan dari tali-temali perkembangan kapitalisme global-lokal yang tidak sama antara satu tempat dengan tempat lainnya. Hal itu mencakup perluasan pasar tanah melalui formalisasi dan pembentukan hak milik tanah dan pengaturan transaksi tanah; deagrarianisasi dan urbanisasi yang membuat desa menjadi wilayah masa lampau; dipaksa masuknya tanah dan kekayaan alam dan penduduk pekerja laki-perempuan dalam sirkuit produksi makanan, energi, dan barang dagangan lain, dan juga bentuk-bentuk baru pengkawasan konservasi alam, dalam skala yang tak terbayangkan sebelumnya; dan perjuangan akses, kontrol, dan komando atas tanah dan kekayaan alam yang sekaligus merupakan bagian dari upaya penataan kembali hubungan negara, warga negara, dan bisnis-bisnis raksasa.

Bagi para agrarista, yakni mereka yang menjadi pengusung agenda Reforma Agraria, buku ini wajib dipelajari, termasuk untuk mendapatkan inspirasi. Saya sendiri menikmatinya sebagai suatu pertemuan intelektual yang amat mengasyikan, terutama untuk memikirkan batas-batas dan cara bagaimana para guru yang berumah di lembaga akademis dapat berkiprah dalam mengungkap dan menganalisa kenyataan hidup rakyat pedesaan, menyuarakan kritik, dan menyampaikan gagasan perubahan yang layak untuk ditempuh.

Noer Fauzi, *Kandidat Ph.D. Barkeley University California*

Buku ini membuka mata saya pada cara lain untuk berilmu, yang kini tidak biasa lagi. Biografi Sajogyo dan Gunawan Wiradi ini menghadapkan pembaca dengan dua ilmuwan yang menjadi besar tanpa mengorbankan kemanusiaannya. Lain dengan teknokrat yang sekarang ini, yang meneliti atas dasar pesanan dari atas, penelitian mereka berakar dalam rakyat. Ia bergerak dari keterlibatan pribadi dalam upaya utopis pembebasan. Sudah waktunya sejarah penelitian *landreform* dan kemiskinan mereka di Bogor tahun 1950-an sampai dengan 1970-an dibuka bagi publik yang lebih besar. Siapa tahu, "pemikiran agraria" akan mengilhami pemuda-pemudi idealis yang ingin membangun karir seperti mereka di dunia penelitian.

Gerry van Klinken, *peneliti senior di KITLV, Leiden, Belanda.*

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria

Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria

Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Ahmad Nashih Luthfi

STPN PRESS

SAINS Sajogyo Institute

Pustaka Ifada
Khasanah Pemikiran Nusantara

Melacak Sejarah Pemikira Agraria
Sumbangan Pemikiran Madzhab Bogor
©Ahmad Nashih Luthfi

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
(Juli 2011) oleh:

STPN Press
Jalan Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 587529
Faks: (0274) 587138

Bekerjasama dengan
Pustaka Ifada
Mlangi 60, Nogotirto, Gamping, Sleman
Yogyakarta 55292
Telp. (0274) 625843
Email: ifadapustaka@gmail.com

Sajogyo Institute
Jalan Malabar 22 Bogor, Jawa Barat
Telp/Faks: (022) 8374048
Email: sains.press@gmail.com

Penulis: Ahmad Nashih Luthfi
Editor: M. Mustafied
Proofing: Tim Pustaka Ifada
Indeks: Tim Pustaka Ifada
Layout Isi: Ulin Ni'am
Desain Sampul: Kenci

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Melacak Sejarah Pemikiran Agraria
Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
STPN Press, Pustaka Ifada, SAINS, 2011
lii + 348 hlm.: 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-95177-4-3

Pengantar Penulis

Alhamdulillah. Hunjuk puji pada Allah SWT, Tuhan dengan segala penat diadukan, segala kegelisahan dipintakan jalan terang, segala kenikmatan dikembalikan. Tuhan dari semua segala. Khalik dari segala makhluk, makhluk benda maupun makhluk ide. Buku ini berhasil dirampungkan jika dan hanya jika atas keridaan-Nya.

Buku ini diangkat dari tesis penulis di Program Pascarjana Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada, yang diselesaikan pada akhir 2009. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Sri Margana sebagai pembimbing penulisan tesis, beserta para penguji, Prof. Dr. Djoko Suryo, Prof. Dr. Suhartono, yang diketuai oleh Prof. Dr. Bambang Purwanto.

Kajian tentang pemikiran agraria dengan menempatkan "apa yang dipikirkan oleh para pelakunya" sekaligus "pelaku itu sendiri", yakni ilmuwan sebagai fokus kajian, adalah ikhtiar untuk mengetahui *state of the art* suatu disiplin ilmu dan melihat belitkelindan antara ilmu(wan), kekuasaan, modal, dan masyarakat di satu sisi, dan kaitan persoalan agraria, kemiskinan, dan kapitalisme di sisi yang lain. Apa yang ditulis ini tidak selalu ada yang baru, atau juga menyegarkan. Sebab yang dilakukan justru adalah menghadirkan apa yang lama itu hadir di tengah-tengah kekinian, sesuatu yang dekat bagi dunia akademis, bahkan dekat sekali, namun barangkali dilupakan: studi agraria, suatu ranah yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.

Para Guru yang dengan sabar berbagi kisah, buku, informasi, ide, dan sikap: Prof. Dr. Sajogyo, DR. HC. Gunawan Wiradi, M.Soc. Sc., dan Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro, yang tanpa mereka bertiga buku ini tidak akan pernah ada. *Matur sembah nuwun* saya haturkan. Dengan penuh penyesalan, dalam buku ini penulis tidak bisa mengkaji secara khusus peran dan kiprah Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro sebagai salah satu sosok ilmuwan Mazhab Bogor yang turut memperkaya khazanah studi agraria Indonesia. Alasan utamanya adalah keterbatasan waktu yang tersedia selama penulis menyelesaikan buku ini yang semula merupakan tugas akhir studi di Universitas Gadjah Mada. Meski demikian, penulis di buku yang berbeda telah membantu menyunting-tuliskan otobiografi beliau berjudul *Mencari Ilmu di Tiga Zaman dan Tiga Benua, Otobiografi Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro.* Buku ini diterbitkan oleh lembaga dimana penulis beraktivitas di dalamnya, Sajogyo Institute (Sains).

Terima kasih tak terhingga kepada Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Atas dukungan penuh beliau, mulai dari awal penulisan hingga penerbitan, buku ini bisa terwujud. Dr. Satyawan Soenito dan Dr. Soeryo Adiwibowo dari Fakultas Ekologi Manusia IPB banyak memberi saran dalam penyusunan proposal.

Buku ini tidak akan hadir tanpa interaksi penulis dengan kawan-kawan di Sajogyo Institute. Mereka adalah Mbak Laksmi Adriani Savitri, Mas Eko Cahyono, M. Yusuf, Dewi Puspitasari Sutedjo, Syafar Supardjan, Didi Novrian, Uswatun Hasanah, Yeni Maryani, Zuhdi Siswanto, Surya Saluang, Chindrasari, dan Pak Adjid. Terima kasih atas ikhtiar untuk *belajar dan bertindak bersama*-nya. Khusus untuk Mas Noer "Oji" Fauzi yang telah mengajar di kelas LIBBRA, dan dari negeri seberang tidak bosan-bosannya mengirim bahan yang relevan untuk tesis ini, *nuhun Kang.* Dian Andika Winda dan Noviana Rahmawati, terima kasih untuk bantuan transkripsinya.

Teman-teman Pustaka Ifada (Mustafid, Irfan Afifi, Rusman Nurjaman, Ryan Sugiarto, Said Hudaini Kadmi dan Ulin Ni'am),

terima kasih kerjasamanya. Pak Bambang, Pak Wahono, Mbak Laksmi, Pak Gerry, Pak Ben dan Mas Noer "Oji" Fauzi, terima kasih atas perkenan prolog, epilog dan *endorsement*-nya.

Moh. Shohibuddin, kakak sekaligus teman, serta pembimbing non-formal atas buku ini, terima kasih atas teladannya. Beberapa gagasannya turut berkontribusi di dalam buku ini. Terkhusus untuk istri tercinta, Anna Mariana, dan buah hati, Sadya Zarobi Lilakila, yang senantiasa memberi dukungan, perhatian, didikan dan kasih sayang demi selesainya tugas ini, terima kasih tak terhingga. Bapak dan ibuku, Drs. H. Muchtar dan Hj. Fathimah, buku ini bukanlah persembahan yang setimpal atas segala apa yang telah dicurahkan kepada penulis.

Buku ini jauh dari sempurna, saran dan kritik senantiasa diharapkan dengan senang hati.

A. N. Luthfi

Pengantar Penerbit

Kajian tentang agraria yang berbasis khasanah pemikiran Nusantara, sungguh mengejutkan, cukup langka dalam literatur sosial kita. Padahal, persoalan agraria pada hakikatnya merupakan salah satu persoalan penting dalam pembangunan bangsa. Absennya kajian agraria dalam diskursus teori pembangunan, bahkan juga dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pada akhirnya berimplikasi sosial amat luas. Kekacauan konsep tata ruang, kekisruhan klaim kepemilikan tanah yang muncul di mana-mana, mudahnya masyarakat tergusur dari tempatnya berteduh, hingga kian menciutnya lahan pertanian produktif, hanyalah sebagian kecil dari implikasi tersebut.

Dalam wacana sosial mutakhir, konstruksi rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, sekali lagi, membuktikan ketiadaan akar historis dan ideologi keberpihakan pada masyarakat. Klausul "untuk kepentingan pembangunan" merupakan gagasan berbahaya oleh karena sangat mudah dimanipulasi, disalahgunakan, dan dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan bisnis. Alhasil, rancangan undang-undang ini merefleksikan ketiadaan keberpihakan pada rakyat, pada hak kolektif masyarakat, pada konstruksi agraria yang berakar dalam sejarah dan budaya Nusantara.

Oleh karenanya, merevitalisasi diskursus agraria yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, dan mendorongnya menjadi wacana publik, dan terus mengembangkan kesadaran publik tentang agraria yang berpihak, menjadi semakin penting dan strategis. Di titik itulah, kehadiran buku *Melacak Sejarah Pemikiran*

Agraria, Sumbangan Mazhab Bogor di tengah-tengah khalayak pembaca di tanah air diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya tersebut. Selamat membaca.

Yogyakarta, Juli 2011
Pustaka Ifada
Khasanah Pemikiran Nusantara

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A
Ketua STPN

Saya sangat bergembira dengan terbitnya buku ini yang semula adalah karya tesis magister yang ditulis sdr. Ahmad Nashih Luthfi pada Program Pascasarjana Ilmu Sejarah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (kini staf pengajar pada STPN, Yogyakarta). Buku ini tentu saja suatu percobaan yang sangat menarik dan sekaligus menantang karena menawarkan keberanian penulisnya untuk menyebut karya-karya pemikiran sejumlah *scholar cum activist* agraria di kota Bogor (mereka yang dikaji berkiprah di lingkungan kampus IPB Bogor) dalam suatu pemaknaan yang meletakkan mereka sebagai perintis dan pengembang mazhab *(school of thought)* tersendiri: 'Mazhab Bogor'. Semoga dengan cara ini penulis bermaksud memberikan celah yang makin lebar (bukan sebaliknya untuk meng-kerangkeng-nya) bagi para peminat *(peer groups*) agar terus menggali, menguji, dan terus mewacanakan, pemikiran-pemikiran 'Mazhab Bogor' dalam diskusi-diskusi ilmiah yang berlanjut dan terbuka.

Saya sendiri merasa sangat tersentuh secara emosional dengan terbitnya buku ini. Mengapa, karena saya sempat menjadi salah satu pelaku yang sangat beruntung mendapatkan kemewahan berinteraksi cukup intens dengan Prof. Sajogyo (tokoh utama 'Mazhab Bogor') untuk waktu yang relatif panjang. Dalam hal ini saya pernah berkiprah dalam beragam posisi akademis yang berbeda-beda di hadapan beliau. Saya pernah sebagai asisten peneliti yang direkrut langsung dan berkerja dalam kegiatan-kegiatan riset yang dipimpin beliau, lalu pernah ditunjuk sebagai

sekretaris eksekutif pada Pusat Studi Pembangunan IPB saat dipimpin oleh beliau, kemudian sebagai mahasiswa doktoral dan sekaligus menjadi anak bimbing dalam penulisan disertasi di mana beliau bertindak sebagai Ketua Komisi Pembimbing, dan terakhir sebagai mitra peneliti dalam berbagai kegiatan riset semasa beliau memasuki periode sebagai Guru Besar Emeritus IPB.

Saya sendiri secara subyektif merasakan ada perguliran pemikiran Prof. Sajogyo yang dari waktu ke waktu menurut hemat saya berevolusi, dari semula yang lebih beraksen sosiologi 'em-piris-kritis' berlanjut menjadi sosiologi 'terapan-kritis', dan beru-jung di akhir karier akademis formalnya (lingkungan kampus) sebagai intelektual paripurna yang mengatasi predikat sebagai 'sosiolog yang kompeten dan otoritatif' penekun pembangunan ekonomi dan masyarakat *(beyond the sociology of development econo-my and society).* Di sini Prof. Sajogyo ibarat resi yang mulai menapaki lebih nyata tuntutan pemikiran dan olah batin dalam tataran yang begitu fundamental dalam kerangka menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang bertautan dengan 'Mencari Indonesia'. Dalam hal ini keprihatinan beliau dipusatkan pada simpul masalah *human dignity* dan *human freedom* yang masih terus mendera kaum papa yang tereksklusi dari akses sumber-sumber kesejahteraan, dalam perspektif jagad semesta ilmu-ilmu sosial dan etika moral.

Selamat Membaca

Yogyakarta, Juli 2011

KATA PENGANTAR

Laksmi Adriani Savitri, Ph.D
Direktur Sajogyo Institute

Sang penulis, Ahmad Nasih Luthfi, menghasilkan karya ini sebagai sebuah tesis sejarah yang mensintesa genealogi pemikiran tentang pembangunan pedesaan Indonesia dari sebuah komunitas epistemis yang disebut sebagai pelahir 'Mazhab Bogor'. Menurut penulis, sumbangan pemikiran para tokoh yang berbagi habitus di kampus IPB selama masa-masa selepas Orde Lama dan sepanjang Orde Baru itu, dengan segala lika-liku tantangan politik, telah memenuhi lima kriteria untuk menghasilkan sebuah aliran pemikiran (merujuk pada Mazhab Frankfurt). Bagi saya, penulis berhasil meyakinkan pembacanya bahwa sebagai aliran pemikiran dalam studi agraria, buah pikir Sajogyo dan Gunawan Wiradi sebagai pemulai, diikuti beberapa guru lainnya seperti Sediono M.P. Tjondronegoro dan Pudjiwati yang hadir kemudian, telah membentuk sebuah pengetahuan otoritatif –paradigma baru- yang memiliki kuasa korektif atas kebijakan pemerintah, yakni dengan menghadirkan cara pikir melawan arus utama pada masa itu. Bayangkan, menandingkan ukuran kemiskinan berdasarkan jumlah uang yang didapat dengan keselamatan hidup rakyat miskin berdasarkan keamanan pangan, pastilah merupakan terobosan besar yang mendobrak sesat pikir kaum elit! Belum lagi kemampuan untuk menghadirkan suatu argumen tandingan atas Revolusi Hijau -sebagai andalan kebijakan utama pada masa itu-, yakni dengan menunjukkan bahwa Revolusi Hijau telah menghasilkan kemiskinan yang semakin akut di pedesaan

ketimbang kesejahteraan seperti yang dibayangkan. Sehingga sebetulnya, yang dibutuhkan sebagai dasar pembangunan adalah Reforma Agraria. Bukan sekedar usaha coba-coba 'peningkatan produktivitas' yang menjauhkan esensi pembangunan dari peneguhan kemanusiaan. Sesungguhnya, seperti disajikan dengan terang benderang oleh penulis, keberpihakan pada masyarakat miskin pedesaan secara konsisten dari perjalanan pemikiran kedua guru inilah yang menjadi 'api yang membara dalam dada', penghidup dan spirit bagi pemikiran itu sendiri. Dengan itulah, pemikiran ini mengakarkan diri, sehingga ia mampu memunculkan apa yang tak terlihat oleh Negara. Pada masa itu, Negara adalah penentu arah Pembangunan dan penentu di mana masyarakat miskin pedesaan diposisikan. Pada masa itu, Mazhab Bogor berdiri sebagai penanding sesat pikir Negara.

Buku ini diterbitkan di satu masa di mana hidup kita, sebagai warga negara, tidak lagi mudah dipahami dalam suatu hubungan pelayanan dan pengurusan antara Negara dengan warganya. Peran Negara sudah dilucuti sedemikianrupa hingga tumbuh ruang kendali yang begitu besar dikuasai oleh pasar. Negara sekedar menjadi instrumen pasar, pelancar distribusi dan alokasi sumberdaya untuk akumulasi modal. Tanah dan sumber agraria lainnya bisa atau tidak bisa dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin pedesaan bukan lagi karena ada peran pengaturan oleh Negara, tapi lebih disebabkan oleh adanya *invisible hands* yang mengatur *supply* dan *demand* atas tanah dan sumber agrarian pedesaan. Lalu, di jaman ini, bagaimana memetik pelajaran dari buku ini?

Bagi saya, atau setidaknya kita semua yang sedang diwarisi tugas sejarah untuk mengembangkan pemikiran ini, konteks yang berubah tentunya menghadirkan tantangan yang berubah. Arus pemikiran yang kita hadapi sudah sedemikian sistematis mewakili suatu kepentingan untuk mengintegrasikan seluruh pelosok bumi dalam sistem pasar global. Sementara kita, jika tidak segera merapatkan barisan dengan cara belajar bertindak bersama tanpa lelah, untuk membangun sistem pemikiran yang teguh sebagai

counter argument dari arus kepentingan ini, maka akan dengan cepat kalah langkah.

Pemikiran para guru kita membantu kita untuk secara tajam memahami *social inequality* di pedesaan. Tidak dengan mudah menerima desa dalam sebuah romantisme harmoni, tapi memahami sepenuhnya bahwa kekuatan kapitalisme juga bisa berasal dan mengakar dari desa. Pada masa ini, begitu dekat jarak antara pemikir dan pengambil kebijakan di lembaga-lembaga keuangan internasional- yang begitu dipercaya oleh Negara, dengan kejadian dan peristiwa yang segera mewujud di pedesaan. Dalam hitungan hari, tiba-tiba masyarakat pedesaan yang sekarang ini hampir tak ada yang tak terjerat hutang, lalu dihadapkan pada keputusan untuk menyerahkan tanahnya pada perusahaan besar yang masuk ke desa dengan janji kesejahteraan. Dengan demikian, kerja kita tidak lagi sesederhana mengorganisir perlawanan atas masuknya modal besar di desa, dan menggedor gedung DPR dan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus beragam regulasi yang menindas. Itu sangat penting dan perlu, dan tak mungkin ditinggalkan, tapi tak cukup.

Dari pemikiran para Begawan ini, kita sadar bahwa kita juga perlu menemukan cara untuk mengurai jerat hutang di pedesaan, membuka jalan demokratisasi hubungan-hubungan sosial pedesaan, mempelajari dan meneguhkan kekuatan rakyat dalam soal kelola wilayah, soal pengorganisasian lahan pertanian, kebun, hutan dan daerah perairan. Dan saat ini kita pun perlu sekaligus mempelajari dan menemukan cara semua itu dalam rangka penyelamatan satuan ekologis untuk keselamatan hidup bersama, sambil tak lupa memihak secara khusus pada kepentingan kaum rentan, seperti perempuan kepala keluarga, buruh, anak-anak dan orang tua.

Memang perjalanan masih panjang. Mari, segera melangkah belajar bertindak bersama. Kita belajar dari buku ini, seperti kedua guru, akarkan diri pada semangat keberpihakan pada masyarakat miskin dan tertindas untuk mampu melahirkan pemikiran

otoritatif yang melembaga pada pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan dan gerakan.

Selamat belajar dan berjuang.

Malabar 22, 8 Juli 2011

PROLOG

Pemikiran Agraria, Hal Penting yang Terabaikan

Prof. Dr. Bambang Purwanto
Guru Besar Ilmu Sejarah UGM

Kurang lebih enam puluh tahun yang lalu ketika Indonesia baru saja mulai membangun dirinya sebagai sebuah negara-bangsa yang merdeka, Mochamad Tauhid, salah seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran agraria di Indonesia, dalam bukunya yang berjudul *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakjat Indonesia* telah mengingatkan bahwa "pengetahuan tentang politik agraria Indonesia di Indonesia belum menjadi pengetahuan bagi umum". Kalaupun ada orang Indonesia yang memiliki pengetahuan itu, maka hal itu "baru dimiliki terutama oleh orang-orang yang akan mempergunakan politik itu bagi kepentingannya". Padahal menurut Mochamad Tauhid, "masalah agraria sebagai masalah pokok bagi penghidupan bangsa dan rakyat Indonesia", atau dalam kata lain "persoalan agraria adalah persoalan hidup rakyat Indonesia". Sementara itu lebih jauh ia mengatakan bahwa persoalan agraria telah "menimbulkan kejadian-kejadian yang menyedihkan" di dalam masyarakat. Berbagai kenyataan yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, fungsi, dan pemanfaatan tanah benar-benar menjadi masalah, bukan jalan keluar atas berbagai persoalan yang telah dihadapi masyarakat sejak lama. Tanah yang seharusnya memberi rezeki kepada penduduk yang hidup di atasnya, telah berubah menjadi beban yang seakan-akan tidak ada penyelesaiannya di

tengah-tengah arus besar modernisasi dan perubahan rezim. Terlepas dari arti penting yang melekat di dalamnya, hal itu sekaligus menunjukkan tidak adanya perhatian yang serius untuk memikirkan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah agraria, baik di tingkat negara maupun akademisi dan praktisi. Masyarakat seolah-olah dipaksa untuk mencari jalan keluar sendiri atas masalah agraria yang dihadapinya.

Kemerdekaan politik yang dicapai melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pembentukan negara Republik Indonesia, dan keberhasilan kekuatan nasionalisme Indonesia menggagalkan usaha Belanda untuk membangun kembali kekuasaan kolonialnya pasca Perang Dunia II, tidak serta merta menyelesaikan berbagai masalah agraria yang telah diwarisi baik dari masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Kekuasaan politik baru cenderung menjadi pewaris perilaku politik kolonial yang ingin terus mendominasi penguasaan atas tanah, sehingga tidak paralel dengan pemaknaan kemerdekaan yang berkembang di dalam masyarakat yang menginginkan pendistribusian dan optimalisasi pemanfaatan atas tanah-tanah itu. Tidak adanya perubahan secara struktural di dalam struktur sosial masyarakat dan penguasaan atas tanah sejak kemerdekaan berakibat pada semakin meningkatnya kesenjangan, baik dalam arti akses atas tanah maupun keuntungan yang diperoleh masyarakat dari tanah itu. Proses nasionalisasi dan indonesianisasi hanya bermakna pengalihan kekuasaan atas tanah sebagai modal dari swasta ke negara dan dari pihak asing ke Indonesia tanpa memberi ruang pada warga negara untuk menguasainya. Hal itu ditandai oleh tidak adanya kebijakan terencana untuk meredistribusi hak-hak penguasaan atas tanah kepada masyarakat secara formal, kecuali masyarakat berinisiatif melakukan pendistribusian itu sendiri yang secara formal selalu diberi makna merebut dari pemilik yang sah. Akibatnya, berbagai konflik vertikal antara negara atau lembaga yang mengatasnamakan negara dengan warganya tidak dapat dihindari. Di sisi lain, berbagai persoalan agraria seperti konflik horizontal antara pemilik dan penggarap yang jarang terjadi sebelum-

nya, malah muncul sebagai sesuatu yang laten ketika Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Masalah agraria tidak lagi menjadi sekedar domain pribadi melainkan lebih mengemuka sebagai persoalan sosial yang akut.

Modernisasi pertanian dan pembangunan pedesaan yang memiliki kaitan erat dengan kenyataan agraria Indonesia ternyata secara historis lebih banyak dipenuhi oleh muatan politis dari pada kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomis yang dapat secara riil memberi manfaat kepada masyarakat. Pengesahan Undang-undang Pokok Agraria dan aturan-aturan lain yang mengikutinya pada tahun 1960-an yang seharusnya dapat menjadi sarana bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagai contoh, cenderung dilihat sebagai komoditi politis baik sebelum maupun setelah prahara politik 1965. Akibatnya, berbagai upaya untuk mewujudkannya terkendala oleh kepentingan politis yang sarat dengan subjektivitas baik ideologis maupun personal. Perubahan rezim politik setelah prahara itu semakin memperburuk keadaan, ketika label-label politik dan interpretasi sosial atas segala hal yang berhubungan dengan sektor agraria telah sampai pada tingkatan irrasional dan memandulkan produktivitas sektor agraria sebagai modal sosial dan ekonomis yang seharusnya mampu mensejahterakan masyarakat.

Keterlibatan kekuatan politik kiri yang sangat dalam dan luas pada sektor agraria sampai pertengahan tahun 1960-an, telah menciptakan trauma dan sekaligus kesewenang-wenangan atas nama tanah pada masa berikutnya. Hampir-hampir tidak berkembang rasionalitas sosial dan intelektual ketika baik negara maupun ilmuwan berbicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, sehingga berbagai konsep tentang tanah yang dikembangkan tidak didasarkan pada kenyataan yang ada. Pada satu sisi, realitas agraria seakan-akan hanya dihubungkan dengan pertanian dan perdesaan. Padahal dalam kenyataannya, masalah agraria juga merupakan sesuatu yang riil ketika berbicara tentang ruang dan kategori lain seperti perkotaan, hutan, dan industri. Di sisi lain, modernisasi perdesaan dan pertanian tidak

bermuara pada perluasan akses masyarakat atas tanah dan manfaatnya bagi kesejahteraan melainkan semakin mempersempit hak-hak agraris masyarakat. Sebaliknya modernisasi perdesaan dan pertanian berubah menjadi proses pengkotaan dan industrialisasi yang menjerat masyarakat dalam keterasingan budaya dan bahkan terusir dari tanah yang selama ini dikuasainya. Berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan lebih didasarkan pada kepentingan politik penguasa atau kelompok sosial-ekonomi dominan dari pada memikirkan kesejahteraan warga negara secara keseluruhan, sesuatu yang tidak berubah jika dibandingkan dengan konsepsi dasar yang pernah berlaku pada masa kolonial.

Nasib yang sejajar juga berlaku pada individu maupun kelompok intelektual yang mencoba menjadikan sektor agraria sebagai substansi material dalam pemikiran dan aksi kritisnya. Ideologisasi pembangunan yang dikembangkan pada masa Orde Baru hampir-hampir tidak memberi tempat kepada mereka, kecuali harus berhadapan dengan resiko pelabelan sebagai para pelanjut dari tradisi kiri di masa sebelumnya, sesuatu yang dapat begitu saja mengakhiri peran sosial dan keilmuan seseorang. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian paradigmatik dan strategi ideologis, sehingga mereka tetap diberi hak hidup untuk dapat terus berpartisipasi dalam proses pembangunan dan bermanfaat bagi cita-cita mensejahterahkan rakyat melalui sektor agraria. Menjadi para "profesional (yang) mendasarkan diri pada sikap netralitas" memungkinkan mereka tetap menghasilkan ilmu dan aksi yang relevan bagi mereka yang berada pada "struktur paling lemah dalam kelas sosial" yang cenderung terabaikan oleh modernisasi dan pembangunan. Hal itulah yang tergambar secara jelas dalam karya Ahmad Nashih Luthfi yang menelusuri secara historis tidak hanya tradisi keilmuan melainkan juga aksi Sajogyo dan Gunawan Wiradi atau tradisi yang disebutnya sebagai Mazhab Bogor dalam sejarah pemikiran agraria di Indonesia.

Dalam buku ini, Luthfi menunjukkan bahwa secara pribadi Sajogyo telah menjadi peletak dasar dalam perkembangan kajian

sosiologi pedesaan di Indonesia dan sekaligus "indonesianisasi" ilmu sosiologi. Sementara itu Gunawan Wiradi digambarkan sebagai perintis kajian *tenurial* dan secara konsisten membangun gagasan baru dalam konteks reforma agraria. Perpaduan pemikiran keduanya menurut Luthfi, telah menyumbangkan gagasan yang memiliki kekuatan "vokasionalitas", sebuah keberpihakan yang nyata kepada masyarakat pedesaan yang teraniaya oleh proses modernisasi dan pengabaian pemerintah dalam kebijakan agrarianya. Sajogyo dan Gunawan Wiradi mencoba membela dan sekaligus membekali masyarakat secara konsepsional, ketika pembangunan yang didasarkan pada ideologi pertumbuhan ekonomi yang diusung oleh rezim penguasa cenderung menciptakan ketimpangan demi ketimpangan dari pada kemakmuran rakyat yang dicita-citakan oleh sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Sementara itu dalam perspektif keilmuan, sebagai insinyur yang biasa diasosiasikan dengan ilmu-ilmu alam, keduanya telah mampu membangun jembatan yang mempertemukan baik secara epistemologis maupun metodologis dengan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, ketika mereka menempatkan masyarakat sebagai inti dari pemikirannya.

Pengalaman pribadi dan intelektual Sajogyo dan Gunawan Wiradi yang merupakan dua tokoh penting dalam perkembangan pemikiran agraria Mazhab Bogor di samping Pujiwati Sajoyo dan Sediono M. P. Tjondronegoro, tidak dapat dipisahkan dari proses historis pemikiran agraria Indonesia. Sajogyo dan Gunawan Wiradi bukan hanya ilmuwan yang mencoba mencari jalan keluar atas masalah-masalah agraria untuk mencapai kemakmuran rakyat seperti yang diharapkan oleh Mochamad Tauhid, tetapi perjalanan sejarah kehidupan mereka berdua sebenarnya telah merefleksikan perkembangan pemikiran agraria di Indonesia itu sendiri sejak tahun 1960-an terutama sepanjang masa Orde Baru. Ketika pemikiran agraria kritis sulit berkembang dan terabaikan, Sajogyo dan Gunawan Wiradi selalu hadir dengan pemikiran-pemikiran yang dapat dikatakan menentang arus dan penuh resiko dengan cara mereka sendiri. Sebagai individu yang

sempat terkorbankan karena prahara 1965, konsistensi yang ditunjukkan dengan cara membangun pemikiran agraria kritis tentu memerlukan keberanian tersendiri jika dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pengalaman serupa. Dalam kenyataannya, Sajogyo dan Gunawan Wiradi tidak pernah menyerah dan berhenti sampai berusia senja.

Biarpun Luthfi secara sadar menyatakan bahwa "salah satu kekurangan yang bisa disebut dalam penelitian ini adalah terkait dengan *habitus* keduanya, bagaimana Sajogyo dan Gunawan Wiradi sebagai Sang atau Pribadi, yang di dalamnya terwadahi sisi-sisi personalitas tidak mendapat perhatian cukup", penelusuran genealogis yang dilakukan Luthfi secara kontekstual tidak hanya menghadirkan pemikiran agraria mereka berdua melainkan juga sejarah sosial dari Sajogyo dan Gunawan Wiradi sebagai pribadi-pribadi di samping sejarah sosial pemikiran agraria Indonesia. Bahkan dalam konteks yang lain, buku ini sebenarnya telah memberi pengetahuan luas tentang perkembangan pemikiran agraria di Indonesia di luar dua tokoh dari Institut Pertanian Bogor itu semata, dan sekaligus perkembangan pemikiran dalam sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia. Memajukan sektor pertanian dan perdesaan tidak hanya sekadar menghadirkan teknologi modern dan canggih yang diasumsikan dapat memberikan nilai tambah, melainkan harus memperhatikan struktur sosial dan kenyataan kultural yang berlaku pada masyarakat. Teknologi modern tidak selalu dilihat sebagai jalan keluar, bahkan sebaliknya keduanya secara sadar melihat dampak buruk dari pemberlakuan teknologi baru yang menjanjikan kemajuan itu. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan jika Luthfi akhirnya berkesimpulan, Sajogyo dan Gunawan Wiradi melalui metode empiris yang "bervisi emansipatoris" terbebas dari dosa yang sering dilontarkan tentang "kemandegan ilmu-ilmu sosial".

Berdasarkan perjalanan sejarah pemikiran agraria yang telah dibahas dalam buku ini yang cenderung hanya menempatkan agraria dalam konteks perdesaan dan pertanian, ada satu hal yang perlu dipikirkan lebih jauh dalam pemikiran agraria sebagai

agenda untuk masa depan. Kenyataan yang ada sekarang ini menunjukkan perlunya menempatkan pemikiran agraria keluar dari perangkap sekadar pertanian dan perdesaan seperti yang dipahami selama ini. Kompleksitas relasional saat ini dan masa depan dapat diasumsikan bahwa pertanian dan perdesaan tidak selalu berada dalam satu kesatuan sebagai kenyataan agraria yang eksklusif, karena masalah agraria juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang perkotaan dan industri. Sementara itu, proses industrialisasi di tengah-tengah masyarakat perdesaan yang terus berlangsung saat ini tidak selalu berarti terjadi pengkotaan, walaupun dalam kenyataannya eksistensi perdesaan dan pertanian sudah terganggu. Pemikiran agraria seperti ini diperkirakan akan memberi ruang bagi terwujudnya sebuah peraturan perundang-undangan baru tentang agraria, sesuatu yang belum terwadahi dalam aturan-aturan yang ada selama ini, termasuk Undang-undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran agraria yang dapat mengakomodasi tidak hanya ruang perdesaan dan pertanian melainkan juga perkotaan dan industri. Akhirnya tidak ada gading yang tak retak, walaupun begitu buku ini tidak hanya telah memberi pengetahuan yang luas tentang sejarah pemikiran agraria Indonesia melainkan juga telah menyumbangkan sesuatu yang cukup berarti dalam perkembangan historiografi Indonesia. Selamat.

Yogyakarta, Juni 2011

Daftar Isi

Pengantar Penulis ~ ix
Pengantar Penerbit ~ xiii
Pengantar Ketua STPN ~ xv
Pengantar Direktur Sajogyo Institute ~ xvii
Prolog Prof. Dr. Bambang Purwanto ~ xxi
Daftar Isi ~ xxix
Daftar Istilah ~ xxxiii
Daftar Singkatan ~ xliii
Daftar Tabel ~ xlvii
Daftar Lampiran ~ xlix
Abstract ~ li

BAB I: PENDAHULUAN ~ 1
A. Latar Belakang ~ 1
B. Sekilas tentang dua Ilmuwan "Mazhab Bogor ~ 11
C. Tentang Buku Ini ~ 13
D. Tentang Mazhab Pemikiran ~ 16
E. Kajian Pustaka ~ 17
F. Metodologi dan Kerangka Konseptual ~ 19

BAB II: PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN KOLONIAL ~ 23
A. Konstruksi atas Desa: Lokal dan Global ~ 23
B. Desa Jawa dalam Penguasaan "Negara Modern" ~ 26
    a. Masa Daendels (1808-1811) ~ 28
    b. Raffles, riset kadaster dan *"land rent system"* ~ 30

c. Re-depolitisasi birokrasi van der Capellen (1816-1826) ~ 36
d. *Cultuurstelsel* dalam perdebatan ~ 38
e. Ekonomi liberal, riset atas penguasaan tanah dan penegasan prinsip "*domein verklaring*" ~ 42
f. Politik etis: Antara balas budi dan "pembentukan" negara Hindia Belanda ~ 45

BAB III: REVOLUSI HIJAU DI ASIA TENGGARA DAN TRANSISI AGRARIA INDONESIA ~ 53
A. Revolusi Hijau dan Berbagai Aspeknya ~ 53
B. Malthusian, Perang Dingin, dan Modernisme ~ 55
C. Revolusi Hijau di Asia Tenggara dan Dampaknya ~ 60
D. Menjadikan Pertanian Bergerak (*Getting Agriculture Moving*) ~ 67
E. Kritik atas Pelaksanaan Revolusi Hijau ~ 72
1. Diferensiasi sosial ~ 73
2. Marjinalisasi perempuan ~ 74
3. Migrasi sebagai bentuk nyata deagrarianisasi ~ 75
4. Keresahan pedesaan ~ 77
5. Punahnya keragaman hayati ~ 78
F. Siapa yang Diuntungkan oleh Revolusi Hijau? ~ 79

BAB IV: STUDI AGRARIA INDONESIA ~ 83
A. Sejarah Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia ~ 84
B. Studi Agraria di Hindia Belanda Abad XX ~ 87
1. Kehidupan pekerja perkebunan dan petani pada masa *malaise* ~ 88
2. Penelitian S. Dingley, *The Peasant Movement in Indonesia* ~ 95
3. *Wong cilik*-nya Soekarno ~ 98
C. Studi Agraria Indonesia Pasca-Kemerdekaan ~ 103
a. Dalam rangka persiapan UUPA ~ 104
b. Studi Anwas Adiwilaga ~ 108
c. Studi H ten Dam di Cibodas ~ 109

d. Jurnal *Sosiografi Indonesia* UGM ~ 110
e. Riset LPEM-UI tahun 1954-1955 ~ 112
f. *Yogyakarta*-nya Selo Soemardjan ~ 113
g. Karya dua Rektor IPB ~ 114
h. *Kaum tani* dan *setan desa*-nya Aidit ~ 115
i. Moch. Tauchid: Masalah agraria adalah soal hidup dan penghidupan manusia ~ 116

BAB V: PROF. DR. IR. SAJOGYO, PELETAK DASAR SOSIOLOGI PEDESAAN INDONESIA ~ 127
A. Masa Kecil yang Selalu Berpindah Tempat ~ 129
B. Pertanian: Meleburnya Unsur *Natura* dan Unsur *Humana* ~ 131
C. Asistensi pada K. J. Pelzer dan W. F. Wertheim: Kesempatan Emas menjadi Doktor ~ 135
D. Rektor Setahun: Pakaian Dinas Abu-abu, Dering Telepon Rumah dan Angket Mahasiswa ~ 138
E. Memimpin Lembaga Penelitian Survey Agro Ekonomi ~ 143
1. Berdirinya SAE: Memunculkan petani gurem yang absen dalam sensus ~ 143
2. Kelembagaan yang bersifat gotong royong ~ 146
3. Keterbatasan dana dan penyiasatannya ~ 147
4. Aktivitas dan metode: Tumbuh bersama Revolusi Hijau ~ 148
5. Siapakah "rakyat" itu?: Kritik SAE terhadap Revolusi Hijau ~ 151
6. Berbagai apresisasi ~ 155
F. UPGK dan Garis Kemiskinan ~ 159
G. Kemiskinan: Antara "Kondisi" dan "Konsekuensi" ~ 168
H. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan: Tantangan *Developmentalism* ~ 170
I. Membuka Celah Pemerintah Daerah ~ 174
J. Pusat Studi Pembangunan: Kritik atas *Developmentalism* ~ 175
K. Sosiologi Pedesaan IPB: Indonesianisasi Ilmu Sosial (Sosiologi) ~ 180

L. Profil Ilmuwan Indonesia: Sebuah Tawaran ~ 189

BAB VI: DR. HC. GUNAWAN WIRADI, GURU STUDI REFORMA AGRARIA ~ 193
A. Masa Kanak-kanak: *Ketulo-tulo* ~ 194
B. Di Tengah Suasana Revolusi: Masa Remaja ~ 201
C. Menjadi Mahasiswa Aktivis ~ 207
    1. Menjadi Ketua Senat Mahasiswa UI Bogor ~ 210
    2. Anggota Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) ~ 215
    3. Kuliah dan bekerja ~ 218
D. Insinyur Pengkaji *Landreform* ~ 220
E. Menjadi Dosen Institut Pertanian Bogor ~ 223
F. Prahara Politik 1965 ~ 225
G. Masa Penuh Petualangan ~ 229
H. Menempuh Jalan Sunyi ~ 230
    1. Sistem tebasan dan ancaman keresahan sosial: Kritik terhadap Revolusi Hijau ~ 232
    2. Studi dinamika pedesaan: Merintis studi *tenurial* ~ 234
    3. Mendobrak kebekuan isu agraria ~ 238
I. Pelembagaan Gagasan dan Rekognisi ~ 248

BAB VII DUA PEMIKIRAN AGRARIA DARI BOGOR ~ 253
A. Adakah Mazhab Itu? ~ 253
B. Reaksi dan Kreasi atas Pembangunan Nasional ~ 255
C. Antara Gagasan dan Diskursus ~ 261

BAB VIII: KESIMPULAN ~ 265

Epilog ~ 271
Daftar Pustaka ~ 279
Lampiran ~ 299
Indeks ~ 331
Tentang Penulis ~ 345

Daftar Istilah

agrarian studies in/on Indonesia: studi agraria di/tentang Indonesia.

agrarian unrest: keresahan agraria; keresahan pedesaan yang berbasis pada konflik atas tanah.

Agrarische Wet: Hukum Agraria.

Agricultural Revolution: satu istilah yang semula digunakan untuk menyebut Revolusi Hijau.

apokaliptis (*apocalyptic*): berorientasi pada masa depan yang jauh (hari kiamat).

applied knowledge: pengetahuan yang teraplikasi atau operasional, umumnya pengetahuan teknis dan rekayasa.

appropriation: penyerabotan; perampasan; pengambil-alihan (atas tanah).

Artikulasi Moda Produksi: bentuk dan proses aktivitas produksi yang melibatkan pihak tenaga kerja (buruh), pemilik (perusahaan), sumber kekayaan yang diolah dan yang dihasilkannya. Suatu teori dalam analisa Marxian.

beneficieries: penerima keuntungan.

birth control: kontrol atas kelahiran, seperti mengatur waktu, jarak, dan jumlah kelahiran.

borongan: sistem panen dengan menggunakan tenaga kerja dari luar yang tidak terikat dengan kegiatan pra-panen sebelumnya.

buruh tani: petani yang mengerjakan lahan orang lain sebab tidak mempunyai lahan sendiri yang dikelola atau lahannya terlalu kecil untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya.

by grace (landreform by grace): suatu usaha perubahan struktur penguasaan tanah tertentu yang diprakarsai oleh kebaikan hati para penguasa negara (dari atas).

by leverage (landreform by leverage): suatu usaha perubahan struktur penguasaan tanah tertentu yang diprakarsai oleh petani secara terorganisir (didongkrak dari bawah).

changes without progress: perubahan tanpa kemajuan (bagi rakyat atau lapis bawah masyarakat).

colonial apologetic: (bernada) pembenaran kolonial.

containment politics: politik penahanan atau pengurungan (atas pengaruh komunis).

Coolie Budget Commission: komisi yang dibentuk untuk menyelidiki kondisi kehidupan buruh dan kaum tani pada tahun 1939, sehingga dari penelitian itu dapat dirumuskan anggaran upah minimum untuk mereka.

cultuurstelsel: secara bahasa berarti sistem tanam. Dalam historiografi Indonesia(sentris) diterjemahkan sebagai Sistem Tanam Paksa.

de-agrarianisasi: proses ketercerabutan tenaga kerja dari ranah agraria (pertanian dan desa).

de-peasantization: gejala ketercerabutan kaum tani terhadap akses atas tanah, sehingga ditandai di antaranya dengan menurunnya persentase pertanian terhadap Produk Domestik Bruto, migrasi, dan pola nafkah *off-farm*.

developmentalisme: paham pembangunan, satu istilah yang terkait dengan proyek intervensi perubahan ekonomi dan politik di negara-negara Dunia Ketiga pasca Perang Dunia Kedua.

Difusion Model and International Technology Transfer: model difusi dan transfer teknologi internasional; salah satu instru-

men yang digunakan dalam pelaksanaan Revolusi Hijau.

domein verklaring: suatu pernyataan deklaratif dari pihak penguasa yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai hak milik individu maka menjadi tanah milik negara.

domestic pressure: tekanan domestik, tekanan dari dalam.

dual economy: kondisi ekonomi menurut Boeke yang bersifat mendua yang membedakan antara desa (tradisional) dan kota (komersial) yang tidak saling terkait dan mengganggu.

een eere-schuld: suatu hutang budi.

efek domino: istilah pihak Amerika mengenai efek berantai komunisme di negara-negara Asia Tenggara.

eigendom: hak milik mutlak.

Eindresume van het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grond: Ringkasan Akhir Penelitian tentang Hak-hak atas tanah Masyarakat Pribumi.

enclave: pemukiman yang terpisah dari komunitas; daerah kantong bagi tenaga kerja perkebunan.

epistemic community: komunitas epistemik, kelompok pembuat gagasan.

erfpacht (erfelijke pacht): hak sewa turun-temurun, suatu hak pemanfaatan tanah dalam hukum Hindia Belanda yang diberikan oleh pemerintah selama 75 tahun kepada suatu badan usaha (perkebunan)

eugenics: praktik pemusnahan ras atau manusia yang dinilai defisien. Istilah ini kemudian meluas maknanya termasuk pembatasan populasi di negara berkembang.

exemplary scientist: ilmuwan yang bersifat teladan.

exploitation of unused lands: eksploitasi atas tanah-tanah yang tidak digunakan/diolah.

extraction of capital surplus: ekstraksi atas surplus kapital dengan modus-modus tertentu, sehingga kelebihan nilai yang

ada pada pihak yang lemah (buruh, desa, dll.) tersedot kembali (*backwashed*) ke pihak yang lebih kuat (perusahaan, kota, dll.).

farmer: pengusaha pertanian.

floating mass: massa mengambang akibat depolitisasi.

food security: keamanan pangan, satu kondisi yang lebih menekankan pada ketersediaan pangan tanpa dipersoalkan dari mana sumbernya, produksi sendiri, pembelian dari luar, atau hutang.

food souvereignity: kedaulatan pangan, suatu kondisi yang menjelaskan kedaulatan pangan masyarakat/negara baik dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi.

founding peoples: pendiri bangsa, istilah untuk mengganti *founding fathers* yang dinilai bias jender.

Garis Kemiskinan ala Sajogyo: patokan tingkat kemiskinan yang dibuat oleh Sajogyo berdasarkan tingkat konsumsi kalori setara beras.

geographic-historical process: proses sejarah di atas sebuah lanskap geografis yang keduanya saling mempengaruhi, membentuk, dan mengubah.

habitus: istilah yang digunakan Pierre Bourdieu untuk menyebut suatu paham atau aturan yang telah terinternalisasi dalam diri tokoh. Namun berbeda dari Bourdieu yang menyebut bahwa *habitus* dibentuk oleh asal-usul kelas, istilah *habitus* di sini digunakan merujuk pada kehidupan batin atau sisi-sisi personal tokoh yang bersifat ekstra-intelektual namun memberi pengaruh pada sisi intelektual.

historical imperative: penghela/pengarah/perintah sejarah.

Human Development Index: Indeks Pembangunan Manusia; salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, di antaranya dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan.

humana: unsur manusia dan segala persoalannya.

Indologi: ilmu tentang Hindia (sebagai tanah jajahan).

Indonesian agrarian studies: studi agraria (bersifat) Indonesia.

Indonesianisasi: proses menjadi Indonesia, dalam hal ini adalah Indonesianisasi ilmu agar cocok dengan realitas keindonesiaan.

Induced Development Model: model pembangunan melalui rangsangan (teknologi).

Induced Institutional Innovation Theory: teori tentang rangsangan inovasi kelembagaan.

intelektual organis: satu istilah yang berasal dari Antonio Gramsci untuk menunjukkan sosok intelektual, berbeda dengan intelektual tradisional, yang menancapkan akar-akarnya di komunitasnya, bekerja mengurus jejaring isu lokal dan perjuangan yang terhubung dengan rakyat dan berbagai pengalaman mereka.

invention of tradition: penemuan, ciptaan, rekaan tradisi.

landreform: suatu usaha yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengubah struktur penguasaan tanah.

liberator: pembebas; salah satu fungsi dan tugas negara bagi warganya.

livelihood: mata pencahariaan, penghidupan.

Malthus Theory: teori Malthus yang mengatakan bahwa peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung, sementara pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur.

Marhaen-isme: paham/ideologi tentang keberpihakan pada lapisan bawah rakyat Indonesia dari segala jenis pekerjaan. Paham ini pertama kali digunakan dan dimunculkan oleh Soekarno.

mindere welvaart: merosotnya kesejahteraan.

modernization without development: modernisasi tanpa pengembangan. Penerjemahan "development" dengan "pembangunan" lebih bernuansa "barang", berbeda dengan "pengembangan" yang lebih bernuansa "manusia".

natura: unsur alam selain manusia.

natural resources: sumber daya alam, satu istilah yang memandang bahwa alam hanya menjadi sumber daya yang bisa dieksploitasi, bernilai ekonomis belaka, dan dilepas dari kompleksitas nilai lainnya. Istilah ini ironisnya digunakan juga terhadap manusia sebagai *human resources,* sehingga manusia hanya dipandang sebagai tenaga kerja, buruh, yang dengan demikian bisa juga dieksploitasi.

non-agricultural activities: aktivitas non-pertanian.

over-population: kelebihan jumlah penduduk (jiwa).

Participatory Action Research: Riset Aksi yang Partisipatif, atau dialihbahasakan oleh Sajogyo dengan Kaji Tindak Partisipatif (KTP). Kegiatan yang tidak hanya penelitian namun berorientasi pemecahan masalah dengan melakukan tindakan/aksi bersama-sama dengan berbagai pihak yang terkait dan berproses secara partisipatif/terlibat.

participatory: partisipatif; pelibatan secara bersama-sama mulai dari pembuatan keputusan, proses pematangan, hingga pelaksanaan keputusan.

patron-client (*relation*): hubungan bapak-anak yang umumnya didasarkan pada penguasaan tanah.

peasant economy: ekonomi petani yang dicirikan dengan usaha tani keluarga dan dalam lingkup komunitas petani yang khas.

peasant: kaum tani.

perdikan (desa): desa-desa yang merdeka dari kewajiban pajak dan tugas-tugas lain terhadap struktur yang lebih tinggi di atasnya.

petani gurem: petani yang memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar. Untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya, umumnya ia masih harus bekerja mengerjakan lahan orang lain (buruh).

plant breeding: pembiakan dan pembenihan tanaman.

plasma nutfah: gen asli tanaman yang dapat disilangkan menjadi varietas baru.

Population control: kontrol populasi, berkaitan dengan adanya intervensi pihak luar (pemerintah) yang bertujuan untuk mengontrol perilaku reproduksi disebabkan adanya tekanan-tekanan demografis. Tujuannya adalah menekan kelahiran dan peningkatan populasi.

Population-National Security Theory (*PNST*): teori yang menyatakan bahwa kelaparan adalah akibat dari kelebihan penduduk dan keletihan sumber-daya, yang akan mendorong terjadinya keletihan sumber-daya selanjutnya dan instabilitas politik. Teori ini diyakini para intelektual Amerika tahun 1940-an dalam kepentingannya pada Perang Dingin dan intervensinya pada negara-negara berkembang.

primitive accumulation atau *previous accumulation*: akumulasi pendahulu atau prasyarat, satu konsep dalam literatur Marxis, menjelaskan tentang bagaimana akumulasi modal hanya dapat dilakukan dengan didahului oleh prasyarat akumulasi sebelumnya, umumnya dilakukan dengan cara *appropriation* (penyerabotan, perampasan).

proefstation: statsiun percobaan.

protector: pelindung; salah satu fungsi dan tugas negara bagi warganya.

provider: pelayan; salah satu fungsi dan tugas negara bagi warganya.

Reforma Agraria (Sp), Agrarian Reform (Ing), Pembaruan Agraria (Ind): Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengubah struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah, yang dimulai dengan redistribusi tanah dan diikuti dengan peningkatan produksi melalui pemberian fasilitas kredit, pendidikan untuk perbaikan teknik bertani, penyediaan sarana irigasi, dan lain-lainnya.

Regering Reglement (RR): peraturan perundang-undangan.

resource exhaustion: keletihan sumber daya.

Revolusi Hijau (*Green Revolution*): suatu perubahan yang terjadi secara cepat akibat diterapkannya kebijakan pertanian dalam bentuk penggunaan teknologi yang menggantikan kebijakan penataan ulang struktur penguasaan tanah.

Rostowian Stages: tahapan transisi masyarakat menurut Rostow yakni dari masyarakat tradisional (*tradisional society*), pra-kondisi tinggal landas (*the pre-condition for take off)*, tinggal landas (*the take off*), menuju dewasa (*the drive to maturity*), dan masyarakat berkonsumsi tinggi dan massif (*the age of high mass consumption*).

rust en orde: ketertiban dan keteraturan.

ryotwari (*ryot*: rakyat): sistem pemukiman yang berasal dari India dan diadopsi di Indonesia oleh pemerintahan Raffles. Sistem ini merupakan bentukan baru negara dengan memberi perlindungan pada rakyat-petani secara tersebar mengikuti masing-masing tuan tanah.

school of thought: aliran pemikiran yang memiliki kecenderungan paradigma tertentu.

scientific revolution: revolusi ilmu pengetahuan (ala Thomas Kuhn).

self-reproducing character and genetic diversity of seeds: benih yang memiliki karakter reproduksi mandiri dan sifat keragaman genetis.

shaktii: senjata, alat, bentuk.

state of the art: status, kondisi atau posisi ilmu pengetahuan, sehingga darinya dapat dijadikan patokan.

static expantion: ekspansi statis. Suatu kondisi meningkatnya produksi dan pendapatan perusahaan namun tidak pada kondisi kesejahteraan tenaga kerja.

super land-lord: tuan tanah besar, yakni negara atau perusahaan parastatal (para-state), seperti Perhutani.

surplus value: nilai lebih; satu konsep dalam literatur Marxian, menjelaskan tentang nilai yang didapat oleh pemilik modal dari "kelebihan" nilai yang berasal dari buruh

dan semacamnya yang semestinya menjadi hak pihak kedua tersebut.

tenancy system: sistem penyakapan, terkait dengan relasi manusia atas manusia mengenai tanah, misalnya sewa-menyewa, gadai, bagi hasil, dsb, tanpa menyertakan aspek kepemilikan.

tenurial security: keamanan penyakapan.

tenurial system: sistem penguasaan atas tanah termasuk kepemilikan.

territorial state: negara yang bersifat kewilayahan, dengan batas-batas penguasaan atas wilayah yang jelas.

The Classic Agrarian Question: Pertanyaan Agraria Lama yang menyoal apa akibat bagi desa dan peran petani ketika terjadi proses kapitalisasi pedesaan.

the rent of land: sewa tanah.

transformasi agraria: perubahan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang arahnya dapat menuju kapitalis, sosialis, neo-populis, atau tidak keduanya.

transisi agraria: perubahan dari tradisional ke modern, dari subsisten ke komersial.

trickle-down effect: efek merembes ke bawah. Prinsip bahwa peningkatan dan pertumbuhan (ekonomi) akan dengan sendirinya memberi efek bagi pemerataan di lapis bawah.

tuan tanah: mereka (petani) yang memiliki tanah di atas 5 ha sawah/ 6 ha tegalan (di Jawa dengan kepadatan $\geq$ 401 orang).

wong cilik: satu istilah yang lebih bersifat ideologis ketimbang sosiologis, yakni orang-orang lapisan bawah yang sering dikalahkan, disubordinasi.

zamindar(i): orang atau pihak yang semula berfungsi sebagai

perantara negara dalam berhubungan dengan *ryot* yang dalam perkembangannya mereka ini kemudian menjadi tuan tanah baru.

DAFTAR SINGKATAN

A/D/C	: *The Agricultural Development Council*
Bapemka	: Badan Perencana Masyarakat Kabupaten
Bappeda	: Badan Perencana Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencana Pemerintah Nasional
BIES	: *Bulletin of Indonesian Economic Studies*
BIMAS	: Bimbingan Massal, Bimbingan Masyarakat
BK	: Badan Kerja
BPMD	: Balai Pendidikan Masyarakat Desa
BPU	: Badan Pimpinan Umum
BTI	: Barisan Tani Indonesia
BUBT	: Badan Usaha Buruh Tani
CECA	: *Council on Economic and Cultural Affairs*
CGMI	: Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia
CIMMYT	: *International Center for Maize and Wheat Improvement*
CMB	: Corps Mahasiswa Bandung
CMB	: Corps Mahasiswa Bogor,
CMD	: Concentrasi Mahasiswa Djogdja
CMD	: Corps Mahasiswa Djakarta
CSO	: *Civil Society Organization*
FF	: Ford Foundation
GaD	: Gender and Development
GTI	: Gerakan Tani Indonesia
IBRD	: *International Bank for Reconstruction and Development*

IPB	: Institut Pertanian Bogor
IRRI	: *International Rice Research Institute*
ISS	: Institute of Social Science
ITB	: Institut Teknologi Bandung
KITLV	: *Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde*
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KTP	: Kaji Tindak Partisipatif
LIBBRA	: Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria
LP Sosped IPB	: Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan-IPB
LPM-IPB	: Lembaga Pengembangan Masyarakat-IPB
LPSM	: Lembaga Pemberdayaan Swadaya Masyarakat
LPSP	: Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MIT	: Massachusets Institute of Technology
MMB	: Masyarakat Mahasiswa Bogor
MwD	: *Modernization without Development*
NGO	: *Non-Government Organization*
P3ER	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Rakyat
PBU	: Padi Bibit Unggul
PERHEPI	: Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
Posyandu	: Pos Pelayanan terpadu
PSP	: Pusat Studi Pembangunan
PSPK-UGM	: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan-UGM
PTM	: Pengerahan Tenaga Mahasiswa
PUB	: Padi Unggul Baru
Puklutan	: Peluang Usaha dan Kerja di Luar pertanian
RA	: Reforma Agraria
RH	: Revolusi Hijau
SAE	: Survey Agro Ekonomi
SNSE	: Sistem Neraca Sosial Ekonomi Nasional
SOBSI	: Serikat Buruh Seluruh Indonesia
SUSENAS	: Survei Ekonomi Sosial Nasional

TKI/TKW	: Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita, penghalusan dari kata buruh migran
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UPGK	: Usaha Peningkatan Gizi Keluarga
USAID	: United State Agency for International Development
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
WDR	: *World Development Report*
WiD	: *Women in Development*

DAFTAR TABEL

NO	KETERANGAN	HLM.
1.	Standar Biaya Sewa Tanah	33
2.	Taksiran Pendapatan dari Sewa Tanah, 1813	34
3.	Penggunaan Tanah sampai dengan Tahun 1938	50
4.	Proporsi lahan di Asia yang Ditanami *PUB*	63
5.	Hasil Pelaksanaan Revolusi Hijau di Asia Tenggara dari segi *Pertumbuhan*	65
6.	Produksi dan Produktifitas Padi di 4 negara Asia Tenggara	66
7.	Pinjaman Bank Dunia terhadap Pembangunan Pertanian Indonesia, 1976-1999	69
8.	Jumlah Penduduk Total dan yang Khusus di Sektor Pertanian, 1961-1995	80
9.	Lokasi dan Jenis Perusahaan Perkebunan yang Dijadikan Sampel Penyelidikan *Komisi*	90
10.	Daftar Tanah yang telah Dibagikan dalam Landreform Tahap pertama di Jawa dan Sunda Kecil	108
11.	Nama-nama Dosen yang Dicopot dan/atau Dikeluarkan dari IPB tahun 1965	142
12.	Pengelompokan Jenis Ilmu	185
13.	Konteks Pembangunan Nasional dan Kritik Mazhab Bogor	255
14.	Peta Paradigma Pembangunan	263

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Foto-foto terkait Prof. Dr. Ir. Sajogyo ~ 301
Lampiran 2. Foto-foto terkait Dr. Hc. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc ~ 306
Lampiran 3. Daftar Karya Tulis Prof. Dr. Ir. Sajogyo ~ 317
Lampiran 4. Daftar Karya Tulis Dr. Hc. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc ~ 324

ABSTRACK

This study focuses on the history of rural development thinking in Indonesia. Although the main feature is more concern to the academic thinking, namely the agricultural scientists who were assembled in the group of "Bogor School of Thought " in the second half of the decade of the twentieth century, it's inevitable to talk about the history of thought of the idea manifested as government policy, the ideas of other academicians, striving and activism of social movements and organizations.

The literature on rural development in the colonial period until independence revolves around the topic of *access to land*, *labor*, and *capital*. Rearrangement effort of controlling land, equal employment opportunities, and capital formation were carried out as an accomplishment of decolonization in the Independence period. This process had been lasted until the 1960s and broken off in the coming of the New Order, when Green Revolution and Modernization project raised.

Sajogyo and Gunawan Wiradi as the representations of "Bogor School of Thought", come up with critics attained from their empirical sociology researches. In the midst mainstream of rural development which was pursued through modernization in the Green Revolution Policy, they show the effects of increasingly acuminate of social differentiation and the parties who become victims in the process, and they also emphasize the importance of re-organization of rural agrarian structure. Therefore

they become the connecting bridge to regain the idea of *founding peoples* about Agrarian Reform as the nation's agenda.

In the absence of critical social science, accusation of unhistorical and bureaucratization of Indonesian social sciences, as well as particularly prohibiting of Marxian analysis in the Indonesian scientific treasure, both of them through the sociological imagination and vocational attitudes, and openness to discipline and other parties in their academic activities, afford to present " people who are forgotten "in the history of rural Indonesia and thereby making rural sociology in its discipline experience the Indonesianization. Starting from their knowledge could be revitalizing and growing of Indonesian agrarian studies.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah ilmu sosial di Indonesia mengalami pasang surut sepanjang beberapa periode. Pada periode kolonial, kajian sejarah dan antropologi, yang merupakan bagian dari ilmu humaniora, dikonstruksi dan dikembangkan dalam perspektif kolonial. Sementara itu, pada masa yang sama, ilmu sosial lain seperti sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi tidak diajarkan di perguruan tinggi. Contoh terbaik yang dapat mewakili sudut pandang kolonial dalam kajian sejarah dan antropologi adalah karya-karya Snouck Hurgronje. Snouck merupakan kombinasi ilmuwan-penasehat-pegawai Belanda yang mempelajari masyarakat Islam Indonesia.

Setelah periode tersebut kita baru menjumpai berbagai eksperimen dalam bidang ilmu sosial yang berusaha berpijak pada realitas keindonesiaan. Kajian hukum adat, meskipun telah dimulai oleh van Vollenhoeven dan B Ter Haar pada masa kolonial, mendapat nuansa keindonesiaan ketika dilanjutkan oleh Soepomo, Soekanto, Hazairin, dan Djojodiguno.

Hal yang sama juga terjadi dalam ilmu sejarah. Proses "Indonesianisasi" dan "indigenisasi" dapat dilihat dalam historiografi Indonesia. Kajian ini semula bertumpu pada perspektif kolonial-sentris namun kemudian bergeser menjadi Indonesia-

sentris. Meskipun demikian, pergeseran ini juga memunculkan kritik. Kritik tersebut mempertanyakan penafian realitas historis yang beragam dan manusiawi, sebagai implikasi pergeseran sudut pandang kolonial ke semata-mata sudut pandang rakyat Indonesia.

Diskusi masalah hukum adat, sejarah, dan antropologi pada masa itu berada dalam isu besar masalah-masalah di pedesaan. Hal ini wajar, sebab sebagian besar masyarakat Indonesia saat itu hidup di pedesaan di mana perkembangan kota belum semasif seperti saat ini. Semua memikirkan bagaimana struktur sosial di desa diorientasikan menuju arah defeodalisasi dan dekolonisasi.

Sementara itu, pembicaraan masalah pedesaan tidak terlepas dari diskursus agraria. Agraria bukan saja menyangkut tanah, namun apa yang ada di bawah dan di atasnya. Apa yang tumbuh di atasnya dapat berupa tanaman pertanian, perkebunan dan perhutanan, lengkap dengan bangunan sosialnya. Sedangkan materi di bawahnya adalah air dan berbagai bahan tambang dan mineralnya.

Definisi yang demikian luas terhadap agraria mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini terkait dengan bagaimana agraria dipersepsi dan kondisi ekonomi-politik macam apa yang menghelanya sehingga menghasilkan perubahan-perubahan tafsir. Secara teoretis, diskusi tentang masalah ini sangat marak pada awal abad 20. Agraria disinonimkan dengan pertanian, dan dalam melihat perkembangannya diletakkan dalam konteks pertumbuhan kapitalisme.

Pada tahun 1926-1928, misalnya, sebuah majalah berbahasa Belanda di Indonesia, *Landbouw*, memperdebatkan kontroversi teori Chayanov. Debat yang kemudian dikenal dengan "*The Classic Agrarian Question/Debate*" itu membahas dua persoalan dasar: di antara *small farm* dan *large industrial farm,* manakah yang lebih efisien? Ketika terjadi kapitalisasi dan moneterisasi pedesaan, apa yang terjadi di pedesaan, khususnya terkait nasib petani, apakah mereka tetap bertahan ataukah musnah (beralih menjadi buruh di perkotaan)? Debat ini berlangsung antara tahun 1895—1929

di Rusia. Ketika diusung oleh majalah *Landbouw* debat ini bergulir dan bergaung di Indonesia.[1]

Boeke dengan teori *dual economy*-nya[2] terpengaruh oleh Chayanov dengan *Peasant Economy*-nya. Kapitalisasi dan moneterisasi ekonomi yang secara teoritis seharusnya mentransformasikan pedesaan Indonesia menuju ekonomi modern ternyata memberi gambaran berbeda, yakni masih bertahannya ekonomi tradisional. Kajian hukum adat menjadi penting di sini, terutama terkait masalah "desa" sebagai "unit adat" tertentu. Burger, seorang murid Boeke, membantah pendapat gurunya itu.[3] Inti kritiknya adalah dalam teori Boeke itu seakan-akan digambarkan adanya modernitas hanya terdapat di masyarakat kota sebagai pusat, sedangkan desa merupakan simbol kelambanan. Karenanya harus dilakukan penyebaran modernitas dari kota ke desa. Dengan kata lain, Boeke menekankan perhatian pada aspek sikap mental. Bagi Boeke, kolonialitas dengan demikian layak disyukuri, sesuatu yang dikritik oleh muridnya.

Setelah Indonesia merdeka, persoalan agraria mendapat perhatian serius para pendiri bangsa. Mereka menyadari bahwa hakekat sejarah kolonial adalah sejarah eksploitasi sumber-sumber agraria di nusantara. Sehingga kemerdekaan adalah kesempatan baru untuk merestrukturisasinya ke arah yang lebih berkeadilan, mengakhiri sistem penguasaan tanah di Indonesia yang berjalan di atas sistem kolonial dan feodal. Dengan penataan ulang itu diharapkan pemecahan problem kemiskinan, perlakuan-perlakuan eksploitatif masyarakat petani, dan problem pemenuhan kebutuhan pangan dapat segera diselesaikan.

Sedari awal, para *founding people* menyuarakan perlunya restrukturisasi penguasaan tanah itu, disertai dengan analisis ter-

---

[1] Gunawan Wiradi, "Karya Chayanov Ditinjau Kembali", paper diskusi ISI Bogor, 7 Juli 1993, tidak diterbitkan.

[2] Lihat, J. H Boeke, "Dualistic Economics", dalam Wertheim (ed.), *Indonesian Economics, The Concept of Dualism in Theory and Policy* (The Hague: van Hoeve Publisher Ltd, 1961)

[3] Lihat dalam Boeke dan Burger, *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger,* (Jakarta: Bhratara, 1973)

hadap sistem sosial masyarakat tani dan perlunya gerakan tani dalam rangka memperjuangkan penataan ulang. Tokoh terkemuka seperti Iwa Kusumasumantri dan Soekarno secara getol memberi perhatian persoalan itu. Dalam analisis tajamnya, Soekarno mengatakan bahwa praktek-praktek perusahan partikelir kolonial adalah bagian dari perilaku imperialisme modern. Modusnya berlangsung dalam empat *shaktii*: Indonesia menjadi negeri tempat diambilnya bekal hidup bangsa Belanda; perampasan untuk pabrik-pabrik Eropa; sebagai pasar bermacam industri asing; sekaligus lapangan usaha bagi modal yang ratusan-ribuan-jutaan rupiah jumlahnya.[4] Kebijakan liberalisasi pertanian pada masa kolonial yang masih berlaku saat itu, semenjak berlakunya Agrarische Wet 1870, mendesak untuk dikaji ulang.

Setahun sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946, pemerintah membentuk kepanitian yang diarahkan melakukan penyusunan undang-undang agraria. Undang-undang No. 13 tahun 1946 memberlakukan penghapusan tanah-tanah perdikan. Selanjutnya adalah masalah tanah konversi, tanah sewa, *erfpacht,* dan konsensi *landbouw*. Melalui Penetapan Presiden No.16 tahun 1948 dibentuk Panitia Agraria yang dikenal sebagi Panitia Agraria Yogya. Nama Sarimin Reksodihardjo tercatat sebagai ketuanya. Tugas panitia itu adalah menyusun usulan-usulan dalam rangka perumusan hukum agraria baru pengganti hukum kolonial.

Tahun 1950-an melalui menteri Pertanian Soenaryo dibuat rancangan undang-undang agraria. Berbagai simposium di beberapa kota diadakan untuk mematangkan konsepnya. Tanggal 1 Agustus 1960, Rancangan Undang-undang (RUU) baru hasil kerjasama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada, diajukan ke DPR-GR. RUU itu akhirnya disetujui DPR-GR pada tanggal 24 September 1960 dalam lembaran negara No. 104 tahun 1960 sebagai Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agra-

[4] Soekarno, "Menuju Indonesia Merdeka", dalam *Dibawah Bendera Revolusi* (Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964), hal. 257 dst.

ria, yang kemudian dikenal dengan istilah Undang-undang Pembaharuan Agararia (UUPA). UUPA diikuti oleh peraturan pemerintah penganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 (yang dikenal sebagai undang-undang *landreform*). Sejak saat itu, tanggal 24 September (hari lahirnya UUPA) ditetapkan sebagai "Hari Tani".[5]

Dengan demikian Reforma Agraria merupakan agenda bangsa. Jika kemerdekaan adalah jembatan emas, dan kemerdekaan diisi dengan pembangunan, maka agenda pertama pembangunan, yang dihasilkan dari analisis terhadap kondisi objektif saat itu, adalah restrukturisasi penguasaan tanah alias reforma agraria. Akan tetapi, berbagai proses politik yang berlangsung kemudian mereduksinya. Dalam perkembangannya kemudian, agenda reforma agraria justru distigmatisasi sebagai program Partai Komunis belaka. Akibatnya, agenda strategis nasional itu pun pada akhirnya ditinggalkan.

Dalam konteks global, kepentingan kekuatan imperialis untuk mempertahankan hegemoni terhadap dunia ketiga setelah penjajahan militer mulai gagal dipertahankan serta konstelasi Perang Dingin ikut serta mewarnai diskursus reforma agraria. Pertarungan ideologi, politik, dan ekonomi, antara Blok Timur dan Blok Barat merambah hingga berbagai dunia ketiga. Berbagai kebijakan dan langkah *pre-emptive* dari politik, ekonomi, militer, hingga akademik dilakukan untuk memperebutkan pengaruh di berbagai kawasan. Indonesia merupakan salah satu medan pertarungan dan perebutan pengaruh tersebut.

Salah satu lokus kontestasi tersebut terdapat dalam ranah ilmu sosial-humaniora Indonesia. Melalui berbagai pelatihan profesional dan pemberian dana oleh lembaga asing yang berasal dari berbagai negara, terutama Amerika Serikat, Indonesia menjadi lahan subur arena perrtarungan pengaruh itu. Pertarungan aliran-aliran atau teori dalam ilmu-ilmu sosial, antara struktura-

[5] Lihat, Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: UGM Press, 1994 [cetakan keempat])

lisme fungsional ala Parsonian dengan strukturalisme ala Marxian misalnya, pada gilirannya memberi implikasi bagi bangunan pengetahuan yang dihasilkan dan bagaimana konstruksi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia diarahkan.

Dalam konteks historis-struktural tersebut serta respon terhadap situasi dan kondisi internal masyarakat Indonesia itulah, diskursus reforma agraria pada periode 1950-1960-an mengemuka. Konstelasi pertarungan global dalam fase Perang Dingin tidak dapat dipisahkan dari konstruksi kajian agraria dalam periode mengemukanya isu ini.[6]

Dilakukannya berbagai kolaborasi *research project* antara universitas di Amerika dan universitas di Indonesia tidak terlepas dari kerangka itu. Selain *Modern Indonesian's Project* dari Universitas Cornell, Program Asia tenggara Unverstas Yale, yang tidak kalah pentingnya adalah tim dari Massachusets Institute of Technology (MIT) yang menjalin kerjasama dengan universitas di Indonesia. Dipimpin oleh Benjamin Higgins, tim yang disebut terakhir ini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada.[7] Salah satu hasil penelitian yang terkenal berasal dari Clifford Geertz dengan tesis "involusi pertanian"-nya. Temuan itu mendapat tantangan luar biasa meski yang mendukungnya lebih banyak. Kosa kata "involusi pertanian" sering dikutip, bahkan dicomot secara serampangan, yang terkadang lepas konteks asalnya. Frase inilah yang sekan-akan menjadi tesis utama dari buku yang memang berjudul *Agricultural Involution*.

Dari arus yang berbeda, dengan prinsip "berpijak pada realitas keindonesiaan", pada tahun 1960-an, sekelompok pene-

---

[6] Alasan sosio-politik kemunculan Reforma Agraria dipetakan secara apik oleh Saturnino M. Borras Jr, Cristóbal Kay dan A. Haroon Akram Lodhi, "Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and Current Issues," dalam Akram-Lodhi, A.H, S.M. Borras Jr. and C. Kay (Eds.), *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries* (London: Routledge, 2006), hal. 6-9.

[7] Ben White, "Agrarian Debates and Agrarian Research in Java, Past and Present", dalam E. Suhendar, dkk. (Eds.), *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi* (Bandung: AKATIGA, 2002), hal. 50-51

liti yang berafiliasi ke sebuah partai besar di Indonesia, melakukan kajian mendalam terhadap persoalan-persoalan pedesaan. Melalui semboyan "Perhebat Integrasi dengan Penelitian!", kelompok peneliti yang dipimpin oleh D. N. Aidit, seorang dosen Akademi Ilmu Sosial "Aliarcham", melakukan penelitian di beberapa pedesaan Jawa Barat.[8] Penelitian yang diasosiasikan ke dalam Partai Komunis Indonesia itu justru mampu manghasilkan penelitian yang *based on rural structural-realities.* Penelitian tersebut menginspirasi lahirnya sebuah pendekatan yang dirasa penting dan baru saat itu, sekaligus menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting yang mereka temukan terkait realitas pedesaan. Metode ini lahir dari penelitian yang disponsori PKI pada tahun 1959, 1964, dan 1965.[9]

Kajian yang juga didukung oleh pemerintah saat itu berpijak pada kritik terhadap kelemahan-kelemahan pendekatan positivistik, yang hanya mengandalkan angket belaka dalam pengumpulan data. Kajian *participatory* menghasilkan sejumlah temuan tentang diferensiasi kelas sosial di pedesaan, kelompok tunakisma, kelompok yang terlilit hutang, dan sebagainya. Penelitian semacam itu sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh Geertz dalam periode yang sama, yang menghasilkan gambaran "involusi", homogenitas petani, dan konsep saling berbagi kemiskinan.

Mereka mempraktekkan apa yang kemudian dikenal dengan 3 "sama" (yaitu sama bekerja, sama makan, dan sama tidur dengan buruh tani atau petani miskin), 4 "jangan" (jangan tidur di rumah kaum penghisap di desa, jangan menggurui kaum tani, jangan merugikan tuan rumah dan kaum tani, jangan mencatat di

---

[8] Pendekatan itu dapat dianggap sebagai *Participatory Action Research*, satu pendekatan baru yang dalam khasanah ilmu sosial baru dikenal tahun 1980-an. Simak kesimpulannya dalam Aidit, D. N., *Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa: Laporan Singkat tentang Hasil Riset Mengenai Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani Djawa Barat* (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964).

[9] Uraian ini didasarkan pada Ben White, "Between Apologia and Critic Discourse: Agrarian Transition and Scholary Engagement in Indonesia", dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae (ed.), *Social Science and Power in Indonesia* (Jakarta: Equinox bekerjasama dengan ISEAS, 2005).

hadapan kaum tani), dan 4 "harus" (harus rendah hati, harus sopan dan siap belajar dari petani, harus tahu dan respek terhadap budaya dan bahasa setempat, dan harus mau menolong memecahkan problem keluarga tuan rumah, petani dan Partai lokal).[10]

Selain kelompok di atas, muncul kecenderungan baru yang berasal dari ilmuwan Bogor yang mengkaji persoalan-persoalan pedesaan dari aspek sosial ekonominya.[11] Mereka inilah yang berusaha menemukenali persoalan-persoalan pedesaan dan mencoba mendudukkan disiplin sosiologi agar relevan dalam usaha pemahaman itu. Kelompok ini selanjutnya dikenal sebagai kelompok "Mazhab Bogor".[12]

Ide mereka yang mulai dikembangkan pada tahun 1963 adalah melakukan pengiriman mahasiswa ke pedesaan, terkadang pada musim tanam penuh, untuk mengajarkan ilmu mereka sekaligus belajar dari para petani, memperkenalkan teknik tanam baru, menghubungkan antara aparat desa dan petani, lalu membawa pengalaman itu kembali ke bangku kuliah.

Pembelajaran semacam itu (yang bergerak antar teori dan praktik) merupakan hal baru pada zamannya. Pada tahun 1964 dan 1965 Kementerian Pertanian mengadopsi program itu dengan cara mengirim sejumlah 440 mahasiswa ke lapangan pada tahun 1964, dan sejumlah 1.200 pada tahun 1965. Inilah yang dikenal sebagai Bimbingan Massal (BIMAS) dan kemudian diadopsi oleh Orde Baru menjadi Bimbingan Masyarakat.[13]

---

[10] Strategi ini sekarang banyak diadopsi oleh NGO.

[11] Selain dari kelompok ini, disiplin ilmu sejarah pada periode selanjutnya mencatat nama Sartono Kartodirdjo, Onghokham, Suhartono W Pranoto, dan Kuntowijoyo dengan keberhasilannya mengkaji pedesaan (pertanian) yang secara kritis berbeda dari kajian-kajian mainstream saat itu. Periksa, Ben White, 2002, *op.cit.,* hal. 127.

[12] Istilah "Mazhab Bogor" tercetus pada saat peluncuran Yayasan Sajogyo Inside di Bogor pada tanggal 10 Maret 2005. Belum ada penjelasan akademis mengapa disebut demikian, selain alasan "praktis" bahwa terdapat beberapa tokoh yang dibesarkan oleh IPB dan berkarir akademis di Bogor. Sebagai "School of Thought" tentu saja memerlukan pertanggungjawaban ilmiah, sesuatu yang justru belum dilakukan.

[13] Ben White, *Ibid,* hal. 120. IPB mempunyai tradisi pengerahan tenaga mahasiswa pada tahun 1963. Sedangkan Universitas Gadjah Mada telah mempunyai tradisi semacam itu melalui program Pengerahan Tenaga Mahasiswa

Berbagai riset empiris yang dilakukan oleh kelompok itu menghasilkan kritik terhadap modernisasi desa yang dilakukan oleh Orde Baru selama diberlakukannya kebijakan "Revolusi Hijau". Menurut mereka, kebijakan itu hanya menguntungkan petani kelompok atas dan semakin mempertajam ketimpangan sosial yang ada. Tesis penting mereka terkait gambaran perubahan pertanian-pedesaan yang terjadi adalah "*Modernization without Development*".[14]

Kebijakan Revolusi Hijau, menurut mereka, seharusnya bukan hanya alih-teknologi (dari tradisional menuju modern), namun yang lebih strategis adalah transformasi kelembagaan desa dan masyarakat, alih fungsi dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi desa (tanah), pelibatan berbagai elemen (perempuan dan petani kelas gurem dan tunakisma), pemahaman tentang gizi dan kemandirian pangan, dan keterkaitan antara sektor *non-farm* dan *on-farm* secara timbal balik. Kata kunci dari transformasi itu adalah restrukturisasi penguasaan sumber-sumber produksi, yakni tanah.

Para ilmuwan dalam mazhab ini sangat berpengaruh dan memiliki otoritas tinggi dalam dunia akademik Indonesia. Maz-

---

(PTM) sejak 1951. Berbeda dengan program IPB di atas yang sangat penting dalam mengkonstruksi rumusan teoritis dalam studi pertanian yang ditempuh oleh mahasiswa, PTM merupakan program dalam bentuk pengajaran sekolah terutama di luar Jawa. Sampai dengan tahun 1957 telah berhasil dikirim sejumlah 1.400 mahasiswa guna mengajar di 161 SLTA di seluruh Indonesia. Tradisi semacam itu kemudian diformalkan oleh Koesnadi Hardjasoemantri tatkala menjabat Kepala Direktorat Pendidikan Tinggi pada tahun 1971. Formalisasi itu dikenal dengan program KKN dan mulai masuk kurikulum perguruan tinggi sejak tahun 1973. Pengalaman itu ditulis-kembangkan sebagai disertasi di IPB dengan judul *Pengaruh KKN pada Pembangunan Masyarakat Desa.* Satu lagi gelar doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan disertasi *Pengaruh KKN pada Pribadi Mahasiswa.* Lihat www.tokohindonesia.com/koesnadihardjasoemantri, diakses tanggal 18 Juni 2007, 8:08:58. Selebihnya baca Munandir (ed.), *PTM Sebagai Bentuk Perjuangan Mahasiswa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001).

[14] Lihat, Sajogyo, "Modernisasi tanpa Pembangunan", dalam Sajogyo, *Ekososiologi, Deidologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus Uji)* (Francis Wahono [ed.]), (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, bekerjasama dengan Sains, dan Sekretariat Bina Desa, 2006), hal. 157-175.

hab ini sangat berpengaruh dalam proses pembentukan *policy* pemerintah dan memberi inspirasi awal kelompok lembaga swadaya yang melakukan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat. Melalui pengetahuan yang otoritatif mereka mampu menembus dan mempertemukan berbagai aktor itu. Di sinilah pentingnya mengetahui keberadaan mereka, sebagai bagian dari membaca sejarah pemikiran pembangunan pedesaan di Indonesia.

Nama-nama ilmuwan (perintis) yang diidentifikasi sebagai kelompok "Mazhab Bogor" adalah Prof. Dr. Ir. Sajogyo, Prof. Dr. Sediono M. P. Tjondronegoro, Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo, dan Dr. HC. Gunawan Wiradi, M.Sc. Keempat tokoh ini saling berdialog, melengkapi berbagai gagasan, dan saling mengkritik, sehingga mengakumulasikan pengetahuan, khususnya tentang pembangunan pedesaan dan studi agraria.

Dari keempat ilmuwan di atas, penelitian yang dilakukan ini hanya memilih dua dari mereka, yakni Prof. Dr. Ir. Sajogyo dan Dr. HC. Gunawan Wiradi, M.Sc. sebagai *exemplary scientists*. Pemilihan itu berdasarkan pertimbangan bahwa tokoh bersangkutan tidak semata-mata mempunyai pengaruh di level akademis, namun juga terlibat langsung melalui berbagai aksi dalam mendorong proses perubahan seperti yang mereka pikirkan baik di level pembuat kebijakan (pemerintah) maupun di level bawah melalui berbagai aksi pendampingan (pengorganisasian massa) dan riset di masyarakat. Sementara dua yang lainnya relatif tidak menempati keistimewaan itu meski bersifat pionir dalam berbagai isu yang digelutinya. [15]

[15] Khusus untuk peran dan kiprah Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro dalam studi agraria Indonesia, dapat dibaca di Sediono M.P. Tjondronegoro, *Mencari Ilmu di Tiga Jaman dan Tiga Benua, Otobiografi Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro,* (penyunting: Ahmad Nashih Luthfi), (Bogor: Sajogyo Institute, 2008). Versi digital buku ini bisa diakses di: http://www.buku-e.lipi.go.id/penulis/moha007/1299989373buku.pdf, dan ulasannya di: http://ikhtisarstudiagraria.blogspot.com/2010/06/profesor-dengan-imajinasi-kaum-tani.html

Kedua eksemplar tersebut akan ditempatkan dalam perjalanan panjang sejarah pemikiran pembangunan sosial-ekonomi pedesaan di Indonesia.

B. Tentang Dua Ilmuwan "Mazhab Bogor"

Prof. Dr. Ir. Sajogyo, yang dikenal sebagai "Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia," semula bernama Kampto Utomo. Ia dilahirkan di Karanganyar, Kebumen, 21 Mei 1926. Pada tahun 1955, ia lulus sarjana IPB. Selang dua tahun, langsung meraih Doktor pertanian di bawah promotor Prof. W. F. Wertheim. Ia pernah menjabat sebagai Rektor IPB selama setahun (Maret 1965-1966).[16]

Pikiran-pikirannya tentang pembangunan pedesaan yang selalu memperhatikan lapis terbawah kaum tani, perempuan, dan kelembagaan lokal sangat berpengaruh tidak hanya dalam studi sosiologi pedesaaan di IPB, tetapi juga di dunia ilmu sosial (pedesaan) Indonesia. Di level kebijakan, perhatiannya tentang Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK) diadopsi sebagai kebijakan posyandu, "taman gizi" ala Orde Baru. Hadirnya berbagai kerangka kelembagaan itu di desa-desa di Indonesia menggerakkan aktivitas tidak hanya kesehatan masyarakat tetapi juga pangan masyarakat (sebab menyangkut gizi: ketersediaan sumber karbohidrat, protein, dan mineral). Begitu juga "garis kemiskinan ala Sajogyo" yang didasarkan pada pendapatan "setara beras" minimal 240 kg untuk penduduk desa, dan 369 kg untuk penduduk kota per tahun. Mereka yang pendapatannya di bawah angka itu dapat dianggap miskin.

Dalam tulisan "semi-otobiografi"-nya,[17] Sajogyo menyebutkan bahwa setidaknya ia terlibat di tiga aras kelembagan: kampus, nasional, dan kelembagaan masyarakat (*Civil Society*

[16] Atas alasan tertentu ia diberhentikan. Dengan persetujuan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Dr. Syaref Thayib, ia mengundurkan diri. "Agar IPB tak lebih jauh terpecah, kami mundur saja", demikian jelasnya dalam surat pribadi Sajogyo kepada penulis, 24 Mei 2007.

[17] Ia menggunakan istilah menuju "profesionalisme baru", Sajogyo, 2006, *op.cit.,* hal. 43-116. Lihat pemetaan karirnya pada uraian Bab V.

Organization/CSO). Di aras kampus, ia berperan dalam mendirikan Program Studi Pasca Sarjana Sosiologi Pedesaan, LPM-IPB, LP Sosped IPB, dan Pusat Studi Pembangunan IPB. Di level nasional, ia berperan di lembaga Survei Agro-Ekonomika Departemen Pertanian, Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK) di bawah Departemen Kesehatan, Dewan Riset Nasional mengetuai bagian Kebutuhan Dasar Manusia, dan Biro Pusat Statistik (BPS) dalam menganalisis indikator kesejahteraan rakyat dan menentukan *Human Development Index*. Di kelembagaan masyarakat, ia tercatat sebagai anggota Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Perhimpunan Pertanian dan Kehutanan, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Gizi Pangan, dan penasehat Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), serta di beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di antaranya Sekretariat Bina Desa Jakarta, Pusat Pengembangan Perekonomian Rakyat (P3M), dan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Jakarta.

Berbagai tema yang digeluti adalah ikhtiar mengembangkan bangunan kerangka teori bagi sosiologi pedesaan, pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, transmigrasi, perbaikan gizi keluarga, dan berbagai isu lain tentang pedesaan.

Ilmuwan kedua adalah DR. HC. Gunawan Wiradi, M. Soc. Sc. Ia tercatat dilahirkan di Solo 28 Agusutus 1932, mendapat gelar insinyur dari Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI) Bogor (sekarang IPB), tahun 1963. Setelah itu, meneruskan studinya di School of Comparative Sosial Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Penang, Malaysia, tahun 1978 dan mendapat gelar M. Soc. Sc (*Master of Social Sciences*), serta pendidikan Non-Degree Program di Insitute of Social Studies (ISS), di Den Haag, Belanda, tahun 1989. Pada tahun 2009, ia mendapat anugerah Doktor Honoris Causa dari IPB dalam "Bidang Sosiologi Pedesaan dengan Bidang Kekhususan Kajian Agraria".

Salah satu isu yang digeluti dalam bidang pedesaan adalah Reforma Agraria. Bukunya yang berjudul *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir* memberi gambaran tentang gaga-

sannya akan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Menurutnya, semasa rezim Orde Baru isu Reforma Agraria (RA) sangat dihindari. Baginya, Revolusi Hijau yang dijalankan tanpa didahului Reforma Agraria (RH tanpa RA) tidak akan mampu mentransformasikan masyarakat Indonesia menuju masyarakat industrial sebagaimana yang dijanjikan. Argumennya, RH tidak mengubah apapun dalam struktur pedesaan, bahkan memperlebar jarak antara yang kaya dengan yang miskin, hingga melahirkan diferensiasi baru dalam masyarakat pedesaan.

Pendekatan yang harus dilakukan di dalam sistem pengetahuan dan kekuasaan semacam itu adalah pelaksanaan Reforma Agraria *by laverage* (didongkrak dari bawah, berdasarkan pemberdayan terhadap petani), bukan *by grace* (hasil dari kemurah-hatian negara). Pendekatan pertama akan mampu mengubah struktur penguasaan sumber ekonomi pedesaan dan menghasilkan pembangunan yang merata dibanding pendekatan kedua yang hanya mampu mengubah nilai dan fungsinya.

C. Tentang Buku ini

Buku ini akan mencoba *pertama,* melacak genealogi pemikiran ekonomi politik transformasi pedesaan sejak abad XIX. Wacana ini berkembang dalam konteks global baik yang sifatnya akademis maupun politik di abad XX, hingga masa Orde Baru dimana sistem pengetahuan dan kekuasaan dalam pembangunan pedesaan dikonstruksi.

Cara membaca sejarah periode kolonial yang demikian panjang dilakukan dengan menghadapkannya pada pertumbuhan kapitalisme. Kapitalisme bekerja dengan cara mengakumulasikan kekayaan dan keuntungan (*surplus value*) sebagai tujuan sekaligus sebagai syarat perlu bagi perkembangan kapitalisme selanjutnya. Proses akumulasi prasyarat inilah yang disebut sebagai *primitive accumulation* atau *previous accumulation*. Dalam proses terakhir ini penting dilihat bagaimana posisi rakyat dan tingkat keamanan/kerentanannya terhadap alat produksinya. Khusus terhadap tema ini, strategi yang dilakukan adalah dengan menafsirkan ulang

secara kritis (*critical reinterpretation*) atas narasi sejarah yang pernah ada, dan tidak melakukan penelitian baru (primer).

Kedua, mengidentifikasi dan memetakan pemikiran-pemikiran para ilmuwan "Mazhab Bogor" dan genealoginya dengan pemikiran terdahulu, serta membandingkan satu dengan lainnya. Apa saja tema-tema yang mereka geluti, adakah keragaman (perspektif dan pemihakan) dan mengapa, serta perjalanan pemikiran mereka ini berujung pada fokus tentang apa? Pelacakan genealogi pemikiran ini penting untuk mengetahui kesinambungan (*continuity*) dan perubahannya (*change*).

Ketiga, melihat bagaimana institusionalisasi gagasan mereka di berbagai wilayah: kampus, LSM/*CSO*, lembaga pemerintah, dan masyarakat akar rumput. Hubungan antara gagasan (teks) dengan masyarakat di berbagai lapisannya, berlangsung melalui adanya mediasi. Hubungan itu ada dalam bentuknya yang beragam. Maka otoritas sebuah gagasan ditentukan tidak hanya melalui keterujiannya secara akademis, namun juga seberapa mampukah bermetamorfosa menjadi kekuatan pengubah *(intelecutual forces)* di tingkatan kebijakan dan pengorganisasian pergerakan di tingkat masyarakat. Bagaimanapun, sebuah gagasan bertujuan untuk mengubah realitas.

Keempat, pemikiran-pemikiran mereka akan dihadapkan pada dua konteks yang berbeda, yakni konteks pergeseran ekonomi-politik Orde Lama menuju pembangunanisme Orde Baru dalam berbagai program modernisasi desa/pertanian, yang secara umum dibaca sebagai agenda liberalisasi ekonomi (terutama tahun 1986-1992). Apakah ada perspektif kritis yang mereka munculkan, dan bagaimana cara agar pemikiran-pemikiran kritis itu dapat dilembagakan di kampus, "lolos sensor" menjadi *policy* bagi pemerintah, dan diperjuangkan melalui swadaya masyarakat.

Selanjutnya, dalam konteks perkembangan ilmu-ilmu sosial, mengapa dan bagaimana perspektif kritis, teorisasi, dan pendekatan partisipatif mereka dikembangkan di tengah-tengah ilmu sosial yang didominasi oleh perspektif fungsionalisme struktural ala Parsonian, analisis non-Marxian, dan "applied sci-

ences" non-kritis yang berorientasi pembangunan, serta di tengah tuduhan mandegnya ilmu-ilmu sosial saat itu?

Agar tidak terlalu melebar, buku ini membatasi diri pada upaya penelusuran sejarah pemikiran pembangunan pedesaan Indonesia. Setiap pemikiran, terutama dalam perspektif sosial dan ekonomi-politik, dapat lahir dari pelaku ekonomi (pengusaha), teknokrat dan birokrat, birokrat dan teknokrat, kalangan media massa, aktivis gerakan sosial, maupun kalangan akademik. Buku ini membatasi diri pada pemikiran yang berasal dari kelompok akademik, khususnya kedua ilmuwan yang mendedikasikan diri pada disiplin sosiologi pedesaan, dalam memproduksi pemikiran-pemikiran pembangunan pedesaan tersebut. Keduanya adalah Prof. Dr. Ir. Sajogyo dan Dr. HC. Gunawan Wiradi, M.Soc. Sc.

Buku ini bertujuan melacak trajektori wacana pembangunan pedesaan pada masa kolonial, sampai dengan mengidentifikasi, memetakan dan membaca ulang pemikiran-pemikiran dua ilmuwan sosiologi pedesaan "Mazhab Bogor". Lantas melihat bagaimana institusionalisasi gagasan mereka itu berlangsung dan direspon di berbagai aras: kampus, LSM/*CSO*, lembaga pemerintah, dan lapangan masyarakat. Serta untuk melihat gambaran bagaimana mereka bergulat (mempertahankan sikap kritis mereka sebagai cendekiawan) ketika dihadapkan pada tarik-menarik kekuasaan yang ada di level "politik negara".

Diharapkan buku ini memberi manfaat dalam mengetahui produksi pengetahuan tentang pembangunan (sosial-ekonomi) pedesaan pada kurun waktu tertentu. Pembacaan terhadap sejarah pemikiran akan memberi kontribusi pada pemahaman atas peta pengetahuan ilmu sosial Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan *state of the art* ilmu sosiologi pedesaan Indonesia. Dengan demikian, tuduhan bahwa sejarah kesarjanaan di Indonesia berjalan terputus-putus bahkan sering dimulai tanpa pendasaran pada pencapaian-pencapaian sebelumnya, akan dapat dihindari.

D. Tentang Mazhab Pemikiran

Sebuah pemikiran dapat disebut sebagai "Mazhab" atau "School of Thought" jika memenuhi karakteristik tertentu. [18] Karakteristik tersebut di antaranya:

1. Adanya kelembagaan formal ataupun non-formal yang menjadi wadah para peneliti (*epistemic community*) saling berdiskusi, mengular gagasan, menguji dan mengukuhkannnya.
2. Adanya sosok intelektual berwibawa, baik dalam perannannya sebagai "*managerial schooler*" maupun "*ideological broker*".
3. Adanya sebuah manifesto (akademis). Bila ceramah inagurasi Horkheimer pada tahun 1931 menandai lahirnya teori kritis dan bagaimana menempatkan posisi falsafahnya yang lahir dalam konteks fasisme Nazi, maka adakah hal semacam itu pada Mazhab Bogor?
4. Paradigma baru. Apa paradigma baru yang diusung oleh kedua ilmuwan tersebut pada masing-masing isu dan disiplin ilmu yang digelutinya?
5. Adanya jurnal atau media apapun sebagai *outlet* yang mempublikasikan hasil-hasil penelitian, sehingga dengan itu kedua tokoh menyebarkan gagasan-gagasannya, mendialogkannya dengan teks-teks lain (intertekstualitas), dan relasi teks dengan realitas.

Dengan peta pengetahuan yang tersebar di atas, maka sebagai strategi *heuristik*-nya adalah mengikuti 5 hal pencirian tersebut. Informasi mengenai kelembagaan dan sosok intelektual akan didapatkan dari wawancara lisan dan pembacaan terhadap naskah-naskah yang ditulis oleh berbagai kalangan, demikian juga informasi mengenai "manifesto", paradigma, dan *outlet* gagasan. Sumber-sumber primer berupa tulisan-tulisan kedua tokoh yang dikaji diperoleh dengan mudah di perpustakaan Sajogyo

[18] Rolf Wiggershaus, *The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significane (*Oxford: Politiy Press, 1986), hal. 2.

Institut, Bogor. Berbagai judul tulisan mereka dapat dilacak dengan mengakses situs www.pustaka-agraria.org

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, baru ada satu tulisan yang secara khusus membaca diskursus transisi agraria dan dalam konteks itu pembangunan pedesaan dibicarakan. Tulisan itu dikerjakan oleh Benjamin White, "Between Apologia and Critic Discourse: Agrarian Transition and Scholarly Engagement in Indonesia".[19] Ia mendiskusikan keterlibatan para sarjana Indonesia dalam memproduksi wacana transisi agraria baik dari mereka yang cenderung melakukan apologi terhadap kebijakan negara maupun para ilmuwan yang menyuarakan sikap kritisnya. Namun, telaah Ben White tersebut hanya meletakkan satu konteks dalam melihat dinamika itu, yakni konteks global di mana wacana ekonomi politik pedesaan tidak terlepas dari pendesiminasian ilmu sosial melalui prakarsa negara luar dan lembaga donor, dan dalam kondisi semacam itu pula ilmu sosial di Indonesia bertumbuh. Adapun konteks pribadi orang per orang dalam pergulatannya sebagai ilmuwan seperti yang akan dilakukan oleh penelitian ini, tidak dibahas dalam paparan Ben White tersebut.

Dua buku lain lebih menekankan pada ketokohan dua ilmuwan tersebut, yakni *Sajogyo, Bapak, Guru, dan Sahabat*[20], dan *Menuju Keadilan Agraria: 70 tahun Gunawan Wiradi.*[21] Buku pertama bernuansa personal, bermanfaat dalam memberi gambaran *habitus* Sajogyo. Buku kedua merupakan tulisan berbagai tema pedesaan yang dipersembahkan sebagai kado ulang tahun Gunawan Wiradi yang ke-70. Satu buku yang ditulis sendiri oleh Sajogyo menyajikan refleksi perjalanan karir "profesionalisme

[19] Ben White, *loc.cit.*

[20] Mubyarto, dkk., *Sajogyo, Bapak, Guru, dan Sahabat* (Jakarta: Yayasan Agro-Ekonomika, 1996).

[21] Endang Suhendar, dkk., *Menuju Keadilan Agraria: 70 tahun Gunawan Wiradi* (Bandung: AKATIGA, 2002).

baru"-nya.[22] Buku ini berguna untuk mengetahui bagaimana Sajogyo melihat dirinya sendiri (*from within*) dan perjalanan kariernya sebagai ilmuwan. Meski demikian, buku ini tidak secara mendalam mengeksplorasi konteks yang lebih luas bagaimana situasi dan kondisi ilmu sosial (sosiologi pedesaan) saat itu.

Tuduhan kemandegan ilmu sosial dapat dilihat dari uraian Arief Budiman yang diwawancarai oleh majalah *Prisma* pada tahun 1983.[23] Ia menjelaskan bahwa kemandegan itu disebabkan ahistorisnya ilmu sosial di Indonesia. Tidak adanya dialektika antara yang empiris dengan ide menjadikan ilmu sosial di Indonesia semata-mata bersifat tekstual dan normatif. Ia tidak dipergulati ke dalam kondisi real masyarakat dengan melihat konteks historisnya masing-masing. Ilmu-ilmu sosial liberal diaplikasikan secara ahistoris. Tulisan ini memberi manfaat pada argumen tentang tuduhan kemandegan ilmu sosial di Indonesia dan melalui pengalaman kedua tokoh Bogor yang dikaji, benarkah tuduhan itu berlaku bagi mereka. Jika tidak, apa dan bagaimana pengalaman mereka berdua sampai dengan tidak mengalami jebakan "kemandegan" tersebut.

Karya sejarah yang secara eksplisit dan tegas menunjukkan pendekatannya secara Marxis sekaligus Indonesiasentris adalah tulisan Malcolm Caldwell dan Ernest Utrecht, *An Alternative History of Indonesia.*[24] Cara pandang kedua penulis dalam melihat sejarah Indonesia dengan menghadapkannya pada pertumbuhan kapitalisme sangatlah berbeda. Penulis menunjukkan bagaimana praktik pemerintah kolonial melalui berbagai eksperimen kebijakannya (mulai dari periode VOC, Daendels, Raffles, van Der Capellen, *Culttuurstelsel,* Ekonomi Liberal, Politik Etis, hingga ekonomi Orde Baru) adalah bagian dari pemantapan aktifitas ekonomi kapital, dan dalam konteks inilah negara

[22] Sajogyo, *Dari Praktek ke Teori dan ke Praktek yang Berteori* (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 2004). Tulisan ini dimuat kembali dalam Sajogyo, 2006, *loc. cit.*

[23] Arief Budiman, "Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Ahistoris", *Prisma* 6, Juni, 1983, hal. 74-90.

[24] Malcolm Caldwell & Ernst Utrecht, *An Alternative History of Indonesia* (Sidney: Apcol, 1979).

Indonesia dibentuk (*state formation*). Negara lahir dan hadir guna memfasilitasi kepentingan kapital yang telah berkembang di suatu kawasan (negeri jajahan).

Sudut pandang marxis tersebut mewarnai dalam setiap bab buku mereka. Dalam konteks akselerasi dan akumulasi kapital yang difasilitasi oleh negara Kolonial dan negara Orde Baru itulah, proses marjinalisasi dan ketercerabutan rakyat dari sumber-sumber produksi terjadi. Kekerasan kemanusiaan, persoalan HAM, kemiskinan, ketidakadilan (Pembantaian PKI dan Kasus Timor Timur), menjadi sorotan penulis. Di sinilah letak Indonesia-sentris dari buku itu, yang secara tegas dinyatakan kedua penulisnya.

Buku di atas membantu dalam melihat sejarah panjang yang terjadi sejak masa Daendels hingga Orde Baru. Perjalanan panjang sejarah itu tidak akan diabstraksikan ke tingkatan filsafat sejarah, dengan mencari pola gerak sejarah, misalnya, namun sebagai perspektif di dalam melihat bagaimana partikularitas sejarah.

F. Metodologi dan Kerangka Konseptual

Buku ini menggunakan pendekatan sejarah pemikiran. Sejarah pemikiran, menurut Kuntowijoyo, dengan mengutip Roland N. Stromberg, adalah "the study of the role of ideas in historical events and process".[25] Secara metodologis, sejarah pemikiran mempunyai tiga pendekatan, yaitu kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan antara teks dan masyarakatnya.[26] Yang dapat disoroti dari segi tekstualnya adalah genesis pemikiran, konsistensi pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, perkembangan dan perubahan pemikiran, variasi pemikiran, komunikasi pemikiran, dan intertekstualitas.

---

[25] Roland N. Stromberg, *European Intellectual History Since 1789* (Cf. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*), hal. 189.

[26] Kuntowijoyo, *Ibid.*, hal. 191-199.

Agar tidak terjabak dalam karya filsafat, buku ini mencoba melihat *konteks* dan *proses*-nya. Konteks yang akan dilihat di sini adalah pembangunan ekonomi-politik Orde Baru (Revolusi Hijau) dan *developmentalisme.* Proses-proses yang pernah terjadi pada masa kolonial, Perang Dingin dan pengaruhnya dalam membangun iklim dan orientasi akademis tertentu, serta konteks pertumbuhan internal ilmu sosial di Indonesia (terutama tentang kajian agraria), juga diuraikan terlebih dahulu, untuk mengetahui *proses* bagaimana suatu pemikiran itu bisa muncul atau tidak muncul.

Hubungan antara pemikiran dan masyarakat dipahami sebagai bagaimana institusionalisasi gagasan itu berlangsung (diterima dan ditolak) di berbagai level; baik di tingkatan akademik, nasional (sebagai *policy* pemerintah), dan lembaga swadaya masyarakat. Secara khusus, untuk menjelaskan relasi antara gagasan dan institusionalisasi ini, penulis menggunakan pendekatan *epistemic community* yang diajukan oleh Peter Haas. Dalam naskahnya berjudul "Introduction: Epistemic Community and Policy Coordination",[27] Haas menunjukkan pentingnya peran aktor-aktor dalam membentuk wacana dan kebijakan program pemerintah. Selain itu ia menunjukkan pentingnya *systematic condition* dan *domestic pressure* yang mempengaruhi *state action*. Yang terakhir ini penting untuk mengenali kondisi sistematis, pengetahuan, dan sampai dengan tindakan nasional itu dilaku-kan oleh jaringan ahli berbasis otoritas pengetahuan yang oleh Haas disebut dengan "epistemic community".

Kajian pemikiran ekonomi politik Indonesia yang menggunakan pendekatan komunitas epistemis telah dilakukan oleh Rizal Mallarangeng. Ia menerapkannya dalam konteks pembangunan liberalisasi ekonomi Indonesia.[28] Salah satu kritik utama terhadap karya Rizal Mallarangeng ini adalah definisi yang kabur antara liberal dalam pengertian ekonomi politik dengan liberal

[27] Peter Haas, "Introduction: Epistemic Community an Policy Coordination", *International Organization,* 46, 1, Winter 1992, hal 2.

[28] Lihat, Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia, 1986-1992* (Jakarta: KPG, 2002). Uraian teoritisnya pada hal. 25.

dalam proses sosial politik. Liberalisasi dalam pengertian pertama dapat diartikan dengan minimnya campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi. Praktik deregulasi dan swastanisasi menjadi contoh mudahnya. Bagi kalangan ini, pilihannya hanyalah dua, menuju arah kapitalisme atau tunduk pada birokratisme ekonomi Indonesia.

Sementara pengertian kedua lebih pada upaya emansipasi masyarakat dari kekangan otoritarianisme negara. Kaburnya pedefinisian itu berakibat pada dicampuradukkannya para tokoh dalam satu "wadah" yang disebut komunitas epistemis liberal itu padahal mereka berada dalam kerangka ideologi dan kepentingan yang berbeda. Seorang Sediono M.P. Tjondronegoro yang dicotohkannya, meski sama-sama anggota diskusi forum *Kompas*, tentulah berbeda dengan Widjojo Nitisastro dan Thee Kian Wie. Yang mempertemukannya kesemuanya hanyalah penolakannya terhadap sentralisme dan otoritarianisme Orde Baru.

Untuk memudahkan pembaca, buku ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metode dan sumber, kajian pustaka, serta metodologi dan kerangka konseptual.

Bab II mencoba melihat bagaimana pembangunan desa dalam konteks kolonial. Bagaimana ia dikonstruksikan dalam pertumbuhan kapitalisme dan kebijakan ekonomi politik kolonial. Bab ini penting artinya untuk melacak bagaimana berbagai orde itu mengkonstruksi pemahaman atas desa, dan apa saja yang dimunculkan dalam konstruksi itu.

Bab III menguraikan gagasan apa yang melatarbelakangi satu proyek besar yang terjadi pada paruh kedua abad XX, yakni Revolusi Hijau (*Green Revolution*), dan bagaimana prosesnya terjadi di Asia Tenggara mulai pada tahun 1960-an. Dalam konteks program ini dapat dilihat bagaimana transisi agraria Indonesia terjadi.

Bab IV mengulas studi agraria Indonesia yang dinilai bersifat rintisan sejak awal abad XX. Bab ini berguna untuk melihat sejauhmana rintisan karya itu menjadi akumulasi pengetahuan di dalam ilmu sosial Indonesia umumnya, dan secara khusus memberi pengaruh pada kedua ilmuwan tersebut.

Bab V menyajikan kajian mendalam tentang Prof. Dr. Ir. Sajogyo sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan di Indonesia. Pada bagian ini didedah genealogi pemikiran, spektrum gagasan dan pengaruhnya, dan dimana posisi keduanya dalam semesta studi agraria di Indonesia khususnya, dan ilmu sosial Indonesia umumnya.

Bab VI adalah uraian tentang tokoh kedua dalam Mazhab Bogor, seorang guru dalam studi teori dan praktik Reforma Agraria, Dr. HC. Gunawan Wiradi, M. Soc. Sc. Di sini juga akan dikaji genealogi pemikirannya, spektrum gagasan dan pengaruhnya, dan dimana posisi keduanya dalam semesta studi agraria di Indonesia khususnya, dan ilmu sosial Indonesia umumnya.

Bab VII Bab ini memaparkan sintesa pemikiran Sajogyo dan Gunawan Wiradi yang diletakkan dalam konteks pembangunan nasional. Dengan sintesa ini diharapkan diperoleh semesta pengetahuan "Mazhab Bogor" dan dimana posisi kritis yang dikembangkannya baik dari segi kritik kebijakan maupun kritik pengetahuan (metodologi).

Bab VIII adalah kesimpulan, berisi temuan atau jawaban dari "misteri" permasalahan yang diajukan.

BAB II
PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN KOLONIAL

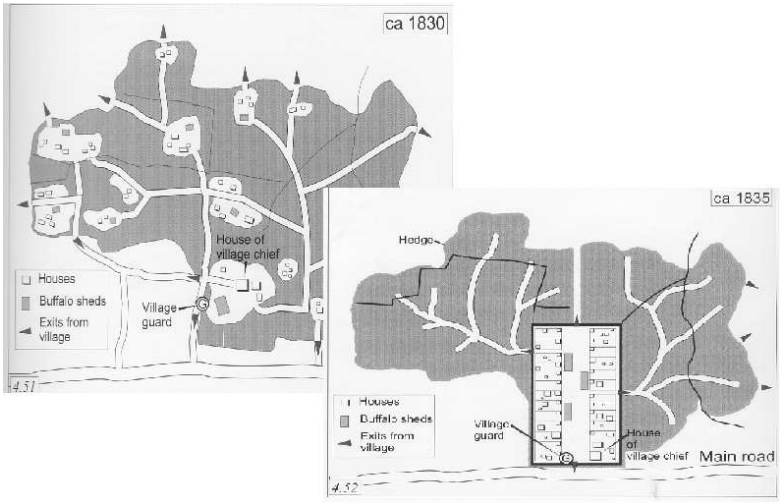
A. Konstruksi atas Desa: Lokal dan Global

Sejarah pedesaan Indonesia adalah sejarah agraria, yakni tentang bagaimana tanah sebagai ruang fisik, geografis, ruang sosial-kultural dikuasai, diatur, dikelola, dan dieksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah Hindia Belanda adalah sejarah tentang "*invention of tradition,*" dengan seperangkat nilai-nilai yang hendak dicangkokkan: kapitalisme dan liberalisme. Kedua nilai ini termanifestasikan dalam bagaimana tanah diolah, tenaga kerja dikerahkan, modal dibentuk, dan bagaimana birokrasi dibangun.

Bagaimana desa dibayangkan oleh para penulis, dapat disimak dalam uraian berikut:

> "Di Djawa dan Madura, desa itu terdjadi dari sekumpulan 'tanah pekarangan' jang biasa diberi tanda berupa pagar keliling, baik terdjadi dari pagar hidup, maupun pagar batu tembok, kaju ataupun bambu. Diatas pekarangan berdiri sebuah atau beberapa buah rumah kediaman penduduk beserta lumbung padi, kandang sapi, kuda, kambing, kerbau. Pekarangan-pekarangan itu dari udjung desa jang satu keudjung desa jang lain disambung dengan djalan-djalan desa. Ditepi desa djalan-djalan itu biasanja ditutup dengan sebuah pintu dari kaju atau bambu, jang pada waktu malam dikun-

tji dari dalam dengan kuat. Dimuka pintu desa itu disebelah dalam berdiri sebuah gardu tempat pendjagaan".[1]



Gambar 1. Desa Jawa dan Reorganisasinya selama dan setelah Sistem Tanam Paksa, 1830 dan 1835
(Sumber: Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2000))

Desa sebagaimana gambaran di atas demikian tertata dengan rapi. Menariknya adalah sejak kapan desa dalam gambaran semacam itu mulai ada; di zaman pra-kolonial ataukah sejak kolonialisme masuk (dan pada periode kapan)? Beberapa sejarawan memberi pandangan yang berbeda-beda. Desa yang digambarkan sebagai unit yang homogen, stabil, penuh ketenteraman, adalah pencitraan yang oleh sebagian sejarawan dipandang bersifat ilutif belaka.[2] Pandangan itu mengasumsikan bahwa desa Jawa bersifat terisolasi, "timeless", tercukupi dengan sistemnya sendiri. Sehingga ketika unsur-unsur eksternal (yang dibawa oleh rezim Kolonial) masuk seperti melalui administrasi, pembangunan infrastruktur, penyuluhan, ekonomi moneter, dan transisi menu-

[1] Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa* (Yogyakarta: Sumur Bandung, 1965 [cetakan kedua]), hal. 4.

[2] Jan Breman, *The Village on Java and The Early Colonial State* (Rotterdam: CASP, 1980) hal. 5.

ju produksi berorientasi pasar, desa mengalami disintegrasi dan diversifikasi.

Pandangan yang ilutif itu dianut oleh Boeke, Schrieke, dan van Vollenhoeven. Pandangan semacam ini pula yang agaknya menandai romantisasi dalam historiografi Indonesiasentris. Cara pandang itu seakan-akan menafikan realitas internal yang sejak mula memiliki kondisi yang kompleks, telah terdiferensiasi, dan dengan segenap potensi konfliknya. Di sini, suatu bentuk glorifikasi atas masa lalu (yang dinilai lebih murni, lebih baik, dan asli) dengan rujukan-rujukannya yang tidak (selalu) jelas, akan menjadi persoalan tersendiri; tentang keaslian mana dan macam apa yang kemudian diidealkan.[3]

Berbagai cara pandang yang menitikberatkan pada homogenitas, kesatuan, ketertutupan, ketidakterbagian, dan kelambanan, menjadi pijakan berbagai kebijakan pemerintah Kolonial. Pandangan itu menjadi legitimasi atas proses pembangunan negeri Hindia Belanda. Belakangan seorang ilmuwan sosial asal Belanda, Jan Breman, membantah cara pandang seperti itu. Ia menunjukkan, setidaknya telah ada dua nama yang memberikan pandangan berbeda dalam melihat desa Jawa: Wertheim dan Onghokham. Wertheim sadar benar bahwa ada hubungan-hubungan "patrimonial" di dalam masyarakat Jawa, yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sementara Onghokham melalui disertasinya menunjukkan telah adanya "diferensiasi internal" masyarakat, baik sebelum maupun ketika berlangsung pemerintahan Kolonial.[4]

Bagi Jan Breman sendiri, desa lebih menyangkut "*the problem of resources management: how exercise control over the Javanese peasants and their products*".[5] Desa adalah arena kontestasi perebutan atas sumber daya itu. Di dalamnya terdapat "pola relasi vertikal" dan "keragaman horisontal". Gejala *landless population* menurutnya telah ada sejak abad XIX, sehingga *depesantization*

[3] *Ibid.,* hal. 6.
[4] *Ibid.*, hal. 8-9.
[5] *Ibid.*, hal. 3.

bukanlah hal baru. Proses itu telah dapat dijumpai pada abad lampau. Kesempatan kerja penduduk yang tidak memiliki tanah hanyalah dengan cara menjual tenaganya sebagai buruh di perkebunan (internasional). Dengan demikian, keterintegrasian tenaga kerja sekaligus desa itu sendiri ke dalam sistem ekonomi global bukanlah hal baru pula.

Breman juga menjelaskan bagaimana sistem desa ditemukenalkan di bawah pemerintahan kolonial, yang eksistensinya tergambarkan pada permulaan abad ke-19. Dengan kata lain, komunitas desa adalah sebuah konstruksi kolonial. Sebagai sebuah "*colonial practice*", konstruksi itu dibangun dengan cara yang bersifat "*trial and error*". Akibat dari "coba-coba" dan "gagal" itu, kesemuanya harus ditanggung oleh masyarakat desa.

Benar bahwa desa di Jawa lebih tua usianya daripada desa-desa yang ditemu-kenalkan oleh kolonial, namun bagaimana gambaran tentang desa di abad-abad lampau itu tidak banyak yang bisa diketahui. Mengingat hampir tidak tersisa sedikitpun wilayah Jawa yang tidak terjamah oleh sistem baru Kolonial. (Desa) Jawa telah diberi fungsi baru. Jawa telah berubah dari bentuk aslinya.

Tentang bagaimana desa-desa Jawa berubah, dibentuk, ditemu-kenali oleh kekuasaan kolonial, dan sebaliknya bagaimana seiring dengan itu format negara kolonial terbentuk, dapat dilihat dalam berbagai periode berikut.

B. Desa Jawa dalam Penguasaan "Negara Modern"

Pada abad 19 masyarakat Jawa telah terkolonisasi yang ditandai kuatnya pengaruh para administrator Belanda, militer, dan pedagang. Sebagaimana ditunjukkan oleh Luiten van Zanden, terbentuknya negara kolonial dilakukan melalui sejumlah tahapan berbarengan dengan bagaimana pola pembangunan ekonomi (di Jawa) diselenggarakan.[6] Berbagai eksperimen dalam setiap

[6] Luiten van Zanden, *Colonial State Formation and Pattern of Economic Development*, artikel tidak diterbitkan, 2002. Dikutip seizin pengarang (20 April 2009).

pergantian rezim kolonial di Jawa dilakukan untuk menjadikan Jawa sebagai daerah yang dapat dikelola dengan cara yang "modern".

Dalam rangka menjadikannya modern ini, sejak abad 17-18 VOC telah memikirkan bagaimana mengeksploitasi sistem feodal yang telah berlaku di Jawa. VOC menunjukkan keberhasilannya dengan kemampuan *flexibility of capitalistic trading*-nya melalui cara mencangkokkan ke dalam struktur feodal. Dalam beberapa periode krisis, VOC mampu melakukan perjanjian dengan kekuasaan tradisional (Kerajaan Banten dan Mataram) hingga menggantikan posisi mereka sebagai "tuan baru" yang mempunyai hak klaim atas hasil tanah, pengerahan tenaga kerja, dan pengumpulan pajak. Perluasan kekuasaan VOC ini menjadikannya sebagai sebuah *territorial state* dari sekedar perusahaan dagang semata.[7]

Pada tahun 1790, VOC memberikan surat pengangkatan kepada kepala distrik di Priangan sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bupati. Selain itu di pedalaman juga diangkat opsiner Eropa untuk kebun kopi. Di masa ini VOC telah mewajibkan penanaman kopi di Priangan yang waktu itu berada di bawah Kesultanan Cirebon. Kebun kopi dibuat di atas *woeste gronde* dengan mempergunakan pekerja wajib. Meski "tanam paksa" ini telah berakhir pada akhir abad 18, namun pola ini berhasil mengubah struktur hukum adat dan mempengaruhi tingkatan masyarakat pedesaan di tatar Sunda.[8]

Dirk van Hogendorp yang berkuasa saat itu memberlakukan stelsel tanah pada tahun 1799. Ia berpendapat bahwa stelsel feodal yang terdapat di Jawa mematikan segala kemauan usaha. Stelsel ini adalah penyebab penyakit "masa bodoh" orang Jawa. Oleh karena itu, ia ingin mencabut kekuasaan dan hak menguasai tanah dari para bupati. Ia menghendaki kebebasan menanam dan kebebasan mengambil manfaat hasil tanamnya. Dengan de-

[7] *Ibid.* hal 4.

[8] D. H. Burger, *Sedjarah Ekonomi Sosiologis Indonesia, Djilid Pertama* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1960), hal. 115.

mikian diharapkan orang Jawa akan termotivasi untuk menanam lebih banyak macam tanaman, tidak sekedar kopi.

Akan tetapi dengan sistem persewaan tanah dalam bentuk penggunaannya sebagai perkebunan partikelir, keberadaan Belanda sangat tergantung pada bagaimana menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan Cina. Ketika dirasa bahwa ekonomi Jawa abad 19 tidak kunjung kondusif pada pasar dengan tingkat dan spesialisasi produksi yang relatif rendah, maka muncul tuntutan-tuntutan perubahan struktur pada abad 19.

Memasuki abad 19, menurut Luiten van Zanden, setidaknya ada tiga tahapan dalam proses menciptakan "negara modern": Masa Daendels (1808-1811), Masa Stamford Raffles (1811-1816), dan Masa van der Cappelen (1816-1826).[9]

1. Masa Daendels (1808-1811)

Terinspirasi oleh Revolusi Perancis, Herman Willem Daendels melakukan perombakan terhadap sistem birokrasi di negeri jajahan. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi formal modern (dalam pengertian Weberian) yang berbeda dari sebelumnya. Jika pada masa VOC formasi kenegaraan diisi oleh kepentingan ekonomi dan pengusaha, sehingga urusan privat dan publik bercampur baur, maka Daendels mencoba memisahkan keduanya. Daendels menempatkan para bupati di Jawa sebagai bagian dari kepegawaian administrasi Belanda, bukan sebagai penguasa atau pemimpin masyarakat di daerahnya masing-masing. Birokrasi adalah pranata modern dengan sistem penggajian. Dalam pelaksanaannya, semangat pembaharuan dengan metode kediktatoran Daendels ini lebih banyak membuahkan perlawanan ketimbang keberhasilan.[10]

Meski singkat, kekuasaan Daendels di Jawa memiliki arti sangat penting bagi "formasi kenegaraan" kolonial terkait dengan sistem administrasi modern yang diperkenalkannya. Kekejaman

[9] *Ibid.*, hal. 6-8.

[10] M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004,* (Jakarta: Serambi, 2008), hal. 245.

metode yang diterapkannya dalam sistem administrasi modern itu mengakibatkan ia mendapat julukan "The Thundering Marshaal".[11]

Daendels juga menekan hak istimewa kaum feodal, menghapus pengerahan tenaga kerja paksa, dan penyerahan paksa hasil-hasil produksi ekspor (misal: kapas). Ia mengeluarkan kebijakan tentang larangan penyewaaan tanah desa, tetapi ia mengecualikan desa-desa yang mengusahakan penggilingan gula, pembuatan garam dan sarang-sarang burung. Dibangunlah *Grote Postweg*, sebuah jalan modern yang menghubungkan kota-kota besar di Pantura. Namun ia juga memperkenalkan cara pembiayaan birokrasi negara melalui tanam paksa kopi yang telah sukses di Priangan.

Dari segi perubahan yang terjadi atas penguasaan tanah, pembangunan *Grote Postweg* yang dikenal juga dengan Jalan Pos Daendels, dilakukan dengan sistem penjatahan pada kabupaten-kabupaten yang dilewatinya. Bupati-bupati yang daerahnya terkena kebijakan ini ditugaskan untuk menyerahkan tanah dan mengerahkan tenaga kerja paksa. Jika penanggung jawab kerja tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai target dan waktu yang ditentukan, mereka terkena ancaman digantung. Kelaparan, kelelahan, dan penyakit malaria, memakan banyak korban.[12] Jalan Daendels yang panjangnya lebih dari 1000 km itu menjadi "kuburan terpanjang di dunia" bagi orang-orang yang telah membangunnya.

Pada masa Daendels, kerajaan-kerajaan yang semula pada masa VOC dijadikan sekutu, berubah menjadi *prefektus*, meniru struktur sosial yang berlaku di Perancis. Dengan diturunkannya martabat, berbagai aksesori simbol kebesaran dihapuskan. Hal ini banyak menimbulkan perlawanan. Deandels juga berusaha keras melakukan pemisahan antara kekuasan negara dan agama. "Rasionalisasi" yang dijalankan dengan "tangan besi" oleh Daendels

---

[11] W. F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999 [terjemahan]), hal. 42.

[12] Pramoedya Ananta Toer, *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels* (Jakarta: Lentera Dipantara, 2005), hal. 5-8.

mengakibatkan negara membutuhkan biaya yang tinggi. Belum lagi dengan pegawai birokrasi yang harus digaji. Maka yang terjadi kemudian Daendels mengulangi pengalaman VOC: menjual tanah-tanah kepada pihak partikelir.[13]

2. Raffles, riset kadaster dan *"land rent system"*

John Sturgus Bastin, sejarawan kelahiran Australia yang pernah mengeditori Jurnal *Malayan and Indonesian Studies,* dalam disertasinya yang dibimbing oleh J. H. Boeke, khusus menulis tentang gagasan Raffles mengenai sistem sewa tanah di Jawa. Menurut J. S. Bastin, sistem itu adalah cerminan dari sistem pajak atas tanah di Inggris, yang merupakan pengejawentahan dari gagasan Adam Smith, James Stuart Mill, Sinclair, dan beberapa tokoh penggagas ekonomi politik pada abad 18 kala itu. Sistem ini mengalasi penetrasi ekonomi uang dan ekonomi liberal pada masyarakat pribumi.[14] Pada pertengahan abad 18, kemajuan material yang terjadi di Inggris dinilai sebagai suatu perkembangan yang wajar. Gagasan modern menyebar dari Inggris. Dalam hal ini pikiran Raffles terkait dengan ide liberal David Ricardo (1772-1823) yang melahirkan konsep tentang "the rent of land" beserta teorinya. Gagasan ini dikombinasikan dengan ide Thomas Robert Malthus (1766-1836) yang sangat berpengaruh pada masa itu dan dirasakan langsung gaungnya oleh Raffles.[15]

Sebagai sebuah kenyataan sosial, penerapan kebijakan pajak atas tanah di Jawa didasarkan pada pengalaman di India, ketika pemerintah Inggris berkuasa di sana. Pada masa kekaisaran Moghul di India (1526-1707), negara dianggap sebagai pemilik tanah, atau *super land-lord*. Merujuk pada pengalaman *ryotwari* di

---

[13] Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Kompas, 1995), hal. 85-88.

[14] John Sturgus Bastin, *The Development of Raffles's Ideas on The Land Rent System in Java* (s'Gravenhage: 1954), hal. Ix.

[15] Sediono M. P. Tjondronegoro, *Negara Agraris Ingkari Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2008), hal. 106.

India, pajak tanah mulai diperkenalkan di Jawa. Kebijakan ini berasumsi bahwa kedua kawasan tersebut mempunyai tingkat kemiripan yang tinggi, hasil dari proses difusi dari Asia Selatan.

Dalam sistem *ryotwari*, negara memberi perlindungan pada rakyat-petani (*ryot*) yang tersebar mengikuti masing-masing tuan tanah (*zamindar*). Dengan kebijakan itu, negara berinteraksi langsung dengan rakyat. Sistem *zamindari* dengan demikian dihapus. Pemukiman terbentuk pada periode sistem ini. Para *ryot* dilindungi dari pengusiran sepanjang mereka memberikan sejumlah bayaran (sebagai biaya sewa) kepada pemerintah. Pemukiman sistem *ryotwari* ini diperkenalkan oleh Thomas Munro segera setelah ia menguasai wilayah Madras pada seperempat pertama abad 19.[16]

Dalam kasus Jawa, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Mackenzie atas kondisi agrarianya, disimpulkan bahwa status tanah-tanah yang ada merupakan milik raja/kerajaan. Tim bentukan Raffles yang dipimpin Mackenzie, yang berdasarkan instruksi Gubernur Jenderal Inggris Lord Minto, menginginkan dilakukannya reformasi total peraturan sewa tanah dan bagi hasil yang ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.[17] Tanah dan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting artinya bagi dikembangkannya ekonomi industrial perkebunan.[18]

> "Dari penyelidikan yang dilakukan pemerintah Inggris dan berbagai fakta yang dikumpulkan para pegawai pemerintah, tercatat bahwa di sebagian besar pulau ini, di distrik timur dan tengah, tidak ada perjanjian antara penguasa lokal dan petani, *dan pemerintah merupakan satu-satunya pemilik tanah*".[19] (garis miring dari penulis, ANL)

---

[16] Lihat, Gunawan Wiradi, "Landreform in India, Report on The Visit of Indonesian team to Punjab and West Bengal", paper dipresentasikan dalam *Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective*, Sukabumi, 17-30 Mei, 1981, hal. 5. Lihat juga, John Sturgus Bastin, *op.cit.,* hal. 5-7.

[17] Thomas Stamford Raffles, *The History of Java* (Yogyakarta: Narasi, 2008 [terjemahan]), hal. 97.

[18] Sediono M. P. Tjondronegoro, *loc.cit.*

[19] Thomas Stamford Raffles, *op.cit.* hal. 88.

Mengingat bahwa Jawa sedang berada dalam kekuasan pemerintahannya, maka Raffles berkesimpulan bahwa status tanah dimiliki oleh pemerintah atau negara. Inilah yang disebut dengan "*domein theory*", yaitu teori tentang kepemilikan negara yang lahir dari hasil penyelidikan komisi yang dibentuk oleh Raffles pada masanya. Dalam buku babonnya itu ia menyatakan, "Tanah, setelah disurvei dan diukur, akan diberikan kepada petani menurut proporsi yang adil. Kontrak diadakan antara petani dan pemerintah secara pribadi…".[20] Pernyataan ini mengindikasikan bahwa yang bertindak sebagai *super-land lord* adalah pemerintah, yang saat itu dipimpinnya.

Selain memberi dasar *domein theory*, hasil riset dan kebijakan kadastral Raffles memberi gambaran tentang luas tanah dan jumlah petani yang kemudian dapat diberlangsungkan kontrak sewa-menyewa. Petani diharuskan membayar sejumlah uang sebagai ongkos sewanya kepada negara. Biaya ini dianggap sebagai pembayaran pajak atas tanah.[21] Sistem tenurial yang semula beragam bentuk sesuai hirarki feodalitasnya, berubah menjadi bentuk kepemilikan mengikuti konsep barat, yakni "*property*" atau "*eigendom*".

Pemerintahan Raffles dalam melaksanakan sistem pajak atas tanah itu sangat mengandalkan struktur lama berupa peran elite lokal. Dengan demikian, elite lokal mengalami restorasi kekuasaan setelah sebelumnya berangsur didepolitisasi oleh Daendels. Raffles juga menjual tanah dalam jumlah besar, termasuk tanah-tanah yang telah lama didiami penduduk kepada perusahaan pribadi (perusahaan partikelir). Penjualan itu disertai dengan segenap peralihan hak "feudal" kepada perusahaan itu (hak mengutip pajak dan pengerahan tenaga kerja di perkebunan).[22]

Pelaksanaan sistem pajak tanah berlangsung variatif. Secara umum dikenakan pajak secara komunal/desa (sebagaimana yang lebih dahulu diterapkan di Banten), namun di Probolinggo sis-

[20] *Ibid.* hal. 98.

[21] Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta dan Bandung: Insist, KPA, dan Pustaka Pelajar, 2000), hal. 122-123.

[22] Luiten van Zanden, *op.cit*., hal. 7.

tem itu dikenakan pada orang-perorang/perkepala. Penerapan pajak komunal menjadi sumber masalah ketika petugas pengumpul pajak menetapkan standar yang lebih tinggi. Di Pekalongan penetapan itu berakibat perpindahan penduduk.[23] Standar biaya sewa tanah yang diterapkan bersifat pajak progresif dan bukan berdasar luas lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1. Standar Biaya Sewa Tanah[24]

Lahan Sawah	
Jenis Pertama	½ hasil produksi
Jenis Kedua	2/5 hasil produksi
Jensi Ketiga	1/3 hasil produksi
Lahan Tegalan	
Jenis Pertama	2/5 hasil produksi
Jenis Kedua	1/3 hasil produksi
Jensi Ketiga	¼ hasil produksi

Di Jawa sistem sewa tanah ini dijalankan oleh Raffles pada permulaan tahun 1815. Tepatnya pada tanggal 11 Februari 1814, sistem ini diberlakukan di Banten dan Cirebon, serta di distrik-distrik di kawasan timur, melibatkan lebih dari satu juta penduduk dan setengah juta petani. Pada tahun 1815 taksiran perolehan dari pajak tanah di Banten sebanyak Rp 349.271, dengan kenaikan sebanyak 4 kali dibanding tahun sebelumnya. Namun, hanya Rp 160.211 yang diterima pemerintah.[25] Sementara dari kawasan timur, berhasil diperoleh jutaan rupiah.[26]

---

[23] D. H. Burger, *op.cit.* hal. 159.

[24] Thomas Stamford Raffles, *op.cit.* hal. 99.

[25] Lihat, John Bastin, "The Working of The Early Land Rent System in West Java", Jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 116 (1960), No. 3, hal. 305.

[26] J. S. Bastin menyebut tiga macam mata uang yang berlaku dan digunakan saat itu: Dolar Spanyol (Sp. dr), Rix Dollars, dan Rupiah Jawa (Rp). Pada masa Raffles, Sp. dr. 1 setara dengan 5 shilling Inggris, dan Rp 1 setara dengan setengah shilling. Dolar Spanyol dapat dikonversi kedalam Rupiah dengan ketentuan, Sp. dr. 1000 sama dengan Rp. 2.200. Lihat, J. S. Bastin, *The Development,* hal. x.

Tabel 2. Taksiran Pendapatan dari Sewa Tanah, 1813[27]

Daerah	Perolehan
Cirebon	Sekitar Rp. 218.736
Ulujami	Sekitar Sp. dr. 18.000-20.000
Pekalongan	Rp. 260.338
Kedu	Rp. 419.760
Grobogan, Jipang, Wirosari	Rp. 150.000
Semarang	Rp. 330.517
Demak dan Kendal	Sp. dr. 37.027
Pasuruan, Malang, Ontang	Rp. 530.000, ditambah pajak dari rumah petak: Rp. 20.000
Probolinggo, Besuki, Panarukan, Puger, Lumajang	Rp. 560.000, ditambah pajak dari rumah petak: Rp. 24.000
Banyuwangi	Rp. 52.000, ditambah pajak dari rumah petak: Rp. 6.000
Surabaya	Rp. 1.236.000, setelah dikurangi biaya operasional sekitar 14%
Gresik	Rp. 605.404
Rembang, Lasem, Tuban	Rp. 256.092
Jepara	Rp. 43.615
Juwana	Rp. 47.935
Kudus	Rp. 32.392
Pati	Rp. 105.685

Selain yang tersaji dalam tabel di atas, akibat yang ditimbulkan dari kebijakan itu yang diklaim oleh Raffles tergambarkan secara prosaik sebagaimana berikut:

[27] Diolah dari J. S. Bastin, *op.cit.*, hal 163-176

> " ...pada awal bulan Desember 1815, beberapa bulan sebelum saya meninggalkan pulau ini, saya melakukan perjalanan keliling ke berbagai provinsi untuk mengawasi secara langsung kemajuan implementasi sistem yang ada, sekaligus melihat angka kejahatan yang terjadi. Dan saya merasa puas dengan hasilnya."[28]

Berdasarkan berbagai laporan para bupati, disimpulkan bahwa kebijakan itu memberi dampak pada kemajuan di bidang pertanian, turunnya angka kejahatan, peningkatan produksi, perbaikan infrastruktur (terutama transportasi), dan perluasan lahan garap. Laporan-laporan itu mencatat berbagai kemajuan di beberapa kota di Jawa seperti Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kedu, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, dan Pasuruan.[29]

Periode Raffles memberi gambaran bagaimana setiap kebijakan yang lahir dari suatu rezim didasarkan pada riset yang mendalam. Hal ini menjelaskan bagaimana pertautan pengetahuan dan kekuasaan yang saling terkait dan berjalin berkelindan membentuk diri. Raffles yang menjadi anggota dari *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (Masyarakat Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan),[30] dengan kegairahan era liberal saat itu, meletakkan dasar-dasar sistem registrasi pertanahan. Sistem itu memberi dua arti: negara sebagai tuan tanah baru menggantikan penguasa tradisional sebelumnya; dan terbukanya aksesibilitas tanah oleh siapapun yang mampu membayar uang sewa (pada kenyataannya juga membeli) kepada negara.

---

[28] Thomas Stamford Raffles, *op.cit.* hal. 100

[29] *Ibid.*

[30] Sejarah riset saintifik yang dilakukan oleh orang-orang Eropa di kawasan tropis-Indonesia, dan kaitannya dengan praktik kolonialisme, serta berbagai lembaga yang muncul dalam kaitannya dengan hal itu, telah disketsakan oleh Peter Boomgaard dalam, "The Making and Unmaking of Tropical Science Dutch Research on Indonesia, 1600-2000", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI)*, 162-2/3 (2006), hal. 191-217. Menurut Boomgaard, *Bataviaasch Genootschap* lahir pada tahun 1778 pada era revolusi ilmu pengetahuan kedua. Ia dicirikan pada semangat "Enlightenment" yang pada saat bersamaan didirikan juga Linnean Society di London. *Bataviaasch Genootschap* beranggotakan para borjuis amatir seperti pengacara, tokoh Protestan, para birokrat dan pekerja VOC.

Pada gilirannya, ketika pemerintah Raffles memerlukan biaya tinggi guna keberlangsungan roda pemerintahan di India, ia membuat keputusan menjual tanah, termasuk desa-desa dan penduduknya yang mendiami luasan tanah itu, kepada pihak swasta. Pengusaha swasta menerima "berkah" atas segenap peralihan hak "feudal" yang diberikan pemerintah, baik menyangkut hak mengutip pajak, pengerahan tenaga kerja, dan sebagainya. Tercatat di Karesidenan Batavia, Karawang, Semarang dan Surabaya, tanah-tanah dijual kepada pihak swasta (Tionghoa).[31]

Era liberal telah dimulai dengan nyata. Problem ketersediaan tanah telah dipecahkan, tinggal bagaimana faktor produksi lain dipersiapkan oleh rezim penerus: tenaga kerja murah. Ekonomi liberal Raffles ditandai dengan regulasi pertanahan dalam rangka menghidupkan "aset-aset yang mati" sebab dikuasai dalam sistem feodal/adat, satu gagasan yang menemukan bentuknya kembali pada pergantian abad 20-21 melalui tokohnya, Hernando de Soto.[32]

3. Re-depolitisasi birokrasi van der Capellen (1816-1826)

Tidak banyak kajian yang dilakukan oleh van der Capellen menyangkut persoalan pertanahan. Ia memperkenalkan kembali ke Jawa gagasan negara dengan misi "*enlightenment*". Ideologinya bisa dilacak balik dalam tahun 1780-an, bersamaan dengan

---

[31] J. S. Bastin, *op.cit.*, hal 72-88

[32] Cara bagaimana "injecting life into dead capital" adalah dengan mendata kepemilikan tanah dan batas-batasnya. Gagasan de Soto berkisar seputar bagaimana kepastian hukum kepemilikan (*Property Law*) bagi kapitalisme; kendala-kendala birokrasi bagi kewirausahaan (*Barriers to Entrepreneurship*), sehingga perlunya reformasi sistem perundang-undangan yang ada (*Legal System Reform*). Dalam sistem ekstralegal, kepemilikan dan batas-batas tanah tidak dapat dipastikan, sehingga menyulitkan terintegrasi ke dalam sistem pasar. Maka lebih dahulu pemerintah harus mencari tahu mengapa dan bagaimana konvensi lokal bekerja serta seberapa kuat eksistensinya. Jangan sampai otorita pertanahan lebih tidak tahu dibanding "gonggongan anjing yang menandai batas wilayah milik majikan masing-masing". Lihat, Hernando de Soto, "Listening to the Barking Dogs: Property Law Agains Poverty in the non-West", *Focaal-European Journal of Anthropology,* No. 41, 2003, hal. 182.

terjadinya Revolusi Perancis. Negara baru yang hendak didirikannya haruslah bercita-cita egalitarianisme, dihapuskannya hak-hak feodal, dan berbasis konsep warga negara. Kesemuanya diinspirasi oleh semangat *enlightentment* yang dibawa Revolusi Perancis.

Gagasan Raffles melalui slogannya yang terkenal, "*come into direct contact with the people*" dan prinsip-prinsip tentang humanitarian pada abad 18, memberi inspirasi van der Capellen akan gagasan filantropisnya. Gagasan liberal dan humanitarian saat itu sangat kuat dalam mempengaruhi opini publik sehingga setiap usulan kebijakan harus diuji komitmen "*interest of the people*"-nya, termasuk juga sistem kebudayaannya.[33]

Van der Capellen melanjutkan kebijakan periode sebelumnya, yakni menempatkan birokrasi sebagai "pegawai negeri sipil" dengan tugas mengumpulkan data statistik hampir semua aspek kehidupan ekonomi dan masyarakat. Pemerintahannya memberi proteksi kuat terhadap masyarakat Jawa di hadapan para pengusaha Cina dan Barat. Ia sangat kritis pada situasi "perkebunan swasta" yang sering mengabaikan hak-hak petani. Pemerintahannya memperkenalkan kontrak penjualan produk langsung ke petani, dimana sebelumnya harus melalui pemuka desa. Gagasan ini untuk memperlemah posisi elite lokal dan memperluas kemampuan petani terhadap pasar bebas.[34]

Van der Capellen menerapkan kebijakan penjaminan pada masyarakat Jawa agar mereka dapat memetik hasil dari tanah mereka secara bebas, asal dengan jaminan membayar sewa tanah. Melalui kebijakan lanjutan periode sebelumnya ini, ia berusaha mengurangi pengaruh orang Eropa di Jawa, sehingga diharapkan masyarakat Jawa dapat terdorong mengintegrasikan diri dengan aktivitas ekonomi liberal dalam menghasilkan produk. Dengan itu mereka dapat dengan lancar membayar sewa tanah kepada pemerintah. Pada tahun 1925 kebijakan ini dinilai gagal, bukan saja oleh sebab adanya Perang Jawa namun secara internal

[33] B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, *Selected Writing I* (Bandung: W. Van Heve Ltd, 1955), hal. 186.

[34] Uraian ini diringkas dari Luiten van Zanden, *op.cit.*, hal. 7-8.

dikarenakan merosotnya harga produk dari Jawa di pasaran dunia.[35]

4. *Cultuurstelsel* dalam perdebatan

Kebijakan *cultuurstelsel* paling banyak mendapat minat para sejarawan, baik sejarawan Indonesia maupun asing. Masing-masing tidak jarang menghasilkan temuan dan kesimpulan yang saling bertolak belakang. Perbedaan kesimpulan tersebut disebabkan oleh keragaman perspektif yang dipakai, beban sejarah yang mengendap di masing-masing sejarawan, aspek apa dan lokalitas mana yang dikaji, lapis masyarakat mana yang dianggap mendapat pengaruh/dampaknya, kapan studi dilakukan, dan data apa yang digunakan. Kesimpulan pokok kajian itu secara singkat dapat digolongkan dalam dua kutub: di satu pihak sistem itu dinilai negatif, di sisi lain dianggap positif. Pihak pertama menerjemahkan sistem itu sebagai *Sistem Tanam Paksa,* pihak kedua cukup menyebut dengan *Sistem Tanam*.

Robert van Niel mencoba membuat pemetaan umum tentang historiografi *cultuurstelsel*.[36] Periode pertama mencatatkan beberapa nama. Van Soest dan van Deventer yang menulis pada tahun 1860-an, menilai secara kritis dengan menyatakan bahwa sistem itu berdampak negatif bagi penduduk. Pierson dan Cornets de Groot mengutuk *cultuurstelsel*, sebagaimana van Vollenhoeven yang dengan cermat melihat bahwa sistem itu telah menghancurkan sistem kepemilikan tanah. Konsep kepemilikan individu sebelum *cultuurstelsel* diakui dalam masing-masing hukum adat, kemudian berubah menjadi kepemilikan kolektif dalam bentuk pengalokasian tanah yang dikelola oleh desa (1/5 diperuntukkan tanaman ekspor). Meski dalam periode yang sa-

[35] Robert van Niel, "Fungsi Sewa Tanah pada Masa Sistem Tanam Paksa di Jawa", dalam Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa* (Jakarta: LP3ES, 2003), hal 4-5.

[36] Lihat, Robert van Niel, "Warisan Sistem Tanam Paksa bagi Perkembangan Ekonomi Selanjutnya", Robert van Niel, *Ibid,* hal. 261-265.

ma, Clive Day menilai positif sistem tersebut. Penilaiannya adalah sebuah perkecualian.

Pada periode kedua, terdapat nama de Kat Angelino yang menilai secara lunak sistem itu. J.S. Furnival dalam sebuah *magnum opus* dengan analisa ekonomi liberalnya memberi uraian baik positif dan negatif. Sementara D. H. Burger mengakui bahwa Sistem Tanam Paksa telah mendorong banyak perubahan yakni upaya defeodalisasi dan membuat desa menjadi terbuka oleh sistem ekonomi Barat. Catatan statistik Mansvelt yang kemudian dilanjutkan oleh Creutzberg menyajikan berbagai kemajuan yang disebabkan sistem tersebut. Bahkan tanpa ragu C. Gerretson menyatakan bahwa sistem itu merupakan "kemurahan hati terbesar" yang dilimpahkan oleh negeri Belanda kepada tanah Hindia.

Reinsma yang menulis pada tahun 1955 mewakili contoh pada periode ketiga. Ia mengangkat gagasan Sistem Tanam Paksa yang meninggalkan perbaikan yang cukup mencengangkan, terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat Jawa. Fasseur dan van Niel sendiri mengakui bahwa pada mulanya ia dipengaruhi oleh gagasan-gagasan periode kedua, namun selanjutnya mereka menyimpang dari gagasan awal seiring dengan data baru yang ditemukan dan sejumlah pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul.

Meski begitu, penghampiran terhadap kasus lokal melahirkan kesimpulan bahwa apa yang disebut dengan Sistem Tanam Paksa itu dalam kenyataanya di lapangan membentuk berbagai wajah yang variatif sesuai dengan kebijakan lokal (melalui residen dan pejabat lokal lainnya), keragaman ekologis, dan susunan masyarakatnya. Ia bukan sistem yang tunggal dan seragam dari tingkatan gagasan di pusat (oleh Van Den Bosch) sampai dengan pelaksanaannya di berbagai lokasi di lapangan. Robert van Niel menyimpulkan *pertama*, sistem itu sesungguhnya adalah rangkaian akomodasi setempat dengan kebiasaan peraturan lokal; *kedua,*, sistem itu telah memompa banyak uang ke tengah masyarakat. [37]

[37] *Ibid,* hal. 254.

Berbagai perdebatan itu dapat kita sebut sebagai Debat Agraria Pertama di Hindia Belanda. Perdebatan itu terkait dengan bagaimana sumber-sumber agraria diolah dalam aktivitas ekonomi semi-merkantilistik, pembentukan modal, peningkatan produksi dan pendapat negara, tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Berbagai isu itu menggiring pada kesimpulan yang bertolak belakang, negatif dan positif.

Memberi penyimpulan pada berbagai isu itu, Robert van Niel dengan tegas menyatakan bahwa dari segi *pembentukan modal,* Sistem Tanam Paksa hanya memberi keuntungan bagi pemodal besar: penduduk desa bertanah luas, pengusaha perkebunan swasta yang mengkontrak pada pemerintah maupun penguasa tradisional (di *vorstenlanden*, misalnya), dan pemilik tanah partikelir.

Dengan demikian dapat dipahami mengapa pada masa ini tidak terjadi pembentukan modal domestik yang mampu menggerakkan roda industrialisasi pedesaan. Berbagai keuntungan yang diperoleh dari sistem itu sebagai sebuah kesempatan baru, hilang begitu saja (*missed opportunity*). Hal senada juga dinyatakan oleh Howard Dick bahwa kegagalan itu disebabkan pertumbuhan industri awal yang terlalu menyebar sehingga tidak mampu melakukan aglomerasi ekonomi yang signifikan. Pasar domestik terlalu kecil untuk menjadi *leading sector* baru, sementara rezim perdagangan kolonial menguasai berbagai bentuk dorongan substitusi impor, setidaknya sampai dengan tahun 1930-an.[38]

Demikian pula menyangkut *tenaga kerja murah.* Sistem Tanam Paksa berjalan dengan cara mendasarkan pada sistem lama yang telah ada terkait dengan pengerahan tenaga kerja. Tidak hanya mempertahankan kerja *corvée*, namun juga menambah

[38] H. W. Dick, "Nineteenth-century Industrialization: A Missed Opportunity?", dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *New Challenges in The Modern Economic History of Indonesia: Proceeding of the First Conference in Indonesia's Modern Economic History, Jakarta, October 1-4, 1991* (Leiden: Programme of Indonesian Studies, Leiden University, 1993), hal. 124, atau yang telah diterjemahkan, H. W. Dick, "Industrialisasi Abad ke-19: Sebuah Kesempatan yang Hilang?", dalam Thomas J. Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES, 2000), hal. 178.

dengan pelayanan tanam oleh pekerja pedesaan bagi tanaman dagang pemerintah.

Akumulasi kapital yang diperoleh dari pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di pedesaan selama kurang lebih 40 tahun mengalami *backwash* atau tersedot kembali ke negeri induk Belanda. Ditambah lagi dengan performa sistem yang lebih memberi gambaran *betting to the strong,* sehingga beberapa kelompok sosial lapis ataslah yang mendapat keuntungan darinya.

Ekonomi pedesaan cenderung memberi kesempatan pada kelompok atas sehingga bertambah kuat dan mengorbankan kepemilikan tanah pribadi warga desa. Alih-alih mempersempit perbedaan sosial di desa, Sistem Tanam Paksa justru semakin mempertajamnya. Ketika sistem memperkuat kembali peranan elite tradisional desa, desa menjadi basis produksi dan unit subsisten masuknya Jawa dalam perekonomian dunia. Desa telah menopang negara induk dan keberlangsungan negara jajahan. Sekitar 823 juta gulden sepanjang 40 tahun itu telah masuk ke dalam kas Kerajaan Belanda. Pengintegrasian desa-desa di Jawa ke dalam sistem ekonomi pasar membuat *exsploitative mode of colonial production* berjalan semakin efektif, demikian kalimat penutup Robert van Niel dalam bukunya.[39]

Pedesaan Jawa diposisikan sebagai sumber ekstraksi atas surplus kapital (*extraction of capital surplus*) bagi negeri Belanda. Sebagaimana ungkapan Fasseur, "Dengan *Cultuurstelsel*, van den Bosch menemukan emas di Jawa seperti Musa mengeluarkan air dari bebatuan di padang gersang".[40] Jawa lebih menjadi sumber penyuplai komoditas dari pada pasar bagi barang-barang Eropa.[41] *Cultuurstelsel* benar-benar telah memberi berbagai perubahan, namun bukan kemajuan pada pedesaan Jawa (*changes without progress*), suatu gambaran yang terulang kembali pada satu abad

[39] Robert van Niel, *op.cit.,* hal. 293.

[40] Fasseur, hal. 24, dikutip dari Andrew Mack, *Rethinking the Dynamics of Capital Accumulation in Colonial and Post-Colonial Indonesia: Production Regulation,* Disertasi Ph.D. pada Departemen Ekonomi, Universitas Sydney, 2001, hal 62.

[41] Andrew Mack, *Ibid.* hal 71-72.

berikutnya. Sajogyo merangkum perubahan yang terakhir ini dalam istilah "*modernization without development".*

5. Ekonomi liberal, riset tentang penguasaan tanah dan penegasan prinsip "*domein verklaring"*

Di parlemen Belanda, terjadi pertarungan gagasan antara pihak konservatif dan liberal terkait pilihan keterlibatan pihak swasta di tanah jajahan. Apakah pihak swasta boleh ikut andil dalam melakukan aktivitas ekonomi di negara jajahan, ataukah mempertahankan sistem lama melalui *cultuurstelsel* sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak pertama. Perdebatan dimenangkan pihak liberal dengan dikeluarkannya *Regerings Regelmen* (RR) 1854. Dalam pasal 62 disebutkan bahwa pemerintah diperbolehkan menyewakan tanah kepada swasta yang akan ditentukan melalui ordonansi.

Peraturan di atas mempunyai maksud ganda. *Pertama,* adanya pengakuan hak *eigendom* (milik mutlak) pada masyarakat. Dengan kepemilikan itu dimungkinkan dilakukannya transaksi sewa-menyewa dengan pihak luar (perusahaan swasta). *Kedua,* tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai milik pribadi statusnya menjadi tanah milik negara yang dapat disewakan kepada perusahaan swasta (hak *erfpacht*). Diusulkan oleh Gubenur Jenderal saat itu, van der Putte, bahwa penyewaan dapat dilakukan dalam jangka waktu 99 tahun. Usulan ini ditolak bahkan oleh mitra liberalnya di parlemen.[42]

Guna memuaskan kedua belah pihak, pemerintah memutuskan melakukan penelitian hak-hak atas tanah pada masyarakat pribumi. Maka keluarlah Dekrit Pemerintah Hindia Timur No. 2 dan 34, Tahun 1867, yang berisi 26 pokok-pokok perma-

[42] Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan KPA, 2000), hal. 125-126. Bandingkan, Hiroyoshi Kano, "Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa pada Abad XIX", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hal. 33-34.

salahan yang perlu diteliti. Riset dilakukan di wilayah Jawa dan Madura selain Jakarta, Kedu dan *vorstenlanden.* Penelitian berlangsung satu tahun (1868-1869), dan hasilnya terhimpun dalam 3 jilid yang terbit dalam waku yang berbeda. Hasil akhir penelitian ini diberi judul *Eindresume van het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grond* (Resume Akhir Hasil Penelitian tentang Hak-hak atas tanah Masyarakat Pribumi), atau dikenal dengan *Eindresume.*

Di antara berbagai pertanyaan penting dalam survei adalah tentang hak pribumi atas berbagai kategori tanah, kepemilikan secara individual atau komunal, darimana sumber hak tersebut berasal, jaminan dalam mempertahankan hak, berlaku-tidaknya suatu hak, pemindahtanganan hak, yang kesemuanya ini memberi kaitan pada bentuk dan pemerintahan desa.[43]

Secara singkat, penelitian itu menyoroti sistem tenurial dan *tenurial security* dan jejaring sosial yang terajut dari hubungan antara manusia dengan manusia yang berbasiskan pada sumber-sumber agraria (tanah). Hasil penelitian memberi potret keragaman sistem tenurial yang ada. Kepemilikan baik komunal maupun individual ditemukan. Akan tetapi, hasil akhir dari riset itu hadir terlambat setelah kebijakan ekonomi liberal dikukuhkan melalui *Agrarische Wet* tahun 1870. Aturan ini diundangkan melalui Lembaran Negara (*Staadsblad*) No. 55 Tahun 1870, disusul dengan aturan No. 118, 1870, yang di dalamnya terdapat pernyataan *domein verklaring,* "bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, baik secara individual ataupun komunal, maka tanah itu menjadi *domain*/milik negara".[44]

Di satu sisi, terdapat kepastian hak kepemilikan tanah pada masyarakat pribumi, di sisi lain kebijakan itu membuka peluang investasi modal Barat bekerja di perkebunan swasta. Masyarakat tani menerima pemasukan dari biaya sewa perusahaan atas tanah

[43] Uraian tentang hasil riset ini diringkas dari Hiroyoshi Kano, *Ibid.*

[44] M. Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakjat Indonesia* (Yogyakarta: Pewarta, 2009), hal. 19.

mereka sekaligus mendapatkan keuntungan dengan mempekerjakan diri di perusahaan itu sebagai buruh perkebunan.

Pada komoditas tertentu, tebu misalnya, buruh bekerja di perkebunan dengan tetap menempati rumah asal mereka tinggal (desa). Berbeda dengan komoditas kopi yang mengharuskan mereka terpisah dari tempat tinggal semula dan menjadikan mereka tinggal di huma-huma atau *enclave* di sekitar perkebunan yang dibuka. Dalam periode inilah dicatat perubahan status mereka yang semula petani menjadi buruh (*from peasant to labor*).[45]

Dengan demikian, berakhirlah *cultuurstelsel* yang digantikan dengan sistem perkebunan swasta, yang kemunculannya sebenarnya telah dimulai sebelum tahun 1870. Sampai dengan tahun 1860, dilihat dari segi tenaga kerja yang terserap, produksi, dan bidang tanah yang digunakan, perkebunan swasta itu keberadaannya cukup penting.[46] Tahun 1870 merupakan titik ekskalatif di mana semakin ekstraktifnya perekonomian Barat melalui liberalisasi perekonomian di Jawa.

Cultuurstelsel telah memberikan dasar-dasar bagi kontrol sosial dan tenaga kerja yang berarti bagi perkembangan perusahaan perkebunan. Dalam periode inilah kita melihat bahwa kebijakan pengelolaan dan penguasaan atas sumber-sumber agraria didasarkan pada pertimbangan politik, dan bukannya hasil riset, yang digerakkan kepentingan ekonomi liberal. Undang-undang Agraria tahun 1870 merupakan titik tolak sejarah pertanian Barat di Hindia Belanda. Dalam konteks ekonomi politik, peraturan itu menciptakan kondisi bagi akumulasi kapital dengan cara merongrong kontrol masyarakat atas sumber-sumber produksi.

Peraturan itu setidaknya memberi tiga arti penting. *Pertama*, memfasilitasi ambisi perusahaan untuk mentransformasikan organisasi produksi Hindia Belanda, dari sistem kontrol negara

---

[45] W. F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition, A Study of Social Change* (Bandung: Sumur Bandung, 1964 [cetakan kedua]), hal. 80-81.

[46] Vincent J. H. Houben, "Perkebunan-perkebunan Swasta di Jawa Abad ke-19", dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *op.cit.,* hal. 97-98.

dengan cara menggunakan hirarki tradisional untuk proses ekstraksi surplus, menuju sistem dimana perusahaan swasta dapat secara langsung melakukan pengambil-alihan (*appropriation*). *Kedua,* kondisi semacam itu mengakibatkan bergantinya bentuk kontrol ekonomi ala *Sistem Tanam* menjadi kontrol ekonomi yang bersifat kapitalis oligopolistik. *Ketiga,* transisi itu mencerminkan kuatnya penegasan kembali kontrol ekonomi dan politik perusahaan swasta.[47]

Benar bahwa ekonomi liberal memberi dampak pada peningkatan populasi dan pengenalan ekonomi uang pada penduduk pribumi. Akan tetapi sedikit bukti yang menunjukkan bahwa pada masa ini standar hidup petani mengalami kenaikan. Investasi modal dalam perkebunan-perkebunan besar di bawah sistem Barat tidak mengakibatkan perubahan mendasar struktur sosial masyarakat di Jawa. Boeke dengan tepat menggambarkan periode itu sebagai "*static expantion*".[48] Satu kesimpulan yang tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya.

6. Politik etis: Antara balas budi dan "pembentukan" negara Hindia Belanda

Ideologi yang dianut pemerintah kolonial dalam upaya "membangun" negeri jajahannya selama periode "liberal" adalah berpola "trickle down effect". Diasumsikan bahwa terbukanya kesempatan investasi bagi perusahaan perkebunan swasta akan menggerakkan perputaran kapital yang dengan sendirinya menciptakan modal domestik dan memberi kesempatan bagi terserapnya tenaga kerja (buruh perkebunan). Bagi pemerintah, peningkatan produksi akan memberi keuntungan bagi kenaikan pajak, sementara bagi penduduk adalah peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan.

Akan tetapi, keyakinan di atas tidak terbukti. Penduduk Jawa tidak berhasil meng-*copy* metode perusahaan Barat sebagaimana yang diharapkan. Pernyataan *mindere welvaart* (merosotnya

[47] *Ibid.* hal. 90-91.
[48] Dikutip dari W. F. Wertheim, 1964, *op.cit.*, hal. 82.

kesejahteraan) berlaku di Jawa, dan diakui oleh Ratu Wilhelmina.[49] Kemerosotan tersebut merupakan "konsekuensi" dari dipisahkannya penduduk Jawa dari sumber-sumber produksi mereka. Banyaknya jumlah korporat perkebunan tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.[50] Karenanya, akar persoalannya semestinya dicari dari sebab-sebab yang bersifat struktural. Kemerosotan itu bukan suatu "kondisi" yang lazimnya dikaitkan dengan persoalan mental, ketidakmampuan mengakses modal, pengetahuan, dan pasar produksi.

Gagasan "Politk Etis" diturunkan dari kenyataan sosial-ekonomi saat itu yang dialami oleh penduduk pribumi, selain pengaruh ide-ide doktrin Calvinis. Basis moral inilah yang dikemukakan oleh Gubernur Jenderal Idenburg, setelah ia tidak menemukan argumen yang tepat tentang kaitan antara kondisi finansial negeri Belanda dan tanah jajahan, ketika yang terakhir ini menderita kemerosotan, sementara di negeri Belanda menerima saldo. Di sinilah gagasan "hutang budi" (*een eereschuld*) muncul. Di dalam pidatonya tanggal 21 November 1901, Idenburg menyatakan,

> "Saya ingin mengatakan demikian: jelaslah bahwa Hindia Belanda mengalami kondisi sulit dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan urgen. Negeri Belanda telah mengingatkan dirinya, bahwa tidak berapa lama dalam dekade-dekade lalu, negeri induk ketika mengalami penderitaan telah ditolong oleh negeri jajahannya, dan biaya yang tersisa tidak mencukupkan kebutuhan penduduk pribumi Hindia".
>
> ".....bukan demi meningkatkan kepemilikan kita, kekuasaan kita, kehormatan kita, juga bukan kapital kita di negeri kolonial ini, akan tetapi demi kemajuan penduduk Pribumi".

---

[49] *Ibid.*

[50] Jumlah korporat perkebunan naik tajam dari 1500 (tahun 1890) menjadi 2500 (1913), peningkatannya hingga 60%. Setiap korporasi memiliki jumlah perkebunan yang variatif: 1, 3, hingga 20 perkebunan. Lihat J.N.F.M. á Campo, "Munculnya Perusahaan Korporat di Indonesia pada Masa Kolonial, 1893-1913", dalam J. Thomas Lindblad (Ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: PSSAT-UGM dengan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 96.

> "Juga bukan egoisme prinsip dasar kebijakan kolonial kita, namun motivasi lebih tinggilah yang menguasainya. Bukan kekuasaan sebagai dasar legalnya, namun misi moral demi kemajuan penduduk, yang bukanlah setengah spesies dari penduduk Barat, namun mengubahnya dengan menempatkan mereka dalam "satu organisme kemanusiaan (*single organism of humanity*)". [51]

Mengomentari pidato itu, van Deventer menulis dalam *De Gids,* LXVI (1902), bahwa gagasan itu sejalan dengan keyakinan Dr. Kuyper yang dinyatakan pada 22 November 1900, ketika ia mendebat dokumen penyusunan anggaran Hindia tahun 1901. Keyakinan ini juga diikuti oleh van Deventer.[52]

Periode industrial asing harus segera ditransformasikan ke dalam periode sosial ekonomi. Artinya, harus ada pembagian kekayaan dari pemanfaatan atas tanah kepada penduduk pribumi agar tidak lagi jatuh ke tangan kapital asing. Untuk itu, level pengetahuan dan kemampuan penduduk harus ditingkatkan. Dilakukan penguatan ekonomi dan pembentengan kepercayaan diri, tanah yang dianggap keramat dan subur harus lebih diproduktifkan, reformasi moral, dan dihapuskannya penyalahgunaan-penyalahgunaan yang tidak menyenangkan.

Upaya yang ditempuh dalam mewujudkan gagasan di atas adalah penyelenggaraan pendidikan. *Pendidikan* dasar diperluas untuk kalangan elite penduduk, pegawai terbaik diberi pelatihan, demikian juga para teknisi, pengacara, dokter, ahli peternakan, ahli pertanian, pedagang, dan nelayan. Bagi massa rakyat, *kerajinan tangan* harus dibangkitkan dan distimulasi, seni rakyat, seperti halnya kebutuhan bunga, harus ditanam dengan penuh kecintaan. *Pajak* dibayarkan dengan uang dan disesuaikan berdasar persetujuan dengan kapasitas keuangan pribumi. Sistem *kredit* yang terorganisir harus memfasilitasi pembangunan pertanian. Pertanian penduduk harus diperluas melalui pembangunan *irigasi* yang baik. Tanah yang terancam banjir harus dicegah.

---

[51] Dikutip dari C. Th. van Deventer, "A Welfare Policy for The Indies", dalam W.F. Wertheim (ed.), *Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Practice* (The Hague: W. Van Hoeve, 1961), hal. 258.

[52] Uraian didasarkan pada *Ibid.,* hal. 260-262.

Informasi dan diseminasi pengetahuan praktikal (*penyuluhan*) harus diberikan, dan mereka yang telah menguasainya lantas menularkan melalui percontohan plot kepada kawannya.

Apakah kebijakan "Politik Etis" berhasil membentengi penduduk di dalam pertarungan ekonomi yang ada saat itu? Ada penilaian, bahkan periode itu diawali dengan harapan yang tinggi, sedikit krisis dengan beberapa kali menikmati *booming*, namun berakhir dengan banyak keluhan bahwa kesejahteraan rakyat justru mengalami kemerosotan. W. F. Wertheim menganalisis beberapa sebab dengan mencoba menelisik bagaimana karakter pengaruh Barat itu terjadi.[53]

Pertama, pengusaha perkebunan tidak mempunyai ciri eksponen "free enterprise". Ketika terjadi krisis, posisinya diambil alih oleh pelaku yang dipekerjakan oleh korporasi perusahaan perkebunan, perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Mereka ini tergantung pada bank perkebunan (*cultuurbanken*). Singkatnya, terjadi kartelisasi perusahaan dengan menikmati nepotisme negara. Akibatnya, terjadi sentralisasi Jawa, dan ketergantungan "outer island" pada pedagang asing dan pengusaha Barat.

Kedua, dalam banyak kasus, terintegrasinya ke dalam ekonomi uang mengakibatkan proses pemiskinan, ketika sistem penguasaan tanah menjadi tidak pasti.

Ketiga, yang mengguncangkan adalah sedikit demi sedikit masyarakat Jawa menuju ke arah diferensiasi. Modernisasi atas suprastruktur masyarakat Barat benar-benar telah membuka kesempatan pekerjaan baru bagi orang Indonesia. Bahkan ekspansi bisnis dan fungsi pemerintahan menciptakan kesempatan pekerjaan masyarakat, baik untuk posisi administratif ataupun teknis. Media transportasi menguntungkan para mekanik dan sopir. Akan tetapi secara keseluruhan, perjuangan ekonomi tetaplah sulit bagi rakyat Indonesia. Untuk menjadi kelas menengah seringkali penuh halang rintang dengan adanya orang asing—utamanya Cina. Mereka ini memanfaatkan hubungan se-

[53] W. F. Wertheim, 1964, *op.cit.* hal. 85-86

cara menyeleweng dengan korporasi yang lebih besar, didasarkan pada sistem klan, berkeanggotaan pemilik modal besar dan pengetahuan tinggi.

Keempat, pada periode ini, investasi berlanjut dalam pertanian skala luas dan pada sektor pertambangan. Pola ekonomi berorientasi hulu, dan Indonesia diposisikan sebagai penyuplai "*raw material*", sehingga tidak memberi resonansi ekonomi pada sektor domestik.

Kelima, produktivitas pertanian ditingkatkan melalui pelayanan irigasi dan sarana lain. Emigrasi ditempuh sebagai solusi atas kelebihan populasi. Padahal sebenarnya bukan semata masalah "*over population*" atau kelebihan tenaga kerja, tapi yang lebih nyata adalah "*under production*". Yang terakhir ini terkait dengan ketersedian sumber-sumber produksi dan pembentukan modal. Seharusnya yang dilakukan adalah penciptaan industrialisasi pedesaan bukan dengan kebijakan yang sifatnya paliatif yang tidak memberi efek mendasar.[54] Dalam kenyataannya, irigasi lebih banyak menguntungkan perusahaan tebu. Demikian juga sistem jalan dan stasiun-stasiun percobaan. Secara tegas, Wertheim dalam menilai periode ini menyatakan, bahwa secara singkat tidak ada peningkatan bersifat permanen dalam hal kesejahteraan umum.

Pada periode ini hasil pembangunan pedesaan dalam kenyataannya jauh dari yang diinginkan. Berbagai sebab kegagalan itu dapat dikonfirmasi ulang dalam periode-periode berikutnya.

Perjalanan panjang pembangunan (pedesaan) semasa Kolonial hingga awal abad ke-20 memberi pemahaman bahwa terbentuknya *nation-state* Hindia Belanda adalah hasil diperhadapkannya dengan pertumbuhan kapitalisme. Sebagaimana dipraktekkan oleh pemerintah kolonial melalui berbagai eksperi-

---

[54] M. A. Jaspan, "Persoalan Transmigrasi: Obat Mujarab atau Jalan Buntu?", dalam Jaspan, M. A, *Social Stratification and Social Mobility in Indonesia, A Trend Report and Annotated Bibliography* (Jakarta: Penerbit Gunug Agung, 1960) hal. 37-38. Bahkan Jaspan berpendapat bahwa kebijakan transmigrasi telah gagal dalam mengurangi tekanan penduduk di Jawa. Terdapat transmigran yang kembali namun tidak tercatat oleh lembaga resmi pemerintah. Kebijakan transmigrasi hingga kini menghasilkan "pemindahan kemiskinan" pedesaan di lokasi yang dituju, Sumatera Selatan.

men kebijakannya (mulai dari periode VOC, Daendels, Raffles, van Der Capellen, *Culttuurstelsel*, ekonomi liberal, hingga Politik Etis, sebagaimana uraian di atas), pembentukan negara (*state formation*) adalah bagian dari pemantapan aktivitas ekonomi internasional di Hindia Timur.

Tabel 3. Penggunaan Tanah sampai dengan Tahun 1938[55]

1.	Tanah Jawa		13.212.400 ha
	a. Untuk *onderneming* asing:		
	– tanah partikelir	498.829 ha	
	– tanah *erfpacht* pertanian besar	590.858 ha	
	– tanah *erfpacht* pertanian kecil	11.510 ha	
	– sewa dari rakyat	89.624 ha	
	– tanah konversi (Yogya, Surakarta)	59.965 ha	
	b. Tanah pertanian rakyat :	3.370.600 ha	
	– sawah		
	– ladang dan pekarangan [sawah yang sekian itu dikurangi dengan persewaan tanah untuk *onderneming*]	4.692.000 ha	
	c. Berupa hutan	3.106.100 ha	
	d. Tambak, dll	1.057.400 ha	
2.	Sumatera Timur		3.370.600 ha
	a. Tanah *onderneming*	888.000 ha	
	b. Tanah pertanian rakyat	252.000 ha	
	c. Hutan cadangan	519.000 ha	
	d. Hutan rimba liar	1.372.000 ha	
3.	Daerah Bali	-	
	a. *Onderneming* asing [karet, randu, kelapa, kopi, merica, akar tuba]	2.559,28 ha	
	b. Tanah pertanian rakyat	347.700 ha	
	– sawah	96.400 ha	
	– tegalan, dengan tanaman umur panjang	155.000 ha	
	– kebun kopi	26.000 ha	
	– kelapa	63.000 ha	138 ha
	– tanaman lain-lain	7.300 ha	214.292 ha
	c. Tanah pegaraman		
	d. Hutan cadangan, jurang dan *vrije landsdomein*		

[55] M. Tauchid, *op.cit.,* hal. 206-207

Ketika Belanda telah memutuskan membuka Hindia Timur untuk ekonomi internasional dan pasar bebas melalui berdirinya perusahaan-perusahaan yang dilindungi oleh Undang-undang Agraria 1870 dan berbagai aturan lainnya, maka "syarat dan pelengkap" bagi berdirinya negara guna menjamin aktivitas niaga itu segera diciptakan.

Dalam proses penciptaan negara–bangsa itu, cara-cara yang ditempuh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Malcolm Caldwell dan Ernst Utrecht,[56] adalah *pertama*, perlunya modal ekonomi para pengusaha perkebunan dan pengusaha pertambangan untuk membeli peralatan, menggaji buruh dan menopang mereka, sampai keuntungan yang memadai mulai bertambah. *Kedua*, modal sosial: jalan, jawatan kereta api, pelabuhan, rumah sakit, sekolah dan segala kebutuhan infrastruktur yang sangat penting untuk melayani investor dan administrasi. *Ketiga*, impor untuk segala jenis barang yang dibutuhkan: mulai dari mesin, perkakas, baja dan berbagai tipe barang modal lainnya untuk orang Eropa dan barang-barang konsumsi mewah untuk penduduk kulit putih. *Keempat*, dan ini yang paling penting karena kegagalan di bidang ini akan membahayakan bidang lainnya (jika bukan menutup seluruh opsi itu), yakni pasukan, mesiu dan dana yang dibutuhkan untuk menciptakan *Rust en Orde.* Maka dengan konfigurasi itu sempurnalah sebuah bentuk negara yang kita kenal dengan Hindia Belanda, suatu cikal bakal yang kelak menjadi negara Indonesia![57]

---

[56] Lihat Malcolm Caldwell dan Ernest Utrecht, *Indonesia: An Alternative History*, (Sydney: Alternative Publishing Co-operative Limited, 1976), terutama Bab III.

[57] Cara pandang kedua penulis dalam melihat sejarah Indonesia dengan menghadapkannya pada pertumbuhan kapitalisme sangatlah menarik. Penulis menunjukkan bagaimana praktik pemerintah kolonial melalui berbagai eksperimen kebijakannya (mulai dari periode VOC, Daendels, Raffles, van Der Capellen, *Cultuurstelsel,* Ekonomi Liberal, Politik Etis, hingga ekonomi Orde Baru) adalah bagian dari pemantapan aktivitas ekonomi kapital (internasional), dan dalam konteks inilah negara Indonesia dibentuk (*state formation*). Berbagai kebijakan itu merupakan "previous accumulation" guna memberi jalan lempang bagi kapital masuk. Cara pandang ini mewarnai dalam setiap bab. Dalam konteks akselerasi dan akumulasi kapital yang difasilitasi oleh negara kolonial hingga

Satu tugas yang semestinya diemban oleh sebuah negara ialah, kemampuannya menjadi *provider, protector,* dan *liberator,* bagi warga negaranya: massa rakyat. Cara mengujinya adalah dengan melihat pada siapakah yang paling diuntungkan dari kebijakan itu (*beneficieries*). Sayangnya, uraian di atas memberikan gambaran umum yang negatif. Tugas negara itu seperti jauh panggang dari api.

---

negara Orde Baru itulah, proses marjinalisasi dan ketercerabutan rakyat dari sumber-sumber produksi terjadi. Kekerasan kemanusiaan, persoalan HAM, kemiskinan, dan ketidakadilan menjadi sorotan penulis. Dengan itu, "Bukanlah komunisme yang radikal, tapi kapitalisme", sebagaimana pernyataan Bertolt Brecht, menemukan kebenarannya. Cara pandang semacam itu sangatlah berbeda jika dibandingkan, misalnya, dengan perspektif sejarah nasional yang melihat terbentuknya Indonesia sebagai satu kekuatan gerak evolusi ke arah integrasi, *sebagaimana yang diusung Sartono Kartodirdjo. Kekuatan gerak itu bisa berakar pada "kejayaan masa lalu" (sebagaimana dikemukakan M. Yamin) atau spirit apokaliptis, yakni suatu imajinasi tentang kegemilangan yang menjelang, seperti ideologi Ratu Adil.*

BAB III
REVOLUSI HIJAU DI ASIA TENGGARA DAN TRANSFORMASI AGRARIA INDONESIA

Bab ini berusaha menguraikan gagasan yang melatarbelakangi satu proyek besar pembangunan pertanian-pedesaan yang terjadi pada paruh kedua abad XX, yakni Revolusi Hijau (*Green Revolution*)[1].

Bagian berikut akan melihat bagaimana proses gagasan tersebut di Asia Tenggara dan dalam konteks itu akan tampak bagaimana transisi dan transformasi agraria Indonesia terjadi. Jika "transisi" agraria hanya terkait dengan perubahan dari "tradisional" ke "modern", maka "transformasi" agraria adalah "perubahan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan". Transformasi itu dapat menuju pada arah kapitalis, sosialis, dan neo-populis.

A. Revolusi Hijau dan Berbagai Aspeknya

Proyek besar yang disebut dengan Revolusi Hijau bertujuan untuk memenuhi keamanan pangan (*food security*) dunia. Namun demikian, "Revolusi Hijau" menandai era perubahan ekonomi

[1] Istilah "Green Revolution" pertama kali diungkapkan oleh William S. Gaud yang bekerja di United States Agency for International Development (USAID) pada Maret 1968 ketika berbicara di hadapan "Society of International Development" guna menggambarkan fenomena dunia pertanian yang mengalami perubahan mendasar dan meluas. Istilah lain yang diungkapkan Lester R. Brown adalah "Agricultural Revolution". Kazuo Saito, "On Green Revolution", *The Developing Economies*, Vol. 8, No. 1, Maret, 1971, hal. 16. Bandingkan, Anonim, "Green Revolution Curse or Blessing?", kertas kerja *International Food Policy Research Institute*, 2002, hal. 1.

politik di kawasan Dunia Ketiga, termasuk Asia Tenggara, yakni keterputusan dengan era sebelumnya. Revolusi Hijau sejatinya merupakan bagian dari produk pertarungan besar di era Perang Dingin. Mobilisasi kapital menjadi *historical imperative* dari keseluruhan komponen Revolusi Hijau ini.

Dari segi gagasan, "modernitas" adalah ideologi yang dianut, dan "teknologi" merupakan instrumen materialisasi gagasan tersebut. Teknologi berperan "memediasi" (*to mediate*) antara kebutuhan dan keinginan manusia (*as human culture*) dengan sumber daya alam/lingkungan (*nature*).[2]

Berbagai kombinasi mengenai teknik pertanian dan inovasi teknologi diperkenalkan dalam proyek itu; mulai dari pengenalan benih baru (jagung, gandum, dan padi), alat-alat pertanian modern, pengenalan pestisida, herbisida, dan fungisida, pemupukan kimia, pembangunan infrastruktur, penyuluhan dan riset, kontrol/pengaturan air, hingga pemberian akses pada modal (kredit).[3]

Semua hal baru itu memberi pengaruh pada perubahan kelembagaan sistem panen, relasi ketenagakerjaan, penguasaan tanah, pendapatan, dan secara lebih luas adalah perubahan struktur keagrariaan di pedesaan Asia Tenggara. Suatu program dapat disebut sebagai "revolusi" ketika dampak yang ditimbulkannya mengakibatkan perubahan yang mendasar pada masyarakat dan terjadi secara masif. *Green Revolution* memenuhi syarat-syarat itu. Kondisi pedesaan di Asia Tenggara sangat terasa mengalami perubahan, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun budaya setelah Revolusi Hijau dijalankan.[4]

---

[2] John H. Perkins, *Geopolitics and the Green Revolution: Wheat, Genes and the Cold War* (Oxford: Oxford University Press, 1997), hal. 5.

[3] Teofilo C. Daquila, *The Economic of Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand,* (New York: Nova Science Publisher, 2005), hal. 53-55.

[4] Dalam orasi Doktor Honoris Causanya di IPB, 28 Mei 2009, Gunawan Wiradi menceritakannya untuk kasus Jawa. Itulah sebabnya mengapa menurutnya tidak tepat penyebutan "Revolusi Biru" untuk menjelaskan terjadinya perubahan teknologi pada bidang kelautan. Perubahan teknologi dan berbagai paketnya tidak membawa dampak mendasar (revolusioner) seperti yang dijumpai dalam kasus di daratan (Revolusi Hijau).

Pada awal Revolusi Hijau belum jelas dampak sosial seperti apa yang akan ditimbulkan, sehingga Clifton Wharton menyebutnya sebagai "kotak pandora", "The Green Revolution Cornucopia or Pandora's Box".[5] Artinya, hasil melimpah produksi pangan yang diakibatkan dari penerapan berbagai komponen Revolusi Hijau itu memberi efek yang mengandung ketidak-pastian. Segala sesuatu bisa keluar dari kotak pandora tersebut, baik efek menguntungkan ataupun efek membahayakan.

B. Malthusian, Perang Dingin, dan Modernisme

Secara teoritis yang mendasari munculnya program Revolusi Hijau adalah teori Thomas Robert Malthus (1766-1836). Teori Malthus (*Malthus theory*) mengatakan bahwa peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung (aritmetik: 1, 2 , 3, 4...), sementara pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur (geometrik: 1, 2, 4, 8,..). Artinya, jumlah manusia mengalami pertumbuhan cepat (*over-population*) sehingga melampaui pertumbuhan produksi pangan. Jika demikian, maka kelaparan menjadi ancaman yang nyata. Karenanya, solusi harus segera ditemukan, dan jalan keluarnya adalah: "teknologi".

Pada masa Perang Dunia II, argumen serupa digunakan rezim Nazi Jerman. Bukan dengan cara meningkatkan produksi sebagai jalan keluar yang dipilihnya, namun dengan cara keji terhadap nyawa manusia, yakni apa yang disebut dengan praktik *eugenics*.[6] Praktik ini adalah suatu legitimasi saintifik dalam mendiskriminasi ras lain dan orang yang dianggap menderita

---

[5] Dikutip dari Sediono M.P. Tjondronegoro, "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa", makalah untuk Seminar *Perubahan Sosial dan Demokrasi Pedesaan*, PAU Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 11-13 Desember 1989.

[6] John H. Perkins, *op.cit.,* hal 133. Praktik *eugenics* modern sebagaimana prinsip neo-Malthusian adalah kontrol kelahiran terhadap rakyat miskin oleh kelas menengahnya. Kampanye penggunaan alat kontrasepsi, tidak jarang dilakukan secara paksa, mengasumsikan bahwa keluarga miskin akan cenderung menghasilkan anak yang *"feeble-minded"* sehingga menjadi problem sosial: prostitusi, gelandangan, dan kejahatan. Bandingkan, Eric B Ross, "The Malthus Factor Poverty, Politics and Population in Capitalist Development", *The Corner House Briefing 20: Poverty, Politics and Population,* July 2000, hal. 5.

defisiensi mental (yang menurutnya berasal dari keluarga miskin). Maka manusia-manusia semacam itu harus dibunuh agar yang tersisa hanyalah manusia-manusia "terpilih".

Para intelektual Amerika dalam iklim politik tahun 1945-1955 hingga suasana Perang Dingin melahirkan gagasan yang mengakui hubungan skematik antara over-populasi, keletihan sumber daya (*resource exhaustion*), kelaparan, instabilitas politik, bahaya komunisme, dan perang. Teori ini disebut dengan "Population-National Security Theory" (PNST). Dalam teori ini, kelaparan dilihat sebagai akibat dari over-populasi dan keletihan sumber-daya, yang akan mendorong terjadinya keletihan sumber-daya selanjutnya dan instabilitas politik. Pembiakan dan pembenihan tanaman (*plant breeding*) dinilai sebagai obat penolong bagi bencana kelaparan, sebab sains dapat meningkatkan produksi pangan dan stabilisasi benih.[7]

Konteks politik dan pengembangan teori ini menjadi penting bagi pemahaman dibangunnya riset-riset dan program pertanian di Asia Tenggara. Sebagai bagian dari politik Perang Dingin, Revolusi Hijau di beberapa kawasan Asia Tenggara dipilih sebagai strategi untuk menggantikan *landreform* yang selama beberapa tahun sebelumnya (di)identik(kan) dengan kebijakan komunis.



Gambar 2. Pihak Rockefeller Foundation disusul Presiden Amerika, Lyndon Johnson, berkunjung ke IRRI, Philipina, pada tahun 1960-an. (Sumber: www.irri.org)

[7] *Ibid.,* hal. 120-121.

Sementara itu, studi tentang populasi manusia telah menjadi perhatian Rockefeller Foundation sebelum Perang dunia II. Pada tahun 1946 muncul kritik tentang masalah populasi namun dikaitkan dengan persoalan kesehatan. Kritik itu muncul dari wakil John D. Rockefeller III, bagian Public Health Programs. Dalam bidang kesehatan ini Rockefeller memberi dukungan selama lebih dari 40 tahun. Inti kritiknya adalah jika proteksi terhadap kesehatan semakin membaik, maka akan meningkatkan daya tahan manusia sehingga mengakibatkan "*massive increase in the population*" yang akan membahayakan bila "*no prospects for feeding the people*". Raymond Fosdick sebagai presiden yayasan kala itu menyetujui gagasan tentang kesehatan publik dikaitkan dengan peningkatan produksi pangan. Ia menyatakan,

> "Saya senantiasa memiliki *feeling* bahwa negara seperti India selalu dalam kondisi '*vicious circle*'. Anda memiliki populasi yang maha besar namun dengan kondisi suplai pangan yang tidak mencukupi. Konsekuensinya, Anda selalu menghadapi problem kekurangan gizi dan kelaparan. Cara keluar dari itu adalah sistem pendidikan yang memadai atau dengan meletakkan dasar kehidupan industrial".[8]

Gagasan itu bergulir di International Health Division (IHD) melalui direkturnya George K. Strode. Kemudian pada Juni 1948, Strode melapor kepada Marshall C. Balfour, seorang dokter yang cukup lama menjabat program luar negeri IHD untuk menindaklanjutinya. Strode setuju atas draf rencana riset populasi yang akan dilakukan di Jepang, China, Formosa (Taiwan), Jawa dan Filipina. Akhirnya tim riset berangkat dikepalai oleh Frank Notestein atas biaya Rockefeller Foundation.[9]

Hasil kunjungan ke Jepang, Taiwan, Korea, China, Indonesia, dan Filipina antara September hingga Desember 1948 berisikan bantahan tafsir Malthusian yang dinilai simplisistik. Tim kemudian cenderung mengarah pada neo-Malthusian: jumlah penduduk tinggi sebab angka mortalitas turun namun tidak pada angka natalitasnya, sehingga perlu dilakukan kontrol kelahiran

[8] *Ibid.,* hal. 133.
[9] *Ibid.,* hal. 134.

(*birth control*). Tim selanjutnya beranjak pada kesimpulan bahwa jumlah penduduk semakin tinggi sehingga diperlukan *food self-sufficiency*, dan Jepang menjadi contoh bagaimana hal itu dilakukan dengan cara industrialisasi.[10]

Masa inilah awal dari kejayaan developmentalisme,[11] dimana produksi pertanian di kawasan Selatan dibentuk melalui berbagai cara: proyek-proyek investasi kuasi-publik melalui *aid agencies*—terutama Bank Dunia, melalui strategi bantuan bahan makanan dan/dumping bahan makanan komersial dari kelebihan stok beras di Amerika.

Selain Rockefeller Foundation, lembaga donor internasional yang membiayai pelaksanaan revolusi Hijau adalah Bank Dunia (World Bank). Melalui hadirnya presiden baru, George Woods, Bank Dunia berpikir bahwa di sektor pertanian yang di dalamnya bekerja 2/3 dari kaum termiskin di dunia, ternyata hanya menerima 8% pinjaman sampai dengan tahun 1963. Dari pemikiran itulah George Woods kemudian mengeluarkan investasi khususnya pada riset pertanian, bekerja sama dengan Rockefeller

---

[10] *Ibid.* Menurut Gunawan Wiradi, kesuksesan Jepang dalam masalah pangan bukan sebab loncatan industrialisasinya, namun industri mereka terlebih dahulu didasari pada upaya restrukturisasi penguasaan faktor produksi, yakni tanah, melalui *landreform*. Ketika Jepang kalah perang, panglima tentara Jendral Mac Arthur, Jr. yang bermarkas di Jepang segera menulis surat perintah pada kaisar Jepang, Hirohito, pada tanggal 9 Desember 1945. Surat berkode SCAP-411/1945 berisi perintah agar dalam jangka tiga bulan Jepang harus menyusun dan langsung melaksanakan program *landreform*. Demikian juga Korea Selatan dan Taiwan dalam pelaksanaan *landreform* yang dinilai berhasil atas dukungan AS (dalam paket bantuan Marshall Plan). Lihat, Gunawan Wiradi, *Dilemma Reforma Agraria,* makalah tidak diterbitkan (29 hal.), 2008, hal. 12.

[11] Developmentalisme pada gilirannya menjadi ideologi yang sangat berpengaruh pasca Perang Dingin. Ide-ide "pembangunanisme" dikaji secara serius melalui munculnya *Development Studies* di universitas-universitas Inggris pada tahun 1960-an dan 1970-an. Apa yang dipelajari di dalamnya adalah *applied knowledge* dengan tujuan praktis agar dapat diterapkan sebagai kebijakan dan intervensi pembangunan di negara-negara berkembang. Dua isu yang dikaji adalah ekonomi pertumbuhan (bagaimana harus mempromosikannya), dan kemiskinan (bagaimana cara menanggulanginya). Henry Bernstein, *Development Studies and The Marxists,* dalam http://repositories.cdlib.org/cgirs/CGIRS-2004-8, diakses tanggal 23 Juli 2006.

Foundation dan Ford Foundation untuk mengembangkan teknologi. Di sinilah mereka berperan penuh mendukung Revolusi Hijau.

Secara khusus Bank Dunia memberi perhatian pada kredit pertanian. Pembagian proyek perkreditan itu di dalam portofolio pertanian Bank Dunia naik secara tajam dari 5% pada periode anggaran 1948-1963 menjadi 41% periode 1964-1968. Kredit pertanian yang diberikan melalui bank-bank pembangunan, bank-bank komersial, koperasi, dan proyek yang ditunjuk, adalah mekanisme yang dipilih, dimana Bank Dunia dapat memberi dukungan bagi diseminasi teknologi Revolusi Hijau kepada petani skala rumah tangga di Asia dan Afrika. Kesuksesan benih padi dan gandum varietas unggul mengundang investasi pada irigasi dan drainase, sekaligus tuntutan terhadap hadirnya investasi-investasi baru lainnya: pembenihan, produksi pupuk, distribusi input (saprotan), pemrosesan dan penggudangan.[12]

Dengan cara pandang semacam itulah berbagai Laporan Pembangunan Dunia (*World Development Report*) tahunan yang dikeluarkan World Bank menyimpulkan bahwa pengalaman pertanian skala rumah tangga sebagai bentuk organisasi mulanya mengalami "benturan", lalu "dimudahkan" oleh Revolusi Hijau dan selanjutnya "terlindungi" dari krisis kelaparan.[13] Inilah klaim-klaim Bank Dunia dalam laporan-laporannya.

Demikianlah, ketakutan Malthusian akan kelaparan massal pascaperang mendorong usaha kontrol atas populasi, riset-riset internasional, program pembangunan dan difusi benih varietas

---

[12] Jonathan Pincus, "The Post-Washington Consensus and Lending Operations in Agriculture: New Rhetoric and Old Operational Realities", satu bab yang kemudian menjadi buku dalam Ben Fine, Costas Lapavitsas dan Jonathan Pincus (Eds.), *Development Policy in the 21st Century* (London: Routledge, 2001), hal. 14.

[13] Haroon Akram-Lodhi, "(Re)imagining Agrarian Relations? The World Development Report 2008: Agriculture for Development", *Development and Change*, Institut of Social Studies, The Hague, hal. 1156.

baru dalam proyek besar Revolusi Hijau.[14] Gagasan Malthus bergema lagi dalam upaya pembangunan yang sebelumnya juga telah dianut, misalnya oleh pemerintah kolonial di Jawa pada masa Raffles. Satu gagasan yang mendukung dan berkesesuaian dengan faham pembangunan (*developmentalism*) adalah menghidupkan aset yang mati (tanah) melalui *land rent*.

C. Revolusi Hijau di Asia Tenggara dan Dampaknya

Dalam pelaksanaan Revolusi Hijau, didirikan lembaga-lembaga riset pangan sesuai dengan komoditasnya. Di Meksiko didirikan International Center for Maize and Wheat Improvement (CIMMYT) pada tahun 1944. Atas bantuan Rockefeller Foundation pusat penelitian jagung dan gandum ini didirikan.

Kesuksesan di Meksiko ditiru untuk tanaman padi. Maka pada tahun 1962, Rockefeller Foundation bekerjasama dengan Ford Foundation mendirikan sebuah badan penelitian bernama International Rice Research Institute (IRRI) di Los Banos, Filipina. Semula pendirian lembaga IRRI ditawarkan kepada Indonesia dan diterima oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi ketika pihak Rockefeller dinilai banyak melakukan berbagai macam tuntutan yang sifatnya intervensif, Soekarno menolak dan menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah mampu melakukannya sendiri tanpa IRRI. Saat itu Indonesia telah mempunyai ahli pembenihan, Ir. Siregar, yang telah melakukan uji coba pembenihan di Lembaga Penelitian Benih, Bogor.[15]

Lembaga di Bogor ini berada di bawah Departemen Pertanian dan Urusan Agraria. Beberapa tahun lembaga ini telah

---

[14] Henry Bernstein, "*Landreform*: Taking A Long(er) View", *Journal of Agrarian Change* 2(4), 2002, hal. 445-446.

[15] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 21 November, 2008; dan wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 18 Juli 2008. Bandingkan dengan, Gunawan Wiradi, "Revolusi Hijau Ditinjau Kembali", Suara Pembaruan, 24 September, 1987.

me-lakukan penelitian penyilangan dari berbagai benih unggul guna menghasilkan varietas baru yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah di Indonesia. Dari ujicoba itu lahirlah "Benih Pendjenis" yang kemudian digunakan sebagai *benih dasar* yang ditanam di beberapa lahan percobaan di Jawa dan Madura. Lembaga tersebut pada gilirannya diminta oleh berbagai Dinas Pertanian (Diperta) yang ada di daerah-daerah untuk memenuhi stok *benih pokok*. Benih keluaran lembaga itu dinilai baik, dapat tumbuh dengan cepat, subur, bebas gulma bawaan dan anti penyakit dan serangga, dan mempunyai rasa yang enak. Surat kabar dan radio terus menerus memberitakan keberhasilan penggunaan benih tersebut yang oleh lembaga itu diperkirakan menghasilkan kenaikan produksi 20-40%.[16]

Benih yang dihasilkan dari lembaga di atas dikenal juga dengan benih "Unggul Nasional" (Ungnas). Di antara nama-nama Ungnas ini adalah "Syntha", "Dara", "Sigadis", "Ramadja", dan "Bengawan". Nama-nama ini merupakan hasil dari pengembangan varietas lokal.[17]

Sementara itu, varietas padi baru produksi IRRI memberi hasil yang jauh melebihi rata-rata hasil varietas lokal di sebagian besar Asia. Benih baru adalah hasil dari persilangan antara varietas padi kerdil dari Taiwan *(Dee-geo-woogen)* dengan varietas padi jangkung dari Indonesia, yakni *Peta.* Peta adalah padi unggulan yang diperkenalkan pada tahun 1940. Hasilnya adalah sebuah varietas yang diberi nama resmi IR.8-288-3, biasa disingkat IR-8 (di Indonesia dikenal sebagai PB-8). Varietas baru

---

[16] Joyce Gibson, "Rice Production and Import", *Bulletin of Indonesian Economic Studies,* No 1., Juni 1965, hal. 57-58.

[17] Dibyo Prabowo dan Sajogyo, "Sidoarjo, East Java, and Subang, West Java", dalam Gary E. Hansen (Ed.), *Agricultural and Rural Development in Indonesia* (Colorado: Westview Press, 1981), hal. 71. Kedua penulis melakukan riset evaluasi pelaksanaan Revolusi Hijau di Sidoarjo dan Subang. Di lokasi pertama, Revolusi Hijau mendapat respons yang tinggi, namun tidak di lokasi kedua.

lainnya kemudian bermunculan dari lembaga penelitian tersebut.



Gambar 3. Menurut majalah *Popular Mechanics,* IR-8 tercatat di urutan teratas dari 50 penemuan selama paruh terakhir abad yang lalu. (Sumber: www.irri.org)

Jenis-jenis bibit dari IRRI itu di Indonesia disebut juga sebagai jenis *Padi Unggul Baru* (PUB). Sejak tahun 1966 itulah IR-8 mulai disebarkan di Asia Tenggara, diikuti oleh penyebaran IR-5 tahun 1967. Maka pada 1968 di India, Pakistan, Sri Langka, Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam Selatan dan Indonesia, telah dilancarkan penanaman jenis-jenis PUB tersebut secara besar-besaran.[18]

[18] *Ibid.,* bandingkan dengan Jonathan Rigg, "The New Rice Technology and Agrarian Change: Guilt by Association?", *Progress in Human Geography,* 1989, 13, hal. 377.

Tabel 4. Proporsi Lahan di Asia yang Ditanami PUB

No	Negara	1975[19]	1981-1984[20]
1	Bangladesh	-	24,8%
2	India	-	49,4%
3	Indonesia	41%	81,8%
4	Malaysia	36%	53,5%
5	Pakistan	-	46,3%
6	Filipina	62%	85,1%
7	Thailand	7%	13 %

Tampak bahwa Thailand merespons secara lambat terhadap Revolusi Hijau, sementara Indonesia dan Filipina merespons secara positif dan masif. Perbedaan respons ini tentu mempengaruhi tingkat kekuatan/kerentanan daya pangan suatu kawasan, baik dari segi stok pangan, ekologi, dan sosial.

Dalam penyerapan itu Thailand adalah sebuah perkecualian. Pada tahun 1979 Thailand merupakan pengekspor produk pertanian terbesar se-Asia. Sepertiga produksi pertaniannya diekspor ke luar negeri. Hingga tahun 1982, Thailand menempati urutan kelima sebagai negara terbesar pengekspor beras, setelah Cina, India, Indonesia, dan Bangladesh. Meski demikian, lahan-lahan pertanian di Thailand termasuk yang terendah dari segi produktivitasnya, terkait tingkat adopsi teknologinya. Hal ini disebabkan pengabaian pemerintah terhadap pembangunan (modern) pertaniannya. Padahal lebih dari 80% penduduknya hidup di wilayah pedesaan (tahun 1982).[21]

---

[19] Teofilo C. Daquila, *The Economic of Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand* (New York: Nova Science Publisher, 2005), hal. 53.

[20] Jonathan Rigg, "The New Rice Technology and Agrarian Change: Guilt by Association?", *Progress in Human Geography,* 1989, 13, hal. 382.

[21] Andrew Turton, "Thailand: Agrarian Bases of State Power", dalam Gillian Hart, Andrew Turton, dan Benjamin White (Eds.), *Agrarian Transformation, Local Processes and the State in Southeast Asia* (California: University California Press, 1989), hal. 53.

Kenyataan tingginya produksi itu berbanding terbalik dengan tingkat responsnya terhadap pelaksanaan Revolusi Hijau. Sampai dengan tahun 1976, PUB hanya ditanam sekitar 5%-7% areal persawahan di Thailand. Antara tahun 1983-1984 areal persawahan yang menghasilkan panen dua kali dengan benih tersebut hanya 7,7%. Demikian juga dengan tingkat irigasinya. Terdapat 60% lahan yang tidak teririgasi dengan berbagai tingkatan yang variatif di berbagai kawasannya. Sementara, penggunaan pupuk hanya 17 kg/ha,[22] berbeda jauh misalnya dengan penggunaan di Indonesia yang 40-60 kg/ha (1977).[23]

Thailand relatif berbeda dengan negara-negara lainnya. Keberadaan agama, bahasa, dan etnis yang relatif homogen, absennya perlawanan antikolonial dan gerakan revolusioner, kontinuitas historis lembaga penguasa, serta tersentralnya kekuasaan baik secara geografis maupun politik, memberi penjelasan mengapa intervensi luar (termasuk kebijakan Revolusi Hijau) sulit dilakukan.[24]



Gambar 4. Indonesia ketika mencapai Swasembada Beras, 1984-1985 (Sumber: Cover majalah *Tempo*, no. 38 XV, 16 November 1985)

[22] *Ibid.* hal. 56-57.

[23] Frederick C. Roche, "The Technical and Price Efficiency of Fertilizer Use in Irrigated Rice Production", *Bulletin of Indonesian Economic Studies,* Vol. 30, No. 1, April 1994, hal. 63. Rasio harga pupuk terhadap beras di Thailand relatif mahal (1:3,35) dibanding Indonesia (1:1,62), dan Malaysia (1:177). Brian Fegan, dalam Gillian Hart cs., *op.cit.*, hal. 136.

[24] Andrew Turton, *op.cit.,* hal. 66-67.

Catatan kesuksesan pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia terjadi pada tahun 1984, ketika Indonesia menyatakan swasembada beras. Atas prestasi ini, Presiden Soeharto diminta berbicara di sidang FAO guna menceritakan kesuksesannya. Demikian juga kesuksesan di Filipina pada tahun 1970-an. Program Masagana 99 berupa kebijakan distribusi kepada petani paket benih baru, pupuk yang disubsidi, dan segenap input modern lainnya, dalam banyak hal sama dengan program BIMAS di Indonesia. Akan tetapi, kesuksesan pencapaian produktivitas di Filipina hanya bertahan satu dekade 1970-an dan tidak mampu mempertahankannya pada dekade 1980-an.[25]

Tabel 5. Hasil Pelaksanaan Revolusi Hijau di Asia Tenggara dari Segi Pertumbuhan[26]

Tahun	Produksi sereal (termasuk padi)	Benih sereal (termasuk padi)	Konsumsi kalori/ orang/hari	Pendapatan (Per kapita-*GDP*)	Populasi
1970	33,8 juta ton	1.352 meter ton/ha	naik 34%	naik 193%	naik 68,2%
1995	73,6 juta ton	2.237 meter ton/ha			

Secara umum, pelaksanaan Revolusi Hijau di Asia Tenggara dalam hitungan dua puluh lima tahun (antara 1970- 1995) telah menghasilkan kenaikan produksi yang berlipat. Produksi sereal termasuk padi meningkat dari 33,8 juta ton menjadi 73,6 juta ton, sementara untuk benihnya meningkat dari 1.356 meter ton/ha menjadi 2.237 meter ton/ha. Peningkatan itu menyum-

[25] Yujiro Hayami, "Ecology, History, and Development: A Perspective from Rural Southeast Asia", *The World Bank Research Observer,* Vol. 16, No. 2 (2002), hal. 194-195.

[26] Tabel diolah dari Kog Yue Choong, *A Green Revolution-Southeast Asia,* www.berkshirepublishing.com/rvw/015/015smpl2.htm, diakses pada 23 Juni 2009.

bang tingkat konsumsi per orang/hari/kalori mengalami kenaikan sebanyak 34%.

Jika Revolusi Hijau telah memberi bukti peningkatan produksi demikian nyata, benarkah ancaman Malthusian akan mampu menjawab kenaikan produksi yang sekitar 105% di hadapan pertumbuhan populasi yang naik sebanyak 68,2% (untuk keseluruhan Asia naik dari 2.096.480.000 menjadi 3.423.290.000[27])?

Tabel 6. Produksi dan Produktivitas Padi di 4 Negara Asia Tenggara[28]

	Indonesia	**Malaysia**	**Filipina**	**Thailand**	**ASEAN**
	Produksi (ribu meter ton) dan persen				
1970	19234 (28,8)	1080 (2,7)	5322 (13,5)	13850 (35,0)	39577
1975	22340 (48,8)	1997 (4,3)	6159 (13,4)	15300 (33,4)	45796
1980	29652 (52,4)	1798 (3,2)	7723 (13,7)	17368 (30,7)	56541
1985	39033 (55,8)	1849 (2,6)	8806 (12,6)	20264 (29,0)	69952
1990	45180 (58,4)	1960 (2,5)	9885 (12,8)	20264 (26,2)	77289
1995	49744 (58,4)	2126 (2,5)	11284 (13,2)	22016 (25,8)	85170
	Produktivitas (kg/ha)				
1970	2040	2380	1780	1870	1947
1975	2630	2662	1664	1831	2150
1980	3293	2883	2155	1909	2534
1985	3942	2780	2588	2061	2939
1990	4302	2591	2808	3527	3766

[27] Angka diolah dari tabel IRRI yang bersumber data FAO, diambil dari www.irri.org, diakses tanggal 9 Juli 2009.

[28] Teofilo C. Daquila, *op.cit.,* hal. 56.

D. Menjadikan Pertanian Bergerak (*Getting Agriculture Moving*)

Guna mencegah "efek domino" atas pengaruh komunisme sekaligus memenangkan perebutan pengaruh atas negara-negara yang dinilai condong ke arah komunis, serta mencegah keresahan agraria (*agrarian unrest*) di pedesaan-pedesaan Asia Tenggara pasca-kolonial, maka dilakukan upaya modernisasi pedesaan melalui serangkaian paket Revolusi Hijau. Benjamin White mencatat,

> "*This is the period in which the focus in agricultural development, in Indonesia and many other countries, shifted from structural change through 'agrarian reform' to technological change through the 'green revolution'*."[29]

Dukungan penuh berasal dari Amerika melalui berbagai lembaga seperti Ford Foundation, Rockefeller Foundation, World Bank, bahkan oleh pemerintahnya sendiri melalui USAID terhadap pendirian IRRI, sebagai satu-satunya lembaga riset padi dalam proyek Revolusi Hijau. Lembaga IRRI bertugas, "to do basic research on the rice plant and applied research on all phases of rice production, management, distribution and utilization".[30]

Bagi pihak Amerika, bantuannya terhadap pembangunan di berbagai belahan dunia (termasuk Asia Tenggara) merupakan metode, "*by which U.S. maintains a position of influence and control around the world, and sustains a good many countries which would definitely collapse or pass into the communist bloc*".[31] Suatu kebijakan yang tidak hanya dimaksudkan membendung efek domino

---

[29] Benjamin White, "Gunawan Wiradi, The Agro Economy Survey and Indonesia's Green Revolution", dalam Gunawan Wiradi, *Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris,* (Yogyakarta: STPN, 2009), hal. xiv.

[30] Pernyataan ini tertulis dalam nota kesepehaman (MoU) yang dibuat di New York pada tanggal 9 Desember, 1959. Bertugas sebagai direktur pertama IRRI adalah Robert F. Chandler, Jr (27 September 1959). Lihat, "IRRI History", dalam www.irri.org, diakses tanggal 9 Juli, 2009.

[31] Dikutip dari, Jagannath Pathy, "The United States Intervention in Third World Rural Policies", *Social Scientist*, Vol. 14, No. 4. (April, 1986), hal. 40. Atas alasan ini, presiden terpilih, Lyndon Johnson, mengunjungi IRRI pada 26 Oktober 1966. www.irri.org, *op.cit.*

sebagaimana yang dicanangkan sejak presiden Eisenhower, namun untuk suatu visi: kontrol atas dunia.

Mengenai *containment politics* ini, seorang tokoh *underground* bernama Gay J. Pauker sangat berperan dalam mengimposisikan gagasan-gagasannya ke dalam struktur kekuasaan negara, utamanya di Indonesia. Ia mengajukan suatu argumen teoritis tentang konsekuensi politis atas program pembangunan pedesaan di Indonesia. Tidak hanya itu, ia memberi justifikasi atas pembunuhan massal pengikut dan mereka yang dituduh PKI,[32] suatu upaya guna memuluskan gelombang perubahan di pedesaan Indonesia. Ia juga memberi saran-saran pragmatis terhadap pemerintah yang baru terpilih atas pelaksanaan Revolusi Hijau. Padahal untuk menjalankan program Revolusi Hijau ini Indonesia membiayainya dengan uang pinjaman/hutang.

Menurut Budiawan, Pauker telah melakukan "kekerasan epistemologis" dalam membangun *body of knowledge* atas proses modernisasi yang harus dilalui Indonesia. Saran atas jalur yang ditempuh seakan-akan menjadi *historical imperative* yang tidak dapat ditawar-tawar.[33] Sehingga *Green Revolution was only the admissible system*, tidak ada alternatif lain kecuali Revolusi Hijau.

Jika dibaca dalam konteks sejarah kapitalisme, apa yang dilakukan oleh Pauker sebagai representasi politik Perang Dingin, adalah memberi arahan bagaimana *previous accumulation* terjadi. Dijadikannya massa rakyat di pedesaan sebagai *floating mass*, padahal sebelumnya ada upaya mengorganisirnya, memberi jalan lempang bagi masuknya kapital ke desa-desa di Indonesia.

---

[32] Kaitan antara pemikiran Malthusian dengan pemikiran *eugenics* yang terkenal pada masa Perang Dingin melalui tokoh Garret Hardin, terabadikan dalam bentuk politik "*containment*", pembendungan bahkan penyingkiran komunisme. Eric B Ross, *op.cit*., hal. 9. Bandingkan dengan Budiawan, "Seeing the Communist Past through the Lens of a CIA Consultant: Guy J. Pauker on the Indonesian Communist Party Before and After the '1965 Affair'", *Inter-Asia Cultural Studies,* Volume 7, Number 4, (2006), hal. 660-661.

[33] Budiawan, *Ibid.*, hal. 651 dan 660.

Tabel 7. Pinjaman Bank Dunia terhadap Pembangunan Pertanian Indonesia, 1976-1999 (dalam US$ juta)[34]

Kredit pertanian	Pembangunan wilayah	Pupuk	Irigasi dan drainase
360	1008	475	2288
Tanaman tahunan	Riset dan penyuluhan	lainnya	**Total**
920	462	334	**5847**

Secara ilmiah bentuk dukungannya ditunjukkan melalui pengiriman buku-buku, kerjasama studi dan pengiriman para konsultan lembaga Council on Economic and Cultural Affairs (*CECA*) yang didirikan oleh John D. Rockefeller III (sebagaimana terhadap pendirian IRRI). Lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The Agricultural Development Council (A/D/C).[35] Dalam periode lembaga A/D/C inilah dikenal nama Arthur T. Mosher sebagai direkturnya. Bukunya, *Getting Agriculture Moving*,[36] menjadi rujukan para akademisi, pejabat, dan pegawai pertanian di lembaga pemerintah. Buku ini didistribusikan terutama di negara-negara Asia, dan diterjemahkan ke banyak bahasa termasuk Indonesia. Isinya mencerminkan secara dominan teori modernisasi dalam wacana pembangunan pedesaan dan fokus baru dalam paket Revolusi Hijau. Di dalamnya terdapat "lima hal esensial" dan "lima akselerator"[37]. Masalah *landreform* sama

[34] Jonathan Pincus, "The Post-Washington Consensus and Lending Operations in Agriculture: New Rhetoric and Old Operational Realities", *op.cit.,* hal. 51.

[35] Ben White, "Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transition and Scholarly Engagement in Indonesia", dalam Vedi R. Hadiz dan D. Dhakidae (Eds.), *Social Science and Power in Indonesia* (Jakarta: Equinox bekerjasama dengan ISEAS, 2005), hal. 114.

[36] Arthur T. Mosher, *Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization*. (New York: Praeger Publishers for the Agricultural Development Council, 1965).

[37] *Lima hal esensial*: pasaran untuk hasil usaha tani; teknologi; tersedianya saprotan secara lokal; perangsang produksi untuk tani; dan transportasi. *Lima akselerator*: pendidikan pembangunan; kredit produksi; kelompok kerja; perbaikan dan perluasan lahan; dan perencanaan nasional pembangunan pertanian, *Ibid.*

sekali tidak disebutkan dalam buku itu,[38] suatu isu yang memang sengaja dihindari.

Peter McCawley menunjukkan bahwa pada periode inilah Amerika banyak memberi bantuan kepada dunia akademis Indonesia. Buku-buku teks ekonomi makro, ekonomi pembangunan, ekonometri, kebijakan pajak, estimasi pendapatan nasional dan daerah, dan sosiologi Barat, serta berbagai jurnal (termasuk *BIES*), dan buku-buku "*how to*" masuk ke berbagai kampus Indonesia. Bahkan dua buku didanai penerjemahannya, yakni buku Hirschman, *The Strategy of Economic Development,* dan buku Arthur T. Mosher, *Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization*. Buku pertama tidak sepopuler buku kedua.[39]

Pemikiran Arthur T. Mosher didasarkan pada prinsip tahap-tahap pertumbuhan ala Rostow. Rostow mengidentifikasi 5 tahap transisi dari tradisional menuju modern: masyarakat tradisional (*the traditional society*), pra-kondisi tinggal landas (*the precondition for take off)*, tinggal landas (*the take off*), menuju dewasa (*the drive to maturity*), dan masyarakat berkonsumsi tinggi dan masif (*the age of high mass consumption*). Dalam perdebatan mengenai tahapan Rostowian ini, terdapat suatu bantahan mengapa misalnya dalam kasus Filipina pada tahun 1957, ketika telah dilalui "*the take off*" justru ia kembali lagi ke arah "*the precondition for take off*". Maka, jawaban agar pembangunan ekonomi (pertanian) dapat mengalami "*rapid growth*" adalah dengan dilakukan "*rapid difussion*", yakni melalui teknologi.[40]

Pemikiran Arthur T. Mosher, sebagaimana Rostow, mencoba memparalelkan pengalaman negara-negara non-Barat agar mengikuti tahapan yang dilalui oleh negara Barat,

---

[38] Benjamin White, "Gunawan Wiradi, The Agro Economy Survey and Indonesia's Green Revolution", dalam Gunawan Wiradi, *op.cit.,* hal xvi

[39] Peter McCawley, "Some Suggestions for Aid to Indonesian Universities", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 10, No. 3, November 1974, hal. 116

[40] Yujiro Hayami dan Vernon W. Ruttan, *Agricultural Development: An International Perspective*, (Baltimore dan London: The John Hopkins Press, 1971), hal. 13-15 (terutama Bab II, "Agricultural Economic Development Theories")

> "*It is useful, as well as roughly accurate, to regard the process of development now going forward in Asia, the Middle East, Africa, and Latin America as analogous to the stage of precondition and take-off of other societies, in the late eighteenth, nineteenth, and twentieth centuries*".[41]

Cara memulangkan perkembangan Asia pada keteraturan-keteraturan dan proses-proses kausal yang dicatat di tempat lain (Barat), dan tidak melihat unsur yang baru hasil bentukan dari sejarah, telah banyak dikritik oleh ilmuwan terkenal Wertheim dalam beberapa telaahnya, seperti tertuang dalam *Indonesian Society in Transition, A Study of Social Change* (1957)—untuk kasus Indonesia, *East-West Parallel* (1964), dan *Third World Whence and Whither?* (1997). Demikian juga dengan Edward W. Said dalam *Orientalism*.

Berbagai penelitian yang memberi dasar legitimasi (kesuksesan) pelaksanaan Revolusi Hijau di Asia Tenggara berangkat dari perspektif neoklasik. Cara menghubungkan proses modernisasi, pembangunan, dan teknologi tampak dalam berbagai penelitian dengan pendekatan *Induced Development Model, Difusion Model and International Technology Transfer, Induced Institutional Innovation Theory,* dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan misalnya oleh Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi.

Sebagai contoh, proses bagaimana kelembagaan desa beradaptasi terhadap teknologi yang dibawa oleh Revolusi Hijau, dukungan kebijakan pemerintah terhadapnya, sehingga memberi dampak pada *produksi* dan tingkat *tekanan penduduk*, merupakan kajian utama dua peneliti tersebut. Pendekatan yang mereka lakukan di Indonesia (Kabupaten Subang) dan Filipina (Laguna, Luzon tengah), misalnya, mencerminkan perspektif itu.[42] Mereka menyimpulkan bahwa pedesaan Laguna berhasil keluar dari jebakan

---

[41] Dikutip dari *Ibid,* hal. 14.

[42] Lihat, Masao Kikuchi dan Yujiro Hayami, "Technological and Institutional Responsse and Income Shares under Demographic Pressure: A Comparison of Indonesian and Philippine Villages", dalam Geoffrey B. Hainsworth, *Village-Level Modernization in Southeast Asia: The Political Economy of Rice and Water* (Columbia University of Columbia Press, 1982), hal. 173-190.

Ricardian melalui pengenalan irigasi modern dan teknologi baru pertanian. Pengalaman itu mampu menolak tuduhan bahwa teknologi modern dan sistem irigasi cenderung hanya menguntungkan petani kaya sehingga mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Bahkan kedua peneliti itu menyatakan keyakinannya di penghujung tulisan tersebut bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan bukanlah nasib yang tak dapat diubah bagi Asia Tenggara jika penanggulangannya ditempuh melalui teknologi, sehingga pertumbuhan penduduk yang memberi tekanan pada penguasaan tanah dapat ditanggulangi.

Jika terdapat kegagalan dan dampak sosial yang merugikan, menurut Yujiro Hayami, lebih disebabkan perbedaan dan keunikan kondisi ekologis dan bukan perbedaan struktur penguasaan tanahnya. Sebab menurutnya, kesuksesan Revolusi Hijau dilakukan dengan cara "*exploitation of unused lands*".[43] Baginya, tidak lagi diperlukan jalan *landreform*, sebab Revolusi Hijau telah memberi jalan keluar bagi stagnasi pertanian di Asia Tenggara.

E. Kritik atas Pelaksanaan Revolusi Hijau

Dalam proses alih teknologi di bidang pertanian, menjadi penting mensituasikannya dengan konteks sosial. Sebab teknologi tidaklah pernah netral secara sosial (*socially neutral*). Revolusi Hijau menyajikan gambaran bagaimana saling terkait hubungan antara negara, sains, dan kontrol sosial. Sebagaimana argumen Perkins, "Penanaman benih varietas unggul hanyalah dapat dipahami melalui tekanan politik yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan terhadap lapis bawah".[44]

---

[43] Yujiro Hayami, "Ecology, History, and Development: A Perspective from Rural Southeast Asia", *op.cit.* hal. 1

[44] Mengenai antar-relasi ini diulas mendalam oleh John H. Perkins, *op.cit.* terutama pada Bab 5 dan Bab 10. Dalam kasus Indonesia, bentuk kekerasan oleh aparat keamanan dalam pelaksanaan Revolusi Hijau dan penolakan terhadap benih unggul dapat disimak dalam laporan sebuah media, "4 penduduk desa Montang Betok, Lombok Timur, direndam di halaman Kodim setempat. Mereka dituduh melakukan subversi karena berani menanam padi lokal di sawahnya", *Tempo,* 19 Februari, 1983.

Revolusi Hijau adalah sepotong kisah bekerjanya struktur kekuasaan sosial di pedesaan. Kondisi dan problem agraria yang berbeda-beda di setiap daerah berdasar keragaman *geographic-historical*-nya masing-masing akan memberi respons dan dampak yang berbeda-beda pula terhadap pelaksanaan Revolusi Hijau di Asia Tenggara. Di antara beberapa dampak negatifnya yang telah banyak dikritik adalah beberapa hal berikut.

1. Diferensiasi sosial

Revolusi Hijau telah mengakibatkan diferensiasi sosial dalam proses, bentuk, indikasi, dan mekanisme yang berbeda-beda di kawasan Asia Tenggara.[45] Intinya, pelaksanaan Revolusi Hijau melalui pengenalan benih baru, penggunaan alat-alat pertanian modern, penggunaan bahan-bahan kimia, penyuluhan dan pemberian kredit, hanya dapat diakses oleh kalangan atas masyarakat tani. Dalam kondisi penguasaan tanah yang timpang dan tidak dilakukan restrukturisasi terhadapnya, pelaksanaan Revolusi Hijau justru mengakibatkan semakin jauhnya kesenjangan (*social and economic gap*) antara petani kaya dengan petani miskin (buruh dan tuna kisma).

Diversifikasi antara pertanian dan non-pertanian berlangsung dalam pola yang hampir sama di semua kawasan Asia Tenggara, yakni aktivitas non-pertanian (*non-agricultural activities*) dilakukan oleh "petani kaya" dan "petani miskin",[46] dan sedikit oleh "petani menengah". Artinya, petani kaya dapat merambah sektor non-pertanian sebab mampu melakukan "akumulasi" atas aktivitas pertaniannya yang telah diuntungkan oleh berbagai sarana yang didapat dari kebijakan Revolusi Hijau. Sementara petani miskin menjalani aktivitas non-pertaniannya sebagai strategi "survival" atau bertahan hidup.

---

[45] Berbagai tulisan dalam Gillian Hart cs. *op.cit.,* menyajikan gambaran diferensiasi sosial di Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia, dengan bentuk, tingkat, dan cara yang berbeda-beda.

[46] *Ibid*. hal. 9.

Dalam kasus di Luzon, Filipina, mekanisasi pertanian difasilitasi melalui kredit Bank Sentral yang bekerja sama dengan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan kesediaan Bank Swasta menerima Sertifikat Transfer Tanah sebagai jaminan atas pinjaman pembelian mesin. Tenaga kerja buruh dan pengolahan menggunakan kerbau menurun tajam. Penggunaan herbisida menyingkirkan peran perempuan yang semula bekerja sebagai pemulia benih.[47] Jika pinjaman untuk pembelian mesin itu tidak terbayar, maka tanah yang telah diagunkan akan berpindah ke tangan bank yang selanjutnya dapat diperjualbelikan ke pihak lain.

2. Marjinalisasi perempuan

Dalam analisis jender, strategi pembenihan Revolusi Hijau yang maskulinis telah merusak dan memarjinalkan "*self-reproducing character and genetic diversity of seeds*" yang memiliki dasar-dasar feminis. IRRI dan berbagai korporasi perbenihan telah mengusir perempuan dalam peran mereka sebagai "pembenih", suatu pengetahuan yang telah mereka miliki dan praktikkan berabad-abad. Bahkan di Filipina, para petani yang telah banyak dirugikan oleh Revolusi Hijau menyebut IRRI sebagai "imperialisme perbenihan", "menabur benih pemerintah, berarti menabur rugi".[48]

Pengalaman Indonesia memberi gambaran serupa. Para pemilik tanah tidak hanya memperoleh keuntungan dari produksi sawahnya, namun juga mereka mampu membeli mesin giling (*huller*) dan menggantikan peran perempuan yang biasanya bertugas menumbuk padi. Efektivitas dan efisiensi yang dihasilkan oleh mesin giling tentu lebih tinggi daripada menumbuk secara manual, sekitar 25% selisihnya. Seiring juga dengan sistem pemanenan yang tidak lagi dilakukan secara konvensional, namun menggunakan sistem *borongan* yang memakai tenaga kerja

[47] Brian Fegan, *op.cit.,* hal. 138.

[48] Vandhana Shiva, *Women Ensure Survival,* hal. 1-2, sumber: *www.metafro.be/leisa/1989/5-4-7.pdf,* diakses tanggal 23 Juni 2009.

dari luar dan didominasi oleh pria. Pemanen luar menggeser pemanen dalam.

Frans Husken dalam disertasinya yang mengambil lokasi di desa Gondosari, Tayu, Pati Jawa tengah, menuliskan hal ini.[49] Ia mengutip paparan beberapa perempuan yang ada di wilayah studinya, Tayu, Jepara,

> "Pukulan apa yang tidak terjadi kepada kami selama bertahun-tahun belakangan ini. Mula-mula datang mesin *selép* yang membikin mati usaha kami sebagai *tuton* (pedagang beras kecil-kecilan). Kemudian pemilik sawah menyerahkan tanduran kepada kelompok-kelompok tetap wanita dan pria yang dianggap berpengalaman dan ahli, sehingga kami tidak kebagian kerja…Semua yang dulunya ikut serta dalam *menderep* dan *mengasak*, sekarang hanya menganggur tinggal di rumah. Bila dulu gampang mendapat kerja, sekarang kok semakin susah...*Wong cilik dipateni kabeh*.[50]

Secara umum, marginalisasi perempuan tidak hanya terjadi akibat pengenalan teknologi modern namun juga adanya alih fungsi lahan, pembatasan terhadap komoditas tertentu, kelembagaan, dan aplikasi program gender pada pertanian.[51] Proses marginalisasi buruh tani dan petani miskin terjadi bersamaan dengan terkonsentrasinya kepemilikan tanah di balik peningkatan produksi pertanian selama Revolusi Hijau.

3. Migrasi sebagai bentuk nyata deagrarianisasi

Proses "deagrarianisasi" dan "marjinalisasi perempuan" telah banyak ditunjukkan dalam berbagai penelitian. Istilah seperti "*housewife-ization*" yang ditemukan dalam kajian di Malaysia Barat, dimana perempuan memiliki julukan "seri rumah tangga"

---

[49] Ringkasannya dapat dibaca dalam Frans Husken, *Cycles of Commercialization and Accumulation in A Central Javanese Village,* dalam Gillian Hart cs., *op.cit.*, hal. 303-331.

[50] Frans Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980* (Jakarta: Grasindo, 1998), hal. 265.

[51] Ken Suratiyah, "Gender dan Pertanian", dalam Sih Handayani dan Yos Soetiyoso (Ed.), *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender* (Yogyakarta: Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta, 1997), hal. 101-112.

(*fulltime housewives*) di Negeri Sembilan, memberi gambaran tentang dampak mekanisasi terhadap tenaga kerja pertanian.[52]

Kasus serupa terjadi di Filipina dan Indonesia. Di Filipina, antara tahun 1977-1984, fenomena yang tampak nyata di desa Pampangan adalah migrasi tenaga kerja perempuan ke negeri Saudi Arabia. Dari total tenaga kerja yang berjumlah 488 jiwa, tenaga kerja pertanian menurun dari 59 menjadi 46 orang (10%), dan pekerja migran ke luar negeri naik dari 17 menjadi 78 (17%), disusul dengan kenaikan tukang batu, tukang kayu, dan tukang tembaga (*tinsmith*) dari 47 menjadi 108 (23%). Jumlah supir, konduktor, dan pengemudi kendaraan roda tiga naik dari 24 menjadi 50 (11%).[53]

Kasus mengenai ketunakismaan dan konsentrasi penguasaan tanah, disusul dengan migrasi sirkuler maupun migran luar negeri di Indonesia (TKI/TKW), ditunjukkan dalam studi Jan Breman dan Gunawan Wiradi dalam *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa,* yang mengambil lokasi di Subang Utara dan Cirebon Timur. Jumlah tunakisma meningkat menjadi 78% dengan kurang dari 20 rumah tangga menguasai 80% luas tanah.[54] Tampak nyata adanya diferensiasi sosial. Lokasi penelitian ini juga merupakan lokasi penelitian Hayami-Kikuchi. Breman-Wiradi menolak argumen Hayami-Kikuchi yang menyatakan bahwa baik orang miskin maupun orang kaya menikmati keuntungan dari Revolusi Hijau. Bukan hanya meningkatnya kesenjangan, namun yang terjadi adalah relasi *patron-client* yang pernah berfungsi memberi "jaminan sosial" terhadap orang miskin sudah tidak ada

[52] Jonathan Rigg, "Rural-urban Interactions, Agriculture and Wealth: A Southeast Asian Perspective", *Progress in Human Geography,* 22, 4 (1998), hal. 508.

[53] Cynthia Banzon-Bautista, "The Saudi Connection: Agrarian Change in A Pampagan Village, 1977-1984", dalam Gillian Hart, Andrew Turton, dan Benjamin White (ed.), *op.cit.,* hal 149.

[54] Jan Breman dan Gunawan Wiradi, *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20* (Jakarta: LP3ES-KITLV, 2004), hal. 64-65.

lagi.[55] Orang lapis bawah tidak hanya tercerabut dari tanahnya (sebagai alat produksi), namun juga ikatan sosialnya.

Bahkan untuk bertahan hidup, tunakisma dari Cirebon Timur pergi ke luar kota. Mereka tidak lantas beralih pada jenis pekerjaan lain, sesuatu yang juga sulit didapatkan, namun banyak juga yang menjadi tenaga kerja panen dengan pergi ke daerah-daerah sekitar Jakarta, bahkan hingga ke Banten. Pilihan ini disertai ancaman pengusiran oleh tenaga kerja setempat dan persaingan dengan tenaga kerja lainnya, bahkan adanya pembakaran terhadap gubug-gubug tempat singgah mereka.[56]

4. Keresahan pedesaan

Dalam bukunya berjudul *Perlawanan Kaum Tani,*[57] James C. Scott memberi contoh perlawanan yang dilakukan oleh petani Malaysia pada tahun 1978-1980, sebagai dampak dilaksanakannya Revolusi Hijau. Bentuk pertama adalah perlawanan perempuan-perempuan penanam yang memboikot pemilik tanah sebab mendatangkan alat-alat panen kombinasi guna menggantikan kerja tangan mereka. Kedua adalah perlawanan dalam bentuk pencurian hasil panen oleh petani pekerja sebelum diangkut dari areal tanam maupun ketika berada di rumah pemiliknya.[58]

Wilayah yang diceritakan Scott adalah desa yang dinamainya Sedaka. Desa ini memiliki 74 rumah tangga, bertempat di Dataran Muda, Kedah, Malaysia. Pada tahun 1979 separoh keluarga miskin memiliki 3% dari lahan padi yang diusahakan dan menggarap termasuk tanah sewa 18%-nya. Ada sepuluh keluarga yang tidak mempunyai tanah. Di lain pihak, terdapat 10 keluarga kaya yang memiliki lebih dari setengah lahan padi yang ada di desa dan masing-masing mengolah rata-rata 8 *acre* (3,7168 ha).

---

[55] *Ibid.,* hal. 28.
[56] *Ibid.,* hal. 89-90.
[57] James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).
[58] *Ibid.*, hal. 278-282.

Pada tahun 1971 dilaksanakan Revolusi Hijau dengan pengenalan cara baru dalam hal pola tanam dan mekanisasi alat-alat pertanian. Cara baru ini membawa keuntungan bagi pemilik lahan, sebab memberi dampak bergandanya panen. Ketika pada tahun 1980 di seluruh Dataran Muda mengalami mekanisasi, alat-alat potong kombinasi raksasa diperkenalkan. Alat yang dibeli dengan harga M$ 200.000 hanya dapat dibeli oleh sindikat-sindikat pengusaha. Alat ini memanen 80% dari tanaman padi sehingga menyingkirkan tenaga kerja petani. Pemilik lahan kecil, penyewa marjinal, dan buruh upahan menjadi dirugikan.

Secara sosial budaya, akibat dari kebijakan ini ikatan patronase memudar dan cara-cara sebelumnya guna mempertahankan ikatan itu jarang lagi dilakukan. Pengadaan pesta oleh petani kaya, pemberian zakat dan pemberian bonus panen pada tenaga kerja tani, sebagai strategi mempertahankan ikatan patron-klien di antara mereka, tidak lagi dilakukan sebab fungsi tenaga kerja petani telah digantikan oleh mesin.

> "Bentuk perlawanan atas hadirnya mesin-mesin itu dilakukan dalam bentuk 'perlawanan sehari-hari'; masuknya mesin dihalang-halangi, baterai-baterai mesin dikeluarkan, karburatornya dirusak, mesinnya dimasukkan ke saluran irigasi, pasir, lumpur atau pun benda-benda semisal paku dan besi-besi bekas dilemparkan ke dalam bor, dan sebagainya."[59]

James C. Scott mencatat tentang pencurian padi. Selama tahun 1979-1980, terdapat 10 kasus pencurian. Kasus yang kerap terjadi adalah pencurian karung-karung goni yang berisi gabah padi.

Beberapah hal di atas itulah yang dicatat James C. Scott akibat dari pelaksanaan Revolusi Hijau di Malaysia.

5. Punahnya keragaman hayati

Revolusi Hijau perlahan-lahan telah menyapu keragaman hayati yang ada di dunia. Amerika pada tahun 1986 telah me-

[59] *Ibid.*, hal. 288-289.

nyimpan 22% koleksi plasma nutfah yang ada di dunia, sementara Uni Soviet 7%, India dan Malaysia masing-masing 6%. Plasma nutfah adalah gen asli yang dapat disilangkan menjadi varietas baru. Keberadaan plasma nutfah mayoritas ada di wilayah negara Dunia Ketiga, namun umumnya dibenihkan di kawasan Utara, khususnya di Amerika Serikat.[60]

Penggunaan herbisida, fungisida, dan pestisida, juga ikut andil merusak daur kehidupan pertanian. Hama tanaman alami ikut mati terkena racun yang disemprotkan ke batang-batang tanaman. Tindakan itu malah memunculkan berbagai penyakit tanaman yang tidak hanya menyerang areal persawahan, namun juga tanaman-tanaman di pekarangan. Hal itu juga disebabkan sistem monokultur yang diterapkan di persawahan.

Pahun 1975 di Indonesia terdapat 80 macam hama dan penyakit tanaman yang mengancam tanaman padi, mulai dari wereng yang dianggap paling ganas, tikus yang punya siklus 7 tahunan, *sundep* alias hama penggerek, belalang, dan *walang-sangit*. Tanaman kelapa diserang oleh 85 macam hama dan penyakit. Di antara semua itu yang paling dahsyat adalah belalang *Sexava Nubila* yang sering menyerang kepulauan Sangihe-Talaud, serta *Sexava Carne* yang menyerang Maluku Utara, dan meloncat ke kepulauan Togean di Teluk Tomini. Tanaman jeruk terancam tidak kurang oleh 74 macam hama dan penyakit, dan jagung sejumlah 51.[61]

F. Siapa yang Diuntungkan oleh Revolusi Hijau?

Jika mengikuti pertumbuhan Rostowian sebagaimana yang dianut banyak ilmuwan neo-klasik, semestinya yang dihasilkan Revolusi Hijau tidak hanya peningkatan produksi, namun juga jawaban atas ketenagakerjaan, sektor pertanian dan non-

[60] Jagannath Pathy, "The United States Intervention in Third World Rural Policies", *op.cit.,* hal. 37.

[61] *Tempo*, edisi 14/V 07 Juni 1975.

pertanian, serta hubungan antara desa dan kota yang berjalan linier menuju "*the age of high mass consumption*".

Sebagaimana uraian di muka, peningkatan produksi tidak berbanding lurus dengan peneguhan hak penguasaan atas modal produksi petani, yakni tanah. Justru terjadi sebaliknya, ketimpangan, ketunakismaan, dan terkonsentrasinya tanah ke segelintir orang di desa.

Tabel 8 berikut menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja pertanian terhadap total tenaga kerja semakin menurun. Di Indonesia pada tahun 1990-an, tenaga kerja pertaniannya menjadi sekitar 50%, turun dari sekitar 70% pada tahun 1960-an. Muncul gejala deagrarianisasi sehingga mengakibatkan tenaga kerja pertanian terlempar keluar, lantas memilih pergi ke kota atau luar negeri sebagai buruh migran. Sementara yang menonjol dari kasus Filipina adalah proporsi penduduk antara desa dan kota. Antara tahun 1980-an hingga 1990-an, kenaikan jumlah penduduk di pedesaan hanya sekitar 5-10% kontras dengan di perkotaannya yang sekitar 60-70%. Di Malaysia justru penurunan tenaga kerja pertaniannya pada tahun 1990-an mencapai sekitar sepertujuh dari angka sebelumnya.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Total dan yang Khusus di Sektor Pertanian, 1961-1995 (dalam juta)[62]

Negara / tahun	Total	Populasi		Populasi	Total tenaga kerja	Tenaga kerja pertanian
		Desa	Desa			
Indonesia						
1961	97.97	83.45	14.52	69.09	38.17	28.23
1970	120.09	99.59	20.50	74.90	45.77	30.34
1980	150.34	116.96	33.38	80.61	60.18	34.81
1990	182.47	126.65	55.82	92.90	80.16	44.23
1995	197.62	127.27	70.36	93.84	91.06	47.14
Thailand						
1961	27.47	24.00	3.47	21.62	13.99	11.66
1970	36.15	31.34	4.80	26.92	17.95	14.32
1980	46.02	38.17	7.84	29.61	24.34	17.26
1990	54.74	44.49	10.25	31.14	31.38	20.10
1995	58.73	47.01	11.72	31.10	34.31	20.70
Philippines						
1961	27.91	19.37	8.53	17.55	10.44	6.58

[62] Data disusun kembali dari tabel IRRI yang berdasarkan data FAO, *op.cit.*

1970	36.55	24.50	12.06	21.09	13.63	7.89
1980	48.04	30.03	18.01	25.07	18.37	9.62
1990	61.04	31.26	29.78	27.83	24.03	11.00
1995	68.34	31.41	36.93	29.00	27.60	11.77
Malaysia						
1961	8.40	6.11	2.29	5.10	2.90	1.81
1970	10.85	7.22	3.63	5.65	3.74	2.01
1980	13.76	7.98	5.79	5.39	5.30	2.16
1990	17.85	8.95	8.89	4.65	7.26	1.99
1995	20.02	9.26	10.76	4.31	8.31	1.89
Asia						
1961	1700.76	1348.30	352.45	1242.31	809.61	612.50
1970	2096.48	1615.83	480.65	1438.57	974.91	693.72
1980	2575.10	1895.04	680.06	1633.88	1228.64	817.13
1990	3097.28	2105.06	992.22	1822.97	1526.79	953.43
1995	3423.29	2244.88	1178.41	1903.98	1701.21	1006.10

Jika benar bahwa pembangunan pertanian melalui Revolusi Hijau menghasilkan perbaikan menyeluruh pada mata pencahariaan (*livelihood*) dan tenaga kerja pedesaan, maka seharusnya tidak terjadi pergeseran-pergeseran angka di atas sebagai cermin dari pencerabutan tenaga kerja pertanian dan migrasi.

Kesimpulan akhir ini mengundang pertanyaan penting atas kebijakan tersebut, untuk siapa sebenarnya Revolusi Hijau itu? Kesahihan argumen Malthusian tentang jumlah penduduk yang mengalami kenaikan berlipat setiap 25 tahun tidak pernah dicek. Pemikiran itu telah mendasari proyek pembangunan sepanjang separoh abad 20 pasca Perang Dunia II, mendasari cara bagaimana relasi antara negara-negara Barat dengan negara-negara Berkembang. Bersama dua produk gagasannya, yakni kebijakan "kontrol populasi" dan "Revolusi Hijau", pemikiran Malthus telah menjadi mitos.[63]

Pihak yang diuntungkan (*beneficieries*) atas Revolusi Hijau yang dicirikan dengan "*capital intensive*" di tingkatan pedesaan adalah para pemilik tanah dan petani kaya yang mampu mengakses teknologi. Di level makro, berbagai pihak yang diuntungkan adalah mereka yang sedari awal mendukung gagasan itu. Berbagai pabrik pupuk semisal "Phillips's American Fertilizer and

[63] Eric B Ross, "The Malthus Factor Poverty, Politics and Population in Capitalist Development", *op.cit.* hal., 18.

Chemical Co.", "DuPont" bank-bank yang terkait dengan Standard Oil Company milik Rockefeller, yang beroperasi di Asia Tenggara dengan bendera yang berbeda-beda, adalah penerima keuntungan yang nyata. Bahkan Revolusi Hijau telah menolong defisit perdagangan non-agrikultural Amerika Serikat.[64]

Sebagai sebuah gagasan, Malthusianisme telah mendesakkan keniscayaan Revolusi Hijau yang tidak memungkinkan alternatif lain dipilih. Gagasan neo-populisme *landreform* dalam bentuk redistribusi tanah kepada satuan rumah tangga baru yang akan dijalankan di negara-negara Asia Tenggara pascakolonial segera disapu bersih. Bentuk sekuritas faktor produksi rumah tangga, yakni tanah, dinilai akan mendorong "peningkatan populasi", sesuatu yang sedari mula ditakutkan oleh pemeluk keyakinan Malthusianisme.

Tahapan selanjutnya, ketika sumber-sumber agraria (tanah) dirubrikasi untuk kepentingan pertambangan, perhutanan, pertanian, dan pembangunan perkotaan melalui pemahaman yang salah akan "hak menguasai negara", alat produksi itu semakin jauh dari massa rakyat. Perubahan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan pada gilirannya menuju ke arah kapitalisme.

Saat ini kita saksikan adanya ketakutan negara Barat terhadap fenomena "migrasi" penduduk dari negara-negara Berkembang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ketakutan itu cermin dari masih hidupnya gagasan Malthusian, setidaknya di negara-negara Eropa saat ini. Gagasan itu membuat proses interaksi antara Utara-Selatan, Barat dan Timur, negara Maju dan Berkembang, terjadi secara dominatif. Kritik dan gugatan terhadap Malthusianisme, Revolusi Hijau dan sejenis pembangunanisme lainnya, yang membawa akibat pada arah transformasi agraria kapitalis yang bias, harus terus-menerus digelorakan.

[64] *Ibid.*, hal. 16.

BAB IV
KAJIAN AGRARIA INDONESIA

Dalam bab ini diuraikan pelembagaan kajian agraria di Indonesia sejak masa Kolonial Hindia Belanda sampai dengan Indonesia merdeka, terutama masa Orde Baru. Berbagai varian kajian agraria akan ditunjukkan, baik yang berbasis kepentingan kebijakan, akademik, maupun partisipatoris-emansipasif.[1] Dari berbagai varian itu kemudian dipetakan karakteristik kajian agrarianya, apakah termasuk kajian agraria di-atau-tentang Indonesia, ataukah kajian agraria Indonesia.

Berbeda dengan Ben White yang membedakan dua konstruksi kajian tersebut berdasarkan siapa yang melakukan kajian (*the role of Indonesian academics rather than the role of foreign academics*),[2] uraian ini lebih mendasarkan diri pada kapasitas dialektika antara teori yang digunakan dengan realitas yang dikaji. Kajian agraria di-atau-tentang Indonesia (*agrarian studies in/on Indonesia*) lebih menerapkan ilmu ekonomi/sosial/humaniora Barat, kerangka analitik, dan konstruksi teoretiknya. Kajian ini secara kategoris menjelaskan dan menyederhanakan rumitnya realitas pedesaan-pertanian yang menyejarah di aneka ragam kondisi

[1] Mengenai pembedaan tiga tipe penelitian dapat dilihat dalam Gunawan Wiradi, *Metodologi Kajian Agraria* (Bogor: Sajogyo Institute dan IPB, 2009), hal. 28.

[2] Ben White, "Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transition and Scholarly Engagement in Indonesia", dalam Vedi R. Hadiz dan D. Dhakidae (Ed.), *Social Science and Power in Indonesia* (Jakarta: Equinox bekerjasama dengan ISEAS, 2005), hal. 107.

geografis kepulauan Indonesia. Sedangkan *Indonesian agrarian studies* adalah cara melihat realitas Indonesia untuk menghasilkan rumusan teoritis baru dengan memperhadapkan pada rumusan teoritis ilmu sosial Barat, kemudian mengorientasikannya menjadi kebijakan pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya perubahan.[3]

Pengalaman berbagai riset individu, lembaga akademis maupun pemerintah, sekaligus eksemplar dari ilmuwan pengkajinya, akan disajikan pula. Dari berbagai pengalaman itu diharapkan tergambar kecenderungan (*trend*) teori, perspektif, disiplin ilmu yang digunakan, serta topik yang dikaji dalam kajian agraria, ketika diletakkan dalam konteks pelembagaan ilmu-ilmu sosial di Indonesia.

A. Sejarah Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia

Sejarah perkembangan ilmu sosial tidak terlepas dari perkembangan ilmu alam. Ilmu pengetahuan tentang manusia di Barat (sosial dan humaniora) berkembang setelah ilmu alam, terutama fisika dan biologi, memantapkan dan mengkonstruksi dasar-dasar ilmiahnya. Ilmu fisika memberi acuan dalam melihat masyarakat sebagai suatu mekanisme yang terkontrol oleh hukum, sementara biologi memberi cara pandang tentang masyarakat sebagai organisme yang diperlengkapi dengan struktur dan fungsinya.[4]

Demikian pula perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Ia tidak pernah secara langsung atau sengaja dikembangkan di Indonesia pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia hanya menjadi keahlian tambahan untuk mendukung keberhasilan tugas di Hindia Belanda. Sejak 1842, pemerintah kolonial memperkenalkan ilmu *indologi* yang di dalamnya dikaji masalah linguistik, geografi, dan etnologi. Sebagai sebuah akade-

[3] Ahmad Nashih Luthfi, "Sajogyo, Pembangun Kajian Agraria Indonesia", *Jurnal Nasional,* 19 Juli 2008.

[4] Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 22.

mi, *indologi* kemudian berkembang dengan dukungan kerajaan menjadi KITLV (*Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde*) di Leiden (1851) dan *Koloniaal Instituut* di Amsterdam (1871), dan tidak pernah diselenggarakan di Hindia Belanda.[5]

Keterkaitan antara semangat yang muncul pada abad XVIII tentang Revolusi Ilmu Pengetahuan (*Scientific Revolution*) dari ilmu alam dan konteks kekuasaan kolonial sangat terlihat gamblang memberi pengaruh dalam perkembangan ilmu sosial di Hindia Belanda.[6] Pada abad XIX ekspedisi saintifik banyak dilakukan di Hindia Belanda. Ekspedisi mengkombinasikan, meski tidak selalu, dua tradisi pengetahuan, yakni antara ilmu kemanusiaan dan ilmu alam. Berbagai ekspedisi besar dilakukan di Sumatera, Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi), dan New Guinea (Papua).

Tampak logis melihat keterkaitan antara ekspedisi dan fase ekspansi negara kolonial Hindia Belanda.[7] Pelembagaan antara ekspedisi ilmu pengetahuan alam dengan tujuan ekspansi kolonial bertitik temu dengan berdirinya *Botanical Garden, yang* dikenal dengan Kebun Raya Bogor, pada tahun 1817 oleh C. G. Reinwardt.[8] Lembaga yang semula hanya mengoleksi "keragaman hayati"[9] ini kemudian berkembang menjadi pusat penelitian untuk tanaman-tanaman komoditas yang menjawab tantangan ekonomi kolonial. Pasca *Agrarische Wet 1870*, pada tahun 1876 didirikan pusat penelitian tanaman ekonomi (*cultuurtuin*) yang kemudian menjadi cikal bakal Lembaga Penelitian Pertanian

---

[5] Mestika Zed, "Ilmu Sosial Indonesia dalam Wacana *Methodenstreit*", dalam Taufik Abdullah, *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 57-58.

[6] Peter Boomgaard, "The Making and Unmaking of Tropical Science Dutch Research on Indonesia, 1600-2000", *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (BKI),* 162-2/3 (2006), hal. 191-217.

[7] *Ibid.*, hal. 204.

[8] *Ibid*., hal. 205.

[9] Sampai dengan tahun 1863 telah terkumpul 10.000 jenis tanaman yang dikoleksi. Simak, Jan H.M. Oudejans, *Perkembangan Pertanian Indonesia* (Yogyakarta: GMU Press, 2006), hal. 29.

Bogor, dan *Plantentuin* pada tahun 1880 yang dikepalai oleh Melchiour Treub.[10]

Nama Melchiour Treub menjadi terkenal dengan gagasannya tentang pendirian Departemen Pertanian. Ia sekaligus menjadi direktur pertamanya. Menyadari ketertinggalan riset yang terkait dengan pertanian rakyat, dan berkutatnya pada riset-riset *cash crops*, maka atas inisiatifnya, didirikanlah Departemen Pertanian pada tanggal 1 Januari 1905. Departemen ini bertugas memperbaiki kondisi pertanian rakyat, usaha pemeliharaan ternak dan perikanan.[11] Treub mengusulkan ke pemerintah agar Departemen Pertanian meniru bentuknya yang ada di Amerika, dengan penekanan pada penelitian pertanian dan tanpa banyak tugas administratif sebagaimana yang ada di Inggris dan Jerman.[12]

Secara khusus pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak memberikan dukungan pada fakultas-fakultas negeri terhadap pelatihan ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi. Pengajaran sosiologi didapatkan di *Rechthogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta pada tahun 1924. Perkuliahan diberikan dalam konteks mendukung secara umum kurikulum kajian hukum. Bahkan pada tahun 1934 pelajaran sosiologi dilarang dan tidak pernah diajarkan lagi.[13]

Kajian sosiologi mendapat perhatian melalui kehadiran para sarjana baik mereka sebagai individu, administratur, dan misionaris yang tertarik pada kajian organisasi sosial. Di antara mereka adalah Wilken, Schrieke, van Leur dan Wertheim. Para sarjana yang menaruh minat pada kajian hukum adat dan

---

[10] *Ibid.*, hal. 30. Secara berturut-turut dibangun stasiun penelitian swasta dan *proefstation* (statsiun percobaan) sesuai dengan komoditas masing-masing: tiga stasiun penelitian tebu di Tegal, Semarang, dan Pasuruan; kopi dan kakao di Salatiga dan Malang; teh di Bogor; tembakau di Klaten dan Jember; dan karet di Medan. Kesemuanya terkait dengan lembaga penelitian di Bogor. *Ibid.*, hal. 32-33.

[11] *Ibid.*, hal. 35.

[12] *Ibid.*, hal. 37.

[13] M. A. Jaspan, *Social Stratification and Social Mobility in Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1960), hal. 7.

ekonomi juga mewariskan materi yang signifikan tentang pemahaman masyarakat Indonesia bagi kajian sosiologi. Dalam kajian hukum adat terdapat van Vollenhoven, ter Haar, Soepomo, Djojodigoeno, Korn, Mallincrockdt, Vergouwen, Tirtawinata dan Hazairin. Dalam etnologi dapat dicatat nama Kruyt, Adriani, Snouck Hurgronje, Kleiweg de Zwaan, Matthes dan Chabot. Sementara dalam ekonomi terdapat Boeke, van Gelderen, dan van der Kolff.[14]

Setelah generasi itu, perhatian pada kajian masyarakat menurun drastis. Ada beberapa alasan. *Pertama*, adanya pendudukan Jepang yang diikuti pergolakan revolusi yang menuntut kedaulatan RI dan mengakibatkan berubahnya susunan masyarakat Indonesia. Akibatnya, banyak data deskriptif pada periode kolonial saat itu berubah dan bernilai sebagai dokumen sejarah. *Kedua*, proses itu berakibat pada penilaian akan keraguan akurasi dan reliabilitas atas apa yang ditulis selama masa kolonial. *Ketiga*, berbagai hasil karya ilmuwan yang disebut di atas, menjadi tidak lagi relevan secara epistemologis, sebab apa yang dihasilkan itu memilki karakter khas, yakni *colonial apologetic* dan *religious propagation.*[15]

Meski demikian, tidak semua karya sarjana Belanda memiliki ciri yang seragam. Dalam hal ini, W. F. Wertheim adalah suatu perkecualian, dengan berbagai karyanya yang berpihak pada rakyat Indonesia. Perhatiannya pada sosiologi baik sebelum maupun setelah Perang mendapat tempat tersendiri dalam sejarah sosiologi Indonesia. Dia terkenal dengan penolakannya pada identifikasi dirinya sebagai bagian dari kolonialisme bahkan ketika ia menjabat sebagai pegawai pemerintah Belanda.

B. Kajian Agraria di Hindia Belanda Abad XX

Dalam hal ini, yang disebut dengan penelitian atau kajian agraria adalah "*social-science research and teaching on agrarian struc-*

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.,* hal. 8.

tures, agrarian history, agrarian and rural poverty, agrarian reform and rural development".[16] Berturut-turut akan disajikan contoh kajian agraria tentang struktur agraria dan kemiskinan, dan bagaimana artikulasi gerakan politik dalam menjawab persoalan-persoalan agraria yang dihadapi.

1. Kehidupan pekerja perkebunan dan petani pada masa *malaise*

Riset sosial ekonomi pernah dihasilkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad XX, tepatnya tahun 1939-1940. Riset itu berjudul *Living Condition of Plantation Workers and Peasant on Java in 1939-1940.* Sebagai riset kebijakan, penelitian tidak memberi penekanan pada sejumlah asumsi-asumsi teoritis tentang bagaimana struktur agraria (ketenagakerjaan) yang ada menyumbang pada kondisi kemiskinan yang terjadi pada pekerja. Sebagai negeri yang pemasukannya masih mengandalkan sektor perusahaan perkebunan, resesi ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 1930-an memberi efek tajam. Yang diharapkan dari riset itu adalah hal-hal praktis tentang "apa yang harus dilakukan" dalam memberi standar dasar upah pekerja tatkala kemunduran ekonomi terjadi, sehingga perekonomian perkebunan tetap dapat berjalan.

Secara metodis penelitian di atas cukup mengandung bias, sebab penelitian dilakukan oleh pejabat negara, wakil dari perusahaan perkebunan, dan sama sekali tidak melibatkan unsur pekerja, dan peneliti independen atau akademisi. Meski demikian, kesimpulan yang dihasilkan memberi gambaran yang negatif atas kondisi pekerja perkebunan dan petani. Berikut uraian tentang hasil penelitian tersebut.[17]

---

[16] Ben White, *loc.cit*.

[17] Uraian ini didasarkan pada ringkasan laporan tersebut, Coolie Budget Commission, *Living Condition of Plantation Workers and Peasant in Java in 1939-*1940—diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh Robert van Niel (New York: Modern Indonesia Project Cornell University, 1956) hal. 122-129.

"Coolie Budget Commission" dibentuk guna menyelidiki kondisi ekonomi sosial buruh perkebunan di Jawa tersebut. Penelitian bertujuan untuk "memformulasikan dasar-dasar anggaran standar" yang hasilnya akan diserahkan kepada Direktur Urusan Hukum dan Ekonomi.

Penelitian sosiologis pada sejumlah perkebunan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat selama kurang lebih setahun itu berhasil diselesaikan pada 8 Desember 1941. Namun hasilnya tidak sempat dipublikasikan, karena dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan penyerangan terhadap sistem administrasi Kolonial.

Sebelum riset itu dilakukan, belum pernah ada penelitian utama tentang berbagai persoalan tenaga kerja-buruh, bahkan untuk kawasan Asia Tenggara. Penelitian itu dilatarbelakangi bencana yang menimpa perekonomian dunia, yang juga tidak terelakkan menimpa Hindia Belanda. Harga produk pertanian Indonesia menurun tajam selama depresi sehingga mempengaruhi turunnya upah buruh. Guna merespons devaluasi mata uang gulden Belanda disamping persiapan pra-perang, pada tahun 1937 harga-harga dinaikkan. Anehnya upah buruh justru tidak dinaikkan dan jauh tertinggal. Padahal pemerintah telah menghimbau para pemilik perusahaan perkebunan agar menaikkan upah.

Komisi penyelidikan beranggotakan 3 pegawai sipil senior, 2 perwakilan perusahaan perkebunan, namun anehnya tidak seorangpun juru bicara yang mewakili kepentingan buruh. Komisi dalam riset lapangannya dibantu oleh staf ahli pertanian, inspektur tenaga kerja, dan lainnya yang bertugas mengawasi pengumpulan data yang dilakukan oleh tenaga yang direkrut dari administrator lokal. Biro pusat statistik pemerintah di Jakarta ikut terlibat dalam penyelidikan.[18]

[18] Lihat analisa ringkas atas laporan tersebut dalam W. F. Wertheim, "The Coolie Budget Report", *Pacific Affair,* Vol. 26, No. 2. (Juni, 1953), hal. 159-164. Analisa mendalam dengan disertai tabel-tabel disajikan dalam W. F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Kajian Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 20.

Komisi melakukan pengumpulan data atas 18 perkebunan sampel dari keseluruhan 1.182 perkebunan yang ada saat itu, dan 2 hutan jati. Pemilihan berdasarkan keragaman geografis dan jenis tanamannya.

Tabel 9. Lokasi dan Jenis Perusahaan Perkebunan yang Dijadikan Sampel Penyelidikan *Komisi*[19]

Perkebunan	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
Karet	1	3	2
Tembakau	-	1	1
Teh	3	-	-
Gula	-	2	2
Kopi	-	-	3
Kayu Jati	-	-	2
Jumlah	4	6	10
Total:		20 lokasi	

Dalam melakukan riset, responden pekerja dikategorikan dalam 3 kelompok: pekerja perkebunan (1.015 keluarga), pekerja pabrik (253 keluarga), dan mandor atau teknisi (287 keluarga). Sementara kaum tani diambil sampel 390 keluarga. Juga dibedakan antara mereka yang menetap di perkebunan dengan yang tidak menetap, artinya pulang ke rumah masing-masing sesuai dengan kondisi setempat.[20]

Jenis informasi yang dikumpulkan adalah tentang komposisi keluarga, jenis kelamin, umur, tinggi-berat anggota keluarga, kondisi rumah, kepemililkan tanah dan ternak, layanan sosial, jumlah perolehan upah dan pendapatan lain, peluang kerja di perkebunan dan tempat lain, pengeluaran dan pola konsumsi.[21]

Saat itu Jawa dihuni 14 juta jiwa. Ketika dilakukan sensus tahun 1930, sekitar sejuta penduduknya bekerja di perkebunan Eropa. Separuh dari jumlah itu bekerja di perkebunan gula. Jika tenaga kerja paruh waktu yang tidak tercatat dalam sensus disertakan dalam hitungan, maka akan diperoleh angka 800.000

[19] Coolie Budget Commission, *op.cit.*, hal. 123.
[20] *Ibid.*
[21] Uraian selanjutnya, W. F. Wertheim (1953), *op.cit.,* 159-164.

untuk tenaga kerja di perkebunan gula saja. Sehingga diperkirakan sampai dengan tahun 1939, jumlah tenaga kerja perkebunan gula sekitar 1,5 juta jiwa.

Hasil penyelidikan itu menunjukkan bahwa sejumlah kecil mandor dan teknisi menerima gaji tertinggi. Dalam kasus pekerja perkebunan yang menetap, 10% anak berusia di bawah 12 tahun, 62% berusia 12-16 dalam kondisi bekerja dan mendapat upah. Demikian juga istri ikut sebagai tenaga kerja, jumlahnya sekitar 68-70% dari total.

Area yang dialokasikan per keluarga rata-rata lima meter, termasuk ruang untuk dapur. Pemuka setempat menikmati hak istimewa, sementara keluarga kuli terkadang tinggal di barak dengan menempati satu ruangan. Tempat tinggal itu dibangun dari anyaman bambu dan separuhnya berlantai tanah. Secara umum, kondisi tempat tinggal para mandor dan teknisi sangat mencolok perbedaannya dengan para kuli perkebunan dan pabrik, tidak hanya dari segi bangunan rumahnya, namun juga perlengkapan di dalamnya.

Kuli pabrik menerima upah lebih besar ketimbang kuli perkebunan, dan yang menetap menerima lebih besar upah ketimbang yang tidak menetap. Seorang kuli perkebunan laki-laki yang tidak menetap menerima upah 2/3 sen saat itu. Perempuannya menerima lebih sedikit. Secara keseluruhan, pekerja laki-laki yang menetap menerima upah 1,1 sen dan tidak lebih dari 1,9 sen per jam. Sementara mandor dan teknisi bergaji 2,7.

Semua pekerja pabrik laki-laki baik yang menetap atau tidak bekerja selama 10-11,5 jam perhari, dan perempuannya 9,1-10,3 jam. Sedangkan yang bekerja di perkebunan rata-rata 8 jam perhari.

Nilai konsumsi kuli perkebunan hampir semua dari upah yang diperolehnya per hari, hanya mandor dan teknisi yang bisa menabung. Persentase dari pengeluaran itu yang tertinggi adalah untuk membayar hutang, melalui kredit, terutama untuk kebutuhan mereka selama di perkebunan. Saat penelitian

dilakukan, kewajiban hutang mereka dalam kondisi yang sangat buruk.

Mengenai kondisi fisik pekerja, dijelaskan bahwa berat dan tinggi perempuan naik tajam memasuki usia 18 tahun, dan rata-rata turun setelah usia 30 tahun. Laki-lakinya naik secara perlahan di atas usia 18 tahun hingga 23 tahun, dan tidak lagi naik setelah itu. Di Jawa Barat, berat laki-laki dewasa sekitar 108-115 *pound*, di Jawa Tengah 101-106 *pound*, sementara perempuannya sekitar 88-97 dan 84-93 pound. Anggota keluarga mandor dan teknisi lebih berat dan tinggi. Penelitian melihat fenomena itu terkait dengan tingkat konsumsi pangan.

Untuk pengeluaran dibedakan antara beberapa kategori: pangan, bahan bakar, lampu penerangan, dan air; pakaian; perbaikan rumah dan uang sewa; dan lain-lain. Sebagian kebutuhan pangan pekerja paruh waktu berasal dari yang diusahakan sendiri di desa mereka.

Kuli dan petani yang tidak menetap menghabiskan 70-75% pendapatannya untuk kebutuhan pangan, dan 80% bagi mereka yang menetap di perkebunan. Gambaran berbeda bagi para mandor dan teknisi. Mereka menghabiskan rata-rata 58-59% untuk kebutuhan pangannya.

Pengeluaran untuk kategori bahan bakar, lampu penerangan, dan air utamanya dibelikan kayu bakar dan minyak tanah. Sedangkan kebutuhan pakaian dan sabun rata-rata perbulan untuk kuli dan petani sebesar 8-14 sen. Kecuali bagi kategori mandor dan teknisi yang rata-rata 1,6-1,7 sen per keluarga per bulan, tidak tersisa jatah untuk perbaikan rumah dan perkakas. Kebutuhan lain-lain seperi merokok dan menginang, meningkat tajam jika terjadi kenaikan upah. Secara keseluruhan, mereka yang menetap menghabiskan banyak pengeluaran dibanding yang tidak menetap.[22]

[22] Jika analisa Artikulasi Moda Produksi dilakukan, keberadaan tenaga kerja petani pedesaan berfungsi sebagai "labor supply" yang murah bagi perusahaan perkebunan yang sifatnya *enclave* tersebut. Tenaga kerja yang sifatnya sirkuler justru dipertahankan, sebab jika tidak perusahaan tidak mampu membiayai ongkos kehidupan mereka sehari-hari. Biaya hidup tenaga kerja itu sebagian

Pengeluaran untuk keperluan kesehatan, sanitasi, termasuk untuk mandi dan merawat diri, pendidikan, transportasi, berkirim surat, upah pembantu rumah tangga, olah raga dan rekreasi, hanya ada pada golongan mandor dan teknisi. Justru untuk kepentingan agama (*selamatan*), kewajiban sosial, dan amal, kelompok miskin itu menghabiskan 90% dari pengeluaran lain-lain mereka.

Sekitar 60-70% pengeluaran pangan kelompk kuli dan petani miskin adalah untuk membeli beras. Jika menginginkan membeli daging dan sumber protein lain semisal mentega, gula, teh dan kopi, maka jatah untuk membeli beras menjadi berkurang. Pekerja yang menetap lebih banyak mengonsumsi daging dibanding lainnya yang hanya makan sayuran dan rempah-rempah.

Rata-rata konsumsi anggota rumah tangga kuli yang tidak menetap, termasuk jika ada *selamatan* adalah 1.282 kalori; kuli pabrik tidak menetap mengkonsumsi 1.399; dan petani lokal mengkonsumsi 1.391. Namun angka ini berbeda-beda di beberapa tempat. Untuk Jawa Barat, angka rata-rata konsumsi kalori adalah paling tinggi dan Jawa Tengah berangka paling rendah. Di perkebunan gula, tenaga kerja paksa yang tidak menetap, konsumsi kalori perhari termasuk ketika ada acara *selamatan* adalah 959 kalori, berbeda dengan petani setempat yang 1.159 kalori. Satu kasus perkebunan gula di Jawa tengah ditemukan angka 652-894.

Konsumsi protein sangat menentukan angka kalori itu. Konsumsi protein rata-rata harian adalah 50-60 gram (mendekati 1¾ hingga 2 ons) bagi mereka para mandor, teknisi, dan kuli yang menetap. Kuli yang tidak menetap dan petani

---

dipenuhi melalui aktivitas dan perolehan mereka di pertanian/desa. Sehingga tepat jika dikatakan bahwa pertanian mensubsidi (perusahaan) perkebunan. Bandingkan dengan analisa Clifford Geertz yang justru melihat fenomena petani dengan "kakinya yang sebelah tertancap di lumpur sawah, yang sebelah lagi menginjak lantai pabrik" untuk menunjukkan terbukanya peluang bekerja di perusahaan perkebunan, dan secara umum sistem kapitalisme Barat yang menurutnya tidak banyak mempengaruhi kondisi petani Jawa.

mengkonsumsi 30-40 gram. Protein hewani nyaris tidak dijumpai dalam semua keluarga kelompok ini. Kelompok istimewa akan menikmati protein hewani, termasuk ketika ada *selamatan*, sebanyak 10 gram per hari. Sepotong ikan sebagai lauk adalah sebuah kemewahan bagi kuli perkebunan.

W. F. Wertheim menyimpulkan bahwa gambaran keseluruhan yang disajikan Laporan Komisi Anggaran Kuli adalah sungguh menyusahkan hati. Upah yang diterima pekerja kuli sungguh rendah sehingga mereka nyaris menjadi "pengangguran terselubung".[23] Ia menyatakan,

> "Sebagaimana penggantian tanam paksa atau sanksi pidana dengan kontrak bebas, belum terbukti merupakan karunia yang sesungguhnya bagi para pekerja perkebunan, maka penggantian kerja paksa dengan pekerja upahan untuk pekerjaan umum tidak menunjukkan keuntungan yang jelas bagi para pekerja yang terkait".[24]

Hasil penelitian itu tidak membawa implikasi kebijakan apapun meski kesimpulannya menjadi pembicaraan umum di kalangan Belanda. Menjelang akhir periode sebelum perang, gambaran paradoksal muncul, sistem perbudakan secara resmi memang telah dihapuskan, namun dalam kaitannya dengan pasokan tenaga kerja yang semakin banyak di perkebunan dan pelabuhan, muncul kemungkinan terjadinya kekerasan baru. Terlebih pada masa pendudukan Jepang.[25]

Penelitian di atas diperlukan sebagai bagian dari proses penciptaan pengetahuan tentang seperti apa kehidupan pekerja perkebunan dan petani yang darinya dapat dirumuskan standar anggaran. Dari situ dapat tercipta standar minimal "*rust en orde*", sehingga tidak terjadi "*agrarian unrest*" atau keresahan agraria di wilayah perusahaan perkebunan. Penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan penataan ulang atas struktur agraria, walau

---

[23] Bandingkan juga penegasannya kembali dalam W. F. Wertheim, (1999) *op.cit.,* hal. 201.

[24] *Ibid.*, hal. 208.

[25] *Ibid.*, hal. 213.

sistem ketenagakerjaan yang berdampak pada kemiskinan tampak secara gamblang.

Dalam kata pengantar atas laporan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Goerge McTurnan Kahin menyatakan bahwa kesimpulan itu mengkonfirmasi mengapa para pekerja perkebunan memberi dukungan positif terhadap para pemimpin revolusi. Sekaligus memberi pemahaman mengapa organisasi buruh pasca-revolusi dapat berkembang demikian kuat di antara buruh perkebunan.[26] Hal terakhir telah sangat gamblang ditunjukkan oleh Ann Laura Stoler dalam kasus perkebunan di daerah Pantai Timur Sumatera.[27] Demikian juga kuatnya SOBSI di berbagai wilayah perkebunan di Jawa dan periode awal BTI yang beranggotakan para buruh perkebunan melebihi petani, terutama tahun-tahun sebelum peristiwa perjanjian Konferensi Meja Bundar.

2. Penelitian S. Dingley, *The Peasant's Movement in Indonesia*

Sumira Dingley adalah nama samaran Iwa Kusuma Sumantri. Pada tahun 1927 ia menulis *The Peasant's Movement in Indonesia*.[28] Bukunya berisi tentang perjuangan dan konflik petani melawan perusahaan perkebunan Eropa, beratnya beban pajak, pemilikan tanah yang luas dan para "raja-raja" lokal, aktivitas lintah darat Cina dan para haji, juga tentang petani tak ber-

[26] George McTurnan Kahin, "Preface", dalam Coolie Budget Commission, *op.cit.,* hal. i

[27] Lihat, Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979* (Yogyakarta: KARSA, 2005).

[28] S. Dingley, *The Peasant's Movement in Indonesia* (Berlin: R.L. Prager, 1927). Iwa Kusuma Sumantri berasal dari Garut, Jawa Barat. Setelah menyelesaikan studi hukum di Leiden, ia lalu melanjutkan ke Moskow pada tahun 1925. Penelitannya ini ditulis dalam bahasa Perancis yang disajikan untuk Organisasi Internasional Petani (*Krestintern*). Ia menuliskannya agar dapat menambah uang sakunya yang sangat kecil. Ketika Indonesia merdeka, Iwa Kusuma Sumantri menjadi Menteri Pendidikan dan Rektor Universitas Padjajaran, Bandung. Ben White, *op.cit.*, hal. 111.

pendidikan yang tidak mengetahui hak-hak politiknya, dan berbagai pengalaman organisasi tani.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Bab II terdahulu, sejarah (pedesaan di) Indonesia adalah sejarah agraria, yaitu tentang bagaimana tanah sebagai ruang fisik, geografis, dan kemudian ruang sosial-kultural diatur, dikelola, dan dikuasai. Iwa Kusuma Sumantri menegaskan hal itu. Ia melihat sejarah kolonialisme di Indonesia sebagai sejarah agraria, dan berbagai persoalan agraria yang ada di dalamnya, para aktor terutama petani melakukan pergerakan sebagai respons dari sistem penguasaan sumber-sumber agraria yang ada.

Ia menunjukkan berbagai perlawanan dalam sejarah Indonesia sebagai sejarah pergerakan petani.[29] Dalam Bab I, ia menyajikan *overview* bahwa gerakan petani terkait dengan eksploitasi sumber-sumber agraria melalui sistem Barat maupun feodal.

S. Dingley menunjukkan bagaimana eksploitasi terhadap kaum petani Indonesia ini pada gilirannya memicu perlawanan yang diwujudkan dalam berbagai macam pemberontakan, perang, serangan-serangan individual atas para penindas. Berbagai ekspresi keagamaan dalam melakukan pergerakan tersebut seringkali terjadi. Ia mencontohkan perang Belanda melawan para penguasa kepulauan Maluku, Ternate dan Tidore, pada tahun 1618-1619, dan pada tahun 1856-1858 adalah bentuk dari resistensi dan penolakan memproduksi rempah-rempah dan bahan makanan, karena Belanda membayar mereka dengan harga yang terlalu murah. Resistensi dari para petani ini didukung oleh Raja (Sultan) Ternate dan Tidore sehingga Belanda menyatakan perang atas mereka.

Demikian juga pemberontakan petani di Minangkabau pada tahun 1822 hingga tahun 1841. Gerakan petani ini dalam historiografi Indonesia sering dikenal dengan "Perang Padri", konflik budaya dan agama antara kelompok adat dan agama, tua

[29] Uraian didasarkan pada naskah tersebut yang telah diterjemahkan dan belum dipublikasikan, S. Dingley, *Gerakan Petani di Indonesia* (Penerjemah: Ruslani), tt., tt.

dan muda. Namun Dingley menarasikannya sebagai pemberontakan petani yang mengeluhkan wajib kerja dan "Pajak Tanah" yang sebagian telah disalahgunakan oleh para pegawai kecil dan sesepuh desa. Peristiwa "Perang Jawa" tahun 1825-1830 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Diponegoro dan Sentot Alibasjah Prawiradirdjo, pemberontakan petani di Cilegon 1888, pemberontakan di Aceh pada tahun 1893 dan 1906 dengan pemimpin-pemimpinnya seperti Toha Oemar, Tjoet Ali, dan Blang Pidi, memberi kesamaan narasi. Semua itu memiliki karakter pemberontakan yang muncul karena kondisi para petani yang sangat mengenaskan akibat eksploitasi dan ekstraksi atas sumber-sumber agraria yang mengalienasikan kehidupan petani setempat.

Pada Bab II, selain menggunakan data dari *Statistical Abstracts of the Netherlands Indies,* yang menarik adalah, Dingley mengutip brosur karya Wongso berjudul *Kitab Tani.* Brosur itu merupakan pamflet berbahasa Melayu untuk para petani. Dengan itulah Dingley menyajikan struktur penguasaan tanah dan berapa rata-rata tanah yang dikuasai oleh petani, yakni kurang dari satu *bau*. Analisis kelas yang dicirikan atas penguasaan tanah menjadi analisis yang cukup kuat dalam naskah tersebut.

Uraian tentang organisasi tani ada dalam Bab 3. Ia secara khusus membahas tentang aktifnya sarekat-sarekat tani yang berada di bawah organisasi Partai Komunis Indonesia (suatu partai yang pertama kali menggunakan kata "Indonesia" sebagai nama organisasinya), yang dalam praktik di berbagai kota memiliki karakter yang berbeda-beda. Ia misalnya, menunjukkan sarekat yang ada di Solo di bawah kepemimpinan Haji Misbach. Organisasi-organisasi tani yang hendak didirikan oleh pemerintah kolonial ia pandang dengan skeptis. Menurutnya,

> "Kita lihat bahwa pemerintah Indonesia pada saat ini tengah memberikan tawaran yang serius untuk mendukung para petani. Oleh karenanya, adalah salah satu tugas terpenting dari setiap komunis militan untuk memasuki berbagai organisasi petani, dengan maksud untuk membongkar permainan dari para pemeras,

> yang mengalienasi massa petani dari kaum proletariat, dengan berpura-pura mendukung mereka."[30]

Dalam historiografi Indonesia, karya Iwa Kusuma Sumantri tersebut tidak dicatat sebagai salah satu tonggak dari apa yang disebut dengan "historiografi Indonesiasentris". Jika jenis tulisan sejarah ini bercirikan "orang Indonesia sebagai aktor sejarah", dan "bukan hanya kehidupan keraton-sentris, namun petani juga dapat ditulis dalam sejarah", maka karya Iwa Kusuma Sumantri memenuhi syarat-syarat itu.[31] Apakah historiografi Indonesia telah sejak awal bersikap diskriminatif terhadap teks-teks dengan tema gerakan agraria, ataukah disebabkan ia diproduksi oleh kelompok kiri Indonesia? Pada masa pergerakan pun, para intelektual progresif tidak menaruh perhatian pada isu kemiskinan pedesaan dan kondisi agraria.[32] Dua perkecualian dapat disebut di sini, yakni Iwa Kusuma Sumantri sebagaimana uraian di atas dan Soekarno dalam berbagai tulisannya, terutama tentang Marhaen dan Marhaenisme.

3. *Wong cilik*-nya Soekarno

Istilah *wong cilik* memuat berbagai kategori sosial. Ia bersifat partikular sesuai dengan konteks lokal dan kapan istilah itu digunakan. Istilah itu lebih merujuk pada pernyataan ideologis daripada penjelasan sosiologis.[33] Perbedaan antara *wong cilik* dan

---

[30] Lihat paragraf penutup Bab 5 dalam naskah tersebut.

[31] Sartono Kartodirdjo dalam disertasinya mengutip buku ini untuk bab satu-nya. Anehnya, ia tidak menghadirkannya kembali untuk buku-buku utamanya tentang historiografi. Dari pelacakan daftar pustaka dan indeks, tidak disebut nama maupun judul penelitian tersebut.

[32] Meskipun dua partai politik telah lahir pada tahun 1920-an, namun tidak ada organisasi berbasis kaum tani yang muncul. Tidak seperti di negara-negara lain, di Indonesia ironis sekali kaum intelektual dan tokoh pergerakannya tidak mengangkat isu agraria sebagai isu politik mereka. Lihat, Jan Breman, "The Village in Focus", dalam Breman, P. Kloos dan A. Saith (Eds.), *The Village in Asia Revisited* (J.C. Delhi: Oxford University Press, 1997), hal. 15-75.

[33] John Sullivan, dikutip dari Arif Aris Mundayat, *Ritual and Politics in New Order Indonesia: A Study of Discourse and Counter-Discourse in Indonesia*, Disertasi pada School of Social and Life Science, Swinburne University of Technology, 2005, hal. 2.

wong gede bukan hanya disebabkan faktor kepemilikan kekayaan, sehingga dengan itu menjadikan *wong gede* superior dan *wong cilik* inferior, namun lebih menjadi persoalan objektifikasi "kelompok atas" terhadap "kelompok bawah" yang memungkinkan pembedaan sosio-kultural dilakukan.[34]

Lantas seperti apa imajinasi sosiologis[35] Soekarno tentang *wong cilik* dalam masyarakat Indonesia? Setidaknya dalam 3 tulisan yang terhimpun dalam buku *Dibawah Bendera Revolusi* ("Marhaen dan Marhaeni", "Marhaen dan Proletar", dan "Mentjapai Indonesia Merdeka"), Soekarno menjelaskan siapa *wong cilik* itu. Ia menyebutnya dengan istilah *Marhaen,* suatu nama yang diambilnya dari seorang petani bernama Marhaen yang dijumpainya di Cigelereng dekat Bandung.[36] Petani itu mengolah lahan sempit yang dimilikinya sendiri, melarat tetapi bukan proletar sebagaimana dalam istilah Marxis.

Imajinasi *wong cilik* Soekarno melalui "pengalaman bertemunya" ia dengan Marhaen mengkonfirmasi pemahamannya tentang struktur kelas pedesaan yang berasal dari Karl Kautsky.[37] Berbeda dengan pendirian Lenin yang mengatakan bahwa proses kapitalisme di pedesaan akan menghilangkan kelas petani di pedesaan (*de-peasantization*), Kautsky berpendapat bahwa yang terjadi adalah peminggiran masyarakat tani (*peasantry*) dan bukannya lenyap sama sekali.[38] Marhaen yang dijumpai Soekarno adalah petani yang bukan "tanpa alat produksi sama sekali" sebagaimana proletar-Marxis, namun masih "memiliki dan mengusahakan tanah yang sempit".

---

[34] Arif Aris Mundayat, *Ibid.*

[35] Tentang bagaimana massa "dibayangkan" dan "didistorsi" secara epistemologis dalam ilmu sosial, lihat W. F. Wertheim, *Elite Perception and The Masses*, Department of South and Southeast Asia Kajianes, Sociology and Anthropology Center, Amsterdam University, 1984

[36] Nama Marhaen tidak lazim digunakan oleh orang Sunda, kecuali jika benar bahwa nama itu hasil kreasi Soekarno, akronim dari Marx, Hegel, dan Engels.

[37] Ben White, *op.cit.*, hal. 112.

[38] Gunawan Wiradi, *op.cit.*, hal. 121.

Jika Kautsky dengan pemahaman itu berujung pada saran untuk menetralisir kaum tani sebab tidak progresifnya mereka akibat proses kapitalisasi di pedesaan[39], maka begitupun juga pendapat Soekarno. Menurutnya, secara umum yang disebut Marhaen adalah bukan hanya petani namun juga kaum buruh, dan kaum melarat Indonesia yang lain, "misalnya kaum dagang ketjil, kaum ngarit, kaum tukang kaleng, kaum grobag, kaum nelajan, dan kaum lain-lain"[40], akan tetapi yang menjadi bagian besar sekali dalam perjuangan kaum Marhaen adalah kaum proletar (kaum buruh). Sebab, lanjutnya:

> "Kaum proletarlah yang kini lebih hidup didalam ideologi-modern, kaum proletarlah jang sebagai klasse lebih langsung terkena [sic.] oleh kapitalisme, kaum proletarlah jang lebih 'mengerti' akan segala-galanja kemoederenan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi".[41]

Selain itu, menurut Soekarno kaum tani akibat dari feodalisme masih dihinggapi alam fikiran mistis, kolot, kuno dan meyakini datangnya "Ratu Adil" yang kelak akan menolong nasib mereka.

Cara pandang Soekarno terhadap petani dengan proletar memang sangat berlainan. Meski dia, sebagaimana disebut di muka, adalah perkecualian dari para tokoh pergerakan yang menaruh perhatian pada isu dan kondisi agraria, namun pemahamannya tehadap struktur sosial pedesaan tidaklah menggambarkan adanya diferensiasi internal. Ini sangat berbeda dengan pandangannya tentang kaum proletar. Dalam tulisan "Kapitalisme Bangsa Sendiri", ia menyadari adanya diferensiasi internal itu: tuan-tuan bangsa sendiri yang ikut "menyengsarakan buruh". Cara produksi kapitalisme memisahkan kaum buruh dari alat produksinya, yang mengakibatkan "meerwaarde" (*surplus value*) jatuh ke tangan majikan, juga mengakibatkan kaum buruh

---

[39] *Ibid.*

[40] Soekarno, "Marhaen dan Proletar", dalam *Dibawah Bendera Revolusi,* (Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964), hal. 254.

[41] *Ibid.*

industri batik, rokok kretek, dan lainnya di negeri Mataram, Laweyan, Kudus, Blitar, hanya menerima 10 hingga 20 sen sehari.[42]

Namun demikian, cara pandang yang mengabaikan diferensasi sosial masyarakat tani itu tidak lebih "strategi politik" Soekarno yang lebih mengedepankan "kesatuan identitas" masyarakat Indonesia dan mengalihkannya pada bentuk perjuangan melawan kolonial. Jika diferensiasi itu ditunjukkannya, maka bisa jadi membahayakan proses integrasi dan bangunan nasionalisme yang selalu dipropagandakannya. Potensi adanya pertentangan kelas dalam masyarakat pertanian-pedesaan dialihkan menjadi pertentangan antara *colonizer* dengan *colonized.* Ideologi memang seringkali tidak bersepadan dengan realitasnya. Dan Soekarno telah berstrategi memilih-milih mana yang mungkin untuk dimunculkan sebagai realitas, dan mana yang diabaikannya.

Demikian juga pemikiran Soekarno tentang gerakan perempuan. Kaum Marhaeni tidak perlu dipisah-pisahkan dengan kaum Marhaen sebab akan memperlemah gerakan. Ia menyerukan agar "satu massa aksi, jangan dipisah-pisahkan".[43]

Cara pandang Iwa Kusuma Sumantri dan Soekarno dalam melihat sejarah Indonesia, khususnya realitas pedesaan, dengan menghadapkannya pada pertumbuhan kapitalisme sangatlah menarik untuk diperhatikan. Jika benar bahwa penulisan sejarah Indonesia dengan cara menghadapkannya pada pertumbuhan kapitalisme dalam metodologi Marxis atau ekonomi politik telah (di)hilang(kan) selama beberapa dekade dalam historiografi Indonesia, apakah pengabaiannya telah berlangsung sejak awal sebelum terjadi peristiwa 65?

Seminar Sejarah Nasional I pada tahun 1957 tidak memunculkan secara eksplisit bagaimana analisa Marxis digunakan. Berbagai prasaran tentang periodisasi dan perdebatan tentang filsafat sejarah (nasional) juga tidak mencerminkan kecenderungan historiografi Marxis. Moh. Ali sebagai salah satu pemrasaran ke-

[42] Soekarno, "Kapitalisme Bangsa Sendiri", dalam *Ibid.*, hal. 181-182.
[43] Soekarno, "Marhaen dan Marhaeni", dalam *Ibid.* hal. 247.

tika mengusulkan periodisasi Indonesiasentris tidak pula memberi sinyal ke arah sana.[44] Padahal dalam beberapa tulisannya yang terbit tahun 1950, ia bersimpati pada dua cara pandang atas sejarah Indonesia "secara Komunistis"[45]. Ia menunjuk dua nama, Tan Malaka dan S. J. Rutgers.

Dalam tulisan itu Moh. Ali menyajikan periodisasi sejarah berdasarkan "politik ekonomi".[46] Ia menunjukkan periodisasi Tan Malaka dalam buku *Massa Actie*-nya, sebagai historiografi yang didasarkan atas "rakyat-jembel Indonesia dan bahwa sejarah yang dilukiskan itu memang sejarah rakyat jembel".[47] Tan Malaka membuat 5 babakan zaman. Dua Zaman terakhir adalah Zaman Belanda yang berisi dua periode, yakni imperialisme Kuno dan Imperialisme Modern, dan Zaman Perebutan Kekuasaan antara Kelas Jembel dan Kaum Imperialisme.

Sementara *Rutgers* dengan faham Komunisnya menyajikan periodisasi sejarah Indonesia berdasarkan "produksi, yaitu cara produksi, cara menghasilkan sesuatu", dan bagaimana "perkembangan sistem penggunaan modal dan cara menghasilkan barang".[48] Moh Ali menyimpulkan, "Membaca *Massa Actie* maupun

---

[44] Simak *Laporan Seminar Sejarah* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1958), terutama hal. 54-55. Seminar Sejarah I tahun 1957 di UGM, Yogyakarta, ini dihadiri oleh D.N. Aidit sebagai ketua Partai Komunis Indonesia yang disertai Njoto. Sementara bertindak sebagai sekretaris panitia pelaksana adalah Drs. Busono Wiwoho yang juga menjadi ketua Himpunan Sarjana Indonesia. Pemberitaan kehadiran pimpinan PKI ini dimuat dalam *Harian Rakjat*, Kamis 19 Desember 1957.

[45] Bukunya semula berjudul *Sedjarah Nasional* dan diterbitkan kembali menjadi *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005). Dalam kesempatan lain ia menyebutnya Marxis (historiografi Marxis). Dua nama yang ditambahkannya sebagai "sejarawan Marxis" adalah D.N. Aidit dan A. Guber. Meski begitu, ia mengkritik keduanya sebagai "agak terlampau bebas menggunakan fakta-fakta demi tujuan mereka". Moh. Ali, "Beberapa Masalah tentang Historiogarfi Indonesia", dalam Soedjatmoko, dkk. (Ed.), *Historiografi Indonesia, Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1995), *fn.* 48, hal. 376.

[46] Maksudnya adalah ekonomi politik.

[47] Moh Ali, 2005, *op.cit.*, hal. 176.

[48] *Ibid.,* hal. 177.

Indonesie 1 karangan Rutgers membawa *alam baru* tentang beberapa segi dari sejarah Indonesia".[49]

Dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa akar-akar historiografi Indonesiasentris semula lebih kuat dorongan "imajinasi sosiologisnya" (yakni tentang siapa yang seharusnya dinarasikan dalam sejarah) daripada "metode eksplanatif" (multidimensi ilmu sosial), "penggunaan sumber" (non-filologis), dan "aspek"-nya (non-politik). Rintisan ke arah itu mula-mula dikecambahkan oleh mereka, diakui atau tidak, para "sejarawan" yang berperspektif "Marxis-Komunis".

C. Kajian Agraria Indonesia Pasca-Kemerdekaan

Kajian Agraria Indonesia pasca kemerdekaan dapat dikatakan tumbuh subur seiring dengan semangat dekolonisasi sistem penguasaan sumber daya agraria di Indonesia. Berbagai kajian oleh pelaku yang beragam memberi gambaran bertemunya ranah kajian dengan gagasan pembaharuan baik dari pihak pengambil kebijakan maupun gerakan rakyat.

Secara khusus, sejak tahun 1945 ada tiga rintisan sosiologi agraria di Indonesia[50]. Ketiga rintisan itu muncul dari lembaga yang terkategori dalam perguruan tinggi, jawatan atau lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat tani atau organisasi politik. Lembaga rintisan dalam kategori itu telah dipaparkan oleh Kampto Utomo. Di antaranya adalah: *Sosiografi Indonesia*-UGM, riset di UI, IPB, dan Universitas Padjajaran; Kantor

[49] *Ibid.,* hal. 178. Penekanan dari penulis (ANL).

[50] Sosiologi agraria atau sosiologi pedesaan menurut Kampto Utomo adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk dan proses-proses kelompok sosial dan masyarakat pedesaan dan pertanian, dengan senantiasa menyadari tidak terpisahnya tinjauan menyeluruh atas masyarakat bangsa, hubungan timbal-balik dengan masyarakat pedesaan dan sektor non-pertanian. Kampto Utomo, "Research Sosiologi Pedesaan di Indonesia, 1945-1965", dalam Sadikin Soemintawikarta (Ed.), *Research di Indonesia, 1945-1965, Bidang Pertanian (III)* (Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia, 1965), hal. 267.

Gerakan Tani, Djawatan Pertanian Rakjat, dan Djawatan Agraria dalam tubuh Departemen Pertanian; dan riset Aidit dkk.[51]

Ben White berusaha menunjukkan dan memperluas dari apa yang telah disebut oleh Kampto Utomo dalam menunjukkan kajian apa saja yang termasuk kajian agraria. Ia setidaknya menyebut 8 kajian, gagasan, dan pengajaran agraria selama periode ini.[52] Secara berturut-turut akan diuraikan sebagai berikut.

1. Dalam rangka persiapan UUPA

Harus dipahami terlebih dahulu bahwa gagasan restrukturisasi penguasaan sumber-sumber agraria telah diusung jauh-jauh hari oleh para pendiri bangsa dan menjadi tuntutan umum di negara-negara yang baru saja bebas dari kolonialisme. Di negara-negara Asia maupun Timur Jauh, tuntutan ini menjadi isu politik utama setelah mereka terlepas dari kekuasaan kolonial. Mereka merasakan perlunya segera dibuat perundang-undangan yang mengurangi biaya sewa tanah dan untuk memberi jaminan atas terciptanya kondisi keamanan tenurial (*security of tenure*).[53] Pada gilirannya tujuan peraturan itu adalah untuk memfasilitasi transfer kepemilikan tanah kelebihan maksimum kepada kaum tani penggarap.

Pada masa Jepang, "reforma agraria" sebenarnya telah dilakukan melalui inisiatif rakyat sendiri. Rakyat melakukan reklaiming, pendudukan, dan kemudian mengolah perkebunan-perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Eropa terutama Belanda. Pada masa Jepang banyak orang Eropa yang dimasukkan ke dalam kamp-kamp internira, terbunuh, atau pulang ke negara asal mereka. Tindakan penguasaan oleh rakyat itu ditoleransi oleh Jepang, bahkan diperoleh dukungan agar tanah

[51] *Ibid.*

[52] Ben white, *op.cit.*, hal. 115-118.

[53] Klatt, W., "Agrarian Issues in Asia", *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs), Vol. 48, No. 3 (Jul., 1972), hal. 395-413.

eks-perkebunan tersebut ditanami tanaman tertentu seperti tanaman yang menghasilkan minyak.[54]

Toleransi semacam itu dilanjutkan ketika memasuki periode kemerdekaan. Sikap toleransi itu dapat dikatakan sebagai "persepsi kolektif" kala itu, sambil menunggu payung hukum agraria nasional segera dibentuk.[55]

Setahun setelah kemerdekaan RI, pada tahun 1946 upaya restrukturisasi yang dilakukan pemerintah secara legal adalah upaya menghapus desa-desa perdikan di Banyumas yang elite-elitenya menguasai sebagian besar kepemilikan tanah di desa. Penghapusan desa perdikan ini didasarkan pada UU No. 13 Tahun 1946. Selanjutnya adalah masalah tanah konversi, tanah sewa, *erfpacht,* dan konsensi *landbouw*.

Hal penting yang perlu dicatat adalah upaya transfer/pembagian tanah dari elite ke rakyat sebagai konsekuensi penghapusan desa perdikan dilakukan dengan ganti rugi, sebagaimana ganti rugi yang diberikan nantinya pada upaya nasionalisasi perkebunan-perkebunan milik orang Eropa pada tahun 1958. Artinya, Reforma Agraria itu dipandu oleh negara (*state led land reform*) dengan skenario ganti rugi dan upaya meminimalisir konflik sedemikian rupa.

Pada tahun 1948 dilakukan pembagian tanah-tanah eks perkebunan Belanda di Yogyakarta kepada organisasi tani. Demikian, upaya restrukturisasi penguasaan sumber-sumber agraria itu terus bergulir di level pemerintahan dan semangat untuk menyusun payung hukum pertanahan nasional segera dilakukan.

Berbagai seminar, kajian, dan diskusi dipersiapkan untuk merumuskan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang berlangsung secara terus menerus, yakni tahun 1948, 1951, 1956, 1958, dan 1959. Periode ini memunculkan banyak nama yang terlibat di dalamnya, seperti Sarimin Reksodihardjo, Singgih Praptodihar-

---

[54] Simak, misalnya, Shigero Sato, *War, Nationalism, and Peasants Java Under the Japanese Occupation 1942–1945* (Australia: Allen & Unwin, Ltd., 1994).

[55] Gunawan Wiradi, "Agrarian Reform Movement in Indonesia: Past and Present", tt, 2005, hal. 3.

djo, Notonagoro, Soewahjo, Soenarjo, Sadjarwo, KH. Zainal Arifin, Boedi Harsono, dan lainnya, serta berbagai kelembagaan seperti Universitas Gadjah Mada, Departemen Agraria.

Secara berturut-turut, penyiapan penyusunan Undang-Undang Pembaharuan Agararia (UUPA) melahirkan beberapa kepanitian: "Panitia Agraria Yogya", "Panitia Agraria Jakarta", "Panitia Soewahjo"; dan dua rancangan: "Rancangan Soenarjo", dan "Rancangan Sadjarwo". Inti dari penyusunan dasar-dasar Hukum Agraria/Hukum Tanah baru itu adalah untuk menggantikan Hukum Agraria warisan pemerintah kolonial.[56]

Melalui Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948, dibentuklah Panitia Agraria yang dikenal sebagi "Panitia Agraria Yogya".[57] Ketuanya adalah Sarimin Reksodihardjo. Tugas panitia itu lebih bersifat persiapan, menghimpun berbagai pemikiran ke arah penyusunan hukum agraria baru, pengganti hukum kolonial 1870.

Panitia Agraria Yogya terbentuk dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 dan 17/1948. Panitia ini berpendapat bahwa untuk mewujudkan masyarakat makmur yang bebas dari penindasan, harus ada pembatasan luas tanah ke bawah dan ke atas. Belum ada ketetapan angka yang dapat dipakai untuk seluruh Indonesia. Di Jawa direncanakan minimum 2 ha dan maksimum 10 ha.[58]

---

[56] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1* (Jakarta: Djambatan, 2007 [edisi ke-11]), hal. 125. Uraian mengenai kepanitian dan rancangan ini dapat disimak dalam Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir* (Bogor dan Bandung: Sajogyo Institute, KPA, dan AKATIGA, 2009 [cetakan ke-dua]), hal. 82-86.

[57] Tentang panitia ini simak, Iman Soetiknjo, *Proses Terjadinya UUPA: Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: GMU Press, 1987).

[58] Moch. Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: Pewarta, 2009), hal. 503. Angka "2 hektar" dan "10 hektar" masih menjadi "misteri". Angka itu muncul dari tulisan berbahasa Belanda anonim yang sampai saat ini tidak diketahui siapa penulisnya. Lihat juga uraian Ben White dalam lingkar belajar LIBRA, Pusat Kajian Pedesaan UGM, 13 Juli 2008. Penentuannya didasarkan pada penghitungan agronomis semata, dan mengindahkan faktor aplikatifnya untuk kasus Jawa. Maka tidak mengherankan bahwa salah satu kesimpulan Wolf Ladejinsky atas kegagalan pelaksanaan UUPA adalah tidak realistisnya angka tersebut.

Tahun 1950-an melalui prakarsa Menteri Pertanian, Soenaryo, dibuat Rancangan Undang-undang Agraria. Berbagai simposium di beberapa kota diadakan untuk menggodoknya. Tanggal 1 Agustus 1960, RUU baru hasil kerjasama Departemen Agraria, Panitia *Ad Hoc* DPR, dan Universitas Gadjah Mada diajukan ke DPR-GR. RUU itu akhirnya disetujui DPR-GR pada tanggal 24 September 1960 dalam Lembaran Negara No.104 Tahun 1960 sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau dikenal dengan istilah Undang-undang Pembaharuan Agararia (UUPA). UUPA ini kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.56 Tahun 1960 (yang dikenal dengan undang-undang *land reform*). Sejak saat itu tanggal 24 Sepetember 1960 (hari lahirnya UUPA) ditetapkan sebagai "Hari Tani".[59]

Redistribusi tanah tidak serta merta dapat dilaksanakan sebab setahun kemudian pemerintah disibukkan dengan penyiapan pembentukan panitia *landreform*, pengadilan *landreform*, dan pendanaan *landreform*. Baru pada tahun 1962 dapat dilaksanakan dengan tahapan pertama di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tahap kedua yang direncanakan adalah *landreform* di kawasan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Dalam perkembangannya, rencana ini gagal dilaksanakan. Pada tahun 1965 terjadi huru-hara politik di tingkat nasional dan pembantaian rakyat di pedesaan-pedesaan, sesuatu yang kemudian membuat semua usaha mewujudkan *landreform* itu berhenti.

[59] Lihat, Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: UGM Press, 1994 [cetakan keempat]). Di masa Orde Baru, tanggal itu tidak lagi disebut dengan "Hari Tani" melainkan "Hari Ulang Tahun UUPA". UUPA hanya dilihat sebagai "peristiwa" di masa lalu, bukan sebagai bukti dari kemenangan dan keberpihakan terhadap kaum tani. Hingga saat ini penyebutan itu masih bertahan di lembaga pemerintah.

Tabel 10. Daftar Tanah yang telah Dibagikan dalam *Landreform* Tahap pertama di Jawa dan Sunda Kecil[60]

Kategori tanah	Luas tanah garapan (ha)	Jumlah pemilik tanah	Luas tanah dibagikan	Jumlah penerima
Tanah kelebihan	112.524	8.967	65.132	100.477
Tanah absentee	22.084	18.421	8.610	29.324
Tanah kerajaan	73.566		73.566	79.850
Tanah negara	147.344		147.192	383.301
Total	**355.518**	**27.388**	**294.500**	**592.958**

2. Kajian Anwas Adiwilaga

Riset tentang kepemilikan tanah dan hubungan antara petani miskin dan petani kaya di Jawa Barat dilakukan oleh Anwas Adiwilaga (1954). Riset ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang pernah dilakukannya bersama dengan H. Ten Dam di Cibodas. Namun ia mengambil di lokasi lain, yaitu Tjipalago, Bandung.

Anwas Adiwilaga adalah seorang ekonom. Namun, dengan melihat aspek penguasaan tanah yang ada di lokasi tersebut, ia mampu menjelaskan diferensiasi yang terpampang nyata. Ia kemudian dikenal sebagai guru besar perintis sosiologi pedesaan di Universitas Padjadjaran, Bandung. Anwas Adiwilaga pernah menyertai W. F. Wertheim sewaktu melakukan *revisit* ke Cibodas. Wertheim mengenang,

> "Tahun 1957, ketika saya menjadi dosen tamu di Fakultas Pertanian IPB untuk mengajar sosiologi pedesaan menggantikan ten Dam yang harus kembali ke Belanda, saya mengunjungi

[60] *Tanah bagi Yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin, 1960-1965,* (Bogor: Kepal Press dan STPN, 2009), hal. 73.

> Cibodas. Waktu itu sekelompok mahasiswa sedang melakukan riset di daerah itu. Saya naik ke lereng-lereng gunung bersama seorang ahli ekonomi hebat, Anwas Adiwilaga, dan sekelompok mahasiswa. Hal pertama yang mencengangkan kami adalah bahwa para petani itu masih tinggal di sana, meskipun tiga tahun kontrak telah lewat".[61]

Wertheim bersama Anwas Adiwilaga menyaksikan bagaimana kaum tani di lereng bersiasat atas kontrak tanam yang dipaksakan oleh Dinas Kehutanan. Petani merusak pinus-pinus itu di malam hari agar dinas kehutanan menggantinya dengan yang baru, berharap agar pohon itu tidak cepat menjadi besar dan menghalangi tanaman yang dikelola oleh petani. Tindakan ini menunjukkan gejala lapar tanah, dan kaum tani tidak yakin akan bisa mendapatkan lahan lagi untuk diolah jika lereng gunung telah dikuasai oleh tumbuhan pinus milik dinas.

3. Studi H ten Dam di Cibodas

Bersama para mahasiswa dan dosen Fakultas Pertanian UI, Bogor, H ten Dam melakukan kajian tentang struktur sosial masyarakat dan potensi kelembagaan lokal (yakni koperasi), di Cibodas, Lembang, Bandung. H. ten Dam adalah Insinyur muda lulusan Universitas Wageningen, Belanda. Salah satu yang membantu riset tersebut adalah Kampto Utomo.

Di dalam riset itu diurai juga sejarah desa yang menjelang akhir abad 19 terbentuk di tengah hutan oleh petani-peneruka yang berasal dari desa-desa di dekat Bandung. Mereka dilibatkan dalam rangka kerja paksa bagi orang desa di Jawa Barat. Penelitian H ten Dam berlangsung antara tahun 1950 hingga 1954.

Penelitian ini menunjukkan adanya struktur masyarakat Desa Cibodas yang terdiri dari dua kelompok sosial dengan perbedaan sangat mendasar. Perbedaan tersebut didasarkan pada akses terhadap faktor produksi, yakni tanah. Kelompok pertama adalah kelompok buruh tani dan kelompok kedua adalah petani

[61] W. F. Wertheim, *Elite vs Massa* (Yogyakarta: Resist dan LIBRA, 2009), hal. 97.

bebas. Perbedaan ini selanjutnya menentukan kegiatan ekonomi dan kedudukan sosialnya, kelompok pertama berperan sebagai "abdi" atau "yang menyerahkan dirinya" sedangkan kelompok kedua sebagai "yang memerintah" atau "yang memperabdi". [62]

Sejumlah 43% keluarga di Desa Cibodas tidak memiliki tanah, 25% memiliki tanah pekarangan dan 23% keluarga lainnya mempunyai tanah garapan dengan luas kurang dari 2,5 *acre* (1 *acre*: 4.072 m^2). Secara kasar 90% dari keluarga yang ada di Desa Cibodas adalah buruh tani.

Dalam kelompok petani bebas terdapat petani bebas kecil (memiliki tanah 2,5-12 *acre*) dan tuan tanah besar (lebih dari 12 *acre*). Petani bebas kecil mencapai 6-8% keluarga, dan tuan tanah besar hanya 1,5% dari keluarga di Desa Cibodas.

Lokasi Cibodas yang pernah dikunjungi oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta ketika gencar-gencarnya menyerukan gerakan koperasi, memberi pengalaman yang sangat penting. Usaha mempersatukan kelompok buruh tani dan kelompok petani bebas dalam suatu kerangka organisasi bersama menimbulkan adanya ketegangan sosial. Ide penyatuan melalui bentuk koperasi dengan keanggotaan yang tidak setara secara ekonomi dan sosial hanya menghasilkan ketimpangan organisasi belaka. Dengan komposisi semacam itu, maka timbul diskriminasi perlakuan koperasi terhadap kelas sosial yang berbeda.

4. Jurnal *Sosiografi Indonesia* (UGM)

Jurnal *Sosiografi Indonesia dan Hukum Adat* terbit sejak tahun 1955 *s*ampai dengan tahun 1961. Kelekatan kajian sosiologi pada hukum masih tampak dalam komposisi majalah tersebut yang banyak diawaki ahli hukum (*meester in de rechten*) dalam keredaksiannya. Tercatat sebagai penanggung jawab majalah tersebut adalah Prof. Dr. Mr. M.M. Djojodigoeno, sekretaris

[62] H ten Dam, "Cooperation and Social Structure in the Village of Chibodas", dalam W. F. Wertheim (ed.), *Indonesian Economics, the Concept of Dualism in Theory and Practice*, (The Hague: W. van Hoeve, 1961), hal. 345-382. Bandingkan juga dengan Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan, Kumpulan Bacaan Jilid 1,* (Yogyakarta: GMU Press, 2005), hal. 108-128

redaksi Wahjoeddin Widjaja, dan para redaksi di antaranya adalah Mr. Soedarso, Mr. Soemardjo Hadiwignjo, Mr. Sarwono, Mr. Kaharkoesman, Mr. Pandam Goeritno, dan Marjanto.[63]

Berbagai kajian lapangannya sangat kaya, bahkan menghasilkan monografi daerah (desa dan dukuh). Dari kurang lebih 30 kajian, 2/3 adalah Jawa, selebihnya Sulawesi (2), Sumatera (3), Kalimantan (1), dan Bali (3). Berbagai soal terkait pedesaan dikaji dalam berbagai segi, seperti pertaniannya, kehidupan ekonomi, struktur kelas, kepemimpinan dan pemerintahan desa, kepercayaan masyarakat, tingkat hidup penduduk, susunan kekerabatan, dan lain-lain.[64]

Penelitian-penelitian lapangannya menunjukkan banyak contoh stratifikasi sosial berdasar ketimpangan penguasaan tanah daripada berbagi kemiskinan.[65] Sebagai contoh adalah penelitian Soemarjo Hadiwignjo, "Disguised Unemployment dan Beberapa Aspek Sosial di dukuh Karangmodjo, Kalasan".[66] Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 1958 hingga Januari 1959. Dalam menitikberatkan soal pengangguran terselubung, penelitian ini mengaitkannya dengan faktor kepemilikan tanah. Dari situ terlihat siapa yang melakukan pekerjaan tambahan di luar pertanian, siapa yang bertani, dan siapa yang menjadi buruh tani. Cara mengetahui siapa yang menguasai tanah saat itu mula-mula dilacak melalui "*letter C*" di kantor kelurahan yang telah dibuat sejak tahun 1935, ditambah dengan beberapa wawancara.

Sosiografi Indonesia adalah majalah yang dibentuk oleh *Panitya Social Research* Universitas Gadjah Mada. Panitia ini dibentuk tahun 1951, dipersiapkan dalam rangka kerjasama dengan tim lapangan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tim yang terakhir ini dipimpin oleh Rufus Hendon dengan beranggotakan 7 calon Ph.D Universitas Harvard: Clifford

---

[63] Lihat dalam halaman kulit Jurnal *Sosiografi dan Hukum Adat*, Yogyakarta, Pembina Hukum Adat, Tahun III, No. 1 & 2, 1961.

[64] Kampto Utomo, *op.cit.,* hal. 269.

[65] Ben White, *op.cit.,* hal. 116.

[66] Jurnal *Sosiografi dan Hukum Adat*, *op.cit.,* hal 21.

Geertz, Hilderd Geertz, Robert Jay, Donald Fagg,[67] Edward Ryan, dan Alice Dewey, dan Lea Williams.

Tim disambut oleh 3 professor, dan salah satu yang menyambutnya secara hangat adalah Prof. Iso Reksohadiprojo.[68] Terpisahnya kerjasama antara Tim MIT dengan UGM menurut versi Clifford Geertz berawal dari usulan UGM yang menganjurkan Tim memilih lokasi penelitian di Wonosobo. Daerah lereng pegunungan ini dikenal dengan langkanya persediaan beras. Usulan lain UGM, menurut Geertz, adalah agar Tim menetap di penginapan/hotel yang ada di daerah itu dan mengundang para responden untuk diwawancarai, seperti gaya penelitian orang Belanda lama. Ide itu ditolak oleh Tim sebab tidak mencerminkan cara kerja antropologi sesungguhnya.[69]

Meski kerjasama UGM dengan Tim MIT (yang kemudian memilih lokasi Pare, Kediri) akhirnya gagal, panitia dari UGM yang telah dipersiapkan itu tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan riset, dan lahirlah majalah *Sosiografi Indonesia* tersebut.

5. Riset LPEM-UI tahun 1954-1955

Penelitian berorientasi kajian ekonomi yang dilakukan oleh *Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat* di 23 desa Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri.

Pemimpin riset saat itu adalah Widjojo Nitisastro dan Julius E. Ismael. Hasil riset itu dapat diikuti dalam tulisan berjudul *Beberapa Bahan Keterangan mengenai Penduduk Djebres, suatu Desa di Jawa Tengah (1956)*; *Pemerintah, Keuangan, dan Padjak di suatu*

---

[67] Donald Fagg setelah menyelesaikan disertasinya kemudian melakukan bunuh diri. Tidak diketahui alasannya. Tema disertasinya tentang modernisasi dan birokrasi oleh keluarganya tidak diperkenankan diterbitkan. Sediono M.P. Tjondronegoro, "Penelitian Ilmu Sosial dan Penentuan Kebijakan", *Prisma,* 6, Juni 1983, hal. 56. Belum ada dugaan yang sifatnya spekulatif menghubungkan bunuh diri itu dengan temuan risetnya, prinsip/tujuan Tim, dan konteks Perang Dingin.

[68] Mengenai tim ini, dikenang oleh Clifford Geertz dalam, "Recollection of an Itinerant Career", *Bulletin of Indonesian Economic Kajianes,* Vol. 24, No. 3, 1988.

[69] *Ibid.,* hal. 33.

Desa di Djawa Tengah (1957); dan *Keadaan Penduduk di Duapuluhtiga Desa di Djawa* (1960).[70] Dalam tulisan terakhir disebutkan bahwa di sepanjang Pulau Jawa penghidupan mayoritas penduduk tergantung pada pertanian namun mereka hanya memiliki tanah kurang dari 0,1 hektar. Diferensiasi sosial berdasarkan penguasaan tanah cukup disadari dalam riset tersebut.

Pada tahun 1956-1962 ketika UI mengirimkan sejumlah mahasiswanya (sekitar 45 orang) untuk belajar ke luar negeri. Widjojo Nitisastro dan J.E. Ismael yang terlibat dalam riset 23 desa tersebut dikirim ke UC Berkeley, California. Beberapa orang dalam kelompok inilah yang kemudian oleh David Ransom dalam majalah *Rampart,* edisi Oktober 1970, dijuluki dengan "Mafia Berkeley".[71] Kelompok ini pada masa Orde Baru mengembangkan paham ekonomi yang jauh berbeda dari pengalaman risetnya di tahun 1950-an itu.

6. *Yogyakarta*-nya Selo Soemardjan

Dalam disertasinya tahun 1962, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (judul asli *Social Change in Yogyakarta*), Selo Soemardjan menunjukkan bahwa kondisi Yogyakarta berubah, menapaki perjalanan sosial ekonomi yang semakin membaik. Terhadap sistem penguasaan tanah bahkan ia menunjukkan,

> "....di masa sebelum perubahan hukum tanah di tahun 1918 kaum tani hanya mempunyai kewajiban dan tak mempunyai hak, bahwa antara 1918 dengan 1951 mereka mempunyai kewajiban dan hak, dan sejak dihapuskannya pajak tanah di tahun 1915 mereka hanya mempunyai hak dan boleh dikata tidak mempunyai kewajiban".[72]

---

[70] Judul-judul ini dapat diikuti dalam Moh. Sadli, "20 Tahun Perkembangan Ilmu Ekonomi di Indonesia" dalam Widjojo Nitisastro (Ed.), *Research di Indonesia, 1945-1965, Bidang Sosial Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IV)* (Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia, 1965), hal. 199-200.

[71] Goenawan Mohamad, dkk., *Menyambut Indonesia: Lima Puluh Tahun bersama Ford Foundation (1953-2003)* (Ford Foundation dan Equinox Publishing, 2003), hal. 126.

[72] Selo Seomardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1981), hal 177.

Oleh banyak kalangan, karya itu dinilai berpengaruh karena merupakan karya sosiolog pertama Indonesia. Meski demikian, karya itu mewakili apa yang oleh W.F. Wertheim disebut sebagai "visi elitis". Seorang "elite" memandang massa rakyat sebagai kelompok yang terisolasi.[73]

7. Karya dua Rektor IPB

Bachtiar Rifai adalah Rektor IPB sebelum periode Kampto Utomo. Keduanya menulis disertasi di bawah bimbingan Prof. W.F. Wertheim. Bachtiar Rifai menulis disertasi berjudul "Bentuk Milik Tanah dan Tingkat Kemakmuran: Penyelidikan Pedesaan di daerah Pati, Jawa Tengah" (1958). Sementara Kampto Utomo menulis "Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah W. Sekampung (Lampung)" (1957).

Disertasi Kampto Utomo memberi uraian sosiologis-antropologis tentang masyarakat tani perintis di Sumatera Selatan (Lampung). Pada mulanya mereka datang ke lokasi tujuan melalui program pemerintah, namun selanjutnya secara spontan pergi ke daerah baru yang mereka buka. Daerah baru ini kemudian menjadi "desa Jawa" yang mengembangkan satuan desa sebagaimana di Jawa (terhubungnya desa dengan kecamatan).

Dikaji pula hubungan genealogis antara masyarakat asli lampung dengan ikatan kekerabatannya yang kuat dan masyarakat Jawa yang kurang ketat ikatan kekerabatannya. Pola usahatani yang dibangun oleh petani perintis itu, meski mulanya mengalami dilema, adalah pola kebun tanaman keras (karet, kopi, dan lada). Sementara pola "sawah irigasi" sangat terbatas peluangnya.[74]

Pendekatan yang lebih bernuansa antropologis (tepatnya antropologi sosial) dalam kajian Kampto Utomo cukup mempunyai alasan. Saat itu bahan-bahan yang dianggap "baku"

[73] W. F. Wertheim, 1984, *op.cit.*, Bab II.

[74] Sajogyo, "Refleksi Sajogyo: Dari Praktek ke Teori dan ke Praktek yang Berteori", naskah refleksi pada sebuah acara yang diadakan oleh Survey Agro Ekonomika di Jakarta, 2004, hal. 7-8.

sebagai teks sosiologi belum ada. Ia banyak menimba pengetahuan sosiologi (desa) dari berlangganan Jurnal *Currant Anthropology* dari pada dari jurnal sosiologi yang saat itu justru kecenderungannya adalah sosiologi kota.[75] Dalam disertasinya, ia menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Raymond Firth dalam *Elements of Social organization: Essay on Social Organization and Value.*[76] Cara kerja antropologi ditempuhnya selama melakukan riset: mengamati kehidupan sehar-hari, menggali *life histories,* bertindak sebagai *participant observer*, dan tidak ketinggalan pula, menelusuri arsip-arsip desa.[77]

8. *Kaum tani* dan s*etan desa*-nya Aidit

Penelitian Aidit dengan timnya yang beranggotakan sekitar 40 orang mempunyai dimensi yang cukup luas. Penelitian itu menganalisis pembagian kelas yang ada di desa, bentuk penghisapan kelas tani dan nelayan yang terjadi, kekuasaan politik yang mereka sebut sebagai "setan desa". Di sisi lain, diuraikan juga bagaimana kaum tani semestinya melakukan perlawanan, perjuangan secara ekonomi, bentuk dan proses pengorganisasian aksi, metode dan prinsip-prinsip propaganda, kebudayaan dan moral revolusioner, hingga fungsi kelembagaan desa berupa koperasi, lumbung paceklik, dan arisan.

Dari segi metodologi, ada beberapa hal yang menarik. Penelitian ini bersifat partisipatif, satu metode yang "ditemukan" berdasarkan kepekaan dan pemahaman yang kuat terhadap masyarakat tani. Didasarkan pada prinsip "3 sama" (sama bekerja, sama makan, dan sama tidur dengan buruh tani dan tani

---

[75] Wawancara dengan Prof. Dr. Sajogyo, Bogor, 21 November, 2008.

[76] Dinyatakan dalam kata pengantarnya, lihat, Kampto Utomo, *Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah W. Sekampung (Lampung),* (Yogyakarta: GMU Press, 1975), hal. viii. Buku Raymond Firth terdiri VII bab yang bab III-nya berjudul "Social Change in Peasant Community". Lihat Raymond Firth, *Elements of Social organization, Essay on Social Organization and Value,* (Boston: Beacon Press, 1967 [cetakan pertama, 1951]).

[77] Gunawan Wiradi, "Aspek Metodologi dalam Pengembaraan Ilmiah Prof. Dr. Ir. Sajogyo", dalam M. T. Felix Sitorus dkk. (ed.), *Memahami dan menanggulangi Kemiskinan di Indonesia, Prof. Dr. Sajogyo 70 Tahun,* (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 15.

miskin), penelitian ini lebih berorientasi pada pengorganisasian gerakan tani. Hal itu tercermin juga dalam semboyannya, "perhebat pengintegrasian dengan penelitian".[78] Penelitian yang mengambil lokasi di 27 kecamatan dalam 16 kabupaten di Jawa Barat itu, telah membuat klasifikasi lokasi penelitian dengan cara membaginya berdasar persentase keanggotaannya dalam BTI. Meski menghasilkan rumusan ideologis tentang "tujuh setan desa", suatu identifikasi yang sangat beresiko konfliktual, penelitian itu dinilai "realistis dan akurat untuk periode itu".[79]

Selain yang telah diuraikan di atas, satu nama dan kajian yang dilupakan baik oleh Kampto Utomo dan Ben White adalah Moch. Tauchid dengan karyanya *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia.*[80] Dilupakannya karya ini cukup mengherankan, mengingat demikian kaya dan luasnya kajian ini, mengenai bagaimana sepak terjang rezim kolonial hingga tahun 1950-an melahirkan berbagai kebijakan dan politik agraria yang justru berdampak menyengsarakan nasib kaum tani.

9. Moch. Tauchid: Masalah agraria adalah soal hidup dan penghidupan manusia

Dalam buku berjudul *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Moch. Tauchid mengurai berbagai persoalan agraria sejak periode kolonial hingga tahun 1950-an. Karyanya dapat dikatakan bersifat ensiklopedis. Di dalam penutup bukunya, disajikan filosofi, perspektif, dan anjuran memajukan kaum tani Indonesia.[81]

---

[78] Aidit, D. N., *Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa: Laporan Singkat tentang Hasil Riset Mengenai Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani Djawa Barat,* (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964), hal. 9.

[79] Ben White, *op.cit.,* hal. 118.

[80] Moch. Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Djakarta: Tjakrawala, 1952 dan 1953).

[81] Moch. Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: STPN dan Pewarta, 2009 [cetakan ke-tiga]), hal. 451.

Menurutnya, masalah agraria adalah masalah penghidupan rakyat yang kompleks. Ia erat kaitannya dengan soal-soal politik, ekonomi, dan sosial, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya ditinjau dari satu segi. Ia dengan tegas mengatakan,

> "Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya".[82]

Perubahan masyarakat tani tidak dapat dipaksakan dari atas atau dari luar, namun harus dilakukan dengan cara melakukan penyadaran terhadap kaum tani, sehingga mereka tahu akan harga diri, hak dan kewajibannya. Dari situlah perubahan dan pembongkaran atas akar persoalan yang dihadapi kaum tani dapat dilakukan. Suatu prinsip yang masih sangat relevan menjadi pegangan para aktivis gerakan tani saat ini. Berdasarkan prinsip itu, menurutnya, pengorganisasi kaum tani menjadi penting.

Tegasnya:

> "Organisasi tani merupakan lapangan tani menyusun kekuatan. Sebagai alat perjuangannya, untuk membebaskan dirinya dari penindasan politik, ekonomi, dan sosial. Di sana belajar menambah kecerdasan otak dan jiwanya, dan dengan kesadarannya nanti membongkar segala pokok dan alat yang menjadi sumber kemiskinan dan kesengsaraan, untuk memperbaiki hidupnya".[83]

Mengenai organisasi tani, Moch. Tauchid sejak awal merupakan salah satu tokoh pejuangnya. Ia tidak hanya aktif di gerakan tani, namun masuk menjadi anggota parlemen di dalam memperjuangkan hak-hak kaum tani. Ia juga tercatat sebagai pendiri Barisan Tani Indonesia (BTI) pada tahun 1945, selepas ia dipenjarakan oleh pemerintah Jepang sebab bergabung dengan gerakan bawah tanah kelompok Sjahrir.[84] Bersama kawan-

---

[82] *Ibid.,* hal. xxl.

[83] *Ibid.,* hal. 394.

[84] Wawancara dengan Imam Yudotomo (68 tahun, anak Moch. Tauchid), Yogyakarta, 13 Agustus 2009. Penjelasan lain menyebutkan bahwa Moch.

kawannya: Wijono Suryokusumo, S. Sardjono "Petruk", Djadi, Asmoe Tjiptodarsono, dan Sajoga, ia mendirikan BTI.

Pendirian BTI merupakan hasil kongres petani di Yogyakarta antara 22-25 November 1945. Semula dilangsungkan rapat tani dan buruh di Surakarta pada 5-7 November 1945 yang dihadiri sekitar 2000 orang. Namun utusan tani ternyata tidak mewakili keanggotaan partai yang saat itu baru dibentuk. Maka segeralah dilangsungkan kongres khusus organisasi tani.[85] Dalam kongres itulah, tokoh-tokoh di atas menjadi pendirinya.

BTI semula adalah kelompok kader petani yang dibina oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta.[86] Pada awal pendiriannya, para pemimpin merasa bahwa mereka masih belum memahami sepenuhnya persoalan kaum tani. Para pendiri tersebut umumnya adalah kaum terpelajar kota. Pemahaman tersebut diperoleh dari hasil kajian, terkecuali Moch. Tauchid yang mempunyai latar belakang anak seorang janda bakul gendong, yang hanya memiliki tanah sempit untuk menghidupi 7 anaknya.[87] Latar belakang inilah yang memberi imajinasi Tauchid tentang kehidupan kaum tani.

Tauchid adalah anggota eksekutif komite partai (bagian komunikasi) hasil fusi di Cirebon antara Partai Sosialis Indonesia (Parsi) pimpinan Amir Sjarifuddin dan Partai Rakyat Sosialis (Paras) pimpinan Sjahrir. Bersama Wijono ia disebut sebagai "Kelompok Yogya" yang terlibat dengan Amir dalam mendirikan Parsi. Lihat, Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hal. 234. Pengalaman masa remaja Tauchid di Purwokerto sebagaimana dituturkan kepada anaknya menunjukkan bahwa ia lebih dekat dengan kelompok Sjahrir. Hal ini diperkuat juga oleh Kenji Tsuchiya. Lihat, Kenji Tsuchiya, *Demokrasi dan Kepemimpinan: Kebangkitan Gerakan Taman Siswa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 156. Bahkan untuk mengenang Sjahrir, ia menulis buku berjudul, *Mengenang Pahlawan Sjahrir* (Yogyakarta: Jajasan Sjahrir , 1966).

[85] Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia.* (Yogyakarta: Insist dan KPA, 1999), hal. 131.

[86] P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 203. Wijono Suryokusumo, S. Sardjono, dan Moch. Tauchid tercatat sebagai anggota KNID Yogyakarta. *Ibid.,* hal. 439.

[87] Imam Yudotomo, *Kakung-Uti: Moch. Tauchid-Kastariyah, Catatan untuk Cucu-cucunya,* tidak diterbitkan, 2004, hal. 2.

BTI merupakan organisasi massa yang pendiriannya mencerminkan semangat revolusi saat itu. Para pemimpin mulai merasakan kebutuhan keterlibatan mayoritas penduduk di pedesaan. Pendirian organisasi massa tani semacam BTI dirasakan sangat mendesak. Dari segi keanggotaan, pada mulanya pengaruh BTI terbatas pada wilayah perkebunan-perkebunan. Namun dalam perkembangannya ia memperoleh pengaruh yang luas. Dalam menarik simpati massa, para pemimpin BTI mendekati Sri Sultan Hamengku Buwana IX.[88]

Historiografi Indonesia yang mengidentikkan BTI dengan PKI tidaklah dapat dibenarkan, setidaknya untuk periode awal. Para pendirinya adalah kaum moderat dan sosialis yang waktu itu telah cukup kuat berada di Yogyakarta. Mereka mempunyai ikatan kuat dengan para pemuda Pathuk dan menjalin hubungan dengan Sjahrir pada waktu Jepang berkuasa. Sementara PNI dan PKI justru muncul belakangan di Yogyakarta.[89]

BTI, yang dipimpin oleh S. Sardjono (Ketua) dan Moch. Tauchid (Ketua Bagian Ssosial Ekonomi), mempunyai pengaruh besar terhadap penyusunan birokrasi pemerintahan Yogyakarta pasca-merdeka. Ketika melangsungkan konferensi tanggal 27-28 Oktober 1945, mereka mengajukan mosi kepada pemerintah agar segera dibentuk DPR di setiap kelurahan hingga pusat, dan tuntutan perbaikan nasib kaum tani yang diwakilinya, yang di Yogyakarta menurutnya mencapai jumlah 1,5 juta.[90]

Dari sini tampak bahwa kemerdekaan merupakan peluang baru (jembatan emas) dalam merumuskan identitas kebangsaan, penguatan terhadap kewarganegaraan (*citizenship*) kaum tani dan hak-haknya, dan bahkan kekuatan organisasi massa-lah (dalam

---

[88] Andi Achdian, *op.cit*., hal. 38.

[89] P.J. Suwarno, *op.cit.,* hal. 203.

[90] *Ibid.* Angka sebesar itu tampaknya lebih memberi makna pada kekuatan semangat dari pada ketepatan numeriknya. Sebab, sampai dengan tahun 1953, ketika BTI telah menjadi organisasi massa yang berafiliasi dengan PKI, anggota yang diklaimnya hanya mencapai 360.000 dan baru meningkat secara pesat setelah pemilu 1955 (3,3 juta). M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2008), hal. 493.

hal ini BTI) yang membentuk struktur pemerintahan resmi (di Yogyakarta saat itu).

Pada saat menjadi badan pekerja DPR DI Yogyakarta mewakili BTI, Moch. Tauchid, pada September 1946, mengajukan usul penghapusan hak konversi atas tanah-tanah yang dikuasai oleh pemilik asing di wilayah *vorstenlanden*. Mosi itu disertai gagasan agar penanaman tebu selanjutnya dikerjakan oleh rakyat dengan cara "*opkoop riet*" (borongan) melalui berkoperasi. Saat itu memang sudah dibentuk koperasi-koperasi rakyat di tingkat kelurahan. Tetapi usul itu ditolak oleh wakil golongan buruh yang merasa dampaknya akan merugikan mereka.[91] Dalam perkembangannya, hak konversi di Yogyakarta dihapuskan pada tahun 1948 berdasarkan UU Darurat No. 13/1948.[92]

Sebagai organisasi, BTI menjadikan semangat anti imperialisme dan feodalisme sebagai prinsip dasar dan metode perjuangannya yang diwujudkan dengan cara perjuangan revolusioner. Selain itu BTI juga melakukan perjuangan berdasar pertentangan kelas. Uniknya, usaha yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan menuju masyarakat sosialis adalah dengan cara pertanian kolektif dan modern.[93]

Prinsip *kolektif* dan *modern* tidaklah sederhana. Dua hal ini sangat mempengaruhi sejarah BTI. Dua prinsip ini terkait dengan orientasi politik dan pengorganisasian para pemimpinnya. Saat itu, prinsip terhadap kepemilikan tanah ditanggapi secara berbeda-beda. Kalangan komunis yang telah memiliki Rukun Tani Indonesia (RTI) memegang prinsip kepemilikan

---

[91] Moch. Tauchid, *op.cit.,* hal. 88.

[92] Selo Soemardjan, "*Land Reform* di Indonesia", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Ed.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 [edisi revisi]), hal. 124-125.

[93] Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, *Almanak Pertanian 1954,* Jakarta, 1954, hal. 134. Almanak tahun 1954 ini keliru menyebut prinsip kolektif BTI, sebab setahun sebelumnya, dengan terjadinya fusi BTI telah memegang prinsip kepemilikan pribadi.

kolektif atas tanah. Sementara BTI memegang prinsip kepemilikan pribadi.[94]

Menurut BTI, perjuangan kaum tani atas tanah tidak lain adalah perjuangan untuk mendapat tanah milik pribadi. Namun pada tahun 1953, kedua organisasi massa tersebut (BTI dan RTI) bersama Sarekat Tani Indonesia (Sakti) melakukan fusi. Nama BTI yang kemudian dipertahankan dalam fusi tersebut. Fusi berlangsung pada Kongres BTI yang diadakan di gedung sarekat buruh kereta api, Manggarai, Jakarta. Pada periode inilah BTI identik dengan PKI, sebab organisasi massa tani ini telah berafiliasi dan dikuasai partai komunis tersebut. Namun uniknya, perinsip kepemilikan pribadilah yang dipertahankan.[95]

Akibat fusi tersebut, Moch. Tauchid bersama kawan-kawan sosialisnya yang ada di BTI memutuskan keluar.[96] Mereka bukan hanya tidak setuju dengan fusi itu, akibat dari pertentangan lama kelompok komunis dan sosialis pasca peristiwa Madiun,[97]

---

[94] Dalam tulisan "Hari Depan Perjuangan Tani", D.N. Aidit mengkritik BTI yang berjuang dengan tuntutan "hak negara terhadap semua tanah". RTI lalu memodifikasinya menjadi semboyan "nasionalisasi semua tanah". Menurut Aidit, program agraria dengan menempatkan negara sebagai pemilik hak belum dimengerti kaum tani, sehingga gagal membangunkan semangat pergerakannya. Maka menurutnya, semboyan yang tepat adalah, "tanah untuk kaum tani", sehingga lebih menarik bagi kaum tani. Noer Fauzi, *op.cit.,* hal. 133-134. Kemungkinan besar, kritik Aidit muncul setelah RTI (bukan BTI), pada awal 1950-an, melakukan lawatan ke Cina untuk merayakan kemenangan Mao Tse Tung (1949). Di sana mereka dipersalahkan karena prinsip kolektifnya itu. Menurut Mao, kemenangan Revolusi Tiongkok justru disebabkan partisipasi kaum tani yang ingin mendapatkan tanah. Dengan demikian, sasaran kritik Aidit sebenarnya adalah unsur-unsur komunis yang memang sejak awal telah ada di dalam BTI. Mereka ini memegang prinsip kepemilikan kolektif dan mendapat tentangan dari Moch. Tauchid. Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta, 6 September 2009.

[95] Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta, 13 Agustus 2009.

[96] Andi Achdian, *op.cit.,* hal. 40. Bandingkan, Imam Yudotomo, *Kakung-Uti...*, *op.cit.,* hal. 13.

[97] Berbagai krisis yang terjadi di Yogyakarta antara kelompok Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan Tan Malaka antara tahun 1946-1948 menempatkan BTI pada posisi sulit. Ia dan Wijono sebagai pimpinan BTI menolak Persatuan Perjuangan (PP) Tan Malaka dan "Minimum Program"-nya, sekaligus berseberangan dengan Amir dalam peristiwa Madiun. Lihat, Ben Anderson, *op.cit.,* hal. 349. Akibat peristiwa madiun, Moch. Tauchid sebagai Ketua BTI ditangkap dan dipen-

namun juga karena memiliki perbedaan prinsip terhadap konsep kepemilikan tanah.[98] Pada tahun itu pula, tepatnya tanggal 17 September 1953, ia kemudian mendirikan dan mengetuai Gerakan Tani Indonesia (GTI).[99]

Di GTI Moch. Tauchid semakin mengerucutkan gagasan-gagasan keberadaan organisasi tani sebagai wadah gerakan dan pendidikan. Mencermati pasal-pasal dalam azas dan tujuan organisasinya, GTI terlihat lebih berorientasi pendidikan kader. Rumusan-rumusannya juga terlihat lebih kompleks menempatkan ranah perjuangan petani; sebagai produsen, golongan sosial, kelompok politik dan ekonomi, dengan perjuangan perbaikan kehidupan tani melalui cara produksi modern dan politik agraria yang membebaskan.[100] Rumusan yang jauh lebih kaya dibanding dengan BTI di awal. Keanggotaan GTI terlihat kuat di mana basis PSI-nya juga kuat.[101]

Bukunya yang berjudul *Masalah Agraria* ditulis di Bogor ketika ia menjadi anggota DPR-S. Semula buku itu disiapkan untuk kongres BTI tahun 1953. Namun perpecahan di tubuh BTI telah tampak pada tahun sebelumnya, sehingga buku itu diterbitkannya sendiri menggunakan nama penerbit *Tjakrawala.*[102]

---

jarakan. Dalam peristiwa ini banyak anggota BTI yang dinyatakan terlibat. Moch. Hatta membelanya dan membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa ia bukan anggota PKI. Meski demikian pemimpin militer saat itu, Gatot Subroto tidak mengindahkannya. Tauchid baru keluar dari penjara ketika Yogyarakta mengalami Clash II. Pintu penjara politik dibuka dan tahanannya dikeluarkan oleh rakyat saat Belanda memasuki kota. Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta, 16 Agustus 2009.

[98] Menurut versi Moch. Tauchid, ia sebenarnya tidak dipecat dari BTI, namun keluar terlebih dahulu sebelum resmi disingkirkan. Ia menuntut agar RTI melakukan "tobat" terlebih dahulu atas keyakinan "kepemilikan kolektifnya". Wawancara dengan Imam Yudotomo, *op.cit.*

[99] Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, *Almanak Pertanian 1954,* Jakarta, 1954, hal. 146. GTI bersekretariat di Jl. Merdeka No. 71, Bogor.

[100] Simak, *Ibid.,* hal. 147.

[101] Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta, 16 Agustus 2009.

[102] *Ibid.*

Ketika menjabat sebagai anggota dewan inilah Moch. Tachid sempat beberapa kali mengeluarkan mosi kepada pemerintah. Mosinya yang diterima oleh Parlemen adalah penghapusan pajak bumi (*landrente*)[103] bagi rakyat Yogyakarta yang melalui reorganisasi 1919 memperoleh akses atas tanah dalam bentuk *erfelijk gebrukisrecht* (hak pakai turun-temurun).

Moch. Tauchid juga menjadi bagian dari peristiwa sejarah yang penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Ia merupakan salah satu penandatanganan sebuah mosi yang dimotori oleh M. Natsir yang berisikan tentang seruan kembalinya Indonesia ke dalam bentuk NKRI. Mosi itu sering dikenal dengan "Mosi Integral Natsir" yang bertanggal 3 April 1950. Mosi ini merupakan monumen sejarah yang mengantarkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan *(unitarisme)* setelah sempat menjadi bentuk federal *(federalisme)* oleh politik van Mook.

Mosi itu ditandatangani oleh M. Natsir sebagai konseptornya, dan beberapa ketua fraksi di parlemen seperti Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, AM. Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Tjokronegoro, Amels, Siradjudddin Abbas, dan Moch. Tauchid.[104] Menyimak dari nama-nama itu, justru tidak dijumpai dari kalangan PNI, dan yang terbanyak adalah dari kalangan komunis.

Mosi lainnya yang diajukan Tauchid, namun gagal, adalah agar tanah-tanah perkebunan asing yang telah diduduki rakyat selama masa Jepang tetap menjadi milik rakyat.[105] Mosi ini bukan hanya gagal secara kasuistis, akan tetapi persoalan kepemilikan perkebunan (dan berbagai aset) yang semula dikuasai oleh pihak Belanda justru dipulihkan hak-haknya melalui perjanjian KMB. Berbagai pasal dalam perjanjian KMB terkait persoalan

---

[103] Moch. Tauchid., *op.cit.,* hal. 82-83.

[104] Mahfud MD., "Mosi Integral Natsir dan Sistem Ketatanegaraan Kita", makalah disampaikan pada seminar *Refleksi 58 Tahun Mosi Integral Mohammad Natsir-Merawat NKRI Menghempang Potensi Disintegrasi,* di Universitas Jenderal Soedirman, Poerwokerto, tanggal 9 Juli 2008, hal. 3.

[105] Wawancara dengan Imam Yudotomo, *op.cit.*

kedaulatan dan penguasaan lahan justru dinilai langkah mundur dan memutus proses dekolonisasi yang sedang dilakukan.[106]

Akibat dari diserahkannya kembali perkebunan-perkebunan besar yang telah diduduki rakyat kepada pemegang haknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda, maka sasaran atau obyek *landreform* sebagai isu populis tahun 1960-an bergeser ke wilayah pertanian. Jika agrosistem perkebunan mengkonstruksi isu *landreform* dalam relasi vertikal antara rakyat dengan pemilik perkebunan swasta (yang sebelumnya difasilitasi oleh negara), maka agrosistem pertanian mengkonstruksikan konflik sosial-horisontal di pedesaan. Suatu perubahan politik nasional yang dampaknya demikian buruk bagi tatanan kehidupan rakyat di lokal pedesaan. Terbukti bahwa Aidit dkk. dengan rumusan "tujuh setan desa"-nya telah mengakibatkan konflik horizontal yang luar biasa.

Tauchid juga mengajukan mosi menolak kebijakan Padi Sentra yang di antaranya berisi pembelian padi "secara paksa" oleh pemerintah guna memenuhi cadangan pangan. Pemerintah mengharuskan petani menyerahkan 20% hasil panennya agar dibeli oleh pemerintah dengan harga separuh dari harga pasar.[107]

Di bukunya yang lain, *Perjuangan Petani,*[108] Moch. Tauchid lebih menekankan perjuangan nasib tani pada konstruksi sosial dan aspek kulturalnya, dan bukan pada perjuangan ekonominya. Dlam buku itu ia menggugat, "mengapa kaum tani yang memberi makan pada umat manusia di semua penjuru dunia, posisi sosial

---

[106] Ulasan tentang bagaimana perjanjian KMB menjadikan langkah mundur bagi proses dekolonisasi dan restrukturisasi penguasaan sumber-sumber agraria, dan dampaknya bagi sasaran *landreform* disinggung juga di dalam buku Moch. Tauchid ini. Pasal-pasal perjanjian dapat disimak dalam Lampiran VII-IX. Bandingkan dengan ulasan Gunawan Wiradi, "Politik Pertanian dari Masa ke Masa", makalah disampaikan dalam acara "Workshop Pertanian YLBHI" bertema *Tantangan dan Masa Depan Pertanian*, di Hotel Seruni, Cisarua, tanggal 2 Mei 2005, 13 hal.

[107] Imam Yudotomo, *Kakung-Uti..., op.cit.*, hal. 13.

[108] Sayangnya penulis tidak mendapatkan buku tersebut. Informasi tentangnya didapatkan dari wawancara, Imam Yudotomo, *op.cit.* Saat wawancara dilakukan, buku yang dimaksud juga belum ditemukan.

dan kulturalnya justru berada pada tempat yang paling bawah. Mereka dihinakan oleh umat manusia lainnya".[109]

Cara *modern* dalam "mentjapai kemakmoeran petani" merupakan gagasan yang tumbuh subur pada periode awal BTI. Moch. Tauchid merupakan eksponen dalam gagasan itu, dan masih tampak ketika ia memimpin GTI. Sebagai Ketua Bagian Sosial Ekonomi BTI, ia merumuskan bagaimana seharusnya modernisasi pertanian itu dilakukan.[110] Rumusan itu ditulisnya pada tahun 1947 setelah berlangsung Kongres BTI di Jember.

Pada masa itu, modernisasi pertanian (dan *term* pembangunan[111]) berbeda jauh pemahamannya dengan ideologi *modernisme* yang dianut dalam pembangunan pertanian Orde Baru. Modernisasi yang dimaksudkan dalam tulisan itu adalah pemakaian pupuk (pupuk kimia adalah salah satu dari 3 lainnya yang alami), pengadaan kebun bibit desa, pendidikan dan peningkatan pengetahuan kaum petani, pembentukan dan pendidikan kader tani, serta pengajaran dan kursus kader BTI.[112]

Membaca selebaran itu akan terasa beberapa kesan. *Pertama*, sudah pada tempatnya gerakan tani menaruh kepercayaan tinggi dan bekerjasama dengan pemerintah (Djawatan Pertanian). Justru dengan kuatnya organisasi tani, kinerja pemerintah akan menjadi mudah dijalankan.[113] *Kedua*, upaya pemandirian kaum

---

[109] *Ibid.* Ide dibalik gugatan ini tercermin kembali dalam azas dan tujuan GTI, pasal 4 ayat 1. Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, *op.cit.,* hal. 147.

[110] Moch. Tauchid, "Mentjapai Kemakmoeran dengan Modernisasi Pertanian", *Barisan Tani Indonesia,* 1947.

[111] *Kata "pembangunan" telah lazim digunakan pada periode ini, bahkan sejak kemerdekaan. Saat itu, arti yang dimaksud adalah membebaskan diri dari mentalitas bangsa terjajah; membangun susunan masyarakat baru yang adil; membangun kesejahteraan rakyat. Gunawan Wiradi, 2009,* op.cit., *hal. 94. Sementara arti "Pembangunan" ("P" besar) terkait dengan suatu proyek intervensi berupa* capitalist development *pasca Perang Dunia II terhadap negara-negara "Dunia Ketiga" yang berkembang dalam konteks dekolonisasi dan perang dingin (*cold war*). Noer Fauzi, "Desentralisasi dan* Community Driven Development *dalam Konteks Pembangunan Kapitalis: Suatu Kajian Teoritis", 2009, tt., tt.*

[112] Simak, *Ibid.,* hal 1-8.

[113] Orde Baru justru menjadikan organisasi massa mandul akibat kebijakan "*floating mass*". Mereka didepolitisasi dan kosa kata "politik" menjadi sesuatu yang tabu. Dengan demikian, warga negara tidak lebih adalah *property* dari

tani dalam hal produksi, yakni pengadaan bibit, dilakukan dengan cara mengintegrasikan kedalam struktur dan dinamika desa. Usaha pengadaan bibit sekaligus adalah pengorganisasian desa.

Ketiga, kaum tani adalah warga negara (*citizen*), dengan segenap haknya. Pendidikan dan kursus kader (tingkat kabupaten hingga desa), dilakukan dalam upaya tidak hanya meningkatkan "keterampilan" bertani, namun penyadaran akan makna sebagai warga negara. Materi yang diusulkan dalam kursus kader di antaranya adalah: tata negara, sejarah pergerakan nasional, ilmu jiwa dan masyarakat (sosiologi), pergerakan kaum tani, pergerakan buruh, ekonomi pertanian, hak atas tanah, kelaskaran, praktek kerja, dan juga pengetahuan tentang budidaya pertanian.

Menelisik kembali berbagai kajian agraria Indonesia (kajian struktur agraria, sejarah agraria, kemiskinan pedesaan, pembangunan pedesaan, reforma agraria, termasuk sejarah gerakan taninya) menyadarkan kembali pentingnya memperkuat bangunan kewarganegaraan rakyat Indonesia dengan segenap hak-hak konstitusional mereka. Bangunan kewarganegaraan Indonesia semestinya tidak hanya didasarkan pada keenekaragaman horisontalnya (ras, identitas, etnis, agama, dan sebagainya), namun dengan senantiasa menyadari bahwa pada masing-masing entitas itu terdapat keanekaragaman vertikalnya. Masyarakat pertanian pedesaan sebagai mayoritas dari warga negara Indonesia, dengan menyadari pengelompokan vertikal yang ada di dalamnya, semestinyalah menjadi perhatian di dalam mengkonstruksi arti kewarganegaraan Indonesia.

Agraria sebagai ranah gerakan yang memperjuangkan *natural resources* (tanah, air, dan udara) adalah ruang kontestasi dalam memberi arti baru bagi *citizenship,* dan dengan demikian, penguatan bangun kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

---

negara, dengan segenap "kewajiban-kewajiban" yang harus ditanggung. Nasib organisasi tani jika tidak mau terancam direpresi negara karena sikap oposisionalnya, maka pilihannya adalah sebaliknya: menjadi oportunis!

BAB V
PROF. DR. IR. SAJOGYO, PELETAK DASAR SOSIOLOGI PEDESAAN INDONESIA

"If you want to understand what a science is, you should look in the first instance not at its theories or findings . . . you should look at what the practitioners of it do".[1]

Kutipan dari Clifford Geertz di atas bermakna, bahwa untuk memahami status *science* sosiologi pedesaan di Indonesia, pertama-tama bukan dengan melihat temuan-temuan teoretiknya, namun juga harus melihat apa yang dilakukan oleh para praktisinya terhadap ilmu tersebut. Dengan kata lain, bukan semata-mata ilmuwannya, namun pengguna(an) ilmu tersebut.

Geertz telah mengembangkan etnografi para ilmuwan, dengan menempatkan mereka sebagai sasaran yang diteliti. Karenanya, untuk memahami "bangunan macam apa" ilmu sosiologi pedesaan itu yang telah dikembangkan di Indonesia dibutuhkan pengetahuan terkait apa yang telah dilakukan ilmuwan sosiologi pedesaan.

[1] Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture,* dikutip dari Leonard Krimerman, "Participatory Action Research Should Social Inquiry Be Conducted Democratically?", *Philosophy of the Social Sciences*, Vol. 31, No. 1, Maret 2001, hal. 60.

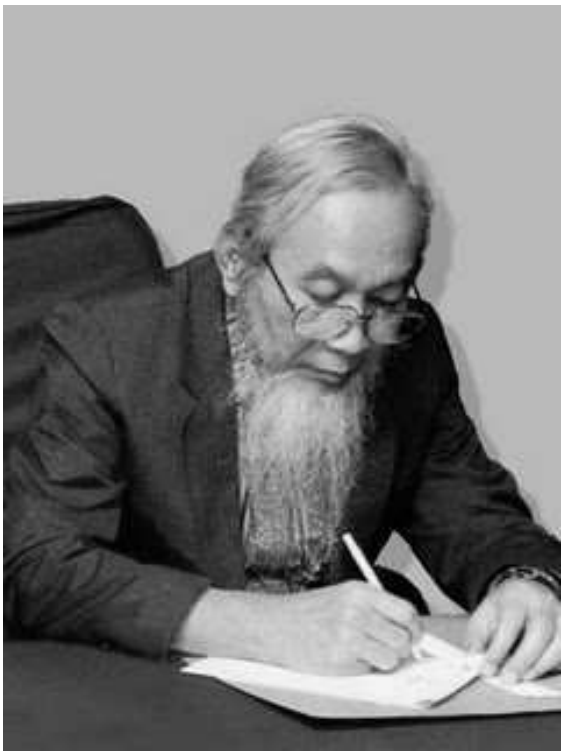
Bab ini menyajikan tokoh-tokoh yang dinilai bersifat *exemplary* (teladan) dan rintisan dalam studi pembangunan pedesaan, terutama pada masa Orde Baru. Mereka adalah Prof. Dr. Ir. Sajogyo dan Dr. HC. Gunawan Wiradi, M. Soc. Sc. Dua tokoh ini merupakan perintis dari kelompok yang kemudian dikenal sebagai "Mazhab Bogor". Nama pertama dikenal sebagai peletak dasar studi sosiologi pedesaan Indonesia, sementara yang kedua sebagai guru studi (Reforma) Agraria.

Bab ini menguraikan biografi mereka, genealogi pemikiran, spektrum gagasan dan pengaruhnya, dan posisi keduanya dalam semesta studi pembangunan pedesaan dan agraria Indonesia khususnya, dan ilmu sosial Indonesia umumnya. Terlebih dahulu disajikan bagaimana sosok dan pemikiran Prof. Dr. Ir. Sajogyo.

Pada tanggal 28 Juni 2008, *Kompas* memberi penganugerahan kepada Prof. Dr. Ir. Sajogyo sebagai "Cendekiawan Berdedikasi". Saat itu, beliau bersama keempat cendekiawan lainnya, Prof. Dr. Soetandyo Wignyosoebroto, Dr. Thee Kian Wie, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., disebut telah "mendedikasikan intelektualitas dan komitmennya untuk mencerahkan masyarakat, kehidupan yang lebih adil dan demokratis".[2] Meminjam istilah Gramsci, mereka adalah ilmuwan yang tidak berdiam di wilayah amannya dengan berada di atas menara gading, namun memihak kelas atau kelompok tertentu.[3]

Sebagai bentuk apresiasi bagi beliau, juga diturunkan tulisan berjudul "Seorang Empu Pemerhati Desa" oleh *Tempo*, Edisi 30 Juni-06 Juli 2008. Di tengah keriuhan berbagai isu yang menerpa bangsa Indonesia, Sajogyo tetap konsisten dengan perhatiannya pada pertanian dan pedesaan, persoalan yang telah lama diingkari oleh negara agraris ini. Setidaknya terhitung sejak 1955, tahun ketika ia mulai mengajar di Fakultas Pertanian UI (IPB kini) hingga sekarang, ia tetap konsisten menggeluti isu tersebut.

[2] "Cendekiawan Berdedikasi", *Kompas*, Jumat 27 Juni 2008.
[3] St. Sularto, "Cendekiawan Berkomitmen", *Kompas,* Jumat, 27 Juni 2008.



Gambar 5. Prof. Dr. Sajogyo

A. Masa Kecil yang Selalu Berpindah Tempat

Sajogyo terlahir dengan nama Sri Kusumo Kampto Utomo di Karanganyar, Kebumen, 21 Mei 1926. Ayahnya, Soewardjo Poerwoatmodjo, adalah seorang guru yang karirnya dimulai dari mengajar sekolah tingkat dasar. Sedangkan ibunya, Ibu Chamidah, seorang ibu rumah tangga, adalah guru abadi bagi dia dan saudara-saudaranya. Kampto Utomo adalah anak ke-2 dari 6 bersaudara.

Ia pertama kali sekolah di Bandung pada tahun 1934, mengikuti ayahnya yang ditugaskan di kota itu. Kemudian selama setahun, antara 1935-1936, melanjutkan sekolah ke HIS di Cepu. Lalu ia pindah lagi ke Barabai, Kalimantan Selatan selama

tiga tahun. Di kota pedalaman ini, ayahnya bertugas menjadi kepala sekolah. Meski tinggal di kota kecil, keluarga ini berlangganan majalah *de Locomotief*, sebuah majalah yang bisa dianggap radikal. Kampto Utomo senang membaca rubrik anak-anak dan berita olah raga.[4]

Tidak sampai lulus di HIS Barabai, Kampto Utomo melanjutkan kepindahannya ke Kediri, Jawa Timur pada tahun 1938. Di sini ia menamatkan HIS. Hanya setahun sekolah MULO di Kediri, ia melanjutkannya di Purwokerto hingga masa Jepang yang telah berubah menjadi SMP. Selepas dari Purwokerto, ia melanjutkan Sekolah Menengah Tinggi (SMT) di Yogyakarta, tepatnya di Kota Baru (kini menjadi SMA III).[5]

Nilai olah raga Kampto Utomo di rapor tercatat angka 9. Namun ketika ia lari pagi dengan kawan-kawannya di dekat Kridosono, ia terjatuh dan muntah darah. Ia diangkut ke RS. Panti Rapih dan mendapat perawatan beberapa hari. Vonis dokter menyatakan bahwa ia terkena penyakit TBC. Vonis itu mengharuskannya pindah ke Purwokerto, agar dapat dirawat di sanatorium Baturaden. Peristiwa ini terjadi tahun 1944, ketika ia masih bersekolah di SMT.[6]

Akibat sakit ini dan perawatannya di sanatorium, Kampto Utomo sangat peka dalam masalah suhu udara dan sangat hati-hati dan tertib dalam menjaga kesehatannya. Dalam perawatan itulah, ia menemukan kekasih hatinya, Soekemi, meski tidak pernah dinikahinya sebab meninggal terlebih dahulu. Ia kemudian bertemu dengan Hesti, gadis yang juga dirawat di sanatorium dan 12 tahun lebih tua. Gadis inilah yang kemudian dinikahinya.[7]

---

[4] Eka Budianta, *Bertemu Sajogyo* (Bogor: BRI, Agro Ekonomi, dan SAINS, *draft* versi 2009), hal. 57.

[5] Suratmin, *Prof. Dr. Ir. Sayogyo, Hasil Karya dan Pengabdiannya* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), hal. 10-12.

[6] Eka Budianta, *op.cit.*, hal. 9.

[7] Episode sanatorium ini dikisahkan secara prosaik oleh Eka Budanta, *Ibid.*

B. Pertanian: Meleburnya Unsur *Natura* dan Unsur *Humana*

Sejak sekolah menengah pertama, Kampto Utomo telah tertarik dengan bidang pertanian. Ketertarikan bermula dari sang paman, Amin Tjokrosuseno, seorang insinyur muda lulusan kehutanan yang telah bekerja mengurus perkebunan di Pekanbaru. Setiap kali liburan, ia berkunjung ke kakaknya, ibu dari Kampto Utomo. Ia membawakan keponakannya foto-foto tentang petani dan berbagai alatnya. Cerita tentang kehidupan petani dan pedesaan disimak benar oleh bocah Kampto Utomo ini. Ia tertarik, sehingga ketika lulus MULO ia mendaftar ke Sekolah Pertanian Menengah Atas, Bogor. Namun ia urung memasukinya dan lebih memilih SMA di Yogyakarta.

Pengalamannya sewaktu menjadi tentara pelajar, tergabung dalam kelompok Sudirman di Purwokerto dan berlanjut di Solo bersama Slamet Riyadi[8], menambah pengertiannya tentang kehidupan tani dan pedesaan. Selepas SMA, pada tahun 1949 dia segera melanjutkan ke Universitas Indonesia, Fakultas Pertanian yang kampusnya ada di Bogor. Di fakultas ini ia mengambil jurusan yang sering disebut dengan "Sosek" (Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian). Fakultas Pertanian bersama Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan kemudian pada tahun 1963 melepaskan diri menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB). Pendirian ini disahkan melalui keputusan Presiden RI, No. 2791, Tahun 1965.[9]

Selama kuliah di sana, Kampto Utomo menerima beasiswa ikatan dinas dari pemerintah. Di kampus inilah, Kampto Utomo mulai mengembangkan pemikirannya dan meneliti, sampai akhirnya di kemudian hari dijuluki sebagai perintis pemikiran pembangunan desa dan studi agraria Indonesia. Selama kuliah, ia belajar pada Prof. Teko Sumodiwiryo, seorang ahli penyuluhan yang memajukan koperasi tahun 1930-an. Mengenai bagaimana "pengaruh luar" masuk dalam masyarakat pedesaan Indonesia, ia

[8] Riwayat periode ini disajikan oleh Suratmin, *Ibid.,* hal. 15-24.
[9] "Landbouw Hogeschool Cikal IPB", *Suara Pembaruan,* 30 November 2004.

belajar dari D. H. Burger, seorang ahli birokrasi Hindia Belanda dan politik. Dari Ir. Terra (ahli pekarangan) ia belajar tentang "studi etnologi", di mana Terra menyoroti tipe usaha tani pekarangan yang dikaitkan dengan pola "matriarkal", dan sebaliknya pola "lahan rumputan" yang jauh dari rumah sebagai pola "patriarkal". Darinya juga Kampto Utomo belajar tentang masalah gizi dan sumbangan "hasil holtikultura" bagi pola makanan rakyat.

Dosennya yang lain, Van Aartsen, memberinya pemahaman tentang geografi ekonomi dalam konteks perekonomian dunia. Bloembergen (ahli botani) mengajarinya tentang "geografi tumbuhan". Ia dalam kuliahnya dituntut menulis laporan studi pustaka dan lapangan, sehingga mengharuskannya menjelajahi pulau Jawa, dari barat sampai ke timur, termasuk Kepulauan Seribu. Prof. Timmer (lulusan Fakultas Pertanian Wageningen) yang menulis "agronomi sosial" memberinya pemahaman yang lebih sosiologis.[10]

Dalam iklim dan spektrum kajian semacam itulah, Kampto Utomo mempelajari relasi antara *natura* dan *humana*.[11] Mempelajari pertanian di kampus itu menyadarkan pentingnya hubungan antara unsur-unsur alam dan manusia. Unsur pertama melahirkan ilmu eksakta dan unsur kedua menciptakan ilmu sosial dan humaniora. Keduanya dalam batas-batas tertentu dipelajarinya di kampus itu. Maka tak ayal dalam perkembangannya kemudian, Sajogyo terkenal dengan semboyannya, "Jika Anda ingin mengerti perekonomian negeri kami, kajilah kebudayaan dan sistem politik kami; jika ingin memahami kebudayaan dan sistem politik kami, kajilah perekonomian kami".[12]

---

[10] Sajogyo, "Refleksi Sajogyo: dari Praktek ke Teori dan ke Praktek yang Berteori" (versi Januari 2004), refleksi pada sebuah acara yang diadakan oleh Survey Agro Ekonomika di Jakarta, 2004, hal. 4-5 (versi Januari 2004). Naskah refleksi ini diterbitkan kembali dalam Sajogyo, *Ekososiologi, Deidologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus Uji),* (Francis Wahono [Ed.]) (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, bekerjasama dengan Sains, dan Sekretariat Bina Desa, 2006).

[11] Francis Wahono, "Pendahuluan: Teori Terbentuk karena Aksi", dalam Sajogyo, 2006, *op.cit.,* hal. 3.

[12] D. H. Penny, *Hints for Research Workers in the Social Sciences*, dikutip dari Sajogyo, "Refleksi…", *Ibid.,* hal. 1. Kalimat asli kutipan tersebut adalah, "If you

Kampto Utomo yang kemudian dikenal dengan "Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia" tidak pernah benar-benar belajar tentang sosiologi yang kala itu memang belum dikenal.[13] Bekal utama dalam memahami kehidupan masyarakat pedesaan selama kuliah terutama adalah dari kegiatan ekstrakurikuler. Ia pernah menjadi asisten mahasiswa yang bertugas di perpustakaan jurusan dengan tugas membaca dan membuat kartu berisi anotasi makalah penting dari berbagai majalah yang dilanggani. Pengalaman membuat bibliografi ini diakuinya sangat penting di dalam memberi peta awal pengetahuannya mengenai sosiologi.

Pengalamannya belajar turun lapangan di tengah masyarakat desa di Cibodas, Lembang, Bandung, juga memberi pengaruh mendalam. Secara sukarela dan berbiaya sendiri ia mendampingi H ten Dam, insinyur muda lulusan Universitas Wageningen Belanda. Di tengah masyarakat ini ia bergaul dan meneliti tentang buruh tani dan koperasi.[14] Laporan penelitian ini menarik perhatian Prof. W. F. Wertheim dari Universitas Amsterdam untuk mengajar di Indonesia, memilih menetap di UI Bogor dan bukannya UI Jakarta yang saat itu sedang merintis studi sosiologi.[15]

---

want to understand the economy of my country, study our culture and our political system; if you want to understand our culture and our political system, study our economy."

[13] Lihat perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia dalam bab sebelumnya (Bab IV). Pemahamannya tentang masyarakat desa dari teks diperoleh dari berlangganan majalah *Currrent Antrhopology* sejak tahun 1961 yang saat itu banyak mengulas tentang kehidupan desa, dan bukan *Current Sociology* yang justru tentang perkotaan.

[14] Hasil penelitian ini dapat dibaca dalam H ten Dam, "Cooperation and Social Structure in the Village of Chibodas", dalam W. F. Wertheim (Ed.), *Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Practice* (The Hague: W. van Hoeve, 1961), hal. 345-382. Ringkasan berbahasa Indonesia ada dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan, Kumpulan Bacaan Jilid 1* (Yogyakarta: GMU Press, 2005). Kajian mutakhir tentang Cibodas dilakukan oleh Slamet Widodo, "Struktur Sosial Masyarakat Desa: Cibodas Dari Masa Ke Masa", lihat, www.learning-of.slametwidodo.com/?p=76, diakses tanggal 1 Februari 2008.

[15] Pengakuan W. F. Wertheim kepada Sajogyo melalui surat pribadi, sebagaimana diceritakan kembali dalam Sajogyo, "Refleksi…", *op.cit.,* hal. 8.

Pengalaman mendampingi penelitian H ten Dam di Cibodas semasa kuliah Sajogyo ini memberinya perhatian pada lapisan paling bawah dalam masyarakat tani. Jika aliran Tim MIT dalam dekade yang sama memunculkan nama samaran Mojokuto dengan pendekatan antropologi interpretatif ala Clifford Geertz, maka kelompok H ten Dam ini memunculkan nama desa Cibodas tanpa embel-embel nama samaran, melalui pendekatan sosiologis. Desa itu bisa dikunjungi sesuai dengan nama aslinya sehingga realitas diferensiasi sosial sebagaimana yang digambarkan dalam penelitian itu dapat dikonfirmasi langsung ke lokasi tersebut. Sementara strategi "pseudonym" mengandung resiko bahwa realitas yang digambarkan adalah rekonstruksi "di atas kertas" terlebih dengan pendekatan interpretatif yang mengandung bias subyektif peneliti. Selain itu, temuan riset dengan gaya terakhir ini jarang dan sulit untuk memberi efek politik dan kebijakan, sebagaimana yang diharapkan dalam riset-riset sosiologi. Sayang sekali nama Cibodas kalah populer dibanding nama "Mojokuto" dalam sejarah ilmu sosial (antropologi) Indonesia. Ia menjadi *socially and politically insensible* dalam wacana ilmu sosial.

W. F. Wertheim mengulas lebih tajam hasil penelitian Cibodas ini. Jika hasil Tim MIT menyajikan kecenderungan yang sama: meremehkan signifikansi perbedaan kelas; maka hasil riset Cibodas telah mampu menunjukkan perbedaan tajam antara dua kategori: petani independen dan buruh tani. Sekitar 13% petani menguasai lebih satu hektar tanah atau 83% dari total kepemilikan tanah di wilayah itu. Sementara buruh tani yang berjumlah 87% dari populasi menguasai 18% lahan. Program koperasi dan penyuluhan dengan berbagai paket bantuannya tidak menjangkau mayoritas massa ini. Massa terbesar ini tetap "dalam kegelapan". Menyikapi program pemerintah yang ada, massa rakyat ini mengungkapkan dengan istilah "melarang *melulu*".[16]

Dalam kegiatan kemahasiswaan, Kampto Utomo aktif di Masyarakat Mahasiswa Bogor (MM[B]). Dalam kenangan

[16] W. F. Wertheim, *Elite vs Massa* (Yogyakarta: Resist dan LIBRA, 2009), hal. 93-94.

sahabat, murid, dan koleganya, Gunawan Wiradi, ia dikenal "keras kepala" dalam mempertahankan pendapatnya, semisal ketika dalam rapat organisasi. Meski demikian, ia menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan yuniornya.

Masyarakat Mahasiswa merupakan organisasi hasil fusi pada tahun 1953 antara berbagai Persatuan Mahasiswa (Persatuan Mahasiswa Bogor, Persatuan Mahasiswa Bandung, dan Persatuan Mahasiswa Djogdja) dengan berbagai Corps/Concentrasi Mahasiswa (Corps Mahasiswa Bogor, Corps Mahasiswa Bandung, dan Concentrasi Mahasiswa Djogdja).[17] Dalam organisasi MMB inilah Kampto Utomo ikut membidani lahirnya Senat Mahasiswa UI di Bogor.

C. Asistensi pada K. J. Pelzer dan W. F. Wertheim: Kesempatan Emas menjadi Doktor

Lulus pada tahun 1955, Kampto Utomo langsung berkiprah di almamaternya, Jurusan Sosek, Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, di Bogor. Pada tahun itu pula ia segera melakukan riset mendampingi Prof. K. J. Pelzer, seorang geograf dari Yale University dalam meneliti persoalan agraria di Sumatera. Bersama Clark Cunningham, ia menjadi peneliti lapang selama kurang lebih 4 bulan. Hasil penelitian Pelzer ini kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia, *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria, 1963-1947;* dan *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Keduanya diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan. Pengalaman asistensi ini memberinya pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor geografi, pertanian, ekonomi, politik, sosiologi, dan kebudayaan saling berkelindan satu sama lain dalam membangun suatu konstruksi sejarah agraria.

Selepas itu, ia menjadi asisten sosiologi pedesaan membantu Prof. W.F. Wertheim yang baru saja tiba bergabung di kampus tersebut. Ia mendampingi Prof. W. F. Wertheim, seorang

[17] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 21 April 2008. Jika tidak disebutkan nama lain, maka berarti wawancara dilakukan oleh penulis (ANL).

ilmuwan dari Belanda yang penuh dedikasi dan kecintaan terhadap Indonesia. Prof. W.F. Wertheim dalam mengajar dan menguji para mahasiswa selalu menggunakan bahasa Indonesia. Kampro Utomo bertugas mendampingi dan membantu Prof. W.F. Wertheim dalam mengajar dan menguji tugas akhir mahasiswa.[18] Ia juga menemani Wertheim dalam melakukan riset lapangan.

Dalam sebuah wawancara, Wertheim menyatakan, "Di mana-mana bersama mahasiswa dan asisten saya, Kampto Utomo yang sekarang terkenal sebagai Prof. Dr. Ir. Sajogyo, kami melakukan penyelidikan di daerah-daerah pedesaan". [Hasil penelitian itu memberi pemahaman], "Indonesia mempunyai situasi yang sangat banyak perbedaannya antara Jawa dan pulau-pulau luar Jawa, maka menurut saya inisiatif harus ditumbuhkan dari bawah".[19]

Hanya bergaul selama 2 bulan, Wertheim memberi penilaian bahwa Kampto Utomo telah siap menulis tesis doktor yang akan diujinya sebelum ia kembali ke Belanda. Tawaran itu diterima dengan senang hati. Segera Kampto Utomo mengatur jadwalnya: mulai bekerja keras menulis selama 6 bulan, rutin mengerjakannya setiap hari setelah jam 8 malam.[20] Disertasinya berjudul *Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah W. Sekampung (Lampung)* diuji pada tanggal 5 Oktober 1957 oleh komisi yang beranggotakan Prof. Soekamto (hukum adat), Prof. Teko Soemodiwirjo dan Prof. Iso Reksohadiprojo (ekonomi pertanian, Universitas Gadjah Mada).[21]

Dampak balik bagi Prof. W.F. Wertheim adalah bahwa

---

[18] Kampto Utomo juga membimbing dan menguji skripsi Gunawan Wiradi.

[19] Hersri Setiawan, "Prof. W.F. Wertheim: Masalah Demokrasi, Sosialisme dan Dunia Ketiga", wawancara 16 November 1997, http://www.geocities.com/edicahy, diakses tanggal 10 September 2007.

[20] Istri pertamanya, Hesti, tidak kuat dengan ritme bekerja dan belajar Kampto Utomo semacam ini, sehingga ia meminta pulang ke orang tua untuk sementara waktu, agar sang suami dapat menulis disertasinya dengan tenang. Ia hadir mendampingi kembali saat sang suami menjalani ujian disertasi.

[21] Sajogyo, "Refleksi…", *op.cit.,* hal 7. Ulasan mengenai disertasi ini lihat bab sebelumnya (Bab IV).

pengalaman mengajar di Bogor merupakan bagian dari upaya merintis "jalan baru" dalam studi ilmu-ilmu sosial di Amsterdam. Ia berharap bahwa para mahasiswa di sana dapat merintis jalan ilmu sosial dengan cara melakukan "studi lapang" di Indonesia, suatu pendekatan yang dinilai pas bagi zaman baru di Asia dibanding "pendekatan Leiden" semasa Hindia Belanda.[22]

Demikianlah, sampai dengan periode ini Kampto Utomo mendapat pengaruh dari aliran Wageningen dan Amsterdam, dan bukan Leiden, dalam membuka disiplin ilmu sosiologi (pedesaan) di Bogor. Ia tidak hanya sebagai perintis studi sosiologi di Bogor namun juga studi sosiologi Indonesia Pasca Perang. Sebaliknya juga, menurut pengakuan Prof. W.F. Wertheim sebagaimana tersebut di atas, ilmu sosiologi yang diajarkannya di Amsterdam mempunyai kekhasan, yakni empiris dan historis yang berdasarkan pengalaman riset lapangnya bersama para mahasiswa-dosen di Bogor.[23]

Sejarah sosiologi Indonesia tidak lengkap tanpa menyebut jasa Prof. W.F. Wertheim dan disertasi Kampto Utomo tentang masyarakat Way Sekampung, Lampung Selatan tersebut. Jika ada tuduhan bahwa perkembangan sosiologi Indonesia mengalami loncatan pada periode 1960-an, dengan hadirnya berbagai bantuan buku teks teori sosiologi Amerika dan tidak terlebih dahulu berangkat dari studi empiris sebab sebelumnya dikembangkan dalam kajian hukum,[24] maka tuduhan ini mengabaikan

---

[22] *Ibid.* hal. 8.

[23] Selain Kampto Utomo, para periode ini di Bogor yang mendapat bimbingan langsung Prof. W.F. Wertheim adalah Bachtiar Rifai. Periode setelahnya dari berbagai universitas terdapat Djokosutono, Harsja W. Bachtiar, Sartono Kartodirdjo, Sediono M.P. Tjondronegoro, S.B. Martokusumo, dan Basuki Gunawan. Selain kedua terakhir, semuanya bergelar Prof. Dr. Simak, Harsja W. Bachtiar, "Willem Frederick Wertheim: dari Ahli Hukum menjadi Ahli Sosiologi", dalam Taufik Abudullah dan Edi Sedyawati (Ed.), *Sejarah Indonesia: Penilaian Kembali Karya Utama Sejarawan Asing* (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Indonesia, 1997), hal. 259-288.

[24] Selo Soemardjan, "Perkembangan Ilmu Sosiologi di Indonesia, dari 1945 sampai 1965", dalam dalam Widjojo Nitisastro (Ed.), *Research di Indonesia, 1945-1965, Bidang Sosial Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IV)* (Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia, 1965), hal. 342.

sumbangan disertasi Kampto Utomo tersebut. Padahal disertasi ini kemudian tidak hanya menjadi rujukan utama di kampusnya (yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia), dan monografinya diterbitkan majalah *Teknik Pertanian* (1958), namun juga dibaca di luar negeri sebab diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda.[25]

Benar bahwa disertasi dan gelar Doktor Kampto Utomo tidak dengan embel-embel penyebutan "bidang sosiologi-pedesaan", namun kajiannya yang bersifat sosiologis dan antropologis tentu bersifat distingtif dibanding yang dihasilkan dari kajian hukum, misalnya. Di tengah kelangkaan dan belum berkembangnya studi sosiologi di Indonesia, disertasinya merupakan sumbangan sangat besar bagi ilmu sosial.[26]

D. Rektor Setahun: Pakaian Dinas Abu-abu, Dering Telepon Rumah dan Angket Mahasiswa

Pada tahun 1963, Kampto Utomo diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian UI di Bogor melalui Surat Keputusan Presiden RI, tertanggal 31 Juni 1963. Dua tahun sesudahnya, ia diangkat menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor. Surat keputusan pengangkatannya tertanggal 23 April 1965.[27] Ia diangkat menggantikan Prof. Dr. Bachtiar Rivai.

Ia tidak pernah menyangka bakal terpilih menjadi rektor, sebab sebelumnya tidak pernah menduduki suatu jabatan apapun kecuali mengajar. Ia hanya pernah menjadi Ketua Bagian Sosiologi Pedesaan, di bawah Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas

---

[25] Penerjemahan dalam bahasa Belanda dikerjakan oleh Sediono M.P. Tjondronegoro pada awal dekade 1960. Lihat, Sediono M.P. Tjondronegoro, *Otobiografi Sediono M.P. Tjondronegoro: Mencari Ilmu di Tiga Zaman Tiga Benua* [Penyunting A. N. Luthfi] (Bogor: Sains Press, 2008), hal. 85.

[26] Beberapa karya dan kuliah yang dianggap sebagai dasar ilmu sosiologi di Indonesia pertama kali setelah perang adalah kuliah Mr. Soenario Kolopaking (ahli hukum) di Akademi Ilmu Politik, Yogyakarta (1948); buku teks "Sosiologi Indonesia" (Djody Gondokusumo); karya Bardosono dan karya Hassan Shadily (1950-an); dan Selo Soemardjan, "Social Changes in Jogjakarta" (1962). Selo Soemardjan, *loc.cit.*

[27] Bukan 23 April 1977 sebagaimana ditulis Suratmin, *op.cit.,* hal. 31.

Pertanian. Ia juga tidak pernah diajak berunding mengenai pencalonannya itu. Sehari sebelum penentuan sebagai rektor, ia baru diajak rapat. Saat itu yang dicalonkan adalah Prof. Dr. Thoyib Hadiwidjaja, Prof. Dr. Bachtiar Rivai, dan Prof. Dr. Kampto Utomo. Saat namanya diajukan ke presiden, tidak ada yang mengenalnya, sehingga membuat presiden ragu. Sampai kemudian seorang jenderal bernama Sukindro mengatakan bahwa ia mengenalnya. Akhirnya Presiden Soekarno bersedia menandatangani surat keputusan itu. Struktur kepemimpinan rektor saat itu mengikuti gaya Hindia Belanda, yakni adanya seorang jenderal berada di atas posisi rektor. Jenderal Sukindro inilah yang menduduki posisi itu.[28]

Selama menjadi rektor yang hanya satu tahun, ada beberapa kebijakan yang dilakukannya, terutama terkait dengan persoalan manajemen kampus. Saat itu administrasi kampus dalam kondisi "morat-marit". Ia menyatakan,

> "Di satu pihak *morat-marit*, ada oposisi yang menguasai jual beli fasilitas kampus, mobil dan sebagainya. Waktu ada rapat mereka ini tidak hadir, hanya ada seorang, lalu saya *skors*. Diundang pimpinan *kok* tidak datang. Wakil rektor saja tidak dari usulan saya, tapi sudah ada disodorkan begitu saja, 'Ini tim Bapak', disodorkan ke saya. Saya pernah mengajak pertemuan sampai jam 2 pagi. Padahal periode rektor sebelumnya malah jarang masuk. Pakaian dinas masa saya warnanya biru abu-abu. Pagi pegawai sudah dinas. Orang luar melihat, *wah* ini ada perubahan besar. Ini kurang lebih satu tahun. Selama menjadi rektor yang saya lakukan adalah menertibkan administrasi. Keuangan yang sempit sekali *kok* ini malah dipermainkan oleh sekelompok orang. Pentolan-pentolannya ini kemudian mengundurkan diri. Mereka ini di kepala-kepala bagian, bengkel dan sebagainya. Ada yang menghilang tanpa pamit pindah ke Unpad. Bahkan ada yang mengundurkan diri, tapi dari luar masih mengendalikan keuangan di IPB."[29]

[28] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 16 November, 2008. Bandingkan, wawancara dengan Sajogyo oleh Eka Budianta, Tri Bangun Asih, Eko Cahyono, dan Dini Harmita, Bogor, 2 Juli 2008.

[29] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 16 November, 2008.

Kebijakan lainnya adalah melanjutkan program BIMAS SSBM (Bimbingan Massal Swa-Sembada Bahan Makanan) yang sebelumnya telah dirintis pada tahun 1963. Dua tahun sebelumnya, kebijakan yang ia terlibat di dalamnya adalah penyebaran bibit padi pendek temuan IRRI dan penggunaan pupuk di tiga desa di kabupaten Karawang. Enam orang mahasiswa yang melakukan penelitian skripsi selama 6 bulan untuk melakukan penyuluhan, menginisiasi agar petani bersedia mencoba bibit dan pupuk tersebut. Hasilnya dinilai memuaskan sehingga petani bersedia menanam untuk musim berikutnya.

Keberhasilan itu mendorong Departemen Pertanian mengambil alih uji coba dari IPB dan menjadikannya suatu proyek nasional dengan pembiayaan dari departemen. Gagasan di balik program BIMAS adalah asumsi bahwa intensifikasi dan modernisasi tergantung dari *alat*, *motivasi,* dan *tata cara teknis.* Terlihat bagaimana ide *modernisme* sangat kuat dianut saat itu, bahkan beberapa dekade sebelumnya.

> Mengenai awal gagasan BIMAS, Sajogyo menjelaskan, "Sejarah BIMAS namanya Demas (Demonstrasi Massal). Sejumlah dosen Agronomi, dengan 6 mahasiswa, melakukan uji coba di 100 hektar sawah di Karawang, di tiga desa. Hanya ada seorang ahli ekonomi, yaitu Ida Bagus Teken. Mereka di desa itu melatih pemupukan, dll. Akhirnya uji coba pendidikan itu diambil alih oleh Menteri Pertanian. Jadi mereka di desa mengikuti penuh selama 6 bulan, dari penanaman sampai pemasaran, berbeda musim: kemarau dan hujan."[30]

Pada tahun 1965, ketika Kampto Utomo menjabat rektor, kebijakan Bimbingan Massal tersebut masih dipertahankannya. Dua kabupaten di Jawa Barat yang mendapat perluasan uji coba selama periodenya adalah Cianjur dan Indramayu. Atas keberhasilan rintisan Bimbingan Massal itulah maka pemerintah kemudian menetapkannya sebagai program wajib mahasiswa pertanian se-Indonesia sebagai syarat wajib tugas akhir. Pada tahun 1965 mahasiswa dari berbagai kampus yang mengikutinya sebanyak 1400 orang. [31]

---

[30] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 21 November 2008.

[31] Sajogyo, "Refleksi…", *op.cit.,* hal. 22.

Keberhasilan uji coba itu menghasilkan kesimpulan bagi pemerintah akan perlunya sistem informasi komprehensif dan asistensi untuk membantu petani dalam meningkatkan produksinya, dan perlunya Koperasi Petani yang berguna memberi motivasi petani.[32]

Rintisan program BIMAS ini, yang oleh Orde Baru kemudian diadopsi dengan berbagai macam perubahan mendasar (kepanjangannya kemudian berubah menjadi Bimbingan Masyarakat dengan gaya instruktif dan bukan lagi penyuluhan/*voorlichting*), banyak dicatat dalam berbagai literatur oleh para peneliti sebagai "kisah sukses" dan bernilai rintisan.[33]

Pada saat menjadi rektor inilah Kampto Utomo memiliki telepon rumah di kediamannya Jl. Malabar, Bogor. Biaya pemasangan telepon relatif mahal saat itu dan gajinya sebagai rektor tidak mencukupi untuk mendananinya. Pemasangan telepon merupakan fasilitas yang diberikan oleh IPB, padahal waktu itu ia tidak memintanya. [34]

Hanya setahun menjabat sebagai rektor IPB, Kampto Utomo kemudian berhenti. Bersamaan dengan 11 dosen yang ada di IPB, ia menjadi korban dari huru-hara peristiwa 1965. Kesebelas orang itu adalah mereka yang tersaji dalam tabel berikut:

---

[32] Egbert de Vries, *A Summary Report of Activities of The Agro Economic Survey in Indonesia, 1965-1968,* (Bogor: SAE, 1968), hal. 22.

[33] Secara berturut-turut di antaranya adalah Sajogyo, "Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Penerapannya", dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986); Gunawan Wiradi, "Revolusi Hijau Ditinjau Kembali", *Suara Pembaruan,* 24 September, 1987; E. A. Roekasah dan David H. Penny, "BIMAS: A New Approach to Agricultural Extension in Indonesia", *BIES,* no. 7, Juni 1967; Egbert de vries, *Ibid.*; Ernst Utrecht, "Land Reform and Bimas in Indonesia", *Journal of Contemporary Asia*, 3:2 (1973); Gary Hansen, "Episodes in Rural Modernization: Problems in the BIMAS Program", *Indonesia,* No. 11, April 1971.

[34] Wawancara dengan Sajogyo oleh Eka Budianta dan Dian Ekowati, Bogor, 30 Juli 2008. Sajogyo memanggil istrinya dengan "mbak" sebab usianya jauh lebih tua darinya, sekitar 14 tahun.

Tabel 11. Nama-nama Dosen yang Dicopot dan/atau Dikeluarkan dari IPB tahun 1965[35]

No	Nama	Posisi di IPB saat itu	Afiliasi yang dipersangkakan	Keterangan
1	Kampto Utomo	Rektor	MMB	Direhabilitir segera
2	Ahyani	Pembantu rektor		Sda
3	Hidir	Pembantu rektor	Kader Nasakom	Sda
4	Darmadi	Asisten Kampto Utomo	MMB	-
5	Suhaedi	Dosen	Kader Kotrar	Direhabilitir
6	Sugeng Sudijatso	Dosen	CGMI	
7	Sutomo Brojo	Dosen	CGMI/ GMNI	Direhabilitir
8	Suleman Krisnandhi	Dosen	Ketua Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM)-IPB	-
9	Hendro Suwarno	Dosen Peternakan	CGMI	-
10	Sjamsoe'oed Sadjad		CGMI dan HMI	Segera dikirim ke Amerika, direhabilitir
11	Gunawan Wiradi	Dosen Peternakan	Mantan GMNI, CGMI,dan Ketua Senat IPB	"Direhabilitir" dengan cara dianugerahi gelar Dr. HC. oleh IPB, 45 tahun kemudian (2009)

Dicopotnya para dosen IPB tersebut sering dikaitkan dengan afiliasi organisasi mereka sebelumnya, meski juga tidak jelas alasan sebenarnya. Tidak ada tuduhan hitam di atas putih terhadap mereka. Saat itu fitnah memfitnah demikian hebatnya, satu sama lain melontarkan tuduhan. Mengutip penjelasan Sajogyo,

> "Tim rektor yang saya pimpin tidak pernah diperiksa. Sebab saya mengundurkan diri, jangan sampai nanti malah menjadi tegang. Tapi setelah itu *kok* malah sampai fakultas-fakultas saling menjatuhkan, saya malah ikut melerai. *Kok* kita ini seperti diadu domba."

[35] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 21 April 2008, dan wawancara dengan Sajogyo, *op.cit.*

Ia sendiri tidak membiarkan posisinya sebagai rektor semakin menjadikan bahan persengketaan. Atas persetujuan Menteri PTIP Dr. Syaref Thayib, ia mengajukan pengunduran diri. "Agar IPB tak lebih jauh terpecah, kami mundur saja".[36] Mengenai suasana saat itu dijelaskannya,

> "Mahasiswa CGMI di IPB sebenarnya tidak ada sampai sepertiganya. Saya sewaktu menjadi rektor pernah membuat angket tentang latar belakang organisasi mahasiswa, mengingat organisasi internal (senat) di kampus justru didirikan oleh berbagai organisasi ekstra. Tidak pernah mengira kalau hasilnya ini kemudian dibuat untuk melakukan pembersihan terhadap mahasiswa. Kuliah sempat diliburkan. Di sini orang-orang PNI dibersihkan. Kemudian mereka ini kumpul-kumpul, malah menyebut diri sebagai "7 pahlawan revolusi". Ada yang lama di SAE. Pak Makali juga disingkirkan dari Departemen Pertanian. Mahasiswa juga dibersihkan, tidak kuliah. Tapi di sini tidak ada *bantai-bantaian*."[37]

E. Memimpin Lembaga Penelitian Survey Agro Ekonomi

Selepas dari jabatan rektor, Kampto Utomo tidak begitu saja menghilang dari dunia akademik dan kampus, sebab keberadaannya segera direhabilitasi. Ia tetap mengajar di IPB dan banyak menekuni riset-riset empiris di lembaga yang dipimpinnya, Survey Agro Ekonomi.

1. Berdirinya SAE: Memunculkan petani gurem yang absen dalam sensus

Survey Agro Ekonomi (SAE) dibentuk pada tahun 1965. Rintisannya telah dimulai pada tahun 1963 ketika Departemen Pertanian berupaya mendapat bantuan FAO dalam merealisasi kegiatan survei. Namun kedua lembaga itu tidak sampai pada suatu kesepakatan untuk membentuk "tim gabungan", sehingga

---

[36] Penjelasan melalui surat pribadi Sajogyo kepada penulis, 24 Mei 2007. Semuanya serba mungkin di saat fitnah-memfitnah demikian hebat. Bahkan saat itu dihembuskan pula isu etnis (Jawa-Sunda) oleh beberapa pihak yang berkepentingan dengan turunnya Kampto Utomo sebagai rektor. Isu etnis ini ditepis oleh Sajogyo dalam wawancara dengannya, sementara Gunawan Wiradi membenarkannya.

[37] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 16 November, 2008.

program tidak berlanjut.[38] Pemerintah kemudian mendekati Ford Foundation agar mendukung program ini terutama dalam hal bantuan teknis.[39] Maka pada bulan 1964 diberlangsungkan Konferensi Ekonomi dan Pertanian, seminar pertama di seluruh Indonesia, di Cibogo, Bogor. Dalam seminar ini, persoalan ekonomi pertanian dan sosiologi dibicarakan, suatu kerangka pendekatan yang pada gilirannya menjadi ciri khas riset dan berkembang ke arah interdisipliner.

Mengenai maksud pendirian lembaga dijelaskan oleh Sajogyo,

> "Awalnya muncul ide dari Menteri Pertanian saat itu, *Pak* Sadjarwo. Beliau orang PNI, nasionalis. Saat perancangan UUPA 1960 beliau sudah menjabat menteri, dan melihat saya ikut berperan dan diundang beberapa kali diskusi perumusannya. Ketika dilakukan Sensus Pertanian 1963, ia tidak puas sebab orang yang memiliki tanah kurang dari 1000 m^2 tidak dianggap sebagai petani. Sensus itu patokannya adalah standar PBB. Sensus Penduduk sejak kemerdekaan pertama kali dilakukan tahun 1961. Sebab tidak puas itu, maka muncul ide pendidirian SAE. Ide itu disetujui tapi diambil alih oleh Menko Perekonomian, Chairul Saleh. SK pendirian SAE ditandatangani Chairul Saleh. Maka dibentuklah Badan Kerja. Saya sebagai orang kampus, dan mungkin juga saya muncul di UUPA 1960, maka di situ ditugasi

[38] Gunawan Wiradi menjelaskan bahwa tidak adanya kesepakatan terkait dengan keinginan FAO agar tim hanya bertanggung jawab ke Roma, sementara Kampto Utomo bersikukuh agar tim bertanggung jawab kepada Presiden. Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 17 Juli 2009. Bersamaan dengan itu, ketegangan hubungan RI dengan lembaga dunia ini semakin memuncak hingga akhirnya Indonesia keluar dari PBB, terutama disebabkan masuknya Malaysia di dalam keanggotaan Dewan Keamanan pada tahun 1965.

[39] Peran Ford Foundation dalam membiayai proyek ini lihat, Goenawan Mohamad dkk. *Menyambut Indonesia, Lima Puluh Tahun bersama Ford Foundation (1953-2003)* (Ford Foundation dan Equinox Publishing, 2003), hal. 77. Uniknya, bantuan dana FF kepada Indonesia pertama kali (1953) adalah menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris. "Orang Indonesia," kata Miller, "dengan cepat melihat bahasa Inggris sebagai salah satu kunci bagi problem pembangunan". Bantuan untuk kegiatan ini sebesar US $ 150 dan mencapai US $ 1,5 juta selama satu dekade dengan menghasilkan sepasang kamus, John Echols-Hassan Shadily, satu kamus yang paling popular di Indonesia. Bandingkan bantuan Uni Soviet pada dekade yang sama dalam jumlah US $ 800 juta. *Ibid.* hal. 81-82.

> sebagai Ketua Badan Kerja, secara *part-time*. Dengan gaji yang tidak seberapa, sebab bantuan dari FAO untuk membiayai dari ISS". [40]

Secara lebih singkat, Sajogyo menjelaskan tujuan SAE adalah, "menghimpun dan mengadakan penilaian atas bahan-bahan keterangan mengenai sumber-sumber pertanian dan keadaan masyarakat tani di Indonesia serta mengenai organisasi, jasa-jasa dan program pemerintah di bidang pertanian dan agraria yang ada (dulu) sampai sekarang, baik dari Pusat maupun dari daerah".[41] Sajogyo juga mempunyai visi khusus,

> "Bagi saya, selain topiknya itu, yang terpenting adalah siapa yang akan dijadikan calon menjadi Ketua Litbang Sosial Ekonomi di Departemen Pertanian. Sejak zaman kolonial masalah sosial-ekonomi diambil alih langsung oleh kementerian jajahan. Sementara Departemen Pertanian hanya diserahi tugas teknis, biasa diambil dari lulusan Wageningen. Mungkin hanya Pak Teko yang berpengalaman memimpin, mengembangkan koperasi di Jawa Timur. Laporannya pernah dimuat di majalah *Landbouw* yang berbahasa Indonesia dan diterbitkan di Bogor. Dia guru besar orang Indonesia pertama di antara guru-guru besar lainnya yang orang Belanda di IPB (UI Bogor). *Nah*, ini (SAE) adalah kesempatan bagus untuk mendirikan lembaga sosial-ekonomi di Deptan. Maka saya rekrut orang-orang dari kampus. Dari UGM misalnya ada Pak Muby [Mubyarto] yang menulis disertasi dengan menggunakan sumber sekunder BPS."[42]

Pada tahun 1964 pula, telah tercapai kesepakatan Ford Foundation di Jakarta (melalui wakilnya, Frank Miller), bekerjasama dengan SAE dan ISS dalam memberi "*prelimenary grant*". Bantuan digunakan untuk membiayai kunjungan singkat Egbert de Vries dan sejumlah konsultan asing.

Guna mendapatkan dukungan nasional, program kemudian diresmikan melalui SK Kabinet Presidium DWIKORA pada tanggal 15 Februari, No. Aa/D/5/1965. Selama setahun tidak ada kegiatan survey yang dilakukan. Direktur Survey dijabat oleh Prof. Dr. Kampto Utomo, Rektor IPB, dan sebagai koordinator

---

[40] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 16 November 2008.

[41] Kampto Utomo, "Prakata" dalam Irlan Soejono, *Program "Bimas" Sebagai Pendorong Modernisasi Usahatani* (Bogor: SAE, 1968), hal. v.

[42] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 18 November 2008

atas nama Ford Foundation adalah Egbert de Vries, Rektor ISS, Belanda.

Ketika rezim berganti, legalisasi lembaga ini dikukuhkan kembali melalui SK Kabinet AMPERA, No. 107/EK/KEP/1966, dengan mempertahankan personel yang sama dan diharuskan melanjutkan program hingga akhir 1967.[43]

2. Kelembagaan yang bersifat gotong royong

Kelembagaan SAE terdiri dari Badan Pimpinan Umum (BPU) dan Badan Kerja (BK). BPU diketuai oleh Menteri Pertanian dan diwakil-ketuai oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departmen Pertanian (Deptan). Para anggota terdiri dari Sekjen Departmen Perkebunan, Direktorat Jenderal (Dirjen) Departemen Pertanian, Dirjen Kehutanan, Dirjen Jawatan Peternakan, Dirjen Perkebunan Swasta, Dirjen Perkebunan Negara, Dirjen Irigasi Primer, Dirjen Urusan Agraria/Transmigrasi, Dirjen Pembangunan Masyarakat Pedesaan, dan Ketua Badan Kerja sebagai pelaksana program. Sekretaris BPU adalah Ketua Biro Urusan Sosial Ekonomi Departemen Pertanian. Dalam sistem semacam ini, otoritas penanggung jawab berasal dari empat direktorat jenderal yang berasal dari Departemen Pertanian, Departemen Perkebunan, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Urusan Perumahan.

Susunan Badan Kerja (BK) periode 1965-1966 diketuai oleh Prof. Dr. Kampto Utomo (Rektor IPB), dengan keanggotaan terdiri dari Ir. Arifin Mukaddas (Deptan.), Ir. Sudarto (Deptan), Singgih Praptodihardjo (Bagian urusan Pertanian/Agraria), Ir. Sadikin Sumintawikarta (Koordinator Riset Pertanian, Deptan.), Ir. Ibnu Sudjono (Dept. Transmigrasi dan Koperasi), Ir. Andjar Siswojo (Bappenas), dan Ir. B. Widodo (Urusan Pangan). Ketika pada tahun 1966 kabinet berganti, komposisi SAE sangat tergantung dari ketuanya yang ternyata diminta oleh Menteri

[43] Egbert de Vries, *op.cit.,* hal. 1

Pertanian yang baru, Frans Seda, untuk melanjutkan proyek. Meski demikian, keanggotaan BK berganti.[44]

3. Keterbatasan dana dan penyiasatannya

Pada tahun 1965, pendanaan kegiatan survei dimasukkan dalam anggaran untuk urusan Pertanian/Agraria. Sampai dengan tahun 1967, prinsip "gotong royong" dalam pendanaan masih dipraktikkan, yakni Budget Rekonstruksi dalam Departemen Pertanian disokong juga oleh semua direktorat jenderal yang terlibat. Ketika semua anggaran dibekukan oleh pemerintah pada tahun 1965, hanya Rp. 21.888.889 (nilai rupiah lama) yang telah dibelanjakan untuk 2 kali lokakarya dan persiapan awal survey.

Setahun kemudian diperoleh Rp. 321.452,50 (nilai rupiah baru) dari 4 sumber berbeda sehingga sejumlah kerja lapang dapat dijalankan. Anggaran tahun 1967 dari sembilan anggota BPU terkumpul Rp. 2.918.000. Akhir Desember 1967, 97%-nya akan disetujui, namun dua bulan sebelumnya hanya 33% dari rencana anggaran yang dicairkan sehingga beberapa kerja lapangan tidak jadi dilakukan. Dalam pengelolaan uang itu, Ketua BK sekaligus bertindak sebagai bendahara. Sampai dengan tahun 1967 tugas bendahara dipegang oleh Chairani, Biro Penelitian Pertanian Deptan. Dari keseluruhan tahapan sampai dengan tahun 1968, dana yang diperoleh dari pemerintah sebesar Rp. 5,3 juta dengan 85%-nya berasal dari lingkungan Departemen Pertanian.[45]

Kemudian diperoleh bantuan dari Ford Foundation sejumlah US $ 6.250 untuk periode dua tahun (1965-1967). Dana ini digunakan untuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya, membeli buku dan materi publikasi asing, dan membiayai perjalanan *study tour* ke beberapa negara (Thailand dan Jepang untuk permasalahan jagung; Malaysia untuk karet; dan Jepang dan Filipina untuk belajar pendokumentasian). Pada bulan Sep-

[44] *Ibid.,* hal 2
[45] Kampto Utomo, *op.cit.,* hal. vii.

tember 1967 diperoleh bantuan sebesar US $ 1.000 dari FAO untuk membiayai survei tentang produksi kopi.[46]

4. Aktivitas dan metode: Tumbuh bersama Revolusi Hijau

Aktivitas SAE terdiri dari 3 jenis kegiatan: pendokumentasian, pemrosesan data-data statistik sekunder, dan riset survei umum. Masing-masing jenis dikelola oleh tim yang berbeda-beda.

Tim pendokumentasian awalnya diketuai oleh Drs. Sediono M.P. Tjondronegoro (IPB) namun kemudian diganti oleh Ny. Sahertian, Direktur Perpustakaan Pertanian dan Biologi, Departemen Pertanian, Bogor. Pendokumentasian difokuskan pada aspek sosiologis dan ekonomi pertanian, terutama materi-materi dari laporan dan artikel berbahasa Indonesia.

Pemrosesan dilakukan terhadap data-data statistik sekunder yang telah dikumpulkan oleh organisasi atau lembaga lain namun belum diolah, seperti dari BPS, dll. Tim ini diketuai oleh Ir. W. Hardjanto (IPB).

Riset survei dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan guna mengumpulkan data primer, umumnya dengan adanya "studi kasus" sehingga dapat dijadikan perbandingan. Setiap lokasi studi dipimpin oleh satu orang ketua dan 4-8 anggota.[47]

Metode yang digunakan dalam riset survei adalah "*problem survey*", yakni lebih menekankan pada analisa "persoalan". Menurut Sajogyo, metode survei dipilih selain karena metode ini belum lazim digunakan, juga untuk menyiasati kesulitan anggaran. Metode survei tergolong sederhana sehingga tidak membutuhkan anggaran yang besar.[48]

Tiga macam persoalan yang disurvei adalah bahan pangan (beras, jagung, tebu) dan komoditas ekspor (karet, kopi, minyak nabati termasuk kopra).[49] Tiga ciri khas dalam melakukan survei

---

[46] *Ibid.,* hal. 3-4.

[47] *Ibid.,* hal. 3, 5, 6.

[48] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 16 November 2008.

[49] Lihat judul-judul Seri Laporan Pertama SAE berikut: Mubyarto, dkk., *Usahatani Tebu dan Industri Gula di Djawa* (1968); Irlan Soejono, *Program "Bimas" Sebagai Pendorong Modernisasi Usahatani* (1968); Wirjadi Prawirodihardjo, *Peranan*

adalah, *pertama*, dilakukan secara "mikro". Pendekatan ini berguna dalam mengkonfrontasi gambaran "mezo" maupun "makro" sehingga bermanfaat saling mengkoreksi dalam pelaksanaan kebijakan. *Kedua*, yang terpenting dalam survei tersebut adalah pertanyaan tentang usaha tani dan hubungannya dengan aktivitas bisnis dan pemrosesan produk pertanian, serta perilaku petani dan pihak-pihak lain yang terkait dalam hubungan itu. *Ketiga*, analisa terhadap kelembagaan baru bagi petani, seperti koperasi, dan analisa tentang kemampuan kerja tenaga kerja baru dalam pertanian dan perkebunan di level bawah (seperti mandor, dll.).

Dari cara memilih jenis kegiatan tersebut, SAE tidak bermaksud menyaingi dinas-dinas atau lembaga-lembaga negara yang melakukan "turne pendek" dalam melakukan analisa kilat terhadap suatu masalah; tidak juga mengikuti cara kerja "survei" dan sensus secara meluas sebagaimana BPS dengan tenaga yang mencapai ribuan, sebab tidak mungkin dilakukan SAE; dan tidak pula jenis "*country study*" seperti yang sering dihasilkan oleh badan-badan internasional (seperti FAO, dll.).[50]

Sifat dari kegiatan SAE adalah "mengikuti cara-cara kerdja jang se-sistematis mungkin" (dalam kegiatan "dokumentasi"). Untuk kegiatan "statistik" dan "survei masalah", kerja SAE lebih bersifat pragmatis dengan memilih masalah-masalah strategis dan mendesak umumnya atas "pesanan" pihak *policy maker* yang berkepentingan.[51]

Kesemua staf SAE bekerja secara *part-time*. Keragaman tim tampak dari komposisi keanggotaan yang berasal dari kementerian, perusahaan negara, biro pusat dan kampus. Meski demikian, dalam melakukan survei mereka masih sangat tergantung dari tenaga ahli kampus yang umumnya berasal dari fakultas per-

---

Ekonomi Perusahaan-Perusahaan Pengolah Padi di Djawa Chususnja di Dua Kabupaten di Djawa Barat (1968); R. S. Sinaga Faisal Kasryno, dan Amris Makmur, *Pengusahaan dan Tataniaga Karet Rakjat di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan* (1968); dan Moeliono Partosoedarso dan Amris Makmur, *Tata Produksi dan Niaga Kopi di Indonesia* (1968).

[50] Egbert de Vries, *loc.cit*

[51] Kampto Utomo, *op.cit.,* hal. vi

tanian, ekonomi, dan geografi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.[52] Dalam melakukan survei, tim mengikutsertakan mahasiswa-mahasiswa tingkat sarjana sebagai petugas lapangan.[53]

Selama perjalanan SAE, dari tahun ke tahun terjadi perubahan metode. Di awal periode SAE, metode survei dilakukan guna menyiasati keterbatasan dana serta urgensitasnya (kesegeraan) dalam memberi sketsa awal bagi kebijakan pemerintah. Pendekatan ini merupakan pengalaman baru bagi Kampto Utomo sendiri. Karirnya sebagai seorang sosiolog memberi pengalaman pada metode "antropologis" (observasi-partisipatif). Ketika unsur-unsur "non-ekonomi" tidak dapat dijangkau menggunakan metode survei, maka metode "antropologis" digunakan kembali di SAE, bertepatan dengan datangnya konsultan baru, Benjamin White, di lembaga tersebut pada tahun 1975. Namun pada tahun ini Sajogyo telah berhenti dari jabatannya sebagai ketua BP-SAE.

Secara umum tampak bahwa topik kajian dan pendekatan yang dilakukan oleh riset SAE ini mencerminkan perhatian dan proses modernisasi yang sedang terjadi. Tiga jenis aktivitas di atas yakni dokumentasi, pemrosesan data statistik sekunder, dan riset survei di awal-awal tahun SAE, pada gilirannya memberi bekal dalam kegiatan riset evaluasi pelaksanaan Revolusi Hijau atau modernisasi pertanian.

Tepatnya pada tahun 1968 pemerintah Orde Baru mencanangkan program BIMAS yang rintisannya daam bentuk lain telah dilakukan oleh IPB (tahun 1963/1964 sebagaimana disinggung di muka). Program BIMAS berupa promosi penggunaan meluas Padi Bibit Unggul (PBU), pupuk buatan, pestisida, insektisida, kredit, irigasi, dan tenaga kerja murah (dalam bentuk hubungan ketenagakerjaan baru). Program BIMAS ini merupakan bagian dari *grand project* Revolusi Hijau yang dicirikan

[52] Meski menghadapi kesulitan besar semacam itu, kinerja SAE dinilai "has been rather successful", Egbert de Vries, *op.cit.,* hal. 9

[53] Kampto Utomo, *loc.cit*

dengan modernisasi dan mekanisasi.[54] BIMAS yang disebut dengan BIMAS "Gotong Royong" ini dibiayai dan dilaksanakan oleh perusahaan asing seperti CIBA, Hoechst, Mitsubishi, dll. Sebagai *pilot project*-nya diujicobakan penanaman benih baru di 20.000 ha sawah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pergantian musim tahun 1969/1970.[55]

Pada tahun itu pula, 1968, SAE didukung Ford Foundation dan bekerjasama dengan *Agriculture Development Council* (A/D/C) melakukan penelitian atas pelaksanaan Revolusi Hijau tersebut. Kerjasama A/D/C dengan SAE bertepatan dengan awal penyebaran bibit unggul padi yang berasal dari IRRI Filipina.[56] Kegiatan penelitian yang bersifat jangka panjang dan besar itu dikenal dengan proyek penelitian "Intensifikasi Padi Sawah" (IPS). Proyek ini dipimpin oleh A.T. Mosher. Pada periode inilah (1968-1972) dua buku A.T. Mosher menjadi pegangan utama, layaknya "kitab suci", bagi peneliti SAE.[57]

5. Siapakah "rakyat" itu?: Kritik SAE terhadap Revolusi Hijau

Meskipun menjadi bagian dari dan mendukung proyek awal pelaksanaan Revolusi Hijau dalam pembangunan pertanian Indonesia masa Orde Baru melalui keterlibatannya di SAE, Sajogyo justru merupakan orang pertama (terpublikasi tahun 1974) yang melakukan kritik atas kebijakan tersebut. Kritik lain pertama kali dilontarkan oleh peneliti asing Richard Franke melalui disertasinya (1972), juga dikerjakan di bawah payung kerjasama SAE proyek IPS.[58]

---

[54] Lihat Francis Wahono, "Dinamika Ekonomi Sosial Desa sesudah 25 tahun Revolusi hijau", majalah *Prisma,* Maret 1994, hal. 3, dan

[55] David Penny, "The Agro-Economic Survey of Indonesia: an Appreciation", Jurnal *Indonesia,* no II, April 1971, hal 125

[56] Goenawan Mohamad, dkk., *loc.cit.*

[57] Gunawan Wiradi, "Aspek Metodologi dalam Pengembaraan Ilmiah Prof. Dr. Ir. Sajogyo", dalam M. T. Felix Sitorus, dkk. (Ed.), *Memahami dan menanggulangi Kemiskinan di Indonesia, Prof. Dr. Sajogyo 70 Tahun* (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 21.

[58] *Ibid.*

Melalui naskahnya yang berjudul "Modernization without Development in Rural Java"[59], menggunakan data-data hasil riset di SAE, Sajogyo menjelaskan beberapa sebab kegagalan produksi dan distribusi Revolusi Hijau sebagai program yang dianggap melakukan modernisasi pertanian. *Pertama*, sebagaimana dipaparkan di awal tulisan itu, ia langsung menyinggung ketimpangan penguasaan tanah dan "kekurangan lahan", aspek yang justru sengaja dihindari oleh para desainer Revolusi Hijau.[60]

> "Kami sempat menulis satu makalah 'Modernization without Development', yang merangkum pengamatan atas kasus awal Revolusi Hijau di pedesaan Jawa, ditulis untuk suatu seminar FAO di Bangkok, tahun 1973. "Revolusi Hijau" itu satu bentuk "modernisasi" yang baru memperbaiki nasib "petani" di lapisan atas di desa. Sebaliknya, di lapisan bawah petani gurem dan buruh tani masih tertinggal, belum terangkat dalam "arus pembangunan" yang berarti perbaikan hidup yang lebih "maju". Misalnya, kenaikan upah buruh tani padi sawah baru sepuluh tahun kemudian menjadi kenyataan!".[61]

Dalam naskah itu Sajogyo menunjukkan bahwa tahun 1963 dengan penduduk 66 juta jiwa ditemukan 55% petani memiliki tanah di bawah 0,5 ha dan 21%-nya memiliki tanah di atas 1 ha. Dua juta rumah tangga dengan luas kurang dari 1 ha yang tidak dimasukkan dalam Sensus Pertanian 1963 hanya memiliki pekarangan yang ditempati rumah tangga tersebut. Singkatnya, permasalahan ketimpangan agraria yang makin diperkuat oleh Revolusi Hijau digarisbawahi dengan tegas dalam naskah Sajogyo ini.

---

[59] Sajogyo, "Modernization without Development in Rural Java", paper pada seminar *Agrarian Transitions* FAO di Bangkok, 1973. Naskah ini kemudian terbit dalam *Journal of Social Sciences*, University of Dhaka, Bangladesh, 1982. Uraian ini menggunakan versi terjemahan bahasa Indonesia, Sajogyo, "Modernisasi tanpa Pembangunan", dalam Sajogyo, 2006, *op.cit.,* hal. 157-177.

[60] Lihat "5 akselerator" dan "5 hal esensial" dalam paket Revolusi Hijau yang sama sekali tidak menyebut pentingnya restrukturisasi penguasaan tanah, sebagaimana telah diulas dalam Bab III (catatan kaki No. 39).

[61] Sajogyo, "Struktur Agraria, Proses Lokal dan Pola Kekuasaan", dalam Endang Suhendar, dkk., *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi* (Bandung: AKATIGA, 2002).

Kedua, tidak dijalankannya UUPA dan UUPBH 1960 menjadikan petani bagi hasil (bukan penyewa) tidak memiliki otonomi penuh dalam mengatur pertaniannya di hadapan pemilik tanah. Padahal sistem penyekapan (*tenancy system*) yang ada di Indonesia mayoritas adalah bagi hasil dan bukan sewa-menyewa. Dibandingkan dengan bagi hasil, persewaan lebih memberi kekuatan penuh pada pihak penyewa dalam mengelola tanahnya.

Ketiga, lemahnya institusi desa di tengah massa yang mengambang (pasca 1965). Kelembagaan desa telah berubah menjadi wakil dari kekuatan di atasnya (mengatur pelaksanaan program pemerintah) daripada berfungsi sebagai "organisasi penggerak" yang mendidik warganya. Massa tidak hanya mengambang secara politik namun juga secara sosial-ekonomi ketika modernisasi relasi ketenagakerjaan terjadi. Akibatnya, "tidak ada klien yang bisa pergi ke begitu banyak patron untuk menyuarakan pendapatnya".[62]

Sajogyo menunjukkan siapa rakyat itu dengan merujuk Sistem Neraca Sosial Ekonomi Nasional (SNSE) dari BPS dengan cara membedakan "pertanian" dan "bukan-pertanian". Dari kelompok "pertanian" terdapat 3 golongan: petani gurem (memiliki tanah kurang dari 0,5 ha) yang berjumlah 34%; buruh tani 37%; dan petani bukan gurem 26% (tahun 1978). Dua kelompok pertama itulah yang sejatinya disebut sebagai "rakyat". Kelompok yang bukan gurem berpotensi di dalam aktivitas bukan pertanian dan meningkat menjadi *farmer*.[63]

Selain itu, kritik SAE yang "membuat heboh" terhadap program Revolusi Hijau berasal dari riset-riset yang dihasilkan oleh William Collier dkk., sewaktu ia bertugas menjadi konsultan SAE pada tahun pada tahun 1969.

---

[62] Sajogyo, 2006, *op.cit,* hal. 171.

[63] Analisa ini dinyatakan kembali tahun 2002. Lihat, Sajogyo, "Pertanian dan Kemiskinan", dalam Sajogyo dan Sumantoro Martowijoyo, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancah Globalisasi* (Bogor: Sajogyo Inside, 2005), hal. 67. Dengan melihat rata-rata data sejak tahun 1990-an, Sajogyo menemukan bahwa laju pertambahan jumlah petani gurem 1,5% dan buruh tani adalah 5,0%. Artinya, terjadi *agricultural ladder.*

> "Bahwa dalam proses itu banyak tenaga buruh tani, terutama buruh panen dengan upah *natura* tersisihkan di desa Jawa: beralih dari alat ani-ani ke alat sabit. Bahkan timbul pengerahan buruh panen secara "terbatas" oleh "pengusaha pemborong panen gabah"—bukan padi bertangkai—yang dipercaya oleh petani pemilik sawah. Waktu itu juga mulai berkembang usaha kecil penggilingan gabah (*huller*) yang juga menyingkirkan buruh wanita".[64]

Sensitivitas dan kemampuan Sajogyo dalam mengungkap kondisi lapisan terbawah atau "kaum miskin dari termiskin" masyarakat tani dan meletakkannya dalam kerangka desa dalam konteks komunitas dan kelembagaan, dapat mendeteksi "kejanggalan-kejanggalan" dan ketimpangan yang diakibatkan dalam pelaksanaan Revolusi Hijau dengan berbagai paketnya. Jika Revolusi Hijau tidak menempatkan lapisan mayoritas ini sebagai penerima keuntungan (*subject of beneficiaries*) dan pelaku dari inisiatif itu, maka cemoohan yang menyatakan "pelaksanaan program pemerintah secara tiba-tiba, pertama-tama akan menjadi 'tontonan' (*show business*), setelah itu akan menjadi 'lelucon' (*monkey business*)" ,[65] menjadi terbukti. Hal ini menggambarkan kegagalan pemerintah meresapi sejauh mana petani dimotivasi oleh dorongan-dorongan ekonomi.

Demikianlah, dalam ketimpangan struktur dan kondisi seperti di atas, modernisasi pertanian melalui Revolusi Hijau hanya akan memperkuat kelas petani pemilik tanah luas. Kelompok lemah pedesaan menjadi semakin tertinggal. Akibatnya, mereka (dipaksa) meninggalkan lumpur sawahnya, pekarangan dan desanya, untuk memasuki kota-kota sebagai

---

[64] Sajogyo, 2002, *op.cit.*, hal. 3. Temuan kritis ini sangat berpengaruh dan banyak dibicarakan hingga membuat pemerintah merasa gerah. Jauh hari setelahnya, pemerintah masih dibuat gerah dengan temuan itu, sampai-sampai Presiden Soeharto menyatakan, "...ternyata di dalam negeri ada yang mengatakan seolah-olah proses pembangunan kita selama 15 tahun ini, bahkan 18 tahun, merupakan proses pemiskinan terhadap rakyat kita... Sebagai bukti terjadinya proses pemiskinan, para ahli itu menunjukkan jumlah petani yang memiliki lahan sempit makin lama makin bertambah sempit", "Sebuah Pertanyaan Di Desa Made", *Tempo,* 28 Desember 1985. Meski tidak menyebut langsung siapa yang disindirnya, agaknya cukup berdasar untuk menduga jika yang dimaksud adalah kelompok SAE, atau setidak-tidaknya "para ahli" yang pernah terlibat dan/atau menggunakan data-data SAE sebagai dasar argumennya.

[65] David Penny, 1971, *op.cit.,* 124.

buruh dan pekerja informal. Revolusi Hijau mengakibatkan proses deagrarianisasi.

6. Berbagai apresisasi

Dalam perkembangannya, SAE dinilai telah berhasil dalam "memberi kontribusi yang penting sekali bagi pemahaman lebih baik mengenai kondisi 'agro-ekonomi' sehingga berguna dalam memberi saran dasar bagi proses 'policy making' bagi pembangunan".[66] Ditegaskan pula,

> "*It will be clear from what follows that these relatively inexperienced (their average age is 32 years), part time research workers have written reports which illuminate a wide range of problems facing the development of Indonesian agriculture*."[67]

Meski kinerja tim terpisah dengan proses dan pengaruh pembuatan kebijakan, namun hasil-hasilnya sejak awal memang diharapkan dapat memberi pemahaman menyeluruh bagi proses pembuatan kebijakan, sebagaimana yang tersirat dalam SK pendiriannya. Hasil-hasilnya dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan. Sejumlah kebijakan yang sedang dibuat berubah seluruh atau sebagiannya, sebagai hasil dari kajian lapangan yang telah dilakukan oleh SAE, terutama setelah riset tahun 1967-1968. Namun perubahan itu terjadi lama setelah laporan ditulis dan bahwa perubahan kebijakan lainnya yang direkomendasikan oleh SAE banyak yang belum dijalankan.[68]

Sampai dengan tahun 1968 yang dihasilkan oleh bagian dokumentasi SAE adalah: membuat direktori pertanian dari lembaga riset dan fakultas yang ada di Bogor dan Jakarta; panduan klasisfikasi geografi Indonesia berdasarkan klasifikasi UDC; indeks artikel selama 3 tahun terakhir; bibliografi ekonomi pertanian di Indonesia; membeli pustaka (melalui bantuan FF);

---

[66] Alan M. Strout, "Managing The Agricultural Transformation on Java: A Review of The Survey Agro Ekonomi", Jurnal *BIES,* Vol. XXI, No 1, April, 1985, hal. 62.

[67] David H. Penny, *op.cit.*, 1971, hal. 111.

[68] Egbert de Vries, *op.cit.,* hal. 10.

menerbitkan katalog buku-buku ekonomi dan ilmu-ilmu sosial yang disumbang dari AID.[69]

Berbagai apresiasi terhadap lembaga SAE yang dipimpin Sajogyo di antaranya menyebutkan bahwa lembaga riset ini banyak mengadakan lokakarya sehingga dari sini peserta yang terlibat membuat perhimpunan PERHEPI.

> "Amat sedikit dari ahli-ahli sosial dan ekonomi yang tidak diperkenalkan oleh *training workshop* atau konferensi yang diorganisasikan oleh lembaga yang beliau pimpin…dan tidak ada penulis dalam bidang sosial ekonomi pertanian di dalam dan luar negeri yang tidak menggunakan data, penemuan, dan kesimpulan dari SAE.[70]

Riset SAE menyadarkan akan keragaman karakteristik masyarakat tani berdasarkan keragaman ekologinya, sehingga perlunya kehati-hatian penerapan suatu program pemerintah. Para stafnya memiliki kemampuan dalam mensintesakan hasil studi-studi terdahulu, lalu melakukan *revisit* guna menguji kembali temuan sebelumnya dan melihat perubahan yang terjadi. Banyak disertasi dan tesis peneliti Indonesia maupun asing yang sedang studi di berbagai negera (Nebraska, Malaysia, Philippina, Belanda, Hawaii, Iowa, dll), menggunakan data-data sensus SAE, bahkan juga laporan-laporan Bank Dunia.[71] Dalam periode 4 tahun (November 1968-September 1972), PERHEPI dan SAE telah melaksanakan 32 lokakarya dan dihadiri peserta lebih dari 700 yang rata-rata pelaksanaannya selama 12 hari.[72]

---

[69]*Ibid.,* hal 12-13. Mengenai topik dan judul apa saja buku yang disumbangkan itu lihat Ben White, "Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transition and Scholarly Engagement in Indonesia", dalam Vedi R. Hadiz dan D. Dhakidae (Ed.), *Social Science and Power in Indonesia* (Jakarta: Equinox bekerjasama dengan ISEAS, 2005). Yang pasti, buku-buku yang tidak sejalan dengan ideologi modernisme Revolusi Hijau tidak disetujui, seperti karya W. F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change,* dan sejenisnya.

[70] Beddu Amang, "Prof. Sajogyo: Tokoh Pencetak Kader Peneliti dan Pemikir dalam Bidang Sosial Ekonomi Pertanian di Indonesia", dalam Mubyarto dkk. (Ed.), *Sajogyo: Bapak, Guru, dan Sahabat* (Bogor: Yayasan Agro Ekonomika, 1996), hal. 6-7.

[71] Alan M. Strout, *op.cit.,* hal. 73-74.

[72] Beddu Amang, *loc.cit*.

Pengalaman SAE memberi arti beberapa hal dalam pengembangan "Metodologi Sajogyo". *Pertama*, dengan berorientasi pada "hadap masalah" atau "*problem oriented*" (bdk. "survey masalah") maka kompleksitas persoalan menyaratkan agar tidak hanya didekati dari satu disiplin ilmu. Pengorganisasian Tim SAE dari berbagai latar belakang disiplin ilmu berpotensi dikembangkannya pendekatan yang bersifat interdisiplin, dan inilah yang telah dilakukan oleh SAE.

Lima judul laporan pertama di atas (lihat catatan kaki No. 45), terkecuali tentang BIMAS, adalah bidang ekonomi dengan ketua tim yang dididik sebagai ekonom, namun semua laporan mampu menjelaskan dinamika sosial politik Indonesia saat itu. Hal ini tidak terlepas dari peran Ketua BP-SAE, Sajogyo, sebagai seorang sosiolog yang menekankan bahwa apa yang umumnya dianggap sebagai fakta ekonomi murni memiliki arti yang jauh dapat dicakup oleh teori ekonomi. Ia dapat digunakan untuk menguji hipotesa perilaku sosial politik masyarakat. Pernyataannya yang terkenal sebagaimaan dikutip di atas (lihat catatan kaki No. 9) memberi kesadaran akan hal itu, saling kait-mengkaitnya persoalan sosial-ekonomi dalam dinamika kebudayaan dan politik masyarakat Indonesia.[73]

Berpikir dalam kerangka budaya dan politik atas kondisi ekonomi, dan sebaliknya melihatnya secara ekonomi atas fenomena budaya dan politik, seakan-akan menapaki jembatan antara ujung "kultural" dan "struktural". Kesadaran semacam ini langka dijumpai dalam sejarah ilmu sosial kolonial yang justru (dalam kasus Snouck Hurgronje, misalnya) memangkas persoalan budaya (agama) dari medan politik dan ekonomi-nya.[74] Hal ini juga mencerminkan semangat ilmu pengetahuan sosial pasca kemerdekaan yang hendak mencari relevansi sosialnya melebihi relevansi teoretisnya, jika yang terakhir ini diartikan sebagai kekakuan dan terkotak-kotakkannya (*compartments*) disiplin ilmu

[73] David Penny, 1971, *op.cit.,* hal. 122.

[74] Tujuan awal SAE sebagaimana dinyatakan Sajogyo, merintis kajian sosial-ekonomi di Deptan yang seringkali disikapi secara teknis dan ekonomis, dengan demikian telah tercapai.

sebagaimana yang terjadi pada periode setelahnya (ketika berorientasi Anglo-Saxon, sejak tahun 1970-an).

Kedua adalah rangkaian akumulatif dari empiris-studi-*policy*. Prosedur konsultasi antara tim SAE dengan "*policy-makers*" dilakukan berkali-kali untuk menjamin agar "laporan-laporan survey pada achirnja tidak hanja masuk arsip mati sadja, melainkan sebaliknja mampu melahirkan pertimbangan-pertimbangan baru jang konkret dan berharga dalam pemetjahan masalah-masalah pertanian kita".[75] Pengalaman ini terkonfirmasi nantinya dalam saran-saran Sajogyo agar dalam mengkaji dan memecahkan persoalan (pembangunan dan kemiskinan) memerlukan kerjasama antar institusi baik sektor publik, kesukarelawanan, dan privat, sebagaimana uraian Norman Uphoff, *Local Institution Development*.[76] Bukan dimaksudkan sebagai pengetahuan yang diletakkan secara subordinatif di bawah kepentingan kebijakan (negara dan swasta), justru dengan pengetahuan yang otoritatif akan mampu memandu kedua sektor itu. Buku Norman Uphoff ini dalam beberapa dekade kemudian sering dikutipnya, merupakan teoretisasi yang sebenarnya hanya bersifat mengkorfirmasi pengalaman Sajogyo bersama SAE.

SAE telah menjadi wadah pelembagaan karir intelektual Sajogyo di awal periode Orde Baru. Dari dalam lembaga ini muncul "manifesto akademis" melalui naskah "Modernization without Development in Rural Java". Naskah ini justru berfungsi sebagai "paradigma kritis" terhadap pembangunan pertanian/pedesaan dan selanjutnya menyarankan agar "imajinasi sosiologis" diarahkan pada "lapis terbawah" masyarakat, serta pentingnya perspektif pemberdayaan.

---

[75] Kampto Utomo, *op.cit.,* hal. viii.

[76] Norman Uphoff, *Local Institutional Development: an Analytical Sourcebook with Cases,* (West Hartford: Kumarian Press, 1986). Buku ini masih disarankannya menjadi "Kerangka Analitik" dalam kegiatan "Ngaji Bareng Prof. Sajogyo" selama bulan Ramadhan, 1428 H., (November-Desember, 2009). Sajogyo sendiri yang menyiapkan kurikulum dan bahan-bahannya agar dikaji oleh peserta di Sajogyo Institut, Bogor.

Lembaga penelitian SAE telah melahirkan peneliti-peneliti ilmu sosial dan ahli-ahli sosial ekonomi pertanian di Indonesia. Banyak dari mereka yang terlibat dengan SAE kemudian mendirikan asosiasi ilmuwan, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). Organisasi ini beranggotakan tidak hanya mereka para ekonom, namun juga mereka yang berminat pada kajian sosial ekonomi pertanian dari berbagai latar disiplin, bahkan tidak juga mengharuskan bertitel sarjana.

F. UPGK dan Garis Kemiskinan

Dalam *Koran Tempo* edisi 29 September 2009, Universitas Indonesia memasang iklan pembukaan mahasiswa baru. Universitas itu mengiklankan diri sebagai perguruan tinggi yang telah "mengakar dan bercabang...". Hal menarik dari iklan itu adalah adanya ilustrasi "pohon ilmu pengetahuan" yang digambarkan memiliki 3 batang (pokok) ilmu, yakni kategori ilmu kesehatan, ilmu sosial dan humaniora, dan ilmu eksakta dan teknologi. Ilmu kesehatan dalam iklan tersebut telah menjadi kategori ilmu tersendiri.

Masing-masing batang ilmu pengetahuan itu memiliki percabangan dan ranting-ranting yang seakan-akan saling terlepas satu sama lain. Dari ilmu kesehatan, misalnya, terdapat cabang ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Sementara ekonomi, politik dan sejarah termasuk ilmu sosial dan humaniora, sedangkan teknik sipil dan biologi sebagai ilmu eksakta dan teknologi. Masing-masing sub-disiplin ilmu seakan-akan saling menjauh dan berdiri sendiri.

Hal seperti di atas tentulah bukan pengalaman Sajogyo ketika berperan dalam meneliti dan merumuskan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Sebagai seorang sosiolog ia mampu melihat persoalan gizi dalam konteks sosial-ekonomi, sesuatu yang kemudian melatarinya menciptakan instrumen untuk merumuskan "Garis Kemiskinan" atau yang kelak dikenal dengan "Garis Kemiskinan Sajogyo". Persoalan gizi tidaklah semata-mata persoalan kesehatan (akibat), namun yang lebih

utama adalah mencari sebabnya dan bagaimana menjadikan masyarakat berdaya secara pangan. Ia menjelaskan awal mula keterlibatannya dalam proyek Departemen Kesehatan ini,

> "Saya terlibat program perbaikan gizi masyarakat yang bukan berasal dari kesehatan. Mengapa saya yang dipilih sebab saya pernah mengajar juga di Akademi Gizi, Bogor, tahun 1959-1961. *Pak* Sudrajat Prawiranegara yang meminta saya meneliti UPGK. Dari situ saya menjadi Ketua Pergizi Pangan (selama dua periode). Idenya adalah mempertemukan *orang* kedokteran dengan *orang* pertanian. Barometer rawan pangan ada di gizi balita! Waktu itu sudah dibuat *early warning system*, sistem waspada dini."[77]

Keterlibatan Sajogyo dan 8 tim-nya[78] berupa survei atas sampel yang berjumlah 1000 keluarga di beberapa desa di 8 provinsi: 2 di Sumatera, 1 di NTB, dan 5 di Jawa. Survei dilaksanakan pada tahun 1972/1973. Hasil pengukuran dari survei tersebut menemukan tingkat asupan makanan/sehari/keluarga dalam ukuran kalori yang rendah sekali.[79] Menariknya, ketika berusaha dikaitkan dengan persoalan struktural, yakni "tingkat pendapatan keluarga", ternyata problem kurang gizi itu tidak ada hubungannya. Tim justru menemukannya pada problem pola budaya makan yang tidak baik pada kedua lapisan masyarakat (kaya-miskin). Namun ini hanya pandangan sekilas yang terlanjur dijadikan sebagai pendekatan program. Ketika melakukan evaluasi, Sajogyo mencoba melihatnya secara lebih luas.

Beberapa contoh yang ditunjukkan mengenai budaya yang tidak sadar pangan itu adalah kebiasaan dalam jalur-jalur pangan (pembungkus tidak aman, cara memasak yang salah, pilihan menu/pantangan yang tidak tepat), bermain judi dan boros

---

[77] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 16 November, 2008.

[78] Tim beranggotakan 14 peneliti yang terdiri dari ahli sosiologi, ilmu gizi, hortikultura, teknologi pangan, ekonomi pertanian, statistik, dan kesejahteraan keluarga. Mereka berasal dari kampus USU Medan, IPB, UGM, UKSW Salatiga, dan UNUD Bali. Sekali lagi, tampak multidimensionalnya pendekatan Sajogyo dalam riset ini. Lihat, Sajogyo, *Usaha Perbaikan Gizi Keluarga: ANP-Evaluation Study, 1973* (Bogor: LPSP-IPB, 1975).

[79] Sajogyo, 2006, *op.cit.,* hal. 72.

sehingga mengabaikan pangan, budaya patriarkis yang lebih mementingkan (pangan) ayah, dan lebih mementingkan membeli pakaian dari pada pangan. Di dalamnya ada masalah ekonomi, mental, dan pengetahuan.[80]

Mereka menyarankan agar perbaikan gizi dapat dilakukan dengan memperhatikan pola makan, mendahulukan makanan cukup gizi pada anak daripada orang tua. Keluarga miskin dapat mengoptimalkan bahan pangan dengan syarat cukup gizi yang mudah didapat di sekitarnya. Sebaliknya, keluarga kaya perlu waspada agar tidak ceroboh memberi penganan-penganan ringan (*snack*) meski mewah namun bergizi rendah yang justru dapat mengurangi selera makan primer sang anak.

Atas saran itulah kemudian diuji-cobakan usaha perbaikan gizi keluarga dalam bentuk program Taman Gizi,

> "Di mana sejumlah ibu yang punya anak balita gizi-kurang berkumpul berkala (sukarela), dalam lembaga bentukan desa/kampung itu... Di Taman Gizi para ibu yang bermasalah mendapat "pelatihan" dalam hal memelihara gizi baik terutama anak kurang dari 5 tahun maupun dirinya.... terisi dengan perkenalan (demonstrasi) menyiapkan beragam hidangan sehat-murah untuk keluarga, sesuai pola makanan setempat. Ada pula (ini unsur baru) pembagian makanan sehat berupa "tepung kedele" bagi anak balita gizi-kurang yang di Taman Gizi dibagikan selama 3 bulan."[81]

Taman Gizi bukanlah taman dalam arti pekarangan atau "warung hidup", namun kumpulan ibu-ibu yang bersatu dalam usaha menangani balita kurang gizi. Taman Gizi merupakan cikal bakal dari "Posyandu", meski keduanya dijalankan dengan konsep yang berbeda. "Eksperimen Taman Gizi waktu itu berlangsung sebelum Departemen Kesehatan meluncurkan Program Posyandu yang menurut namanya saja lebih tampak merupakan "alat" dalam Program yang digelar Pemerintah".[82]

---

[80] Sajogyo, dkk., *Menuju Gizibaik yang Merata di Pedesaan dan di Kota* (Yogyakarta: GMU Press, 1994 [edisi V]), hal 5-6.

[81] Sajogyo, 2006, *op.cit.,* hal. 74.

[82] *Ibid.,* hal. 76.

Keduanya terlihat jauh berbeda. Taman Gizi dalam program UPGK berinti pada pendidikan orang dewasa di luar sekolah.[83] Konsepnya adalah pengorganisasian rakyat dan bukan mobilisasi berdasar instruksi dari atas sebagaimana kemudian dipraktekkan dalam Posyandu. Kegiatan UPGK mencakup penyuluhan gizi masyarakat, pelayanan gizi, dan peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan.

Dari ketiga kegiatan UPGK itu tampak sekali jejak-jejak pendidikan Sajogyo. Pendidikan orang dewasa dipelajarinya dari Prof. Teko Sumodiwirjo,[84] dan masalah pekarangan dari G. J. A. Terra semasa ia kuliah. Bagi generasi tahun 1950-an, nama Prof. Teko dan kiblat Denmark-nya lebih dikenal dalam pendidikan orang dewasa daripada Paulo Freire dan Brasil yang sering dirujuk aktivis pendamping petani generasi tahun 1980-an.

> Mengenai gurunya, G. J. A Terra, Sajogyo mengenang, "Awalnya, ia hendak meneliti buah-buahan di Jawa. Ia membayangkan buah-buahan ditanam di areal perkebunan berblok-blok sebagaimana di Eropa. Namun setiba di Jawa ia menjumpai bahwa buah-buahan banyak ditanam di pekarangan, beragam jenis menjadi satu, bahkan dengan jenis tanaman lainnya. Mulai tanaman yang ada di dalam tanah, jenis umbi-umbian, setinggi lutut, sepinggang, sejajar orang dewasa, sampai dengan bermeter-meter tingginya, ditemukan semuanya di pekarangan rumah. Melihat pola semacam itu, penelitian yang dilakukan mengarah pada usaha memahami 'budaya pekarangan' sampai dengan 'budaya rumah tangga'".[85]

---

[83] Sajogyo, 1994, *op.cit.,* hal. X.

[84] Karya Teko Sumodiwirjo mengenai pendidikan orang dewasa, *Sekolah Tinggi Rakjat* (Djakarta: Pusat Djawatan Rakjat, 1954). Buku ini bukan pengalaman Indonesia namun hendak mencontoh dari pengalaman negara-negara skandinavia utamanya Denmark dengan tokoh "School for Adult"-nya N. F. S. Grundtvig. Peserta sekolah ini adalah pemuda-pemudi tani berumur 18-25 tahun, tanpa ujian masuk/keluar dan tamat untuk kembali bekerja di pertanian. Indonesia mencontoh pengalaman ini dengan mendirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD). Sejak bulan Oktober 1947, BPMD dimasukkan sebagai bagian dari rencana 3 tahun program Kementerian Kesejahteraan, atau dikenal dengan "Plan Kasimo". Beberapa BPMD yang terkenal ada di Turen Malang, Bukittinggi, Ampel, Lebakwangi, dan Kuningan. Lihat, Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, *Almanak Pertanian 1954* (Jakarta, 1954), hal. 383-405.

[85] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 2 Oktober, 2007.

Budaya pekarangan, budaya keluarga, dan pola pangan inilah yang dicoba-saling-kaitkan Sajogyo dalam program UPGK itu. Dari program ini, yang membanggakan Sajogyo adalah membantu Kader Gizi di Desa dalam menyediakan buku pedoman perbaikan gizi keluarga, "…Khususnya naskah buku untuk kader di Desa saya tulis dengan banyak 'keringat'. Itu pertama kali (dan terakhir) menulis untuk pembaca lulusan SD".[86]

Dalam laporan evaluasi resminya, lebih jauh Sajogyo berupaya menghubungkan persoalan kurang gizi dengan kemiskinan, pendapatan rumah tangga, dan peluang bekerja masyarakat. Atas dasar penggolongan tingkat penghasilan "miskin" (terlebih "di bawah garis kemiskinan"), yang untuk rumah tangga pedesaan di Indonesia ditetapkan "kurang dari nilai tukar 240 kg beras setahun per kepala", maka perbandingan antara golongan "penghasilan cukup" dengan golongan "miskin" menunjukkan kontras tajam: 2.172 kalori dan 53,6 g protein berbanding 1.283 k dan 26,9 g. Di perkotaan angkanya lebih rendah: 1.250 k dan 27,4 g. Oleh karenanya, implikasi kebijakan yang disarankan lebih ke arah pembinaan dan pendidikan gizi.[87]

Jika melihat secara terpisah naskah evaluasi UPGK dan implikasi kebijakan yang disarankan, nuansa penyuluhannya (*extention*) lebih terasa ketimbang perombakan struktur. Akan tepat melihatnya secara bersamaan dengan naskah lain, yang ditulis berbarengan ketika ia masih menggarap proyek UPGK, yakni naskah "Modernization without Development" (MwD), dan dilanjutkan dengan tulisan pengantar untuk buku *Penduduk dan Kemiskinan* yang ditulis setelahnya (1976).

> Mengenai naskah MwD ini, Sajogyo menjelaskan, "Di Hawaii satu tahun dengan mengajukan beasiswa ke Rockefeller. Di sana menulis naskah *Modernization without Modernization* yang dipresentasikan di Bangkok, tahun 1973. Di sana diwakili oleh *Pak* Tjondro, sebab saya tidak *enak* meninggalkan kampus. Selain itu ada tugas baru di Bapenas yang waktu itu sebagai ketua dijabat

[86] Sajogyo, 2006, *op.cit.,* hal. 75.
[87] Sajogyo, 1973, *op.cit.,* hal. 6.

> oleh *Pak* Widjojo. Di sana diserahi tugas tentang Applied Nutrition Programs, atau UPGK."[88]

Ketika naskah ini dipresentasikan oleh Sediono M. P. Tjondronegoro dalam pertemuan FAO tersebut, kesan mengenai perlunya pelaksanaan Reforma Agraria (RA) terasa samar-samar meski mendapat sambutan dari peserta lain (asal India). Mengenai pertemuan tersebut, Sediono mengatakan:

> "Kalau dari Indonesianya *kok gak* terlalu itu *ya.* yang saya ingat ada dari India. Dia juga setuju rupanya [dilakuan RA], seorang guru besar perempuan. Delegasinya '*kan macem-macem*. Tapi kami tidak sempat mendiskusikan lebih lanjut di luar rapat itu. Di negara bagian mana, apa, ini soalnya diskusi makro *ya*. Tapi dia *manthuk-manthuk*, *ya* memang betul, kalau ini tidak dilaksanakan, dilakukan, maka kemiskinan tidak bisa diatasi sebagai masalah nasional."[89]

Sementara itu, di dalam naskah pengantar buku karya Masri Singarimbun dan David Penny, Sajogyo menyarankan untuk mengatasi ketidakmerataan kepemilikan tanah bagi petani gurem perlu dibentuk BUBT (Badan Usaha Buruh Tani).[90] Persoalan ketidakmerataan tanah, tulisnya, diselesaikan bukan dengan cara meredistribusi tanah kelebihan maksimal atau tanah-tanah terlantar, namun adalah melalui *landreform.* Uniknya, sasarannya justru dikenakan pada petani gurem, dengan cara mereka yang menguasai tanah kurang dari 0,2 hektar dibeli tanahnya oleh pemerintah dengan harga tertentu, kemudian tanah ini dititipkan oleh negara dan diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Buruh Tani (BUBT). Mengenai ide BUBT ini, Ben White menulis, "Ketika ditanya mengapa memperkenalkan kembali isu *landreform*, ia menjelaskan kepada penulis bahwa itu dimaksud-

---

[88] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 16 November, 2008.

[89] Wawancara dengan Sediono M. P. Tjondronegoro, Bogor, 20 November 2008.

[90] Sajogyo, "Kata Pengantar Pada Buku 'Desa Srihardjo", naskah ketik, 1976, hal. 2-3. Tulisan dapat dilihat dalam Masri Singarimbun, dan D. H. Penny, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Desa Srihardjo* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1976).

kan sebagai *proefballon,* sebuah percobaan".[91] Lontaran idenya tidak bersambut di kalangan ilmuwan sosial kala itu apalagi "terlembagakan" menjadi sebuah kebijakan. Lagi-lagi, ide Sajogyo menjadi *socially and politically insensible* di dalam konteks ilmu sosial yang sedang menuju arah yang berbeda.

Dari riset UPGK, Sajogyo telah mengembangkan ukuran garis kemiskinan. Dengan kreatif ia mengekstrapolasikan hasil survey di 8 propinsi itu, membanding-banding buku karya R. Schiekele, *Agrarian Revolution and Economic Progress*, dan dibantu sebuah buku BPS, maka dihasilkannya angka 240 kg/tahun untuk penduduk desa dan 369 kg yang di kota, sebagai ukuran garis kemiskinan. Pemikiran Sajogyo ini pertama kali dapat dibaca oleh publik ketika dimuat dalam surat kabar *Kompas* tanggal 17 November 1977 dengan judul "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan". Pemikiran itu digunakan secara luas sejak tahun 1977,[92] diadopsi juga oleh pemerintah sebelum akhirnya secara resmi pemerintah menggunakan konsep BPS pada tahun 1984.

> "Salah satu indikator penting pemerataan kesejahteraan rakyat adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Apabila garis kemiskinan dipakai sebagai tingkat pengeluaran keluarga minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan setara dengan 2100 kalori per anggota keluarga per hari serta kebutuhan pokok bukan-pangan tertentu, maka diperoleh jumlah sebagai berikut…berkurang dari 54,2 juta orang atau 40,1% dari seluruh penduduk dalam tahun 1976 menjadi 47,2 juta atau 33,3% dari seluruh penduduk dalam tahun 1978…menjadi 40,6 juta atau 26,9% dalam tahun 1981".[93]

Istilah "Garis Kemiskinan" masuk dalam kosa-kata resmi pemerintah sebagaimana dalam kutipan Pidato Kenegaraan

---

[91] Ben White, *op.cit.,* hal. 124.

[92] Sajogyo mengakui bahwa ukuran ini tidak bersifat permanen. Dalam rentang waktu tertentu harus diubah seiring dengan angka populasi dan dikaitkannya dengan variable lain, tidak hanya unsur pendapatan. "Wawancara Sajogyo: 'Ukuran Garis Kemiskinan yang Telah Dipakai 20 Tahun Harus Direvisi'", *Tempo,* Edisi 29, September, 1997.

[93] Naskah Pidato Presiden, 16 Agustus 1984, Bab I, hal. I/9.

Presiden di atas tanggal 16 Agustus 1984. Pidato itu tidak secara langsung mengutip naskah Sajogyo namun menggunakan laporan BPS periode Agustus 1984 yang telah diolah dari Garis Kemiskinan Sajogyo, analisa Polii, Parera, dan Bank Dunia. Meski BPS menggunakan angka 2100 kalori dari Sajogyo, namun ia membandingkannya dengan harga setara beras (konversi harga adalah murni dari BPS yang justru tidak ada dalam Sajogyo).

Ketika Sajogyo berusaha menghitung dengan cara konversi harga beras sebagaimana BPS (periodik tahun 1978, 1979, 1981), namun berdasarkan harga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), ternyata ditemukan angka yang lebih rendah dari angka BPS. BPS menggunakan harga beras yang lebih tinggi dibanding Susenas.

Demikianlah, riset UPGK yang dalam pandangan sepintas hanya berdimensi kesehatan, dalam kacamata sosiolog Sajogyo bersifat multi dimensi: budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik. Angka kemiskinan menjadi permainan dan komoditas politik, setidaknya dalam rentang 5 tahunan (ritual Pemilu). Karena digunakan sebagai komoditas politik, Sajogyo pernah mengkritik penganugerahan UNDP kepada Presiden Soeharto atas "prestasinya" menurunkan angka kemiskinan. Tanpa segan ia mengatakan:

> "Jika penilaian itu dilakukan secara obyektif tentu kita wajib bersyukur, tetapi saya melihat bahwa ada pihak-pihak dari departemen tertentu yang meminta UNDP untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Pak Harto. Departemen tersebut mengundang UNDP untuk memberikan penghargaan atas suksesnya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
>
> Departemen Koperasi sebenarnya meminta UNDP untuk menilai program koperasi yang mereka kembangkan, bahwa lewat koperasi, Indonesia berhasil memerangi kemiskinan. Karena UNDP menilai bahwa koperasi yang dikembangkan Departemen Koperasi belum layak menerima penghargaan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Akhirnya setelah berunding UNDP bersedia memberi penghargaan, itupun dengan sejumlah catatan."[94]

[94] *Ibid.*

Menggunakan garis kemiskinan Sajogyo, Anne Booth dan Sundrum mengestimasi bahwa 61% penduduk pedesaan di Jawa adalah miskin pada tahun 1970, dan 21% sisanya adalah miskin sekali. Di perkotaan Jawa orang miskin sekali adalah 25%, sedangkan di luar Jawa angkanya 21% di perkotaan dan 15% di pedesaan.

Mengidentifikasi kemiskinan adalah hal yang rumit. Berbagai cara mengukur, kepentingan, dan akibat yang akan ditimbulkannya, turut mempengaruhi. Ada beberapa pengukuran selain dari "Garis Kemiskinan Sajogyo" yang oleh banyak pakar dinilai lebih berguna.[95]

BPS telah membuat perhitungan kemiskinan sejak 1976. Ukurannya didasarkan pada harga (*cost*) setara 2.100 kalori untuk masyarakat desa dan kota, yang kemudian ditingkatkan dengan variabel perumahan, bahan bakar, dan ketersediaan kesehatan. Kritik terhadap pengukuran BPS ini adalah tentang apakah *cost* itu cukup memadai diterapkan pada berbagai keragaman sumber pangan yang ada di Indonesia, serta keraguan akan rendahnya biaya yang dialokasikan untuk kebutuhan non-pangan.

Pada tahun 1986, Prof. Hendra Esmara mengajukan alternatif garis kemiskinan didasarkan pada sekelompok kebutuhan dasar: pangan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Kesulitannya adalah asumsi kebutuhan ini berubah dari waktu ke waktu dan adanya perbedaan antara desa dan kota. Keberatan utama terhadap pemikiran Esmara ini terletak pada tingkat dinamisnya pandangan terhadap kebutuhan dasar yang justru berakibat menyamarkan arti kemiskinan.

Bank Dunia membuat satu studi pada tahun 1984 berdasarkan konsumsi rumah tangga hasil survei Susenas. Dengan cara sederhana Bank Dunia menyebut bahwa orang miskin adalah mereka yang pengeluaran kebutuhan dasarnya kurang dari 20% dari total pengeluaran rumah tangga. Kalkulasinya

---

[95] Jonathan Rigg, *Southeast Asia: The Human Landscape of Modernisation and Development* , (London: Routledge, 2003), hal. 95-96.

berdasarkan interpretasi atas ketidakcukupan (*inequality*). Konsep Bank Dunia ini semena-mena, juga lemah, sebagaimana konsep Hendra Esmara yang justru menyamarkan kenyataan kemiskinan.[96]

Dukungan dan penolakan terhadap konsep kemiskinan Sajogyo ditandai dengan diterima atau ditolaknya estimasi angka orang miskin yang tinggi, ketika konsep Sajogyo itu digunakan. Dukungan dari Sritua Arif, misalnya. Dengan penghitungan ekonometri tertentu, ia menyatakan bahwa angka 5 juta yang miskin dari 8,8 juta keluarga petani yang disebut Sajogyo, nasibnya semakin buruk sebab pendapatan riilnya menurun dalam upah yang dibayarkan dalam proyek-proyek inpres tahun 1971-1974. Diambil rata-rata, pada tahun 1969-1976 jumlah orang miskin meningkat 9% dengan jumlah riil 9,3 juta jiwa.[97]

Kritik terhadap garis kemiskinan Sajogyo terutama disampaikan Anne Booth dan R. Sundrum (1980) yang menyatakan terlalu tinggi angka yang diestimasikan.[98] Beberapa analis telah mengkritik garis kemiskinan Sajogyo, namun tidak diragukan lagi bahwa kemiskinan semakin meluas di berbagai tempat di Indonesia pada tahun 1970-an, apapun konsep yang digunakan.

G. Kemiskinan: Antara "Kondisi" dan "Konsekuensi"

Dua istilah yang dianggap sensitif selama Orde Baru adalah "kemiskinan" dan "Reforma Agraria". Kedua istilah itu ternyata erat kaitannya dengan lembaga Survei Agro Ekonomi, tempat dimana Sajogyo berkarir dan menjadi ketuanya. Reforma Agraria diusung kembali oleh SAE melalui pelaksanaan lokakarya di Selabintana (1981).[99] Sedangkan kemunculan istilah "kemiskinan struktural" pertama kali dilontarkan oleh Ben White dalam kongres ilmu sosial di Malang tahun 1978. Tesis itu dilontarkan

---

[96] *Ibid.*

[97] Sritua Arif, *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan, dan Kemiskinan Massal,* (Jakarta: LSP, 1979), hal. 70 dan 77.

[98] Dinyatakan lagi dalam Anne Booth, "Poverty and Inequality in the Soeharto Era: an Assessment", *BIES,* Vol 36 No 1, April 2000, hal. 75-77.

[99] Mengenai lokakarya ini diuraikan dalam bab berikutnya (Bab VI).

berdasarkan pengalamannya ketika terlibat dalam program-program SAE. Ia pun menggunakan data-data SAE dalam makalah yang disampaikannya pada cara tersebut.[100]

Kemiskinan dilihat sebagai sebuah "konsekuensi" dan bukan "kondisi". Melihat kemiskinan sebagai "konsekuansi" tidak lazim dalam konteks saat itu. Kemiskinan dianggap sebagai sesuatu yang "given" (kondisi kemiskinan) yang bisa ditunjuk siapa dan tinggal dimana, dan tentu saja, bisa diukur. Jikapun sebagai akibat, ia dikaitkan dengan sebab-sebab internal yang bersifat mentalitas: ketiadaan etos untuk maju, pendidikan yang rendah, dan nihilnya berbagai "etika protestan" ala Weberian. Bahkan kehadiran dunia LSM saat itu tidak bisa melepaskan diri dari cara pandang tersebut. Sehingga kegiatan mereka saat itu lebih mengarah pada pemberian pelatihan, peningkatan etos, kewirausahaan dan *capacity building*[101] (sesuatu yang terulang kembali di berbagai kampus pada masa sekarang).

Kemiskinan adalah konsekuensi atau akibat dari berbagai kekuatan yang menyelimuti kehidupan masyarakat (tani). Ia memiliki sejarah dan dinamika yang berbeda-beda dalam hal proses pembentukan, durabilitas, dan bahkan juga reproduksinya. Beberapa hal berikut adalah penyebabnya.[102] *Pertama*, struktur penguasaan tanah yang timpang berakibat pada dominasi satu kelompok atas lainnya, dan peluang mengembangkan nafkah berganda bagi kelompok bawah masyarakat tani terhambat sebab ia tidak memiliki modal dasar yang kuat (tanah). Sektor

---

[100] Bersama Rudolf Sinaga (Ketua SDP-SAE), ia menyampaikan makalah berjudul, "Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural". Berbagai makalah dalam kongres itu diterbitkan dalam Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan (Ed.), *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai* (Jakarta: Pulsar/YIIS/HIPIS, 1980).

[101] Mengenai kritik bagaimana gerakan LSM pun berada di bawah bayang-bayang ideologi *developmentalisme*, dan bahkan menjadi penyokong utamanya, lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 [cetakan keempat]), terutama Bab 5.

[102] Simak, Sajogyo, "Pembangunan dan Kemiskinan Struktural", tt, 4 halaman.

non-farm bukanlah cerita tentang kemenangan namun justru ke-(di) kalah(k)an.

Kedua, berbagai perubahan baru (mengenai sistem panen) mengakibatkan terlepasnya hubungan bapak-anak (*patron-client*) yang semula berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial ekonomi. *Ketiga*, kebijakan pemerintah yang bias kota dan bias elit, sebagaimana tampak jelas dalam kasus Koperasi Unit Desa (KUD). *Keempat*, tiadanya kemauan politik (*political will*) pemerintah dalam mengorientasikan kebijakan yang mengutamakan golongan bawah masyarakat (tani).

Semua gambaran itulah yang menjadi *structural limit* yang bersifat membatasi ruang gerak masyarakat lapis bawah sehingga mereka terjebak ke dalam lingkaran kemiskinan yang kemudian disebut dengan budaya kemiskinan. Maka, budaya kemiskinan lebih sebagai akibat daripada sebab. Dengan demikian, Sajogyo telah membantu mengenali/mengidentifikasi bagaimana "krisis agraria" merupakan akar dari kemiskinan.

H. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan: Tantangan *Developmentalism*

Antara tahun 1972 hingga 1991, Sajogyo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tumbuh-kembangnya pusat studi ilmu sosial di Institut Pertanian Bogor. Dalam rentang waktu itu, pusat studi yang dipimpinnya menghadapi berbagai tantangan baik yang bersifat paradigmatis, teknis, hingga politis. Mulai dari pemantapan disiplin ilmu sosial, urgensitas dilakukannya perspektif interdisipliner di dalam riset sosial, paradigma pembangunan dan berbagai kritiknya, hingga riset-riset aksi, merupakan sebagian tantangan yang dihadapi dari segi metodologi. Tidak kalah pentingnya adalah tenaga peneliti, sarana, dan pendanaan.

Sajogyo menjadi direktur pertama Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan (LPSP) yang didirikan pada tahun 1972. Berbagai penelitian dengan perspektif sosiologi pedesaan dilakukan, misalnya penelitian UPGK, studi wanita pedesaan, dan tingkat pendapatan rumah tangga dan kecukupan pangan.

Mengenai penelitian UPGK, selain sebagaimana diuraikan di atas, yang patut dicatat adalah efek kebijakan yang ditimbulkannya di tingkatan birokrasi pemerintah. Mengingat masalah gizi memiliki dimensi yang kompleks, maka dalam penggalangan dukungan penanganannya memerlukan keterlibatan lintas sektoral. Sajogyo merekomendasikan agar pembinaan proyek UPGK dijalankan dengan kekuatan Instruksi Presiden yang menugaskan lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Transkopnaker, dan Departemen Pertanian. Dengan kerjasama antar sektor diharapkan akar persoalan dapat diselesaikan dan proyek dijalankan tidak semata-mata menggugurkan kewajiban formal di masing-masing penanggung jawab proyek/departemen. Inilah gagasan bernas Sajogyo kala itu.[103]

Studi wanita pedesaan tumbuh subur di lembaga ini. Bahkan kajian gender dalam ilmu sosial agraria pun bermula dari lembaga ini, yang kemudian direplikasi menjadi Pusat Studi Wanita yang tumbuh di kampus-kampus. Studi wanita muncul berbarengan dengan diskursus Women in Development (WID) yang mulai berkembang di dunia sejak tahun 1972. Tumbuh secara bersamaan, wajah studi wanita di lembaga ini mengalami ancaman "penjinakan" sebagimana wacana WID itu bermula di Amerika melalui USAID.

Agenda utama program WID adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Asumsinya, keterbelakangan perempuan terjadi karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan, "*WID advocates have adopted a strategy of relevance. In other words, their demands for the allocation of development resources to women hinge on economic efficiency arguments about what women can contribute to the development process*."[104]

---

[103] Eko Cahyono dan Moh. Shohibuddin, "Pembangunan yang Baik: Cukup Pangan dan Gizi Baik; Wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Sajogyo", Majalah *Basis,* No. 05-06, Mei-Juni, 2008, hal. 27.

[104] Shahrashoub Razavi dan Carol Miller, "From WID to GAD: Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse", *Occasional Paper,* 1, February

Penelitian-penelitian tentang wanita di lembaga ini ternyata tidak jauh berbeda dengan cara pandang WID itu. Meskipun kajian ini semula diarahkan pada studi kritis gender, namun kemudian mengalami perubahan-perubahan. Dalam studi wanita, LPSP memiliki pengalaman selama 6 tahun mulai dari 1978, dengan melibatkan lusinan dosen di 15 kampus di Indonesia. Kegiatan penelitian bermula dari perkembangan riset di SAE yang masih mewarisi sikap kritis.

> "Ben White mementingkan survei, disertasinya di Kulonprogo menggunakan itu. Setelah survei, enumeratornya anak-anak SMA. Ini terulang waktu SAE meneliti 'peranan wanita' oleh FAO. Ben White *bilang* jangan SAE saja, lalu saya *ajak Bu* Pudji."[105]

Penelitian LPSP semakin berkembang ketika didanai oleh Ford Foundation dan FAO. Pada gilirannya, jaringan yang telah terbentuk dari 15 kampus itu dimanfaatkan dalam mendukung program "peningkatan peranan wanita" oleh kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.[106] Pada periode terakhir inilah oleh Ben White disebut telah mengalami "penjinakan" dan "pengkooptasian".[107] Pada periode ini pula, pusat-pusat studi wanita di kampus-kampus didirikan atas anjuran pemerintah. Studi kritis telah menghilang dari ranah itu, terlebih ketika studi wanita dikaitkan dengan kepentingan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB).[108]

Tampak paling nyata dari wacana ini adalah disertasi yang dihasilkan oleh Pudjiwati Sajogyo. Dalam *summary* disertasinya, ia memulai dengan menyatakan bahwa,

> "Sejumlah kebijakan dan strategi yang bertujuan mengintegrasikan wanita Indonesia ke dalam pembangunan nasional telah diru-

---

1995, United Nations Research Institute for Social Development, United Nations Development Programme, hal. 2.

[105] Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 19 November 2008. Dari sinilah pula awal keterlibatan Pudjiwati Sajogyo, yang kemudian mencatatkan namanya sebagai ahli studi "peranan wanita".

[106] Sajogyo, "Mengembangkan Suatu Pusat Studi Pembangunan: Kasus di IPB", makalah ceramah umum di PSP-IPB, 16 Desember, 1993, hal. 12.

[107] Ben White, op.cit., 129.

[108] *Ibid.*

> muskan dalam GBHN dan Repelita III; program pemerintah terhadap peran wanita dalam berbagai sektor pembangunan diprioritaskan pertama-rama adalah kepentingan perempuan pedesaan. .....terdapat indikasi yang menyatakan sekitar 40% perempuan dari keluarga petani gurem, tuna kisma dan miskin,... masih menghadapi berbagai kesulitan."[109]

Gap antara harapan ideal sebagaimana telah dirumuskan pemerintah dalam peraturan perundang-undangannya, dengan kenyataan yang menunjukkan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh perempuan pedesaan itulah yang menjadi "misteri" dalam riset Pudjiwati.

Dalam bab dua, sebagai kerangka analitik, Pudjiwati menunjuk "alokasi waktu" kerja perempuan dan kontribusi reproduksi sebagai produksi/efisiensi ekonomi rumah tangga. Perimbangan utama dalam pendekatan itu adalah ingin menunjukkan "sumbangan wanita" terhadap keluarga melalui pekerjaan dalam proses produksi dan reproduksi. Sumbangan itu harus dilihat secara "wajar" yaitu sebagai "sumber daya manusia" sebagaimana pria melakukan pekerjaan yang langsung dalam menghasilkan nafkah.[110] Dengan kata lain, suatu ketidakwajaran dalam logika pembangunan jika perempuan tidak turut memberikan "sumbangsihnya".

Terlebih kerangka analisa yang digunakannya adalah berasal dari Marion J. Levy, seorang ahli strukturalisme fungsional. Pendekatannya menekankan pada pemapanan fungsi dalam struktur yang sudah ada, atau jika terdapat perubahan, fungsi-fungsi diberi makna baru dan tidak dengan cara mengubah struktur yang ada. Keberlangsungan dan kelancaran pembangunan memerlukan kemapanan fungsi-fungsi (peran) wanita dan pria, dan hubungan keduanya berjalan secara stabil (*status quo*).

---

[109] Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 361.

[110] Harsya W. Bachtiar (ed.), *Masyarakat dan Kebudayaan : Kumpulan Karangan untuk Prof.Dr.Selo Soemardjan* (Jakarta: 1988), hal. 152. Naskah ini adalah ringkasan disertasi.

Dengan logika semacam inilah, pembangunan Orde Baru dijalankan.

Berbagai studi wanita di LPSP bermuara pada banyaknya tesis-disertasi yang ditulis dengan tema "peranan wanita" di bidang sosiologi pedesaan di IPB selama periode 1975-1994.

I. Membuka Celah Pemerintah Daerah

Pada tahun 1974 hingga 1978, Sajogyo dan Tim LPM-IPB bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Sukabumi dalam merintis adanya lembaga riset perencanaan antar bidang di tingkat kabupaten.

> "Tahun 1970-an melakukan kerja sama dengan Kabupaten Sukabumi. Permintaan Bupati Sukabumi untuk menyusun Bapemka. Bupatinya [akhirnya] *ketahuan* oleh Gubernur Jawa Barat, 'Ini *kok* bupatinya sering *ngomong*, bagus'. Atas dasar itu, ia mendapat penghargaan. Tim yang terlibat 3 orang, semuanya akhirnya menjadi rektor. Margono Slamet, dari Penyuluhan Peternakan, akhirnya menjadi Rektor Universitas Lampung, dan Andi Hakim Nasution, matematikawan, Rektor IPB".

Badan Perencana Masyarakat Kabupaten (Bapemka) merupakan cikap bakal dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda). Keberhasilan Bapemka di Sukabumi menginspirasi didirikannya Bappeda di hampir semua kabupaten di Indonesia. Lembaga ini langsung berada di bawah Bupati, berfungsi sebagai badan perencana daerah lintas sektor dalam pembangunan kabupatennya selama satu tahun periode anggaran. Dengan adanya Bappeda, fungsi perencanaan pembangunan tidak hanya ada di level pusat (Bappenas).

Namun dalam kenyataannya, selama Orde Baru kerja perencanaan Bapeda lebih menitikberatkan pembangunan ekonomi dibanding sektor lainnya. Cara pandang yang digunakan adalah bagaimana menggenjot sektor-sektor yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Dengan kata lain, Bappeda merupakan perancang dari pembangunan ekonomi pertumbuhan di masing-masing kabupaten.

J. Pusat Studi Pembangunan: Kritik atas *Developmentalism*

> "Development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedom that people enjoy... Development requires the removal of major sources of unfreedom: poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well as systematic social deprivation, neglect of public facilities as well as intolerance or overactivity of opressive state".
> (Amartya Sen, 1999)

> "...berlaku pedoman utama bahwa negara, kecuali pelindung (*protector*) dan pelayan (*provider)* selayaknya juga berperan sebagai pembebas (*liberator*) yang memberdayakan golongan miskin, memberi peluang dan mendukung mereka mencapai masa depan yang lebih menjanjikan bagi mereka, di dalam ke-bhinekaan dan *sesuai pilihan mereka*".
> (Sajogyo, 2004)

LPSP mengalami perubahan pada tahun 1982, ketika diwajibkan berganti nama menjadi Pusat Studi Pembangunan. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB, ditetapkan bahwa hanya ada satu lembaga penelitian di universitas. Pusat-pusat studi yang ada harus digabungkan ke dalam satu induk lembaga. Dipilih kata "pembangunan" dengan mengacu pada pusat studi di Sussex University, Inggris, "Institut of Development Studies".[111] Sebagai tokohnya adalah Prof. Seers. Sajogyo menjelaskan,

> "Waktu itu kami tak sempat menjelaskan arti 'pembangunan' menurut apa yang pernah diuraikan oleh Seers (tokoh perintis IDS, Univ. Sussex), tapi berupaya langsung *memberi tafsiran sendiri*: ...menjelaskan khusunya arti 'pembangunan pedesaan'."[112] (garis miring dari penulis, ANL)

[111] Mengenai peran penting universitas-universitas di Inggris dalam mengembangkan "development studies" pasca Perang Dingin, telah disinggung dalam Bab 3 (catatan kaki No. 11).

[112] Sajogyo, 1993, *op. cit.,* hal. 1.

Kata "pedesaan" yang diusulkan dalam "memo Sajogyo, 1981" tidak jadi digunakan sebagai nama PSP. Padahal dalam memo itu ia menekankan pada "arti dan tujuan" pembangunan yang "bukan hanya membawakan arti pembangunan pedesaan yang dibuat oleh penguasa/negara (dari atas) atau oleh teoretikus/ilmuwan, tapi juga menggali dari tengah masyarakat sendiri". Ditekankan juga tentang arti dan tujuan penelitian dengan ciri "antar-disiplin" ilmu.[113] Gagasan Sajogyo yang khas tercermin dalam cita-cita pendirian PSP: pendekatan *emic* dan interdisipliner!

Ada periode ketika PSP menghasilkan beberapa tema riset, di antaranya studi perhutanan sosial dengan dana dari Ford Foundation dan PT. Perhutani. Dalam hal ini PSP membantu mengembangkan *pilot project* di Jawa. Adakah ide ini merupakan cikal-bakal dari Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (2001) yang telah banyak dikritik oleh masyarakat/LSM sebab mengandung unsur "tanam paksa" di dalamnya?

Sajogyo pada tahun 1950-an ketika menjadi mahasiswa dan asisten dosen, telah memiliki pengalaman meneliti tentang masyarakat di/dalam kawasan hutan. Penelitian di Cibodas tentang "upaya kreatif" masyarakat yang menyiasati "kecurangan" Perhutani dalam "kerjasama tumpang-sari", pengalaman lampung tentang pembedaan "hutan yang dikuasai desa", serta pengalaman mendampingi penelitian K. J. Pelzer di pedalaman Sumatera, mengajarkan tentang "pentingnya hutan bagi masyarakat".[114]

Pendiriannya masih sama ketika pada tahun 1991 ia menyatakan bahwa hutan adalah "sumber pangan" bagi masyarakat. Bagi petani ladang berpindah, sangat jelas bahwa hutan adalah "ladang" sebagai lahan mereka menanam secara bergilir.

[113] *Ibid*., hal. 7 dan 2
[114] Sajogyo, "Masyarakat Desa dan Hutan", tt, 1976

Demikian juga "hutan domestik" di dalam kampung, yakni pekarangan. Keduanya berfungsi sebagai sumber pangan.[115]

Dalam pengalaman panjang sejarah Indonesia, kondisi "lapar tanah" yang dialami rakyat di satu sisi, dan "hak penguasaan oleh negara" di sisi lain, di mana Perhutani telah bertindak sebagai perusahaan "parastatal" (*para-state*), menempatkan kedua belah pihak pada posisi konflik berkepanjangan. Dengan berbagai kondisi dan pengalaman itu, agaknya sulit menyeberangkan keberadaan Sajogyo dari posisi rakyat.

Penelitian Peluang Usaha/Kerja di Luar Pertanian (PukLuTan) antara tahun 1986-1991 di Jawa Barat mendokumentasikan banyak hal: kerjasama peneliti, kerjasama kelembagaan, pendirian baru lembaga penelitian, dan peluang studi lanjutan. Penelitian ini merupakan kerjasama 4 kampus, yaitu PSP-IPB, *Institute of Social Science*, ITB, dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM. Penelitian dilakukan di bawah tema "Produktivitas Pedesaan dan Sektor Non-Pertanian di Jawa Barat". Dalam pengorganisasian riset, penelitian ini mengembangkan penguatan tiga lapis tenaga riset: lulusan S1 sebagai tenaga *full timer*, S2 sebagai lapis tengahnya, dan S3 sebagai peneliti senior.[116]

Riset mengambil lokasi di Cirebon, Bogor, Subang, Purwakarta, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Pandeglang. Tujuan utama riset adalah mengidentifikasi faktor-faktor pendukung perkembangan industri pedesaan dan kegiatan non-pertanian yang dipengaruhi oleh pertanian perkebunan; mengidentifikasi pola pembangunan industri desa dan memberikan saran dalam memaksimalkan pertumbuhan dan peningkatan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan; serta menemukan berbagai hambatan yang dihadapai para pengambil kebijakan dalam merangsang tumbuhnya industri dan pekerjaan di pedesaan.[117]

---

[115] Sajogyo, "Pangan dari Hutan dan Pekarangan". *Jawa Pos,* 15 Oktober, 1991

[116] Sajogyo, 1993, *op.cit.,* hal. 13

[117] Soegijanto Padmo, "Perkembangan Kesempatan Kerja Non-pertanian di akresidenan Cirebon, 1830-1930", dalam Thomas J. Lindblad (Ed.), *Sejarah*

Salah satu temuan yang sering dirujuk adalah tentang "teori permintaan tenaga kerja". Ringkasnya, berbagai kelas yang berbeda dalam struktur agraria pedesaan di Jawa Barat merespon secara berbeda permintaan tenaga kerja di luar pertanian. Bagi golongan petani pemilik lahan luas, mereka akan menginvestasikan surplus pertaniannya dalam aktivitas non-pertanian sebagai "strategi akumulasi modal". Golongan rumah tangga menengah melakukannya sebagai "strategi konsolidasi". Sementara bagi golongan rumah tangga marjinal atau tunakisma (*landless*), penyaluran itu berfungsi sebagai "strategi subsistensi".[118]

Pemetaan itu sebenarnya diambil dari peta diferensisasi yang sering dibuat Sajogyo tentang masyarakat tani. Ada lapisan lemah, lapisan menengah, dan lapisan atas masyarakat tani yang merespon secara berbeda-beda program pemerintah saat itu (BIMAS). Jika pembangunan ekonomi harus diarahkan, maka menurutnya, pembangunan itu harus diorientasikan ke arah partisipasi golongan yang terlupakan dalam pembangunan. Mereka harus diorganisir (bukan malah dibiarkan "mengambang") dalam proses pembangunan. Maka partisipasi menjadi penting artinya, tidak hanya menjadikan mereka sebagai "obyek program pemerintah" melalui berbagai satuan yang dibentuk dari pusat itu (UDKP dan sebagainya). Inilah kritik Sajogyo memasuki Repelita kedua kala itu.[119]

Kesimpulan itu menegaskan analisa lama Sajogyo. Dalam kata pengantar buku Geertz, *Involusi Pertanian*, Ia membantah

---

Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru (Jakarta: LP3ES, 2000), hal. 160-161. Selain Soegijanto Padmo, sejauh penulis ketahui dari kuitansi yang masih tersimpan, dari pihak Sejarah UGM yang terlibat adalah Machmoed Effendhie.

[118] Ben White, "Economic Diversification and Agrarian Change in Rural Java", dalam Paul Alexander, Peter Boomgaard, Benjamin White (Eds.), *In the Shadow of Agriculture: Non-farm Activities in the Javanese Economy Past and Present* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991), hal. 41-69.

[119] Sajogyo, "Pokok-pokok Pemikiran tentang Sistem Ekonomi di Indonesia: Ke Arah Partisipasi Lebih Nyata Golongan yang Masih Tersisihkan dalam Pembangunan Desa", naskah 38 hal., tp., Oktober, 1976. Dalam versi lain, peta diferensiasi ini diulas Sajogyo kembali dalam tulisan yang terbit di majalah *Prisma,* April, 1978.

terjadinya involusi di pedesaan Jawa yang memberi gambaran tiadanya proses "komersialisasi" dan "moneterisasi", dan sebaliknya malah "bergerak ke dalam". Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 1963, Sajogyo menunjukkan bahwa kelompok petani yang mempunyai lahan di atas 0,5 ha (32% dari 7,8 juta petani) itulah yang mampu menjadi petani komersial. Mereka inilah yang mampu membeli pupuk, mengeluarkan biaya untuk tenaga buruh upahan, cukup atraktif dalam merespon "revolusi hijau" dengan berbagai input-nya.[120]

Petani di pedesaan Jawa, dengan tingkat kepemilikan tanah yang berbeda-beda, tidak menampakkan homogenitas sosial dan ekonominya dengan cara *shared poverty* akan *constant pie* yang ada, sebagaimana dijelaskan Geertz. Namun ada kelompok yang dapat bergerak (keluar) secara dinamis, dan sebaliknya, ada kelompok yang bertahan dan bahkan membebani diri (ke dalam). Dengan ini Sajogyo hendak menjelaskan stratifikasi/kelas sosial pedesaan yang (di)luput(kan) dalam pengamatan Geertz.

Hasil kerjasama 4 lembaga dalam proyek PukLuTan ini melahirkan lembaga baru bernama Akatiga, pusat analisa sosial yang bertempat di Bandung. Akatiga terutama mewarisi aset-aset dari ISS yang untuk kepentingan ini, mendirikan kantornya di Bandung. Akatiga berkembang menjadi lembaga riset dengan tenaga-tenaga muda yang sebagiannya kemudian menempuh studi formal di ISS, Belanda.

Seusai penelitian PukLuTan inilah, pada tahun 1991 juga, Sajogyo mengakhiri jabatannya sebagai direktur PSP, dengan meninggalkan suatu evaluasi kritik mengenai pembangunan

---

[120] Sajogyo, "Kata Pengantar: Pertanian, Landasan Tolak bagi Pengembangan Bangsa Indonesia", dalam Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, diterbitkan untuk LPSP-IPB dan Yayasan Obor, 1975), hal. xxiv. Ulasan mengenai hal ini lihat, Hiroyoshi Kano, "Pemilikan Tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa", dalam Sediono M. P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: YOI, 1984), hal. 237-238.

selama Orde Baru yang dijalankan secara *top-down*.[121] Kutipan di awal sub-bab ini menegaskan posisinya.

Menurut refleksinya, pembangunan yang berjalan selama Orde Baru dalam kenyataannya hanya memperkuat posisi negara di hadapan massa-rakyatnya. Padahal semestinya, negara berfungsi sebagai pelayan/pengurus bagi terjaminnya keadilan sosial, pelindung (*protector*) dari kekuatan luar maupun dalam negeri yang dapat meminggirkan posisi rakyat sebagai warganegara yang sudah menjadi haknya mendapat perlindungan.

Menurut Sajogyo, fungsi negara selanjutnya adalah sebagai pembebas (*liberator*). Penyelenggaraan pemerintah, pilihan-pilihan program dan kebijakannya sudah semestinya berfungsi membebaskan rakyatnya, bukan semakin membuat rakyatnya tergantung (*dependent*), atau malah terpasung kebebasannya.[122] Hal senada dinyatakan oleh peraih nobel ekonomi, Amartya Sen, sebagaimana dikutip di muka. Program-program karitatif semacam BLT misalnya, sama sekali bukanlah peran negara yang tepat. Ia hanya dapat dibenarkan dalam kondisi darurat (bencana) atau dilakukan oleh perseorangan, dan bukan oleh negara. Namun anehnya, ketika rakyat benar-benar sedang tertimpa bencana, negara serasa tidak hadir di sana.

K. Sosiologi Pedesaan IPB: Indonesianisasi Ilmu Sosial

Studi sosiologi di Barat (Inggris kontinental) pada mulanya bertujuan untuk melakukan studi atas masalah sosial akibat revolusi industri pada abad 19.[123] Orang miskin, pengangguran, imigran, penjahat, pengemis, istri yang ditinggal pergi suami, pelacur, orang jalanan, dianggap "residu" oleh proses industriali-

[121] Sajogyo, 1993, *loc.cit.*

[122] Tiga fungsi dan peran negara ini dinyatakan dalam Sajogyo, "Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Pemberdayaan", draf makalah untuk seminar AIPI, 2004, hal. 6-8.

[123] E. Shils, *Sociology: Key Topics of Study,* dikutip dari Sajogyo, "Kata Pengantar, Panen Dua Puluh Tahun SPD di IPB, Bogor", dalam Sajogyo, dkk, *Panen 20 tahun: Ringkasan Tesis-Disertasi 1975-1994; Studi Sosiologi Pedesaan Program Pasca Sarjana IPB* (Bogor: Dokis, ISI Bogor, PERHEPI, dan YAE, 1996), hal. viii.

sasi yang berlangsung. Sosiologi dimaksudkan untuk mengetahui mengapa muncul residu semacam itu.

Dalam proses pembangunan di Indonesia, masyarakat modern yang hendak dicapai sebagai cita-cita tunggalnya, golongan petani dan masyarakat adat dilihat pula secara negatif, sebagai masyarakat yang "tertinggal", "residu" dari proses pembangunan. Pengalaman berdirinya sosiologi pedesaan di IPB juga berada dalam konteks "pembangunan pertanian".[124] Namun bagaimana dengan posisi studi sosiologi pedesaan di IPB dalam melihat proses itu?

Dapat dikatakan bahwa kemunculan sosiologi pedesaan di IPB adalah pelembagaan atas pengalaman partikular Sajogyo. Sebagaimana diurai di bab sebelumnya (Bab IV), ilmu sosial di Indonesia (sosiologi) tidak pernah menjadi perhatian utama dalam sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia sejak masa kolonial. Periode sebelum perang hingga tahun 1940-an tidak memberikan pengalaman secara langsung ataupun tidak langsung pada Sajogyo dalam merintis bidang sosiologi di Indonesia.

Pengalamannya selama kuliah di Fakultas Pertanian UI, belajar dari Prof. W. J. Timmer, Prof. Teko Sumodiwiryo, dan hasil bacaan jurnal-jurnal antropologinya, menempatkan sosiologi pedesaan yang dibangunnya sebagai ilmu yang bersifat *emic*, deskriptif, pengorganisasian, dan preskriptif.[125]

Disebut *emic* sebab "…tentulah kita, orang-orang luar (misalnya penyuluh) mesti lebih dulu mengenal petani itu, makhluk sosial yang *punya cita-cita, motivasi, dan rasa kepentingannya*".[126] Melalui cita rasa antropologi yang memadai, dan pengalaman Sajogyo mempelajari *Totale Landbouw, s*osiologi pedesaan yang dikembangkannya di IPB sesungguhnya bersifat "hibrid", campuran sosiologi warisan negara industri dengan psikologi sosial, dan ilmu ekonomi pertanian. Di sinilah Sajogyo gencar

[124] Sajogyo, *Ibid.,* hal. Ix.
[125] Kesimpulan ini disarikan dari Sajogyo, *Ibid.*
[126] *Ibid.,* hal. ix dan xv. Penekanan oleh penulis, ANL.

mengkampanyekan kerjasama lintas disiplin antara ilmuwan sosial dengan ilmuwan ekonomi.

Disebut "deskriptif" sebab menjadi penganalisis masyarakat pedesaan yang mampu melukiskan dan menjelaskan masalah pembangunan manusia dan masyarakat pedesaan. Disebut "pengorganisasian" karena dalam upaya memecahkan problem sosial yang dihadapi dilakukan dengan cara "penyuluhan" (sebagai gerakan, bukan sosialisasi atau instruksi), sehingga dari situ didapatkan saran-saran (preskriptif) bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Hal terakhirlah yang kemudian menjadi ciri menonjol dari sosiologi pedesaan ala Sajogyo yang dikenal dengan genre "sampaimana". Dalam menguji tesis maupun disertasi di IPB, salah satu pertanyaan wajibnya adalah apakah pemikiran peneliti guna memecahkan persoalan (preskriptif) setelah didapatkan uraian-uraiannya (deskriptif). Dengan kata lain, "sampaimana" hasil temuan itu dapat memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini jugalah yang menjadikan sosiologi ala Sajogyo sebagai sebuah "sosiologi terapan".[127]

Metode yang jamak digunakan dalam riset tesis maupun disertasi adalah "studi kasus" dan "mikro". Sementara itu, dalam rentang 20 tahun (1974-1994), tema yang dikaji adalah: peluang berusaha dan bekerja; masalah agraria; peranan wanita; *group* dan komunitas; nilai-nilai sosial-budaya; dan kependudukan. Jika diamati dari 5 tema ini, 3 tema pertama adalah tema yang dimulai dan atau dilanjutkan oleh Sajogyo dalam riset-riset lainnya.

Kendati demikian, semua upaya itu sebenarnya bukan tanpa kekurangan. Kritik tajam pernah dilontarkan oleh Ben White dalam menilai secara cepat judul-judul dan abstraksi dalam ringkasan tesis-disertasi tersebut. Dengan lugas ia menyatakan,

> *"Two general patterns are clear. First, the relatively little attention given to issues of land tenure and agrarian relations, and broader theoretical issues*

[127] Pidato Ilmiah Purna Bhakti Sajogyo tahun 1991 mengambil judul "Sosiologi Terapan".

> *in both centres and second the predominant tendency towards topics that basically validate the prevailing New Order rural development models and strategies".*[128]

Mengenai penguasaan tanah dan hubungan agraria, hanya ada satu yang cukup menonjol, yakni tesis Moh. Amaluddin berjudul "Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah". Dalam kajiannya ini, Amaluddin dapat menunjukkan kesenjangan luas penguasaan tanah yang cukup tajam (indeks gini 0,60). Penguasaan tanah merupakan faktor penentu dalam gengsi sosial. Meski peka terhadap aspek penguasaan tanah, namun riset ini menghasilkan kesimpulan, "keeratan hubungan antara gaya hidup dan luas penguasaan tanah ternyata tidak membangkitkan pelebaran jarak sosial antar lapisan petani".[129]

Memang benar bahwa Sajogyo dan Sediono M.P. Tjondronegoro sebagai perintis dalam Sosiologi Pedesaan IPB, belum sempat "menulis buku teks yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar sosiologi pedesaan ala IPB", [130] namun bukan berarti Sajogyo tidak menjelaskan posisi/pilihan teoretisnya, sebagaimana yang banyak dituduhkan selama ini.[131]

Jika yang dimaksud dengan teori adalah "pernyataan-pernyataan yang sangat umum sifatnya mengenai keteraturan hubungan-hubungan segala yang terdapat di dunia ini, yang memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat meramal dan menjelaskan berbagai fenomena yang kita temukan",[132] maka

---

[128] Ben White, 2005, *op.cit.,* hal. 124.

[129] Dikutip dari Sajogyo, 1996, *op.cit.,* hal. 194-195.

[130] Ben White, 2005, *op.cit.,* hal. 128.

[131] Misalkan komentar Satyawan Sunito dalam diskusi membahas proposal tesis penulis (ANL), KPM-IPB, Bogor, 4 Juni, 2007, atau Ivanovich Agusta yang menyebut bahwa metodologi Sajogyo adalah realisme-pragmatis. Ivanocich Agusta, "Realisme Sosiologi Pembangunan Desa: Membaca Paradigma dan Teori Sajogyo", dalam Francis Wahono (Ed.), *op.cit.,* hal. 490. Kritik terakhir ini mendapat bantahan keras oleh Francis Wahono. *Ibid*., hal. xi

[132] Keat dan Urry, 1980, hal. 4, dikutip dari Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria* (Bogor: Sajogyo Institute dan IPB, 2009), hal. 7. Kamus *Oxford Leaners Pocket* mendefiniskan "theory" sebagai, "set of reasoned idea intended to explain facts or evens".

yang dipentingkan dalam kasus membangun *body of knowledge* sosiologi pedesaan di IPB ini adalah "imajinasi sosiologis" dan "metodologi", dan bukan teori dalam pengertian tersebut. Sebab teori selalu bersifat "kontekstual" dan tidak pernah bersifat "reifikatif", ada dalam bentuk materialnya.

Imajinasi sosiologis Sajogyo yang dicerminkan dalam studi Sosiologi IPB adalah menonjolkan pemikiran tentang "golongan lemah pedesaan". Dengan kata lain, imajinasi yang berguna layaknya busur mengarahkan perhatian seorang ilmuwan/peneliti ke mana anak panah dibidikkan, penting artinya untuk menentukan apakah realitas tertentu menjadi terlihat atau tak terlihat, diketahui atau sengaja diabaikan untuk tidak diketahui (*ignorance*). Realitas golongan lemah pedesaan itulah yang menjadi imajinasi sosiologi Sajogyo.

Sementara, pilihan cara kerja Sajogyo tercermin dalam kombinasi empat ganda (*combination of multiples*): *multiple theoretical perspective, multiple observers, multiple sources of data,* dan *multiple methodologies*.[133] Pengalaman mengkombinasikan perspektif, peneliti, sumber data, dan metodologi ini sebenarnya lebih tampak dalam praktik penelitian di SAE dari pada di sosiologi pedesaan sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Sebab untuk yang terakhir, yang lebih mungkin dilakukan oleh para muridnya adalah menggunakan kombinasi berbagai metodologi (wawancara survei, *participant observation*, *life histories*, wawancara dengan pihak ketiga, dan lain-lain), dan kombinasi sumber data.

Kembali pada pertanyaan di depan, bagaimana dengan posisi sosiologi pedesaan IPB dalam melihat proses pembangunan? Melalui pengalaman Sajogyo, jika sosiologi yang dibangunnya adalah menempatkan peneliti sebagai pelaku di dalam melihat proses itu (*emic*) mencoba mencari metodologi yang relevan secara sosial sehingga dari situ bernilai relevan juga secara teoretis. Dengan demikian, sebenarnya ilmu sosial yang dikembangkan oleh Sajogyo adalah sebagaimana yang tersaji dalam kutipan pemetaan berikut.

---

[133] *Ibid.,* hal. 25.

Tabel 12. Pengelompokan Jenis Ilmu[134]

Praktek	Interest	Sifat Ilmu	Jenis Ilmu	Pengeta huan yang Dihasilkan	Akses pada Realitas	Tujuan
Kerja	Teknis	empiris-analitis (1)	ilmu alam dan ilmu sosial empiris (2)	informasi	observasi (3)	Penguasa-an teknis
komuni-kasi	Praktis	historis-hermeu-netis (4)	humanio-ra (5)	interpretasi	pemaham an arti melalui bahasa	Pengem-bangan intersuby ektifitas
kekua-saan (6)	Emansi-patoris (7)	sosial-kritis (8)	ekonomi, sosiologi, politik (9)	analisa (10)	self-reflection	Pembeba-san kesada-ran non-reflektif (11)

Ket: Yang bergaris bawah menjelaskan dimana letak "sosiologi ala Sajogyo".

Riset-riset Sajogyo di berbagai kelembagaan yang ia geluti (SAE, LPSP, PSP, Sosped-IPB) adalah riset empiris-analitis (1), berdasarkan survei dan juga wawancara kualitatif. Akses pada realitas yang ditelitinya adalah melalui observasi (3), terjun ke tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini jenis ilmunya adalah ilmu sosial empiris. Tidak berhenti pada tujuan penguasaan teknis, namun pengetahuan yang didapatkan dari lapangan (dalam kasus mikro) ia bandingkan, abstraksikan ke tingkatan lebih luas guna mendapatkan analisa (1) yang sifatnya makro. Metode perbandingan yang ia lakukan tidak hanya antara satu kasus dengan kasus lainnya (kewilayahan) namun juga membanding antara satu kasus dalam rentang periode yang berbeda atau historis (4). Kesadaran historis ini tampak dalam kajian pemulanya tentang Cibodas dan Lampung (bagaimana terbentuknya masyarakat itu, strategi lapis bawah masyarakatnya dari tahun ke tahun), juga ketika membanding jumlah petani miskin dari tahun

[134] Ignas Kleden, "Teori Ilmu Sosial sebagai Variabel Sosial: suatu Tinjauan Filsafat Sosial", dalam Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik kebudayaan,* (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 36. Kategorisasi di atas oleh Kleden merupakan ikhtisar epistemologi Juergen Habermas. Meski demikian, sebagaimana dinyatakan Kleden, ikhtisar diadopsi secara bebas sehingga ia yang bertanggung jawab atas pengkategorisasiannya.

ke tahun dalam memberi kata pengantar buku *Involusi Pertanian*. Penguasaannya terhadap metode etnografi dan cara kerja antropologi lainnya, menjadikan jenis ilmunya adalah humaniora (5). Data-data statistiknya tidak untuk menempatkan kemiskinan dan orang miskin sebagai sesuatu yang dapat diukur, ditunjuk, namun bisa ditemukan dalam realitasnya dan dipahami sebab-sebabnya.

Dalam studi Cibodas dan studi lainnya tentang agraria dan kemiskinan (*peasant studies*) meniscayakannya pada kesadaran penguasaan sumber-sumber produksi sebagai basis pengelompokan sosial. Hubungan satu kelompok/golongan dengan lainnya di masyarakat berada dalam relasi kekuasaan ekonomi dan politik, sehingga dalam menganalisanya (10) tidak hanya diperlukan ilmu sosiologi, namun juga ekonomi dan politik (9).[135]

Meski pendekatan ekonomi politik dijauhi dan perspektif Marxian absen dalam sejarah ilmu sosial Indonesia pada periode 1970-an, namun dengan mempertanyakan aspek penguasaan alat produksi (sumber-sumber agraria) serta dilengkapi dengan imajinasi sosiologis yang kukuh. Sajogyo berhasil terbebas dari jebakan ilmu sosial yang berorientasi struktural fungsional, pragmatis dengan tuntutan-tuntutan aplikatif pembangunannya, namun berusaha kritis agar tidak berfungsi melegitimasi kekuasaan (negara) belaka.

Dari kerja ilmiah Sajogyo, pengetahuan diarahkan untuk melakukan perubahan. Sosiologi terapan yang tercermin dalam pernyataan "sampaimana" mengarahkan agar ilmu mampu membebaskan persoalan yang dihadapi masyarakat. Ilmu bertujuan pembebasan kesadaran (11). Dalam istilah lain adalah *ngelmu iku kalakone kanthi laku.* Ilmu sejati adalah ilmu yang cocok dengan realita, bukan karena ia berkesuaian dengan teori tertentu.[136]

---

[135] Sebagaimana pentahbisan Mubyarto terhadap Sajogyo sebagai "Bapak Ekonomi-Sosilogi Indonesia". Lihat, Mubyarto, "Prof Sajogyo: Sosiolog yang Ekonom, atau Bapak Ekonomi-Sosilogi Indonesia", dalam Mubyarto dkk. (ed), 1996, *op.cit*., hal. 10-20. Juga semboyan Sajogyo yang terkenal, sebagaimana telah dikutip dalam catatan kaki no. 9.

[136] Pernyataan dari Francis Wahono, *loc.cit.*

Agar bisa menjalankan tujuan semacam itu, maka ilmu harus bersifat kritis (8) baik terhadap ilmu dan ilmuwannya itu sendiri (kritik teori). Selain itu, ilmu yang bertujuan pembebasan dan berorientasi hadap masalah disertai pemecahannya, menuntut sikap saling mengemansipasi dari aktor-aktor yang terlibat (7). Emanispasi adalah tindakan/praktek kekuasaan (6). Hal terakhir inilah yang sulit dilakukan dan jarang disadari dalam komunitas ilmiah maupun para pengambil kebijakan. Secara singkat, hal terakhir diistilahkan sendiri oleh Sajogyo sebagai Kaji Tindak Partisipatif (KTP), Indonesianisasi dari kata *Participatory Action Research* (PAR).

Jenis riset PAR semacam ini disadari betapa sulitnya dilakukan. Hingga saat ini, ia selalu mengingatkan perlunya saling kepercayaan satu pihak dengan lainnya dalam upaya melakukan PAR. Menutup tulisannya tahun 2009, ia mengatakan, "Tapi dapat dicatat, bahwa bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan itu tantangannya memang berat. Apalagi dalam kerangka suatu kegiatan 'kaji-tindak' *(action research)*".[137]

Sifat Kaji Tindak Partisipatif inilah yang banyak menginspirasi kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), satu istilah yang juga dilahirkan oleh Sajogyo pada tahun 1970-an ketika saat itu banyak yang masih menggunakan istilah *Non-Government Organization.*[138] Meski demikian, hingga saat ini masih banyak LSM yang mengambil posisi *action*-nya langsung ke masyarakat, lebih sempit lagi ada kecenderungan anti-negara, tanpa disertai dengan *research* yang memadai sehingga terkesan naif dan bergerak tanpa kritik. Jika mereka tidak sabar menjalaninya dan

[137] Sajogyo, "Desaku, Desa Kalian, Desa Kita", esai yang disiapkan untuk acara penganugerahan Bakrie Award 2009, hal. 10.

[138] Ketokohan Sajogyo dalam LSM, atau sebelumnya dikenal dengan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), istilah asli dari Sajogyo, diakui oleh salah satu tokohnya yang telah berkecimpung selama lebih dari 42 tahun, Bambang Ismawan (Bina Swadaya). Lihat, "70 Tahun Bambang Ismawan; 'Kesetiaanlah Satu-satunya yang Saya Miliki dan Pertahankan'", *Kompas,* 8 Maret, 2008.

bergerak non-reflektif dan kritis, maka akan sangat mungkin jalur cepat akan ditempuhnya: non-partisipasi. Mereka menjadi perpanjangan tangan dari pelaksana program, yang dilakukan secara aplikatif dan tidak melibatkan masyarakat berpartisipasi dari mulai ide, proses, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

Kaji Tindak Partisipatif inilah juga yang oleh Sajogyo Institute, satu lembaga yang diniatkan meneruskan cita-citanya, menjadi pedoman dalam melakukan riset, sesuatu yang dirasa sangat sulit dilakukan.

Masuknya sosiologi ala Sajogyo ke hampir semua kotak dalam tabel di atas tidak berarti menjadikan kategorisasi Kleden tidak berguna, namun menunjukkan bahwa kategorisasi yang dibuat itu tidak tepat. Sekaligus membuktikan bahwa kegiatan kelimuwan ala Sajogyo tidak tepat dikategorisasi mengikuti pengalaman kegiatan ilmiah sebagaimana yang ada di Barat, atau setidaknya dalam ikhtisar Juergen Habermas sebagaimana yang dirujuk Ignas Kleden.

Pilihan imajinasi sosiologis dan metodologi Sajogyo di atas itulah yang menjadi penting dalam membangun *body of knowledge* disiplin ilmu sosiologi di IPB khususnya, dan Indonesia umumnya. Menjadikan sosiologi relevan pada kenyataan sosial terutama lapis bawah masyarakat Indonesia, mampu menjelaskan, dan juga mampu mengubah kenyataan sosial yang timpang adalah ciri khas dari "bangun pengetahuan sosiologi Indonesia ala Sajogyo". Dalam proses memahami dan mengubah kenyataan sosial itulah, baginya, tidak cukup dilihat dari satu segi disiplin ilmu secara ketat dan cara pandang satu pihak tertentu belaka, namun dibutuhkan interdisiplineritas dan kerjasama antar berbagai pihak dan aktor: rakyat itu sendiri, ilmuwan, pemerintah, dan usahawan.

Dengan kata lain, sosiologi terapan ala Sajogyo adalah upaya "Indonesianisasi ilmu sosial (sosiologi)", sebagaimana dalam pengalaman historiografi Indonesia, mengalami proses Indonesia-

nisasi dan nasionalisasi. Hal terakhir ini mengalami proses dan arah yang bisa jadi berlainan.[139]

L. Profil Ilmuwan Indonesia: Sebuah Tawaran

Sosok Prof. Dr. Ir. Sajogyo meneladankan pentingnya seorang ilmuwan (Indonesia) untuk bisa berperan dalam beberapa posisi berikut.

1. Bertindak sebagai *ideological broker.* Pemikiran-pemikiran ilmuwan diharapkan bernilai otoritatif, mampu menyumbang gagasan-gagasan yang bernilai rintisan dalam perkembangan keilmuwan di bidangnya, mendapat perhatian kalangan ilmuwan lain baik yang mendukung atau menolak. Meski ada aliran yang menyatakan bahwa ide tidak harus "bermanfaat secara langsung" terhadap masyarakatnya, Sajogyo tidaklah seturut dengan pemahaman itu. Dengan kata lain, pemikirannya sedapat mungkin berkontribusi dan "relevan secara teoretis" dan/atau "relevan secara sosial".

   Selama ini, sikap ilmiah yang dinilai belum tertradisikan di Indonesia tersebut disebabkan oleh keadaannya yang "kurang elitis," sehingga tidak pernah menjadi relevan, dan akumulatif secara teoretis. Perkembangannya lebih ditentukan oleh perumusan masalah secara praktis/birokratis. Atau bisa juga sebaliknya, perumusan masalahnya "tidak realistis" karena hanya untuk memenuhi "gugurnya kewajiban" dari lembaga, baik pemerintah ataupun kampus, dan lainnya.

2. *Pintar mencari dana*. Sebab minimnya perhatian negara dalam dunia ilmiah Indonesia, para ilmuwan merasa harus mencari dana dari sumber-sumber lain untuk membiayai kegiatan ilmiahnya. Ilmuwan kampus/lem-

[139] Proses Indonesianisasi ini dinyatakan langsung oleh Sajogyo dalam suratnya dengan gaya bertanya kepada penulis, "Benarkah proses 'Indonesianisasi' dan 'nasionalisasi' hanya pada kajian sejarah Indonesia? (Jika benar, keliru bicara hal 'Mazhab Bogor' [dalam] sosiologi pedesaan)", surat tertanggal, 24 Mei, 2007.

baga riset yang tidak pintar mencari dana untuk membiayai kegiatan ilmiahnya beresiko menikmati *status quo*-nya sebagai pegawai (PNS) dengan kegiatan rutin mereka. Jika tidak berangkat dengan dukungan teoretis yang memadai dan upaya untuk memecahkan problem sosial (setempat) yang ada, maka resiko yang menghantui adalah, "kekuatan kapital" dari pemesan (swasta, perseorangan, maupun pemerintah) dapat menentukan arah kegiatan ilmiah yang akhirnya hanya akan berfungsi sebagai alat legitimasi mereka. Ketidakmampuan mempergulatkan teori dengan realitas lokal akan beresiko menjadikan kegiatan ilmu sosial sebagai perpanjangan tangan belaka (mengekor) dari tren teori ilmu sosial yang sedang berkembang di luar (Barat), baik yang dibawa oleh lembaga donor maupun lainnya.

Peluang mempergulatkan temuan-temuan ilmiah secara terus-menerus bagi kalangan akademis jauh lebih mungkin dilakukan dibanding dengan mereka yang ada di lembaga LSM. Ditambah lagi selalu hadirnya mahasiswa (baru) di kampus akan siap menjadi "forum baru" bagi dinamika intelektual dan mem-bola-salju-kan kegiatan ilmiahnya. Sementara ilmuwan LSM sulit membayangkan "forumnya". Kegiatan mereka yang umumnya dijalankan secara *by project* terancam tidak terakumulasi dan terarah.

3. *Pengorganisasi yang baik*. Riset, seminar, pertemuan ilmiah, penulisan buku, dan lain-lain, adalah bukti bahwa seorang ilmu-wan mampu mengorganisasi gagasan-gagasan dan menjadikannya sebagai aktivitas bersama khalayak ilmiah, sekaligus menguji keterandalan dalam pengelolaan dana yang diperolehnya. Barangkali terdapat gagasan seorang ilmuwan yang cemerlang, namun pemikirannya menjadi tidak dikenal dan hilang begitu saja sependek usia yang dikandung raga.

   Dua kemungkinan hal di atas menjadi sebabnya. *Pertama,* karena ia tidak pandai (lalai) mengorganisasikan

> gaga-sannya, mangkumulasikannya secara terus menerus. *Kedua*, apa yang "cemerlang" sebagai gagasan (teoretis) tidak bersambut, terumahkan, dapat disebabkan karena secara sosial dan terutama politik, ia tidak memungkinkan untuk diterima (*socially and politically insensible)*.

Berbagai tipe ilmuwan Indonesia setidaknya mewakili kategori di atas. Ada ilmuwan yang "soliter" dari hiruk pikuk dunia publik namun diakui oleh khalayak ilmiah. Jarang yang bisa seperti ini. Yang sering terjadi adalah "ilmuwan publik" dengan sedikit melakukan riset (teoretis) namun segera di/tertarik ke dunia publik. Ada juga "ilmuwan proyek" yang menerima pesanan dari berbagai sumber. Meski *project*-nya berada dalam "kerangka kegiatan ilmiah", namun karena tidak berangkat dari permasalahan teoretis dan tidak diarahkan untuk membangun ke arah itu, maka "*project* ilmiah" tersebut tidak pernah tuntas. Akibatnya, hanya meninggalkan kesan bahwa proyek itu berfungsi *survival*. Terakhir adalah "ilmuwan birokrat". Di saat "kegiatan ilmiah" belum terpisahkan dengan "kegiatan birokrasi" yang seharusnya berfungsi sebagai *supporting system*, maka seorang ilmuwan dituntut untuk dapat melakukan keduanya. Ironisnya, ketenaran dan otoritasnya dinilai menjadi lebih kuat ketika ia menempati posisi birokrasi ini.

Gabungan ketiganya adalah tipe ideal ilmuwan yang dibutuhkan di Indonesia. Dengan memenuhi tiga posisi di atas, dijamin "krisis generasi penerus" tidak akan terjadi. Tipe di atas dapat digunakan untuk membaca mereka, ilmuwan yang ada di kampus, pusat studi, LSM, atau di manapun. Dengan terus-menerus menanyakan pada diri sendiri, untuk siapa para ilmuwan itu menulis-meneliti, menyadari bahwa-klaim-klaim netralitas ilmunya berada dalam konteks dan suasana tertentu, maka semestinyalah kritik diri terus menerus dilakukan. Sudah menjadi aksioma, bahwa ilmu pengetahuan bekerja dengan cara demikian.

Bab VI
Dr. Hc. Gunawan Wiradi, Guru Studi Reforma Agraria[1]

Gunawan Wiradi dikenal sebagai guru studi Reforma Agraria. Ia berperan penting dalam mempromosikan ide Reforma Agraria secara tekun, ketika isu ini ditabukan oleh rezim Orde Baru. Sejak awal rezim itu berkuasa hingga sekarang, Gunawan Wiradi tidak berhenti melakukan kajian atas kondisi dan problem agraria. Gunawan merupakan sosok peneliti yang handal dalam melihat proses transisi agraria di Indonesia. Gunawan juga menjadi juru bicara utama dalam menyuarakan pentingnya pelaksanaan Reforma Agraria. Pendiriannya atas urgensitas pelaksanaan Reforma Agraria didasarkan atas hasil riset dan keterlibatan panjangnya pada berbagai forum yang terkait dengan pembangunan pedesaan dan Reforma Agraria baik di dalam negeri maupun di kancah dunia.

Dapat dikatakan bahwa Gunawan Wiradi merupakan salah satu, jika bukan yang utama, figur yang menjembatani wacana agraria periode kemerdekaan hingga saat ini. Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa tanpa dia, bersama-sama koleganya tentu saja, Prof. Dr. Ir. Sajogyo dan Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondro-

[1] Sebagian tulisan ini dengan judul berbeda telah diterbitkan dalam Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria* (Bogor: Sajogyo Institute dan IPB, 2009), hal. 309-345.

negoro, isu Reforma Agraria akan tenggelam, baik dalam wacana publik maupun akademik.[2]



Gambar 6. Gunawan Wiradi, M. Soc. Sc saat menerima penganugerahan Dr. Hc. dari almamaternya, Institut Pertanian Bogor, 28 Mei 2009.
(Sumber: ANTARA/Jafkhairi/ss/hp/09)

A. Masa Kanak-kanak: *Ketulo-tulo*[3]

Bayi Gunawan Wiradi lahir dari rahim ibu dalam kondisi berbungkus plasenta. Kelahiran dalam kondisi semacam itu memiliki makna tertentu dalam keyakinan orang Jawa. Gunawan Wiradi berasal dari sebuah keluarga feodal di kota Solo. Ia dilahirkan pada hari Minggu Wage, tepatnya tanggal 24 Bakda Mulud (bulan ke-4), tahun Dal, tahun Saka, Jawa 1863. Dalam

[2] Noer Fauzi, "Perjalanan Sebuah Gagasan: Pengantar Penyunting", dalam Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta dan Bandung: Insist, KPA, dan Pustaka Pelajar, 2000), hal. xv.

[3] Istilah *ketulo-tulo* ini berasal dari Gunawan Wiradi sendiri ketika berusaha merefleksikan kembali kehidupan kanak-kanaknya yang dirasakan sangat "keras" dibandingkan dengan kehidupan anak-anak sekarang yang cenderung dimanja. "Saya bertanya apakah ada anak yang seperti saya. Saya sejak kecil *ketulo-tulo*. Jika melihat anak sekarang, saya melihat anaknya Pak Leksono, lha ini gak pernah disuruh. Zaman saya kan, misalnya disuruh kirim surat, diajari bagaimana cara bicara menyampaikannya". Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Yogyakarta, 10 Agustus 2009.

kalender Masehi, tanggal lahir ini sama dengan 28 Agustus 1932. Di beberapa publikasi karya tulisnya, Gunawan Wiradi mencantumkan tanggal lahir 26 Maret 1934, agar sesuai dengan yang tercantum dalam KTP, meskipun ini keliru. Kekeliruan ini bukan tanpa sebab, melainkan terkait dengan riwayat masa kanak-kanaknya.

Gunawan Wiradi adalah anak dari pasangan R. Pujo Sastrosupodo dan R.A. Sumirah. Ayah ibunya berasal dari keluarga Kasunanan Surakarta. Ia adalah anak bungsu dari sebelas bersaudara, empat laki-laki dan tujuh perempuan, namun lima di antaranya telah meninggal semasa muda. Secara berurutan saudaranya itu adalah Raden Ngabehi Jayayuwana, Raden Nganten Nitipurwaka, Raden Nganten Mangunsawardi, Raden Nganten Sasrawiryono, dan Raden Parijan. Kesemua saudaranya kini telah tiada.[4]

Sebagai anak bungsu, barangkali wajar jika Gunawan Wiradi kecil menjadi "anak manja". Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Pada umur satu setengah tahun, ayahnya meninggal. Ayah yang menjadi tulang punggung keluarganya, dengan segenap keistimewaan seorang priyayi itu, tiba-tiba tidak lagi hadir di tengah-tengah keluarga. Sang ibu, janda dengan banyak anak, menanggung beban berat. Sekalipun semula merupakan keluarga mampu dan terpandang, dengan meninggalnya sang ayah, maka dalam tempo sekitar lima tahun tepat saat si bungsu seharusnya masuk sekolah, ekonomi keluarga ini terpuruk.

Gunawan Wiradi sempat dimasukkan ke sekolah Belanda, HIS "Prins Bernard School" di Solo. Untuk bisa masuk ke sekolah ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi: keturunan bangsawan dan ayahnya bergaji minimal 50 gulden. Ini merupakan ketentuan HIS "Prins Bernard School" di *vorstenlanden*.[5] Berangkat ke sekolah, Gunawan Wiradi ditemani oleh 3 pembantu (2 perempuan dan 1 laki-laki) dengan tugas berbeda-beda. Ketika

[4] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 28 Februari, 2009.

[5] Endang Suhendar, "Sekelumit Tentang Gunawan Wiradi", dalam Endang Suhendar, dkk., *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi* (Bandung: AKATIGA, 2002), hal. xii.

masuk kelas I, Gunawan Wiradi sudah bisa menulis di kartu pos karena dididik sendiri oleh pamannya di rumah, sehingga ketika disuruh menulis seperti kawannya yang lain, ia agak membandel.[6]

Bertahan hanya tiga bulan di sekolah itu, Gunawan Wiradi terpaksa putus sekolah. Ibunya tidak lagi mampu membiayainya. Uang sebesar 4 gulden harus diserahkannya setiap bulan ke sekolah. Tentu saja ini berat. Sementara, harga beras saat itu kurang dari lima sen per liter. Sang ibu lantas berusaha mencari bantuan kesana-kemari, terutama pada beberapa keluarga tetangga dekatnya.

Dalam kekalutan itu, datanglah seorang paman, Soewito Kusumowidagdo. Ketika itu sang paman sedang belajar di Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Ia meminta kakaknya agar tak usah mencari bantuan kemana-mana. Si bungsu ini hendak dididik sendiri olehnya di rumah (Solo). Meski sang paman tidak dapat menjanjikan untuk mengajar secara bersinambung, melainkan hanya sewaktu-waktu ketika ia pulang liburan, tawaran ini dinilai lebih baik.[7]

Satu setengah tahun kemudian Gunawan Wiradi dimasukkan lagi ke sekolah, namun umurnya sudah lebih dari 7 tahun. Maka tanggal lahirnya lalu di-"muda"-kan, 26 Maret 1934, tanggal sebagaimana yang tercantum di KTP sekarang. Sewaktu masa pendidikan di rumah, sang paman memberi pelajaran membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, dan menyuruh si bungsu menghafalkan delapan kata-kata bahasa Inggris, baik tulisannya maupun pengucapannya. Si bungsu hanya bengong karena tak paham apa tujuannya, bahkan ketika delapan kata itu sudah dirangkai sekalipun. Rangkaian delapan kata-kata itu adalah "*Laugh! And the world laughs with you. Weep! And you weep alone!*".[8]

Ketika si bungsu kecil itu mendesak pamannya agar menjelaskan apa maksudnya, maka dengan kalimat yang menusuk

---

[6] Wawancara Noer Fauzi dan Ratna Saptari dengan Gunawan Wiradi, Leiden, 13 Februari, 2005.

[7] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 28 Februari, 2009.

[8] Endang Suhendar, *op.cit.,* hal. Xiii.

hati, lantang, dan serius, sang paman berkata: "Engkau anak seorang janda! Melarat! Tidak mampu membiayai sekolahmu! Tetapi, engkau tidak boleh menangis. Sepanjang hidupmu dalam keadaan apapun jangan sekali-kali engkau menangis, mengerti?!" Mendengar itu, si bungsu justru meledak tangisnya. Karena itu, ia lalu dimasukkan ke dalam kamar dan dikunci dari luar, agar ... "menangis sendirian!".

Pendidikan formal Gunawan Wiradi di tingkat sekolah dasar tidak keruan. Suatu saat dia harus ikut tinggal serumah dengan kakak iparnya yang saat itu bekerja sebagai staf *employee* Pabrik Gula Tjolomadu. Ia harus pindah sekolah. Tetapi di daerah Tjolomadu tidak ada sekolah HIS, adanya di Kartosuro yang berjarak sekitar 8 km dari Tjolomadu. HIS adalah sekolah swasta Protestan. HIS Sedyo Mulyo, tempat Gunawan sekolah di Kartosuro, dipimpin Maulawi Simbolon (di kemudian hari menjadi Kolonel Simbolon, tokoh Dewan Gajah pada zaman PRRI). Ia harus berangkat ke sekolah dengan jalan kaki pulang-pergi setiap hari. Tidak lama kemudian ia bersama ibunya pindah ke Kartosuro, agar bisa mendekati tempat sekolah.

Meskipun hanya sekitar satu setengah tahun, pengenalan terhadap daerah pedesaan areal tebu dari PG. Tjolomadu itu ternyata cukup membekas di benaknya. Tentu saja istilah "agraria" belum dikenalnya saat itu, namun berbagai istilah semisal "*tanah gogolan*", "*glebagan padi-tebu*", dan lain-lain, sudah mulai dikenalnya meski secara lamat-lamat. Tanpa disengaja, hal ini telah membekali dasar pemahaman Gunawan Wiradi tentang pedesaan dan rakyat petaninya.[9]

Di sekolah itu Gunawan Wiradi sempat menjadi "anak-emas" sang kepala sekolah. Jika Simbolon membawa limun atau roti ke sekolah, ia selalu diberinya. Sebenarnya ia betah di sekolah ini. Namun karena sesuatu hal, sekali lagi Gunawan Wiradi kecil beserta Ibunya harus pindah kembali ke kota asalnya, Solo.[10]

---

[9] *Ibid.,* hal. xiv.

[10] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 3 Juni 2007.

Di kota Solo dia masuk ke sebuah HIS swasta, "Sekolah Arjuna". Gunawan Wiradi merasa sekolah ini berbeda, suatu sekolah yang di kemudian hari disadarinya sebagai sekolah perjuangan. Di situ murid-muridnya dididik dan digembleng, dibangkitkan semangatnya. Cerita wayang dijadikan semacam "kitab suci" sebagai landasan moralnya. Dari cerita itu pula Gunawan Wiradi kecil yang saat itu duduk di kelas 3 SD, mulai mengenal suatu peristiwa, yang jauh di kemudian hari dikenal sebagai "konflik agraria". Suatu cerita dari dunia pewayangan: Bomanarakasura, putera Sri Kresna, berhadapan dengan Gatotkaca, putera Bima. Mereka saling mengklaim berebut wilayah. Di sinilah Gunawan Wiradi melihat, Sri Kresna tampil sebagai penengah, semacam "LBH" yang "independen".[11]

Sekolah Arjuna (*Ardjoena-Scholen*) adalah bentukan kelompok perkumpulan theosofi. Ada beberapa Sekolah Arjuna yang didirikan *Nederlandsch Indische Theosofische Bond voor Opvoeding en Onderwijs* (NITBOO) atau Perkumpulan Theosofi Hindia Belanda untuk Pendidikan dan Pengajaran. Sekolah Arjuna di Surakarta adalah yang pertama, lalu didirikan juga di Bogor, Bandung, tiga buah di Jakarta (Jatinegara, Gang Paseban, dan Petojo), dan di Prambanan, Klaten.[12] Arjuna dipilih sebagai figur ideal oleh para pengikut theosofi.

Sekolah Arjuna tidak serta merta beraliran progresif sebagaimana diingat Gunawan Wiradi. Berbeda dengan sekolah Taman Siswa yang bersifat *self help* dan paham kemerdekaannya, Sekolah Arjuna awalnya cukup dekat dengan pemerintah dan bersifat kooperatif sehingga menginginkan perubahan secara evolutif, sebagaimana aliran dalam theosofi itu sendiri.[13]

Dalam fase selanjutnyalah Sekolah Arjuna menjadi tempat tumbuhnya ide-ide kebangsaan yang memiliki kualitas ksatria dan mengarah pada gerakan nasionalisme non-kooperatif.[14] Dari

---

[11] Endang Suhendar, *op.cit.,* hal. xiv.

[12] Iskandar P. Nugraha, *Mengikis Batas Timur dan Barat, Gerakan Theosofi dan Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2001), hal. 83.

[13] *Ibid*., hal. 85.

[14] *Ibid.*, hal. 156.

segi spiritual, Sekolah Arjuna adalah gabungan antara agama dan kejawen. Namun ia adalah wadah perjuangan, menggembleng kader pejuang kemerdekaan.[15] Perubahan orientasi terhadap pemerintah Hindia Belanda terkait dengan konteks waktu dan tempat di mana Sekolah Arjuna hadir.

Di Sekolah Arjuna, Gunawan Wiradi diajari pencak silat, menari, menggambar, berhitung, bahasa Belanda, dan lain-lain. Bersama satu kawannya, Gunawan Wiradi pernah diajak gurunya ke *societeit* untuk mempelajari tarian aliran Mangkunegaran. Sebagai sekolah theosofi, Timur dan Barat adalah dua titik pijak yang ingin dipertemukan. Di sekolah itu pula semangat cinta tanah air diajarkan. Selain melalui cerita pewayangan yang diajarkan di kelas dan menyanyikan lagu "Indonesia Raya", sebelum dimulai pelajaran para murid mengucapkan "Sumpah Arjuna", dan menyanyikan lagu "Arjuna Mars" sebagaimana yang dihafal oleh Gunawan Wiradi,

"Arjuna tengah saudara, kelima dalam hidup
Arjuna traju berupa, timbang orang sebut
Arjuna tetap bersabda, keluar tak tercabut
Arjuna adil jauh alpa, kutiru lagi kuturut.
Reff: Marilah kita kumpul, saudara tua muda
Rapat kita bergaul, bercekcok tak berguna
Marilah kita susun kemajuan alam dunia
Banyak pun beban teruslah pikul
Tenagamu faedah nyata
Rakyat mulya punya parool[16]
Petani mulya rakyatnya makmur
Rakyat mulya punya parool
Ibu kita Indonesia."[17]

Olah fisik diajarkan dengan maksud menjaga diri dan melawan kejahatan. Ini pula yang membedakan Sekolah Arjuna dengan sekolah Taman Siswa yang mengedepankan *ahimsa.* Satu cerita yang tak luput dalam ingatan. Suatu ketika Gunawan

[15] Wawancara *via* telepon dengan Gunawan Wiradi, 20 Mei 2009.
[16] Parool: bahasa Belanda, artinya cita-cita.
[17] Wawancara via telepon, *loc.cit.* Tulisan teks lagu ini diperiksa langsung oleh Gunawan Wiradi.

Wiradi dengan kedua kawannya sedang bermain di Singosaren, Solo. Mereka bertiga melihat ada pencopetan yang menimpa seorang tua. Pencopetnya berbadan besar, sementara mereka ini adalah anak usia SD sehingga tidak kuasa menolong. Atas tindakan ini, mereka terkena hukuman dari seorang guru yang kebetulan lewat di tempat itu sebab dinilai tidak menjalankan ajaran Arjuna.[18]

Meletus Perang Dunia II di Indonesia, Belanda menyerah kepada bala tentara Jepang. Surakarta dalam suasana perang, maka untuk sementara waktu sekolah ditutup. Sekitar enam bulan kemudian barulah sekolah dibuka kembali. Gunawan Wiradi tetap di Sekolah Arjuna. Namun sebelum sekolahnya selesai, Jepang menyerah kepada Sekutu, dan berakhir pula PD II. Disusul masa revolusi Indonesia, sekolah tutup kembali untuk sementara.

Secara umum, sudah dikenal bahwa masa pendudukan Jepang adalah masa suram. Rakyat kelaparan. Pakaian compang-camping. Bahkan di banyak tempat, karung goni dan lembaran karet digunakan sebagai bahan pakaian. Wabah penyakit merajalela, sementara obat-obatan sangat langka. Dalam kondisi semacam ini, Gunawan Wiradi kecil pernah mengalami operasi tumor tanpa bius. Untuk memperoleh beras, rakyat harus antri untuk mendapat penjatahan. Namun dari semuanya itu, satu hal layak dicatat: uang sekolah relatif murah![19]

Pada masa Jepang ini, Gunawan Wiradi pernah membantu pamannya yang menjadi *kumicho* (Ketua RT) membagikan *katul* (bekatul--Ind)[20] kepada warga. Per keluarga yang tinggal di kota dibagi 1 liter. Saat itu banyak orang terkena penyakit beri-beri. Diyakini bahwa dalam *katul* terdapat kandungan vitamin B yang berkhasiat menyembuhkan penyakit itu. *Katul-katul* itu diperoleh dari pedagang beras.[21]

---

[18] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 5 Mei 2008.

[19] Endang Suhendar, *op.cit.,* hal. xiv

[20] *Katul* adalah bubuk halus sisa beras yang ditumbuk atau di-*sosoh*; merupakan makanan yang banyak dikonsumsi pada masa pendudukan Jepang.

[21] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 5 Mei 2008

Masa pendudukan Jepang memberi kesan traumatik. Meski demikian, cita-cita Gunawan Wiradi terbangun pada masa ini. Gunawan Wiradi yang kini dikenal sebagai pembela agraria, saat kanak-kanaknya tidak pernah bercita-cita menjadi ahli agraria. Film "Kato Penyapu Udara", pesawat Jepang yang terbang di tengah kota, memberi imajinasi sang bocah akan gagahnya menjadi pilot atau tentara. Itulah cita-citanya masa kecil. Situasi bangsa ikut mempengaruhi pribadi Gunawan Wiradi.[22]

B. Di Tengah Suasana Revolusi: Masa Remaja

Setelah Sekolah Arjuna buka kembali, pada tahun 1946 Gunawan Wiradi menamatkan pendidikannya di situ dan melanjutkan ke SMP Negeri I di kota Solo. Di kota Solo inilah Gunawan Wiradi mengalami masa-masa revolusi fisik. Sekolah buka-tutup silih berganti seiring dengan situasi.

Pada akhir PD II, ketika Jepang menyerah kepada Tentara Sekutu, pihak Sekutu menugaskan tentara Inggris untuk melucuti tentara Jepang yang ada di Indonesia. Pada awal revolusi sebelum tentara Inggris itu datang, rakyat Indonesia sudah bertempur melawan Jepang. Kedatangan tentara Inggris itu ternyata "diboncengi" tentara Belanda. Karena itu rakyat Indonesia pun melawan mereka, yang artinya, sekaligus melawan Jepang, Inggris dan Belanda.

Di pulau Jawa, daerah pertempuran tahun 1945/1946 itu pada umumnya di sepanjang pantai utara. Kota Solo awalnya relatif masih aman meski terjadi pertempuran antara "laskar-laskar perjuangan" melawan *Kenpetai* Jepang. Gunawan Wiradi sekolah di SMP I secara normal sampai awal tahun 1947. Namun tak lama kemudian, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melanggar perjanjian damai Linggarjati dan melakukan aksi militer menyerang daerah Republik (dikenal sebagai *Clash I*). Dalam situasi perang inilah Gunawan Wiradi beserta keluarga mengungsi ke luar kota, meskipun tidak lama karena ternyata pasukan Belanda belum sampai ke kota Solo. Perang ini berakhir pada awal

[22] *Ibid.*

1948 ketika perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948.

Pada tahun 1948 ini Gunawan Wiradi telah duduk di kelas 2 SMP I. Bulan Agustus 1948 ia naik ke kelas 3. Belum sampai sebulan, meletuslah peristiwa Madiun pada pertengahan September. Mengenai peristiwa Madiun ini, Gunawan Wiradi memiliki kesaksian terkait dengan pengalaman masa kecilnya di Solo,

> "Waktu saya dikenalkan dengan Onghokham, [saya ceritakan masalah ini] *gak* percaya dia. Karena ada sejarawan yang pokoknya harus ada dokumen. …Jadi letusan pertama 13 September di Kota Solo, [ini] belum pemberontakan di Madiun. Saya masih kelas 2 SMP, saya sama ibu saya mau ke Colomadu, waktu itu transportasi Colomadu *pake* lori tebu yang *dikasih* dinding, *makanya* disebut monting, karena lokomotifnya berbunyi 'ting-ting-ting'. Saya dari Gandhekan, Kusumodiningratan dekat Pasar Kembang Solo, jalan kaki ke Manahan lewat Srambatan, selatan Stasiun Balapan. Di dok (?) ada asrama Siliwangi. Entah apa, yang saya saksikan tiba-tiba ada 'der der der!', saya masuk selokan sama ibu saya."[23]

Kesaksian pribadi ini menurut Gunawan Wiradi, ketika dicerikatakannya kepada Onghokham, tidak lantas dipercayai. Ia melanjutkan,

> "Ong *bilang, 'Ah gak,* tidak pernah ada peristiwa itu'. Padahal itu peristiwa jelas rentetan sebelum Madiun. Karena sebelum itu ada penculikan-penculikan anak buahnya Slamet Riyadi, yang dituduh menculik Siliwangi. Siliwangi *kan* hijrah ke Jateng. Salah satu satuan Siliwangi itu ada yang di selatan pojokan Balapan. *Nah,* saling ultimatum, *nyulik,* tidak, *nyulik,* tidak. Slamet Riyadi masih di front, dia turun kemudian ikut. *Tahu-tahu* Bung Hatta mengumumkan *itu* pemberontakan, kirim Siliwangi ke Solo. Slamet Riyadi [berpandangan], kalau ini dibiarkan, perang di kota, kasihan penduduk. [Lalu] Slamet Riyadi mundur".[24]

Penting membandingkan kesaksian pribadi Gunawan Wiradi ini dengan beberapa narasi lain. Secara singkat, peristiwa Madiun adalah "pemberontakan" yang dilakukan oleh kaum komunis yang hendak mendirikan pemerintahan dengan gaya

[23] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Yogyakarta, 10 Agustus 2009.
[24] *Ibid.*

Soviet, di bawah inisiatif Musso, seorang "korektor" dalam ideologi komunisme di Indonesia.[25] Keterkaitan antara peristiwa yang meletus di Surakarta dengan peristiwa Madiun dibenarkan dalam uraian Ricklefs. Pada pertengahan September 1948, pertempuran terbuka antara kekuatan bersenjata yang pro-PKI dengan kekuatan yang pro-pemerintah. Divisi Siliwangi pada tanggal 17 September berhasil memukul mundur pendukung PKI itu hingga ke kota Madiun. Di kota ini mereka bergabung dengan kekuatan pro-PKI lainnya.[26]

Uraian di atas menunjukkan bahwa pertempuran terjadi antara mereka yang pro-PKI dan mereka yang pro-Pemerintah. Sementara pembelaan D. N. Aidit yang naskahnya dibukukan, *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948,* menjelaskan bahwa peristiwa Madiun adalah hasil dari "provokasi Hatta". Selengkapnya dikutip,

> "Peristiwa Madiun didahului oleh kejadian2 di kota Solo, mula2 dengan pembunuhan atas diri Kolonel Sutarto, Komandan TNI Divisi IV, dan kemudian pada permulaan September 1948 dengan pentjulikan dan pembunuhan terhadap 5 orang perwira TNI, jaitu major Esmara Sugeng, kapten Sutarto, kapten Supardi, kapten Suradi dan letnan Muljono. Djuga ditjulik 2 anggota PKI, Slamet Widjaja dan Pardjijo... Presiden Soekarno mengatakan bahwa Peristiwa Solo dan Peristiwa Madiun tidak berdiri sendiri. Ini sepenuhnja benar! Sesudah pentjulikan2 dan pembunuhan2 di Solo jang diatur di Djokja, keadaan di Madiun mendjadi sangat tegang sehingga terdjadilah pertempuran antara pasukan2 dalam Angkatan Darat jang pro dan jang anti pentjulikan2 serta pembunuhan2 di Solo".[27]

Aidit melanjutkan,

> "Dalam kekatjaubalauan ini Residen Kepala Daerah tidak ada di Madiun…Walikota sedang sakit. Maka Front Demokrasi Rakjat, dimana PKI termasuk didalamnja, mendesak supaja saudara Supardi, Wakil Walikota Madiun bertindak untuk sementara… tindakan

[25] Lihat, misalnya, M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2008), hal. 459-460.

[26] *Ibid.*

[27] D. N. Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948-Peristiwa Sumatera 1956* (Jakarta: Jajasan Pembaruan, 1958), hal. 9-10.

> mengangkat Wakil Walikota menjadi Residen sementara jang dinamakan oleh pemerintah Hatta tindakan 'merobohkan pemerintah RI', tindakan 'mengadakan coup d'etat' dan tindakan 'mendirikan pemerintah sovjet'...maka Hatta menggunakan mulut Soekarno dan memindjam kewibawaan Soekarno untuk membasmi Amir Sjarifuddin dan be-ribu2 putera Indonesia asal suku Djawa".[28]

Kesaksian bocah Gunawan Wiradi tidak hendak menghubungkan (pengikut) Slamet Riyadi, pahlawan nasional dan menjadi jalan utama di kota Solo, terkait atau setidak-tidaknya bersimpati dengan komunisme, atau tentang tentara-tentara lasykar yang lebih menggabungkan diri kepada komunis akibat dikeluarkannya mereka dari barisan TNI yang mengalami "rasionalisasi Hatta", atau bagaimana "provokasi Hatta" itu membawa akibat mengerikan. Kesaksian bocah Gunawan Wiradi akan lebih bermanfaat dalam menunjukkan bahwa "perang saudara" itu terjadi dalam kondisi "normal"; ketika orang-orang sipil hendak bepergian, menaiki lori menuju tempat yang dikehendaki guna *menyambangi* saudara di tempat lain. Perang yang dilihatnya itu jauh dari kepentingan langsung "hajat rakyat banyak".

Dua bulan setelah peristiwa yang berkesan itu, Gunawan Wiradi kembali "terlibat" dalam perang. Ketika pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda untuk kedua kalinya meluncurkan "aksi militer", melanggar perjanjian Renville, kemudian menyerbu Yogyakarta. Rentetan peristiwanya terjadi juga di Solo. Gedung SMP I Solo di Banjarsari dimana ia bersekolah dibumihanguskan Belanda pada tanggal 20 Desember. Padahal gedung itu merupakan gedung SMP termewah zaman itu, memiliki ruang kelas yang sudah mirip dengan ruang kuliah universitas. Gedung itu memiliki ruang-ruang khusus untuk pelajaran ilmu fisika, peralatan musik, gamelan, ruang olah raga, dll.[29]

Tanggal 21 Desember tentara Belanda berhasil menduduki kota Solo. Pada tanggal inilah Gunawan Wiradi ditangkap Belanda. Karena dianggap masih kecil ia tidak ditahan, melainkan

---

[28] *Ibid.* hal 10-12.

[29] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 5 Mei 2008.

hanya disuruh menimba air sumur untuk mandi tentara Belanda, setelah itu ia dilepas.

Gunawan Wiradi muda kemudian turut ke luar kota mengikuti "kakak-kakak"-nya yang Tentara Pelajar (TP). Ia diberi pistol dan diserahi tugas memberi tanda sewaktu-waktu jika tank Belanda datang. Namun belum sampai tiga bulan berada bersama mereka, ia dijemput oleh ibunya untuk kembali ke kota. Sang Ibu tidak ingin lagi kehilangan anak lelaki yang tinggal satu-satunya. Di kota, ia tetap diberi tugas oleh "kakak-kakak" TP itu, menulis di tembok-tembok keraton atau sekolah. Misalkan, menempel plakat "Kalau sekolah ini tidak ditutup, maka guru-guru akan digantung". Atau juga menulisi tembok-tembok kota, "*Hollandsche Studenten, keert naar je land terug, om verder te studeren. Wij kunnen onze land zelf bewaren*".[30] Kata-kata ini ditujukan kepada tentara milisi Belanda yang kebanyakan berasal dari pelajar.

Meskipun kota Solo diduduki tentara Belanda, tetapi secara diam-diam sejumlah guru yang tetap setia kepada RI (dan tidak menyeberang menjadi pegawai Belanda) mendirikan "SMP Gerilya" yang tempatnya berpindah-pindah. Gunawan Wiradi masuk ke sekolah itu. Setelah perang berakhir, sekolah ini menjadi SMP III.

Agustus 1949 perang gerilya berakhir, dan sekolah dibuka kembali. Tetapi sekolah baru berjalan secara normal sejak Januari 1950. Agustus 1950 Gunawan Wiradi tamat dari SMP dan masuk ke SMA Negeri di Solo. Suasana *euforia* kebebasan setelah perang selesai meliputi seluruh masyarakat. Gunawan Wiradi mulai mengalami masa belajar di sekolah secara lebih baik. Dan tentu saja, sambil berpacaran!

Pada masa kolonial Belanda, jumlah SMA di Indonesia tidak mencapai 10 buah, dan hampir semuanya ada di Pulau Jawa. Waktu itu namanya *Algemeen Middlebare School* (AMS). Jurusannya hanya dua dan disebut sebagai "Bagian A" dan "Bagian B".

[30] Ungkapan berbahasa Belanda ini kurang lebih berarti, "Hai para mahasiswa Belanda, pulanglah ke negerimu untuk melanjutkan sekolah. Kami dapat menjaga sendiri tanah air kami!". *Ibid.*

Bagian A untuk mata ajaran sastra, hukum, sejarah, dan lainnya. yang sekarang masuk kelompok sosial-budaya dan/atau humaniora. Bagian B adalah kelompok ilmu-ilmu pasti-alam, biologi, dan sebagainya.

Untuk Bagian B, salah satu AMS yang dianggap paling baik adalah AMS di Yogya, sedang Bagian A di Solo. Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang kemudian dikenal sebagai tokoh yang berasal dari luar Jawa (misalnya Moh. Yamin, Moh. Natsir, Sanusi Pane, Armijn Pane, dll) pernah lama tinggal di Solo ketika mereka belajar di AMS Bagian A. Di Solo, AMS Bagian B pun dibebani mata ajaran yang menjadi pokok mata ajaran Bagian A (seperti sejarah, ekonomi, ketatanegaraan, sastra, dan sebagainya). Di Bagian A sedikitnya ada enam bahasa asing yang diajarkan, sedangkan di Bagian B hanya empat (Belanda, Inggris, Jerman dan Perancis). Untuk masing-masing pelajaran bahasa itu, selain buku *grammar*, ada sejumlah buku bacaan yang menjadi buku wajib dan bahan ujian.[31]

Di zaman kolonial Belanda itu, ujian penghabisan AMS adalah ujian negara, dan dilakukan sebanyak dua kali. Ujian untuk bahan bacaan itu berlangsung secara lisan dalam ujian yang kedua. Tradisi di zaman Belanda itu dilanjutkan sampai sesudah Indonesia merdeka sebelum kemudian diubah. Karena itu, meskipun Gunawan Wiradi masuk Bagian B (pasti-alam), namun ia sempat menerima pelajaran bahasa asing yang masih mirip di zaman Belanda. Hanya saja, bahasa Belanda memang tidak diajarkan lagi. Buku bacaan wajib masih ada walaupun tidak sebanyak di zaman Belanda. Untuk bahasa Inggris, misalnya, Gunawan Wiradi harus menghapalkan nama-nama sastrawan Inggris dan Amerika beserta karya-karya sastra mereka (yang diingatnya: William Shakespeare, John Milton, William Makepeace Thackeray, Charles Dickens, Jonathan Swift, dll; atau sastrawan Amerika seperti H.W. Longfellow, R.L. Stevenson, Ernest Hemingway, dan lain-lain).

[31] Wawancara *via* telepon dengan Gunawan Wiradi, *op. cit.,* Untuk kepentingan penerbitan (Gunawan Wiradi, 2009, *op.cit.*) keterangan tertulis ditambahkan langsung olehnya.

Karena kota Solo saat itu dianggap sebagai kota kebudayaan, generasi Gunawan Wiradi walaupun di Bagian B, sempat juga menerima pelajaran mengenai berbagai hal dalam mata ajaran "pengetahuan umum", yang barangkali dapat disebut sebagai bagian ilmu-ilmu sosial. Misalnya, apa yang jauh di belakang hari dikenalnya sebagai "*sociology of love*". Saat itu ia telah menerima pengetahuan tersebut sejak SMA, misalnya tentang "brotherly-love", "*platonic love*", "*romantic love*", "*sexual love*", dan "*conjugal love*".[32]

Sewaktu masa sekolah di SMA, Gunawan Wiradi juga menjadi anggota Youth of All Nations (YOAN) yang bermarkas di Washington. Dia mempunyai sejumlah "pen-friends" dari berbagai bangsa (Jerman, Australia, Amerika, dan lain-lain), yang dengan itu ia dapat melatih diri berbahasa asing. Pengalaman ini dirasakan berguna ketika ia terlibat sebagai panitia Kongres Mahasiswa Asia Afrika, 1956.

C. Menjadi Mahasiswa Aktivis

Tahun 1953 Gunawan Wiradi tamat SMA. Ia ingin meneruskan ke Akademi Dinas Luar Negeri. Ia tertarik dengan akademi tersebut sebab setelah lulus bisa menjadi duta. Tetapi pilihan itu tidak disetujui oleh pamannya karena dinilai hanya tingkat akademi, bukan universitas. Gunawan Wiradi memilih Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran. Setiba di kampus UGM yang masih menumpang di keraton, ia mandapati kondisi kapus yang begitu memprihatinkan, laboratoriumnya bekas garsi dan ruang kuliah yang penuh sarang laba-laba. Ia menganggap sekolah SMP atau SMA-nya jauh lebih bagus dibanding kampus itu, sehingga ia urung masuk. Kemudian ia berkirim surat ke Kedokteran UI, Jakarta. Ia mendapat balasan bahwa beasiswa baru bisa diperoleh pada semester 3 dan keterangan tentang

[32] *Ibid.*

bahasa pengantar kuliah yang menggunakan bahasa Belanda. Lagi-lagi ia membatalkan niatnya.[33]

Saat itu Presiden Soekarno sering berpidato menyarankan agar anak muda Indonesia masuk ke fakultas pertanian, sebab negara ini adalah negara agraris. Gunawan Wiradi tertarik dengan seruan itu. Akhirnya ia memilih pergi ke Bogor dan masuk ke Fakultas Pertanian di Bogor yang saat itu masih bernaung di bawah Universitas Indonesia. Ia menjadi mahasiswa dengan NIM bernomor 525. Selama di Bogor, ia tinggal di pondokan.

Begitu masuk kuliah di Bogor, Gunawan Wiradi langsung menerima beasiswa dari pemerintah. Tetapi, belum lama tinggal di kota ini, pada tahun kedua untuk kesekian kalinya ia harus mengalami goncangan jiwa yang berat. Gunawan Wiradi kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, ibu dan pacarnya. Ibunya meninggal sebab sudah *sepuh* (usia lanjut). Akibatnya, untuk pertama kali dalam sejarah sekolahnya, ia tinggal kelas.[34]

Aktivitasnya sebagai mahasiswa di luar perkuliahan mampu membantu mengatasi goncangan itu. Dalam Pemilu 1955 Gunawan Wiradi menjadi anggota pengawas pemilu yang dengan SK Walikota Bogor disebut sebagai "Polisi Tak Bergajih". Di tahun itu pula ia aktif sebagai pimpinan Seksi dalam Panitia Persiapan Nasional Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika (KMAA) yang terselenggara setahun kemudian yaitu tahun 1956, di Bandung. Ia menjadi koordinator seksi dokumentasi.

Dalam Konferensi itulah Gunawan Wiradi banyak bergaul dengan mahasiswa dari negara lain dan semakin akrab dengan mereka dalam Persatuan Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Dalam organisasi ini terhimpun HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, dan berbagai oganisasi lain yang umumnya beranggotakan mahasiswa yang berasal dari Tentara Pelajar.

Terkait dengan KMAA ini, Gunawan Wiradi menjelaskan,

---

[33] Wawancara Noer Fauzi dan Ratna Saptari dengan Gunawan Wiradi, Leiden, 13 Februari 2005.

[34] Endang Suhendar, *op.cit.,* hal. xv.

> "Mahasiswa ingin melanjutkan, menindaklanjuti apa yang sudah dirintis oleh senior-senior di tingkat negara. Oleh karena itu, Konferensi Asia Afrika itu tahun '56, tidak tahun '55, '55 itu yang negara….".[35]

KMAA berangkat dari kesadaran *platform* bersama untuk membina hubungan internasional antara negara-negara yang baru mencapai kemerdekaan. Semangat semacam ini terasa sekali dan memberi implikasi internal pada organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia. Ia melanjutkan,

> "Waktu menyambut Konferensi Mahasiswa Asia Afrika, pidato Bung Karno mengatakan begini, 'Saya sekarang belum tahu pasti, mana yang lebih penting Konferensi Asia Afrika yang dilakukan pemerintah, atau Konferensi Mahasiswa'. *Gitu. Anu*, Bung Karno *bilang*, yang dimaksud, semua, semua mahasiswa bisa bersatu untuk revolusioner, untuk revolusioner. Bukan sekedar bersatu. *Gitu*. Itu yang dimaksud.
> …salah satunya, tokoh yang *survive* dalam arti dia tetap diterima dan menempati posisi zaman Orde Baru, Emil Salim, mewakili Gemsos. Ia menjadi wakil ketua delegasi [Indonesia], sementara ketua delegasinya perempuan, Nini Karim".

Gunawan Wiradi perlu menjelaskan keterlibatan Emil Salim dalam KMAA dan posisinya dalam pemerintahan Orde Baru. Hal ini karena pelaksanaan KMAA dan KAA dalam wacana Orde Baru direduksi sebagai produk pemerintahan Soekarno. Dengan sendirinya, kongres yang bersifat multilateral dengan sikap anti-imperialisme dan cita-cita menuju tatanan dunia baru yang non-sektarian, justru diasosiasikan komunis, atau setidak-tidaknya kiri. Tidak aneh jika nama Nini Karim sebagai ketua delegasinya kemudian tidak pernah muncul kembali pada masa Orde Baru, dan semangat KAA memudar, hanya menyisakan nama jalan yang ramai.

> "Dalam Panitia Persiapan Nasional Konferensi Mahasiswa Asia Afrika tahun 1956, ketua dari HMI Agustin Aminuddin, progresif ini. Wakil Ketua I CMB Bandung, sekjennya AY. Gultom (GMKI). Banyak yang ditahan karena Orba menganggap gerakan Asia Afrika

[35] Wawancara Noer Fauzi dan Ratna Saptari dengan Gunawan Wiradi, Leiden, 13 Februari 2005.

> itu komunis. Dari Bogor dapat jatah seksi dokumentasi, ketuanya Sudarmaji, saya sebagai wakil ketuanya…
> Dulu mahasiswa menulis dengan steno karena tanpa itu tidak terkejar. Saya menyalin lagi tulisan steno ke dalam tulisan biasa. Tetapi saya melibatkan teman-teman. Ada yang bagian gambar, ada yang bagian menangkap inti, ada yang bagian *nulis* semua yang didengar. Saya menyalin ketiganya".[36]

1. Menjadi Ketua Senat Mahasiswa UI Bogor

Pada tahun 1957-1958, Gunawan Wiradi menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian UI di Bogor. Ketua Dewan UI (di Jakarta) saat itu adalah Hasan Rangkuti, yang baru saja menggantikan Emil Salim. Gunawan Wiradi terpilih sebagai perwakilan angkatan dan bukan dari organisasi ekstra. Ia adalah ketua senat periode keempat.

Lahirnya senat mahasiswa di Bogor cukup unik. Ia dilahirkan oleh organisasi ekstra yang telah ada. Berbeda dengan Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta, dinamika organisasi mahasiswa kampus Bogor belum cukup kelihatan. Senat mahasiswa didirikan oleh organisasi MMB, GMI, HMI, GMKI, dan PMKRI. Lima organisasi eksternal inilah yang membentuk senat. Di antara para pendiri senat adalah Kampto Utomo, Santoso dan Saryadi yang mereka ini sudah berada di tingkat terakhir perkuliahan.

Sebagai mahasiswa, Gunawan tercatat sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI). Namun ketika terpilih sebagai ketua senat, ia mewakili tingkatan kuliah, bukan organisasi GMI. Saat terpilih, ia tidak sedang ada dalam acara pemilihan sebab sedang melakukan praktik lapangan bersama dosennya, Dr. Ir. Kampto Utomo.[37]

---

[36] Wawancara Moh. Shohibuddin, A. N. Luthfi, dan Eko Cahyono dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 9 Februari 2008

[37] Gunawan Wiradi menyebut Kampto Utomo yang selanjutnya dikenal dengan Sajogyo ini sebagai "kawan, guru, dan bapak": kawan dalam organisasi kemahasiswaan ekstra maupun intra; guru sebab merasa pernah diajar di perkuliahan hingga mendapat bimbingan selama penulisan skripsi; dan bapak dalam mendampingi hidupnya terutama pada masa-masa sulit. Gunawan Wiradi, "Prof. Dr. Ir. Sajogyo: Temanku, Guruku, dan Bapakku", dalam Mubyarto dkk. (ed.), *Sajogyo, Bapak, Guru, dan Sahabat,* (Bogor: Yayasan Agro Ekonomika, 1996), hal. 72-75.

> "Karena ini ada 5 tingkatan *ya*, waktu itu *kan* 5 tingkatan *ya* di Fakultas Pertanian. Setiap tingkat ini ada dua wakil, jadi jumlahnya 10. *Plus* mewakili organisasi ekstra. Jadi keseluruan 15 wakil [duduk sebagai anggota senat]. *Nah*, kadang-kadang, ketika ini jadi, *thek*, pemilihan ketua. Ketua yang terpilih bisa jadi yang ini [mewakili organisasi ekstra]. Tapi saya waktu itu, saya dianggap mewakili yang ini [tingkatan]. Saya waktu itu tingkat tinggi, di tingkat 4. Terpilihnya sebagai perwira intra, walaupun orang tahu saya CGMI".[38]

Pada periode inilah ia pernah memberi kata sambutan pada acara simposium membahas rancangan UUPA 1960. Sebagai ketua senat ia bertanggung jawab dalam kepanitiaan. Selain menyinggung rancangan UUPA, sambutannya berisi ulasan tentang apa arti simposium, istilah yang belum populer saat itu.[39]

> "Waktu itu pidato saya bunyinya begini, 'Simposium itu berasal dari judul buku karangan Plato, *Simposium*. Isinya adalah penganugerahan hadiah pertama kepada sastrawan yang namanya Agaton. *Nah,* setelah upacara-upacara, diikuti dengan minum anggur dan musik-musik. Lalu setelah acara penyerahan hadiah itu selesai, tukang anggur dan tukang bir itu diusir. Tinggal sastrawan-sastrawan. Mereka berdiskusi tentang apa artinya cinta. *Nah,* karena tema diskusinya cinta, maka tidak ada ujung pangkal. Jadi, simpisium itu adalah pertemuan diskusi yang tidak ada kesimpulan. *Brainstorming*, *gitu'. Nah,* lalu saya mengatakan, 'Sekarang, ini Simposium Agraria, ini saya berharap timbul Agaton-agaton Agraria'. *Ha ha… Habis*, *wong* mahasiswa, suruh pidato. *Ya* mangaitkan agraria dengan simposium. *Ya* itu saja".[40]

Salah satu polemik yang diingatnya dalam diskusi saat itu adalah persoalan adat yang dilontarkan oleh Prof. Soekanto. UUPA sebagai upaya dekolonisasi hukum agraria menurut pakar tersebut haruslah digali dari spirit yang berasal dari hukum adat, dan bagaimana seharusnya mengkritisi beberapa konsep seperti "sewa" dan "*eigendom*" (hak milik mutlak) yang berasal dari hu-

---

[38] Wawancara Noer Fauzi dan Ratna Saptari dengan Gunawan Wiradi, Leiden, 16 Februari 2005

[39] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 9 September 2008.

[40] Wawancara Noer Fauzi dengan Gunawan Wiradi, Bandung, 2 Maret 2005.

kum kolonial (Barat) dan tidak dikenal dalam hukum adat. Pengalaman ini merupakan ketertarikan awal pada isu-isu agraria.

Hal lain yang diingatnya, tugas senat saat itu adalah membela kepentingan mahasiswa yang terkait dengan masalah internal di luar persoalan yang telah di-*cover* oleh organisasi ekstra. Tugas lainnya adalah menjadi mediator hubungan dosen dengan mahasiswa, terutama persoalan pengajaran.

Peralihan dari sistem Belanda ke sistem Amerika membawa dampak mendasar bagi pengajaran di kampus Bogor ini. Dengan dibatalkannya perjanjian KMB tahun 1957, banyak dosen-dosen berkebangsaan Belanda dipulangkan. Akibatnya, terjadi kekosongan pengajaran sekitar setengah tahun. Pada tahun 1958 kampus mulai diisi dosen kontrak jangka pendek. Mereka berasal dari Perancis dan Jerman, bahkan terdapat dosen bekas pilot tentara nazi yang mengajar meteorologi. Untuk menyetabilkan pengajaran, pada tahun ini pula datang rombongan dari Kentucky University Team (Kenteam). Mereka datang dalam konteks kerjasama antar-universitas, dalam rangka membantu univeritas-universitas di Indonesia.[41]

Kondisi serupa terjadi juga di beberapa kampus disusul kehadiran staf pengajar universitas dari Amerika guna memberi bantuan pengajaran. UI Jakarta, misalnya, kerjasama dengan Berkeley University, ITB dengan California University, sementara UGM bekerjasama dengan Wisconsin University. Pada gilirannya, kerjasama ini didanai oleh Ford Foundation.[42]

Pendidikan Amerika mempunyai misi politis tertentu. Misinya mencegah agar jangan sampai pendidikan di negara-negara pascakolonial berkembang menuju arah komunis. Kenteam jelas mengemban misi politik semacam itu. Kentucky University saat itu dipilih karena universitas inilah yang memiliki studi sosiologi pedesaan.[43]

---

[41] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 19 November 2008.

[42] Mengenai kerjasama ini simak, Goenawan Mohamad dkk. *Menyambut Indonesia, Lima Puluh Tahun bersama Ford Foundation, 1953-2003* (Jakarta: Ford Foundation dan Equinox Publishing, 2003).

[43] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 19 November 2008.

Selain itu, perubahan lain yang sangat dirasakan mahasiswa Bogor saat itu adalah berlakunya sistem ujian baru. Dalam sistem Belanda ujian dilakukan di akhir tahun setelah menempuh perkuliahan selama setahun penuh. Skala penilaian diberikan dari 1 hingga 10. Ujian dilakukan secara lisan. Sementara sistem Amerika menggunakan sistem penilaian relatif (A, B, C, D) dalam kurva absolut. Ujian disampaikan secara tertulis dalam jumlah pertanyaan yang sangat banyak (100 pertanyaan misalnya), juga berlakunya sistem kehadiran (presensi).

Sedangkan sebelumnya mahasiswa terbiasa dengan pertanyaan yang berjumlah 2-3 dengan jawaban yang sifatnya uraian panjang. Akibatnya, sebagian ada yang diuntungkan namun sebagian besar lainnya merasa dirugikan. Akhirnya banyak mahasiswa yang protes, demo. Di sinilah senat turut memperjuangkan kepentingan mahasiswa. "Jangan demo, nanti saya rundingkan. Lalu saya negosiasi dengan Fakultas, dengan dekan Pak Thoyib".[44]

Pada tahun 1958 juga, sebagai ketua senat, ia ditugaskan mengikuti dan menyertai Pekan Olah Raga Mahasiswa di Yogyakarta. Saat itu suasana politik nasional dengan adanya peristiwa PRRI turut mempengaruhi kehidupan mahasiswa, tidak terkecuali kegiatan olah raga ini. Salah satu yang diingat Gunawan Wiradi adalah ketika ia dan seorang kawan dari Jawa Barat, Hidayat Kusnadinata, dikeroyok oleh peserta dari Sulawesi. Keduanya dianggap dari pusat (mewakili UI). Sementara saat itu, sentimen anti pusat memang begitu mengeras. Hal serupa dirasakannya saat di penginapan, bantal-bantal di atas kasur ditulisi dengan kata-kata yang mencerminkan sentimen anti-pusat. Dengan kesaksian ini, ia merasa heran jika wacana tentang peristiwa PRRI pada masa Orde Baru disebutkan sebagai suatu tindakan anti-komunisme, seakan-akan argumen ini hanya untuk melegitimasi tindakan perlawanan terhadap pemerintahan Soe-

[44] Wawancara Noer fauzi dan Ratna Saptari dengan Gunawan Wiradi, Leiden, 16 Februari 2005

karno saat itu. Pelaku peristiwa itu bersikap *self-fulfilling* saja atas argumen Orde Baru ini.

Selama menjadi ketua senat, Gunawan Wiradi berkeanggotaan ganda dalam organisasi ekstra, yakni menjadi anggota GMNI dan CGMI. Pada tahun 1963 ketika berlangsung kongres GMNI di Kaliurang, ia diminta memilih antara GMNI ataukah CGMI. Ini dilakukan setelah adanya peraturan yang tidak memperbolehkan rangkap keanggotaan organisasi. Sebelumnya rangkap keanggotaan hal yang biasa, HMI sekaligus CGMI ataupun GMNI. Gunawan Wiradi tidak mau memilih dan beralasan, "Saya sudah lulus kuliah maka sudah bukan anggota apa-apa. Dalam Anggaran Dasar, otomatis ketika anak ini sudah lulus, maka tidak menjadi anggota lagi. Untuk apa *milih*, *wong* saya sudah lulus".[45] Alasan ini oleh kawan-kawannya saat itu dinilai bahwa Gunawan Wiradi *emoh* meninggalkan keduanya.

Sejak menjadi Ketua Umum Senat, Gunawan Wiradi menikmati beberapa keistimewaan: memiliki kantor yang dilengkapi dengan meja dan telpon khusus, diundang hadir dalam acara kenegaraan yang diselenggarakan di Istana Bogor (ketika menyambut Presiden Ho Chin Min), dan ketenaran di kalangan mahasiswa. Meski demikian, karir studinya terhambat. Sebab menjadi senat itu pula dan terafiliasinya ia dalam organisasi ekstra CGMI, dalam perjalanan hidup selanjutnya ia mengalami rintangan berat. Ia menjelaskan,

> " [Akibat peristiwa 1965] saya di-*screening* 4 kali: IPB, Deptan, CPM. Setiap kali *screening* selalu ditanya, 'Kamu diangkat sebagai ketua senat *kan* utusan CGMI'. Padahal saya dipilih saat tidak di Bogor. Waktu saya diperiksa kedua kali dari tim Jakarta, ada seorang kolonel wanita. Itu lebih hati-hati. Kolonel polisi mendesak agar saya mengatakan bahwa si A menjadi anggota senat karena utusan CGMI. Saya bilang tidak. Dia menggebrak. Saya menggebrak balik dan lebih keras. Saya bilang, saya yang menjadi ketuanya! Semua kaget. Laksamana Musa yang ada di situ terus mengatakan, 'Sabar, Mas'. Ibu itu yang terus *screening* tiap tahun. Waktu akan studi ke Malaysia saya juga di-*screening*. Waktu itu orang IPB

[45] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 25 Juli 2008.

bingung, *kok* saya bisa ke Malaysia. Jadi yang penting argumennya".[46]

Gunawan Wiradi memang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia cukup dikenal oleh kawan-kawannya di organisasi ekstra mahasiswa hingga sempat akan dicalonkan sebagai ketua di salah satu organisasi eksternal, yakni CGMI. Namun ia menolaknya dengan alasan ingin segera menyelesaikan studi, setelah juga mendapat peringatan dari pamannya. Keberadaan organisasi CGMI dari perspektif Gunawan Wiradi ini perlu mendapat ulasan yang mencukupi.

2. Anggota Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI)

CGMI berdiri pada tahun 1956, yaitu tahun ketika berlangsungnya Konferensi Mahasiswa Asia Afrika di Bandung. CGMI merupakan hasil fusi dari tiga ormas mahasiswa, yakni GMD (Gerakan Mahasiswa Djakarta), CMB (Consentrasi Mahasiswa Bandung), dan CMD (Consentrasi Mahasiswa Djogjakarta).[47] Organisasi apa saja yang melakukan peleburan dan di mana tempat terjadinya fusi tersebut ada beberapa penjelasan yang berbeda.

Hersri Setiawan tidak menyebut keterlibatan organisasi asal Bogor, Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI),[48] yang menurut Gunawan Wiradi justru organisasi ini "menyumbang" nama "Indonesia" dalam CGMI. Barangkali Hersri menyamakan GMI (Bogor) dengan GMD (Jakarta) yang notabene GMI beranggotakan para mahasiwa dari UI yang di Bogor, sehingga keduanya diasosiasikan sebagai (UI) Jakarta. Jika Hersri menyebut Jetis, Yogyakarta sebagai tempat terjadinya fusi itu, maka Guna-

[46] Wawancara Moh. Shohibuddin, A. N. Luthfi, dan Eko Cahyono dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 9 Februari 2008

[47] Hersri Setiawan, dalam "Surat Pembaca", Majalah *Tempo,* 10 Mei 2004.

[48] GMI adalah organisasi yang beranggotakan eks-CMB yang keluar dari Masyarakat Mahasiswa Bogor (MMB) sebab tidak setuju dengan keberadaan MMB yang masih melakukan perpeloncoan dalam penerimaan mahasiswa baru.

wan Wiradi menyebut Puncak, Bogor, meski ia sendiri tidak menghadirinya.

> "Saya *enggak* hadir. Karena saya sedang praktik dalam rangka sekolah. Saya hanya tahu itu ditandatanganinya di Puncak. Yang hadir sekitar 25 orang, dari Bogor 3 orang. Saya *sebetulnya* menyimpan semua arsip itu. Tetapi, waktu ada *rame-rame* itu, pembersihan dan saya sedang sakit. *Nah*, [oleh] saudara yang di rumah, karena takut *macem-macem*, semua *file* saya dibakar".[49]

Menurut penuturan Gunawan Wiradi, CGMI terbentuk pada tahun 1959 dari fusi empat organisasi: GMD (Djakarta), GMI (Bogor), CMB (Bandung), dan CMD (Djogjakarta). Tahun 1959 yang disebutnya agaknya kurang tepat jika membanding penuturan Hersri Setiawan dan Hardoyo. Nama terakhir adalah Ketua CGMI periode 1960-1963.[50]

Nama CGMI menurut Gunawan Wiradi adalah kesepakatan dari usulan masing-masing organisasi. CMB dan CMD menghendaki kata "Concentrasi" sementara GMD dan GMI menghendaki nama "Gerakan". Kompromi diperoleh dengan cara menggabungkan keduanya. Penggabungan nama ini menurut Gunawan Wiradi berasal dari usulnya bersama A. R. Gunardi dari CMB, ketika keduanya bertemu di asrama Ganesha.[51]

Wacana perlunya fusi ini menguat saat pelaksanaan KAA Mahasiswa. Keempat organisasi itu merasa sealiran: berdasar ideologi Pancasila.

> "Waktu ultah CGMI Bung Karno berpidato, 'Kelahiran CGMI adalah kemenangan integrasi mahasiswa Indonesia', karena ideologi Pancasila. Konsekuensi dari itu adalah kita membolehkan anggota rangkap. Saya anggota rangkap GMNI dan CGMI. *Pak* Sjam-

---

[49] Wawancara Moh. Shohibuddin, A. N. Luthfi, dan Eko Cahyono dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 9 Februari 2008.

[50] Wawancara Wimar Witoelar dengan Hardoyo dalam acara "Perpektif Baru" yang disiarkan secara *on air,* Maret 2000. Transkripsi kaset No. 1 TDK 90.

[51] Wawancara Noer Fauzi dan Ratna Saptari, Leiden, 16 Februari 2005. Jika yang disebut adalah Asrama Ganesha, kemungkinan pertemuan terjadi pada pelaksanaan KAA Mahasiswa yang berlangsung kurang dari setahun sebelumnya. *Ibid.*

> soeoed [Sadjad] merangkap HMI dan CGMI. Dulu tidak *dikotak-kotak*, baru tahun 1964 mulai ada pengkotakan". [52]

Dalam historiografi Indonesia, CGMI diidentikkan sebagai *onderbouw* PKI. Pewacanaan semacam itu bukan berarti tidak benar. Namun diperlukan memahami proses-proses dan keragaman[53] yang terjadi saat itu dan kepentingan di balik pewacanaannya oleh Orde Baru.

Hardoyo menjelaskan proses bagaimana CGMI mencantolkan diri pada PKI.

> "Saya Ketua Umum Pusat ketiga tahun '60-'63. Tapi di situ tahun yang sangat berat. Karena waktu itu dalam Demokrasi Terpimpin ada nasakomisasi. Pada tahun '64 CGMI ditantang, kalau CGMI tidak menyatakan 'Kom' [komunis], dalam dewan-dewan mahasiswa tidak boleh duduk sebagai dewan, karena dewan mahasiswa harus Nasakom, kata HMI dan sebagainya. Akhirnya CGMI *tanya* ke PKI, 'Bolehkah CGMI menyatakan dirinya Kom?'. [dijawab], '*Ya* nggak bisa, *wong* kamu Kom-nya siapa? *Wong* CGMI (ada) *macem-macem*. Akhirnya ada kompromi. Tahun '64 saya sudah tidak ketua umum lagi, diganti ketua umum yang baru. Di situ sistemnya menjadi Organisasi Mahasiswa Komunis dan Progresif non-Komunis. Kemudian tahun 1964 memang *sih* untuk CGMI bisa berkembang, memang harus terpaksa menerima mewakili Kom, padahal sebenarnya dalam CGMI yang disebut Kom itu mungkin anak-anaknya orang PKI yang *nggak* lebih dari 2%. Anggota CGMI tahun 1964 jumlahnya 18.000."[54]

---

[52] Wawancara Moh. Shohibuddin, A. N. Luthfi, dan Eko Cahyono dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 9 Februari 2008.

[53] Demikian halnya terjadi pada berbagai organisasi yang selama Orde Baru diidentikkan dengan PKI, terutama Gerwani dan Lekra. Runtutan logikanya adalah, meski pendasarannya sering tidak masuk akal bahkan tidak diperlukan dasar sama sekali dalam pewacanaan itu: komitmen kerakyatan-radikal-komunis-ateis-kriminal-pantas disingkirkan. Mengenai Gerwani dapat dibaca dalam Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*--terjemahan Hersri Setiawan (Jakarta: Garba Budaya, 1999); tentang keragaman Lekra ada dalam Keith Foulcher, *Social Commitment in Literature and Arts: The Indonesian "Institute of People Culture" 1950-1965* (Victoria: Monash University Press, 1986); dan Hilmar Farid, "Pramoedya dan Historiografi Indonesia", dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta dan Bali: YOI, KITLV, dan Pustaka Larasan, 2008), hal. 79-110.

[54] Wawancara Wimar Witoelar dengan Hardoyo, *op.cit.*

Sejak tahun 1961 di dalam tubuh CGMI sebenarnya telah ada perdebatan mengenai pilihan idelogisnya, apakah netral dalam pengertian "non blok" dengan tidak condong pada salah satu kekuatan dalam Perang Dingin ataukah menunjukkan dukungannya pada sosialisme. Politik nasakomisasi akhirnya menyelesaikan perdebatan itu.[55]

Kebijakan nasakomisasi berakibat bukan saja karena memudahkan rezim Orde Baru dalam melakukan identifikasi itu, namun pada tahun-tahun ketika kebijakan itu dilaksanakan, nasakomisasi membawa akibat yang bersifat konfliktual di berbagai ranah. Dalam hal pendidikan, misalnya, nasakomisasi di Taman Siswa Yogyakarta mengakibatkan terjadinya perpecahan di dalam kepengurusan.[56]

Keterlibatan Gunawan Wiradi dalam organisasi ini cukup mendalam meski ia tidak pernah sekalipun masuk dalam kepengurusan. Di Bogor yang aktif dalam organisasi ini di antaranya adalah Sadikin, Sjamso'oed Sadjad, Sutisno Hadi, Kartiko, Sadikin Jaya Pertjunda, Bambang Widodo, Mursaid, dan Suwardjo.[57] Namun ia cukup dikenal dalam organisasi ini melalui ketenarannya sebagai ketua senat mahasiswa. Bahkan menurut pengakuannya, ia pernah "nyaris" menjadi ketua CGMI jika saja tidak segera menolak karena ingin konsentrasi pada perkuliahan.

3. Kuliah dan bekerja

Berbagai aktivitas dalam gerakan mahasiswa itu membuatnya terlambat dalam menyelesaikan studi. Tetapi itu bukan satu-satunya sebab. Karena beasiswa dari pemerintah tidak cukup, maka ia terpaksa belajar sambil bekerja. Selama kurang lebih

[55] Wawancara Noer Fauzi dan Ratna Saptari, Leiden, 16 Februari 2005.

[56] Dapat dibaca dalam Ahmad Nashih Luthfi dan Amin Tohari, "Moch. Tauchid: Tokoh Pendiri Bangsa, Gerakan Tani, dan Pendidikan Taman Siswa", 2009, naskah dalam proses penerbitan.

[57] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 25 April 2008. Nama Sjamso'oed Sadjad kini terkenal sebagi ahli gizi yang aktif menulis di media massa, seorang profesor dari IPB.

lima tahun (1956-1961), ia mengajar di sebuah SMA swasta di Bogor, SMA Wisnu.

Di sekolah itu awalnya Gunawan Wiradi menggantikan seorang kawan yang sakit untuk mengajar bahasa Inggris. Selanjutnya ia diminta pihak sekolah mengajar beberapa bidang: aljabar, kimia, dan tata negara. Pernah dalam satu minggu ia mengajar sampai 36 jam hingga mengakibatkan ia sakit. Per jam mengajar ia digaji 3-5 rupiah, suatu jumlah yang lumayan bila dibandingkan harga kemeja yang saat itu Rp. 2,5. Beasiswa yang diterimanya dari pemerintah pada awalnya cukup besar, Rp. 250. Akan tetapi ketika mulai terjadi inflasi, harga-harga pun naik melebihi jumlah yang dapat ditanggungnya dari uang beasiswa. Maka ia memutuskan bekerja mengajar selain juga secara insidental menjadi buruh lepas di pabrik ban *Good Year*.[58]

Ketika masih mahasiswa, tahun 1961-1962, Gunawan Wiradi diminta oleh Staf Penguasa Perang Tertinggi (KOTI) untuk menjadi anggota Tim Penulis tentang Irian Barat. Buku yang ditulisnya kemudian terbit dengan judul *Mengenal sebagian dari Tanah Air Kita Irian Barat*. Buku ini berisi pengenalan tentang pertanian, peternakan, dan kehutanan. Bersama peta Irian Barat dan sebuah buku tentang pertambangan terbitan ITB, buku ini dimasukkan ke dalam sebuah tas untuk dibekalkan ke setiap prajurit TNI yang bertugas dalam misi "Pembebasan Irian Barat". Diharapkan melalui buku itu prajurit TNI dapat *survival* selama menjalankan tugas di medan perang. Atas kontribusinya ini Gunawan Wiradi mendapat anugerah Bintang Satya Lencana dari Presiden Soekarno, meskipun tanda penghargaan ini tidak sempat dilihat dan apalagi diterimanya sebab terlanjur terjadi pergantian rezim.

> "Atas jasa ini, saya mendapat radio transistor, tetapi saya jual untuk membeli cincin. Teman-teman penulis lain diberangkatkan ke Irian Barat, sebab 'menyogok' ke KOTI, membawa buah-buahan dan sebagainya. Sedangkan saya tidak. Saya menulis Irian tetapi tidak pernah ke sana, baru tahun 1995 bisa pergi ke Irian".[59]

---

[58] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 25 Juli 2008.
[59] *Ibid.*

D. Insinyur Pengkaji *Landreform*

Tahun 1963 Gunawan Wiradi tamat dari Fakultas Pertanian, tepat di tahun berdirinya IPB. Waktu itu aturan yang berlaku agar menjadi insinyur adalah diwajibkannya mahasiswa tingkat akhir menghasilkan minimal enam karya (skripsi), dengan kategori "mayor" dan "minor". Dua penelitian mayor Gunawan Wiradi adalah mengenai *marketing* minyak kelapa di Jawa Timur (studi lapangan) dan perdagangan dalam negeri (studi literatur). Sedangkan penelitian minornya adalah sosiologi pedesaan.

Sekalipun dari Jurusan Sosial Ekonomi, mahasiswa Fakultas Pertanian saat itu dituntut menulis skripsi bidang teknis. Dalam hal ini, Gunawan Wiradi mengambil topik "pemupukan rumput". Dua makalah yang bersifat elektif ditulisnya, yakni tentang Demografi dan Sistem Usaha Tani. Skripsinya di bidang sosiologi pedesaan mengambil lokasi penelitian di Ngandagan, sebuah desa di Purworejo, Jawa Tengah. Dalam skripsinya itu Gunawan Wiradi telah menunjukkan ketertarikannya pada *landreform.*

> "Sebenarnya itu tidak sengaja. Saya *mau ambil* Sosiologi, jadi *Pak* Sajogyo yang mengajar mengundi saja lokasi untuk latihan meneliti. Itu tidak untuk skripsi, *wong* itu mata kuliah usaha tani di tingkat 4. *Nah*, lokasinya di Ngandagan, judul penelitiannya, 'Perubahan Bentuk Usaha Tani, Dulu dan Sekarang'. Waktu *mau* menulis skripsi, *Pak* Sajogyo menyarankan untuk kembali ke Ngandagan".[60]

Di bawah bimbingan Dr. Ir. Sajogyo, skripsinya yang berjudul "*Land Reform* di Desa Jawa: Studi Kasus Tentang Peranan Lurah dalam Pengambilan Keputusan" ini mengulas tentang pelaksanaan *landreform* di tahun 1947 yang berasal dari inisiatif desa (bukan pemerintah pusat ataupun daerah); bagaimana proses pengambilan keputusan oleh lurah; dan "pertukaran kerja" yang diakibatkan oleh kebijakan *landreform* tersebut.

Kesimpulan utama skripsi Gunawan Wiradi adalah peran penting pemilik otoritas (*the role of authority*) dan peran kekayaan

[60] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 25 April 2008.

(*the role of property*) yang menjadi kunci dari keberhasilan *landreform*. *Landreform* sukses dijalankan dengan cara terpadu melalui dukungan lurah, Sumotirto, dan seorang petani kaya yang justru tanahnya menjadi sasaran obyek redistribusi, "*…the ex*-Congkok *Tirtosumo, wealthy though he was, supported the* Lurah*. He wanted to show to the people that he was willing to release part of his lands for the sake of the landless*". Namun demikian, bukan berarti kebijakan *landreform* tidak mendapatkan tantangan. "Martosudarno *was a relatively wealthy farmer. Though his position of opposing the* Lurah's *proposal may be motivated by his unwillingness of letting part of his lands to be substracted*".[61]

Pengalaman melakukan penelitian skripsi itu dikisahkan ulang oleh Gunawan Wiradi dengan mencatat beberapa hal yang dianggapnya memberi pemahaman bagaimana semestinya melakukan penelitian di masyarakat tani. Di antaranya adalah pemahaman pentingnya kepekaan dalam memilih tempat menginap, memahami ritme kerja petani dan kapan waktu yang tepat mewawancarai mereka, tidak mencatat di hadapan mereka. Lebih penting dari itu adalah pemahaman yang kemudian menjadi *icon* dari Gunawan Wiradi, yakni *landreform by leverage,* reforma agraria dengan cara didongkrak dari bawah hanya akan mungkin jika ada kepemimpinan yang kuat dan pengorganisasian yang rapi.

Saat itu, literatur amat terbatas, apalagi yang menyangkut masalah metode pengumpulan data. Hanya dengan bekal "rasa ingin tahu" (*curiosity*) yang kuat, Gunawan Wiradi melakukan improvisasi sendiri di lapangan.[62] Inilah pengalaman kedua yang mengawali ketertarikannya pada persoalan agraria, lebih mengerucut lagi pada isu *landreform*.

---

[61] Gunawan Wiradi, "Land Reform in a Javanese Village: Ngandagan", AES-RDS. Occational Paper, No. 4, 1981, (versi bahasa Inggris dari skripsi 1961), hal. 32.

[62] Mengenai masalah keterbatasan dan improvisasi ini lihat, Gunawan Wiradi, "Penelitian Empiris Mengenai 'Struktur Kekuasaan dalam Masyarakat Pedesaan: Belajar dari Pengalaman, *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin KRITIS*, No. 4, Tahun VII, UKSW, 1993.

Sebagai petanda yang baik, pentradisian ilmu pengetahuan dapat dilihat dari bagaimana ia berhasil diakumulasikan, lokasi dan temuannya menjadi situs yang dikunjungi dan ditelaah ulang guna menguji dan melihat kembali persistensi dan perubahannya. Hasil skripsi Gunawan Wiradi agaknya tepat dalam penyebutan itu. Setidaknya ada dua studi yang dilakukan berangkat dari temuannya.

Pertama, penelitian Tim Sejarah di PSPK UGM tahun 1981-1982 yang diketuai oleh Dr. Loekman Soetrisno dengan judul "Purworejo: Ngandagan Revisited". Penelitian menunjukkan tentang efektivitas penguasaan tanah meski dalam ukuran kecil dalam meningkatkan produksi pertanian. Penelitian menyebut persoalan kepincangan penguasaan tanah dan perlunya dilakukan *landreform*. Meski perlu dilakukan, "namun berbagai upaya kebijaksanaan pertanian yang sudah dijalankan yaitu program intensifikasi dan perbaikan irigasi cukup banyak membantu meningkatkan produksi".[63] Proyek padat karya menjadi saran dalam riset ini, suatu preferensi yang tepat dalam konteks pembangunan pertanian Orde baru.

Kedua, penelitian berjudul "Kepemimpinan dan Masalah Pertanahan di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Nampu dan Desa Ngandagan" oleh Bambang Purwanto.[64] Penelitian sejarah yang diselesaikan tahun 1984 ini membandingkan dua desa, Nampu dan Ngandagan, pada tahun 1946-1963. Kedua desa mengalami proses dan menunjukkan respon yang berbeda menghadapi tekanan, baik secara internal maupun eksternal: penduduk, ekonomi uang, dan teknologi. Desa pertama memberi gambaran tentang terjadinya alih kepemilikan tanah yang jatuh ke tangan

[63] Ringkasan riset yang masih berjalan saat itu dapat dibaca dalam Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty untuk PSPK), 1990.

[64] Penelitian yang semula berasal dari skripsi Sejarah di UGM ini diterbitkan dalam Bambang Purwanto, *Kepemimpinan dan Masalah Pertanahan di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Nampu dan Desa Ngandagan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal kebudayaan, Proyek penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1985).

penduduk luar, sementara desa kedua justru sebaliknya, redistribusi kepada penduduk dalam desa tersebut.

Metode *revisiting* atau juga membanding lokasi riset yang sama dalam periode berbeda jarang dijumpai. Hal demikian menjadi petanda baik bagi pelembagaan gagasan dan pengakumulasian pengetahuan.

E. Menjadi Dosen Institut Pertanian Bogor

Dengan berdirinya IPB yang terpisah dari UI pada tahun 1963, maka berdiri pula Fakultas Peternakan. Di fakultas ini sedang dibutuhkan "ahli rumput". Karena memperoleh beasiswa "Ikatan Dinas" yang mensyaratkan bersedia ditempatkan di mana saja, Gunawan Wiradi tanpa bisa menolak dicomot ke Fakultas Peternakan menjadi dosen *forage crops*, walaupun ini bukan minatnya.

Di Fakultas Peternakan, Gunawan Wiradi mengenal baik Taufik Ismail, seorang dosen yang mempunyai talenta dalam bahasa Inggris dan kepenyairan. "Dia semula adalah sahabat saya. Dia pintar bahasa Inggris dan sewaktu di SMA sudah ke Amerika. Dia dua tahun di bawah saya. Kalau saya pidato bahasa Inggris, dia MC-nya".[65]

Sebagai mantan aktivis, Gunawan Wiradi selama menjadi dosen Fakultas Peternakan banyak melakukan kegiatan pengorganisasian. Oleh dekan saat itu, Prof. Dr. J.H. Hutasoit, ia diserahi tugas sebagai panitia pengadaan perumahan dinas. Ketika terjadi masalah berebut mobil dinas, maka ia diserahi tugas sebagai kepala *pool*. Uniknya, sampai dengan berakhir menjadi dosen di fakultas itu, Gunawan Wiradi justru tidak pernah mendapatkan rumah apalagi mobil dinas.

Dalam periode ini, Gunawan Wiradi pernah melakukan uji coba pengembangan *mixed farming* yang digagas oleh Prof. Tergast. Tahun 1963 ini, IPB lahir bersamaan dengan lahirnya

[65] Wawancara Moh. Shohibuddin, A. N. Luthfi, dan Eko Cahyono dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 9 Februari 2008.

BNI 1946 cabang Bogor. Kebetulan direktur yang ditunjuk adalah temannya sewaktu SMA. Lalu disepakati adanya kerjasama antara IPB dan BNI 1946 di mana pihak IPB diminta mengajukan proposal proyek untuk mendapatkan kredit. Lebih dari 40 proposal yang masuk. Dari sejumlah itu 22 proposal disetujui, salah satunya adalah yang diajukannya. Belum genap setahun, kebanyakan dari 22 proposal proyek yang disetujui bangkrut dan hanya tersisa 4, termasuk yang dikelola oleh Gunawan Wiradi.

Proyek yang dikelola Gunawan Wiradi ini berusaha menerapkan dan memodifikasi teori Ir. Tergast tentang sistem usaha tani *mixed farming*.[66] Dalam teori asalnya, *mixed farming* ini dijalankan oleh satu keluarga terdiri atas 7 orang (suami-istri dan lima anak) yang mengelola 5 ha tanah dan 5 satuan ternak. Namun dengan mengingat ketentuan batas maksimum pemilikan tanah pertanian dalam UU No. 56/1960 (dalam rangka *landreform*), Gunawan Wiradi melakukan modifikasi atas teori ini.

Seorang pegawai di fakultasnya yang bersedia menjadi pelopor *mixed farming* ini dipilih. Gajinya sebagai pegawai dihentikan sementara, tetapi ia diberi modal untuk mengelola 2 hektar (bukan 5) tanah milik fakultas dan 3 satuan (bukan 5) ternak, yaitu satu sapi, tujuh ekor kambing dan 25 ekor unggas. Tanah 2 ha itu dibagi menjadi: 1 ha untuk tanaman rumput-rumputan makanan ternak; 0,5 ha untuk sawah; 0,25 ha untuk rumah, kandang kambing dan kandang unggas, dan sisanya untuk tanaman palawija. Gunawan Wiradi ingin melihat apakah 2 ha dalam batas minimum UUPA dengan tanggungan 7 anggota keluarga itu bisa mencukupi ataukah tidak. Hasilnya adalah, untuk tanah sesubur Jawa Barat bagi satuan keluarga sebesar 7 orang dengan 4 orang di antaranya adalah usia-kerja, tanah 2 ha itu ternyata lebih dari cukup menopang kesejahteraan keluarga.

[66] Sebenarnya ada beberapa model dalam sistem usaha tani yang diajukan Tergas, namun Gunawan Wiradi hanya memilih salah satu di antaranya. Lihat, G. C. W. Tergas, "Vergrooting van de Indonesische Landbouw in het Bijzonder op Java en Madura", *Landbouw,* tahun ke-22, 1950. Ringkasannya dapat dibaca dalam, Moch Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: Pewarta, 2009), hal. 356-370.

Buktinya, belum sampai 2 tahun (dari masa kredit yang rencananya ditentukan 4 tahun), Gunawan Wiradi dan timnya sudah bisa mengembalikan pinjamannya ke bank.[67]

F. Prahara Politik 1965

Minat Gunawan Wiradi dalam melakukan studi politik pertanian dan sosiologi pedesaan dengan sendirinya terbengkalai setelah Gunawan Wiradi dicomot sebagai "dosen rumput" di Fakultas Peternakan. Namun walau belum sempat mendalami lebih lanjut minat studinya itu, Gunawan Wiradi secara praktis telah melakukan eksperimen usaha tani sebagaimana uraian di atas. Kegiatan ini justru menyita waktu melebihi tugasnya mengajar di kelas.

Memang saat itu Gunawan Wiradi memperoleh kesempatan untuk mengambil studi lanjut di Amerika (dalam urusan rumput). Semua persyaratan telah berhasil dipenuhi, namun kesempatan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Prahara politik 1965 tidak hanya menggagalkan keberangkatan Gunawan Wiradi, namun benar-benar telah mengubah jalan hidupnya. Ia tersingkir dari IPB. Karir akademiknya secara formal di IPB berakhir tanpa dia merasa berbuat dosa apa-apa, kecuali bahwa dia memang menempatkan diri di barisan nasionalis pendukung Bung Karno. Aktivitasnya selama mahasiswa turut dipersoalkan.

Bagaimana peristiwa itu menurut pandangan Gunawan Wiradi dan apa akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupannya? uraian berikut menjelaskannya.

Upaya nasakomisasi mengalami puncak pada bulan Januari-Februari 1965. Pada bulan Mei 1965, Partai Komunis Indonesia merayakan ulang tahunnya. Di Jakarta, menurut kesaksian Wiradi, jalanan "berwarna merah", sehingga menakutkan pihak lawan. Meski demikian, menurutnya, tidak menimbulkan ke-

[67] Wawancara Moh. Shohibuddin, A. N. Luthfi, dan Eko Cahyono dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 9 Februari 2008.

kerasan, sehingga semboyan yang dikenal saat itu adalah "bukan dor-doran, tapi jor-joran manipolis".

Akhir bulan September kekuatan kiri semakin terlihat menunjukkan kekuatannya. Pada tanggal 27 hingga 30 September 1965 terdapat serangkaian pertemuan di Senayan Jakarta. Tanggal 27 berlangsung Musyawarah Besar Teknik (Mubestek) yang dihadiri para insinyur di kalangan militer, kampus, seni, dan sebagainya. Dua hari sesudahnya, 28-29 September diadakan pertemuan CGMI. Gunawan Wiradi tidak sempat menghadirinya sebab sedang sakit bisul di pantatnya. Namun ketika ada kawan yang mendatanginya, ia sempat memberinya uang saku perjalanan. Seingatnya, ia memberi kawannya itu Rp. 15.000.

Dalam pertemuan itu berbagai pihak berpidato, termasuk Presiden Soekarno dalam membuka acara Mubestek. Ketika berdiri di atas podium, Presiden Soekarno melihat spanduk dengan tulisan tertentu. Setelah diamatinya, teks itu ternyata mengutip wejangan Kresna kepada Arjuna dalam perang Bratayudha. Teks itu berbunyi "Karmane Vadikaraste Mapalasu Kadaζana", yang artinya "Laksanakan tugasmu jangan menghitung untung rugi". Melihat ada tulisan yang salah, Presiden Soekarno mengoreksi dan menjelaskan apa maksudnya.

> "Oleh Orde Baru, teks dan penjelasan Bung Karno ini dituduh sebagai sandi untuk memerintahkan pembunuhan para jenderal. Padahal itu, dia *ngoreksi* spanduk. Itu ada masuk televisi *kok.* Saya ingat *betul*.".[68]

Pada tanggal 1 Oktober, Gunawan Wiradi sedang bermain kartu *bridge* bersama klub *Berlian*-nya. Ketika didengarnya pengumuman dari Umar Dhani yang memberi dukungan terhadap aksi dini hari itu, klub ini terus saja bermain. Mereka tidak tahu menahu dengan peristiwa itu, meski terus memendam tanya ada masalah apa di Jakarta. Sore harinya ia mendengar berbagai berita yang simpang siur. Malam harinya ia diajak seorang sepupu eks-CPM untuk mencari informasi di Jakarta. Sepupunya ini

[68] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 18 Juli 2008; Yogyakarta, 10 Agustus 2009.

pernah menjadi pengawal Jenderal Sudirman, sehingga masih mempunyai banyak kenalan di militer dan markas-markas partai. Di Jakarta, Gunawan Wiradi tidak menemukan hal yang menarik perhatiannya, sebab ia segera pulang ke Bogor karena menahan sakit ambiennya.

Di Bogor, ia segera masuk rumah sakit guna menjalani operasi ambien. Sebagai dosen, pengobatannya dibiayai oleh kampus. Di rumah sakit itulah ia sempat membaca koran yang menjelaskan bahwa "keluarga Kolonel Katamso dicincang lumat". Ia langsung bisa memprediksi bahwa kejadian ini tentu mempunyai efek besar. Namun ia bisa menangkap adanya kejanggalan dalam pemberitaan itu. Seorang kawan yang menjenguknya kebetulan adalah keponakan Nyonya Katamso, menjelaskan bahwa benar Kolonel Katamso ditembak, namun istri dan anak-anaknya selamat.[69] Ia mulai menyadari adanya fitnah-memfitnah yang luar biasa beredar di luar.

Setelah ia bisa keluar dari rumah sakit yang memakan waktu cukup lama, 3 bulan ditambah dengan perawatan di rumah, Gunawan Wiradi kembali lagi ke kampus. Ternyata keberadaannya di kampus menuai banyak kecaman. Ia tidak terbebas dari fitnah-memfitnah yang tanpa dasar. Seseorang yang semula dikenal sebagai sahabat memfitnahnya, dengan mengatakan bahwa orang yang dulu menghasut sehingga mengakibatkan ia terusir dari fakultas adalah Gunawan Wiradi.[70] Setelah empat bulan mengalami masa penuh huru-hara di kampus, tepatnya pada Maret 1966, ia bersama kesepuluh dosen lainnya termasuk sang rektor, dikeluarkan dari IPB. Surat pengeluaran yang ditujukan kepadanya berbunyi, "dibebaskan untuk sementara dari kewajiban dan aktivitas".[71]

---

[69] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Yogyakarta, *ibid.*

[70] Wawancara Moh. Shohibuddin, A. N. Luthfi, dan Eko Cahyono dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 9 Februari 2008.

[71] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 21 April 2008.

Dari kesebelas orang yang dikeluarkan, tujuh di antaranya segera direhabilitasi dengan berbagai alasan dan koneksi.[72] Tinggal 4 orang yang masih tersisa: Sulaiman Krishnandi, Hendro Suwarno, Sjamsoe'oed Sadjad, dan Gunawan Wiradi. Sulaiman Krishnandi yang kemudian terkenal sebagai penerjemah[73] segera pergi dan bekerja di kedutaan Australia. Hendro Suwarno meski pernah menjadi anggota aktif CGMI namun bisa selamat. Tidak begitu jelas bagaimana caranya. Tinggal dua orang yang dianggap berat. Namun Sjamso'oed Sadjad meski pernah menjabat pengurus CGMI Bogor selama 3 periode berturut-turut, ia bisa selamat. Ia pergi melanjutkan studinya ke Amerika. Di sanalah ia bertemu dengan Dr. Ir. Akhmat Satari yang kemudian menjadi Rektor IPB dan berhasil menariknya kembali ke kampus tersebut.[74] Maka, tinggallah Gunawan Wiradi sendiri.

Goncangan jiwa jelas tidak terhindarkan. Bahkan lebih dari itu, dalam suasana ketika fitnah-memfitnah merajalela itulah, pacar keduanya meninggalkannya karena terlarut oleh provokasi. Sejak itu Gunawan Wiradi mengambil keputusan untuk hidup melajang. Tentu saja ini keputusan yang sangat sulit. Sebab, Gunawan Wiradi semula bukanlah orang yang bisa hidup tanpa "dikelilingi perempuan". Selama mahasiswa ia terlibat beberapa kali percintaan yang berujung pada pilihan pacar yang menyertainya sampai ia lulus dan menjadi dosen. Namun prahara 1965 membuat hubungan mereka berakhir.

Depresi mental tidak dapat terhindarkan. Untunglah, petuah pamannya di masa kanak-kanak tetap menyertai dan mampu membentengi sikapnya, "jangan menangis dalam keadaan apapun!".

---

[72] Kesebelas nama dan keterangannya telah disebutkan dalam Bab V sebelumnya.

[73] Misalnya, menyunting buku *Involusi Pertanian*-nya Geertz dan menerjemah beberapa buku karya A.T. Mosher.

[74] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 21 April 2008.

G. Masa Penuh Petualangan

Meski telah keluar dari IPB, statusnya sebagai dosen tidaklah benar-benar terputus. Ia masih menerima "gaji buta" sampai dengan tahun 1972. Hal ini semakin menunjukkan tidak jelasnya tuduhan yang disangkakan kepadanya. Ia tidak pernah secara resmi dipecat, diadili, divonis, oleh kampus ataupun oleh lembaga pengadilan. Yang jelas, ia tersingkir.

Memasuki tahun 1972, sekitar 7 tahun dari "didiamkannya" ia oleh pihak kampus, datang surat resmi dari rektor Prof. Dr. Ir. Akhmat Satari yang menyatakan bahwa ia "diberhentikan dengan hormat sebagai dosen dan dinaikkan pangkatnya". Suatu pernyataan yang baginya sangat aneh. Sementara kawannya, Sjamsoe'oed Sadjad, pada tahun ini justru direhabilitasi.[75]

Mulailah Gunawan Wiradi mengarungi perjalanan hidup yang penuh petualangan yang harus ditempuhnya di luar bidang akademis. Ia mendaftar ke banyak perusahaan. Pengalamannya sebagai dosen cukup menyulitkan orang lain dan pihak perusahaan untuk bersikap terhadap dirinya, misalnya menyangkut gaji dan jenis pekerjaan. Padahal ia bertekad mau melakukan pekerjaan apapun.

Melalui bantuan salah satu sepupunya, Gunawan Wiradi kemudian dapat bekerja sebagai staf di PT. Sumber Selatan (1967-1969). Di sinilah pertama kali ia terkena tipu! Penipunya masuk penjara, tapi uangnya tidak kembali. Dari pengalaman inilah pernah terpikir dalam benaknya bahwa dunia bisnis itu adalah persoalan "ditipu atau menipu". Setelah itu, ia sempat menjadi Wakil Direktur PT. Sumber Sejahtera, Jakarta (1969-1970), dan bekerja di perkebunan karet PT. Lebah Kencana di Sumedang (1970-1972).

Tahun 1969-1971, Gunawan Wiradi bersama sejumlah orang yang masih bersedia mengaku teman, menangani Proyek Pakis Baru, yaitu suatu proyek pertanian sebagai penunjang dibangunnya jalan pintas dari Kismantoro ke Pacitan. Sementara

---

[75] *Ibid.*

proyek pembuatan jalannya dipegang oleh Angkatan Darat yang mempekerjakan para tapol golongan C. Jalan itu melintasi desa Pakis di puncak gunung bekas tempat persembunyian alm. Jenderal Sudirman semasa perang gerilya.

Kelima anggota tim, kecuali pamannya sebagai ketua, adalah "orang-orang yang dirumahkan". Meski demikian, dalam proyek tersebut Gunawan Wiradi mengantongi keterangan sebagai anggota KOKAR (Komando Karyawan Angkatan Darat) atas jaminan sepupunya. KOKAR adalah 1 dari Kelompok Induk Organisasi (KINO) dari Golkar. Lainnya adalah MKGR, Kosgoro, dan KASI. Di sinilah Gunawan Wiradi pernah dibujuk menjadi juru kampanye Golkar dan ia menolaknya.

Ia bersama 5 anggota tim lainnya bertugas merumuskan pengembangan pertanian. Mengingat lokasi proyeknya di pegunungan, maka diusulkan usaha tanaman keras. Proposal senilai Rp 150 juta yang diajukan ke PT. Kembang Mas diterima. Proyek penanamannya dengan membeli langsung bibit cengkeh dari Cibinong dan bibit kelapa dari Beji Jawa Tengah. Bibit-bibit yang ditanam ini dapat tumbuh dengan baik. Meski demikian, anggaran itu dikorupsi oleh Angkatan Darat.[76]

H. Menempuh Jalan Sunyi

Pada tahun 1972 itu pula paman Gunawan Wiradi, pendidik di masa kecilnya, pulang ke tanah air setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar di Swedia. Ia adalah alm. Soewito Kusumowidagdo, Mantan Deputi Menlu di zaman Bung Karno. Pamannya itu marah melihat Gunawan Wiradi berpetualang. "Engkau harus kembali ke dunia intelektual! Caranya? Belum tahu! Nanti pasti ada jalan!".[77]

Gunawan Wiradi lalu "dikurung" dalam perpustakaan pamannya, untuk membaca buku apa saja yang ia minati. Sang paman pernah berkata,

---

[76] *Ibid.*
[77] Endang Suhendar, *op.cit.*

> "Ketika orang-orang memalingkan muka saat bertemu kamu, ketika ada sahabatmu yang pura-pura tidak kenal dengan kamu karena takut akan terkena imbasnya, janganlah engkau benci mereka. Jangan dendam terhadap mereka. Ketahuilah, bukan kamu yang menjadi korban politik, melainkan justru mereka. Mereka yang meludahi kamu itulah yang justru merupakan korban politik, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat!"[78]

Di tahun 1972 itu pula terjadi titik balik perjalanan hidup Gunawan Wiradi. Saat itulah datang uluran tangan dari Prof. Dr. Ir. Sajogyo, seseorang yang sangat dihormatinya dan diakuinya sebagai teman, guru, dan bapak. Keduanya kembali bertemu. Beliau merekrut Gunawan Wiradi sebagai peneliti lapangan dalam Proyek Survey Agro Ekonomi (SAE).

Mengenai SAE, patut disinggung ulang. Lembaga ini didirikan pada tahun 1964 di bawah naungan Departemen Pertanian yang semula berstatus proyek jangka panjang. Inisiatif pendiriannya berasal dari Menteri Kompartemen (Menko) Pertanian dan Agraria, Sadjarwo, S.H. Ia merasa tidak puas dengan hasil Sensus Pertanian 1963 yang tidak memasukkan pemilik tanah kurang dari 1000 m^2 sebagai petani. Adanya realitas petani gurem tidak terbaca dalam sensus tersebut. Maka dirintislah pendirian SAE yang bertujuan melakukan penelitian tingkat mikro. Diharapkan hasilnya dapat menjadi "penyeimbang" data makro dari BPS. Sejak awal, lembaga ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Sajogyo sampai awal tahun 1973 ketika pimpinan kemudian diserahkan kepada alm. Dr. Ir. A.T. Birowo.

Pada tahun 1968, dalam rangka Revolusi Hijau (RH) SAE melaksanakan penelitian jangka panjang (5 tahun) mengenai Intensifikasi Padi Sawah (IPS). Penelitiannya terutama dengan metode survey di 37 desa sampel penghasil padi (20 di Jawa dan 17 di luar Jawa). Gunawan Wiradi bergabung dengan SAE pada tahun 1972, ketika proyek IPS ini menjelang berakhir. Di sinilah ia menemukan gejala yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu terjadinya perubahan kelembagaan tradisional di pedesaan

[78] *Ibid.*

(misalnya: sistem panen, pemasaran hasil, dan lainnya) sebagai akibat Revolusi Hijau.

Di bidang penelitian dalam arti yang sesungguhnya, sekalipun umurnya sudah 40 tahun saat pertama kali terlibat di SAE, Gunawan Wiradi merasa masih sangat "hijau". Namun ia tidak malu untuk belajar dari siapa saja, dan dengan tekun melaksanakan tugasnya. Seiring bergulirnya waktu, datang dorongan dari berbagai sahabat yang ditemuinya di lembaga SAE ini, antara lain Dr. A.T. Birowo, Dr. Rudolf Sinaga, dan Drs. Sediono M.P. Tjondronegoro. Mereka ini adalah orang-orang yang dengan caranya masing-masing memberikan semangat, membesarkan hatinya agar terbebas dari depresi mental. Seorang dari Amerika, Dr. William Collier yang saat itu bekerja sebagai konsultan SAE, turut berjasa dalam mendorongnya untuk dapat sekolah ke luar negeri. Di kalangan yunior saat itu, Dr. H.S. Dillon adalah teman baru yang kemudian menjadi sahabat karib. Sementara Dr. Benjamin White dianggapnya sebagai sahabat abadi yang juga telah berbuat banyak bagi kehidupannya.[79]

1. Sistem tebasan dan ancaman keresahan sosial: Kritik terhadap Revolusi Hijau

Selang beberapa bulan bekerja di SAE, tulisan Gunawan Wiradi dalam bahasa Inggris bersama Bill Collier, Soentoro, dan Makali tentang sistem tebasan, membawa namanya ke khalayak ilmuwan agraria internasional. Tulisan itu berjudul "Hyv's Tebasan and Rural Change: An Example in Java" (1973). Sistem tebasan mengakibatkan tersingkirnya tenaga kerja buruh tani. Temuan ini "membuat heboh" saat itu dalam menunjukkan dampak negatif Revolusi Hijau.

> "Hasil penelitian IPS menunjukkan adanya kesenjangan meningkat, buruh wanita tersingkir lalu ada sistem tebasan. *Nah*, saya terkenalnya *kan* [karena mempublikasikan hasil penelitian] ini. Saya masuk sebenarnya sudah tahun kelima. Jadi fasenya tiap setengah

[79] Endang Suhendar, *Ibid.,* dan wawancara dengan Gunawan Wiradi, 18 Juli 2008.

> tahun penelitian. *Nah*, kuesioner yang telah disusun itu tebal sekali, rinci, ini *kan* ciri khas *Pak* Sajogyo, bisa sampai 4 jam wawancara satu responden. Dalam kuesioner ada info-info standar tentang pupuk dan lain-lain. Lalu ada tema dampak sosial yang ditulis oleh *Pak* Sajogyo dan *Pak* Tjondro. Tema ketika saya masuk adalah berapa persen hasil yang dijual dan berapa yang dimakan sendiri. Begitu saya masuk penelitian di desa Wanarata, Pemalang, saya temukan tentang tebasan itu. Lalu saya *explore* tentang tebasan itu, sebab-sebabnya, dan lain-lain, maka dianggap temuan tentang tebasan itu. Tetapi oleh orang Barat, sistem tebasan dianggap temuan Collier. Ketika saya lacak di hasil penelitian IPS, kok tidak ada yang pernah menemukan sistem tebasan."

Temuan Gunawan Wiradi tentang sistem tebasan itu oleh Collier kemudian diminta untuk ditulis secara detail. Dari sini ditulis ulang ke dalam bahasa Inggris oleh Collier dan diberi judul "Hyv's Tebasan and Rural Change: An Example in Java". Tulisan ini dikembangkan menjadi tulisan lain dalam konteks ketenagakerjaan dan ancaman ketegangan sosial jika tidak ditemukan alternatif sumber pendapatan lain. Dalam penutup artikel disebutkan:

> *"The question is what happens to the landless rural labourers on Java if these innovations spread along with the adoption of HYV…… If the itinerant harvesters and landless or very poor village members cannot find alternative sources of income, it can he expected that social tensions will increase. Programs to deal with this problem are essential".*[80]

Temuan itu terus bergulir baik di dalam maupun di luar negeri melalui publikasi di majalah *Prisma,* "Sistem Tebasan Bibit Unggul, dan Pembaharuan Desa di Jawa" dan tulisan yang sama dimuat dalam buku *Reading in farm Management*.[81]

---

[80] W.L. Collier, Gunawan Wiradi, dan Soentoro, "Recent Changes in Rice Harvesting Methods" *Buletin of Indonesian of Indonesian Economic Studies* (*BIES*), Vol. IX, No. 2, July, 1973, hal. 45.

[81] W.L Collier, Soentoro, Gunawan Wiradi, dan Makali, "Sistem Tebasan Bibit Unggul, dan Pembaharuan Desa di Jawa" dalam *Prisma*, No. 6, 1974, dan tulisan di *BIES* itu dimuat kembali dalam Tan Bock Thiam dan Shao er Ong (Eds.), *Reading in Farm Management* (Singapore: Singaore University Press, 1979).

Beberapa riset Gunawan Wiradi kemudian memberi perhatian pada sistem panen dan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan Revolusi Hijau. Atas temuan-temuannya, ia dikategorikan ke dalam kelompok yang berparadigma populis (*populist paradigm*). Secara ringkas isi tulisan-tulisan mereka memiliki sejumlah proposisi yang di antaranya adalah (a) pengaruh gabungan antara tekanan jumlah penduduk dan teknologi yang dibawa oleh Revolusi Hijau (RH) telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam pranata-pranata tradisional di pedesaan Jawa, salah satu di antaranya adalah perubahan "tata-cara panen"; (b) perubahan tata-cara panen merupakan indikasi melemahnya gejala *sharing of poverty* yang diyakini oleh Geertz; (c) teknologi RH menyebabkan terjadinya proses *kesenjangan* baik dalam hal penguasaan aset, khususnya *tanah*, maupun dalam hal *pendapatan*.[82]

2. Studi dinamika pedesaan: Merintis studi *tenurial*

Tugas utama yang dibebankan kepada Gunawan Wiradi sepanjang tahun 1974 adalah mempersiapkan berdirinya Studi Dinamika Pedesaan (SDP). Studi ini bertujuan mempelajari dinamika perubahan pedesaan yang mewakili kondisi yang berbeda-beda baik dari segi geografi, topografi, maupun ekologi. SDP merupakan unit khusus dalam SAE. Di unit lembaga ini Gunawan Wiradi menjadi sekretaris dan sebagai ketuanya adalah Dr. Rudolf Sinaga.

SDP lahir dari rapat kecil di IPB tahun 1974 yang dihadiri sekitar 8 orang. Sebagian besar orang asing dan ada beberapa nama sosiolog Indonesia yang telah terkenal, Selo Soemardjan, Mely G. Tan, dan tentu saja, Sajogyo. Dipilihlah nama Dinamika Pedesaan. Uniknya, istilah ini justru dipinjam dari disiplin mekanika. Diasumsikan bahwa desa mengalami dinamika hasil dari

[82] Penilaian Jonathan Pincus dalam *Class, Power and Agrarian Change* (New York: St. Martin Press Inc, 1996) yang dikutip dari Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria* (Bogor: Sajogyo Institute dan IPB, 2009), hal. 132.

tarikan berbagai kekuatan. Konteksnya saat itu tentu saja adalah perubahan yang diakibatkan oleh penerapan Revolusi Hijau. Istilah itu lalu dikonseptualisasi dalam ilmu sosial. Tampak nyata bagaimana masih miskinnya konsep-konsep dalam ilmu sosial saat itu, sehingga memerlukan bantuan dari ilmu alam.

Perhatian utama SDP saat itu ada 3 hal: sistem pertanian (padi sawah, palawija, surjan); pendapatan dan kesempatan kerja; dan kelembagaan. Tiga tema besar ini dipayungi dalam *eight centre questions*. Lalu seminar besar-besaran di Bandung hingga berlangsung 17 kali seminar berperan dalam mema-tangkan konsep itu. Dalam perumusan ini yang sangat penting andilnya adalah Prof. Sajogyo, William Collier, dan seorang lagi dari *Ford Foundation*. Saat itu ada tiga pilihan lokasi penelitian: daerah sepanjang Sungai Cimanuk, Sungai Srayu, dan Sungai Brantas. Atas ide Prof. Sajogyo, dipilihlah DAS Cimanuk. Selain karena terbatasnya dana, idenya adalah DAS Cimanuk melewati daerah-daerah dengan ketinggian yang cukup tinggi hingga dataran rendah, Garut, Majalengka, Cirebon, dan Indramayu, sehingga cukup mewakili keragaman ekologisnya.[83]

Agar dapat memilih desa-desa yang akan dijadikan sampel penelitian yang representatif mewakili seluruh wilayah DAS Cimanuk dari hulu sampai hilir, pertama-tama dilakukan "sensus desa" yang mencakup 795 desa. Dipilihnya metode survei sekali lagi sebab SAE berpengalaman dengan metode ini dan konsultan asing sedang giat-giatnya dengan metode survei.

Sebanyak 1047 variabel pertanyaan disusun. Dibutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan kuesioner itu. Sensus dijalankan selama 3 bulan (90 hari), dan hanya sekitar 45 desa yang berhasil diwawancarai. Dari 45 desa ini dipilih 20 desa sebagai prioritas untuk didatangi secara rutin setiap bulan. Namun rencana ini tidak terealisir sempurna. Hanya 6 desa yang secara intens dikunjungi, yakni desa Ciwangi dan Siambit di Garut; Gunungwangi di Majalengka; Wargabinangun di Cirebon; dan Lanjan di Indramayu. Gunawan Wiradi tidak berhasil mengikuti

[83] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 25 April 2008.

semua proses penelitian ini sebab ia harus pergi ke Malaysia untuk melanjutkan studinya.

Tentang aspek *land tenure* (penguasaan tanah), lembaga ini mulai mencoba menggarapnya. Dalam tradisi yang dikembangkan oleh SDP, peneliti akan dituntut untuk menentukan variabel manakah yang *reliable* dan manakah yang tidak. Saat itu masalah tanah ditanyakan pula dalam survei DAS Cimanuk. Akan tetapi hasilnya dianggap *less reliable*, sehingga tidak dilanjutkan untuk dianalisa. Data yang diperoleh kemudian di-*drop*, sebab jawaban-jawaban yang tersaji di dalamnya dinilai meragukan. Responden takut menjawab secara jujur ketika ditanya masalah penguasaan tanah. Agaknya, hampir sepuluh tahun dari huru-hara yang terjadi di pedesaan Jawa yang dilakukan oleh negara ataupun konflik yang terjadi secara horizontal, masih menyisakan kesan traumatik.

Keberangkatan Gunawan Wiradi untuk studi di Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1975 (3 tahun setelah bekerja di SAE) dibiayai oleh *fellowship* A/D/C. Pada masa Gunawan Wiradi belajar di USM itu, kondisi, sistem, ataupun suasana pendidikan di kampus USM mempunyai warna yang khusus, yang mungkin sekarang sudah berbeda. Paling tidak ada tiga ciri yang layak disebut.[84]

Pertama, salah satu fakultas (yang di sana disebut "School") di USM saat itu adalah "School of Comparative Social Sciences". Gunawan Wiradi mengambil program pasca sarjana di bagian ini. Di samping kuliah-kuliah biasa, sebagian besar kuliah disampaikan dalam bentuk diskusi yang dihadiri oleh beberapa dosen yang disiplin ilmunya berbeda-beda. Tema yang sama dianalisis menurut perspektif yang berbeda oleh dosen yang berbeda pula sesuai disiplin ilmunya (sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan psikologi sosial). Kemudian para dosen itu berdebat, dan mahasiswa mendengarkan. Barulah sesudah itu mahasiswa diberi

[84] Untuk kepentingan penerbitan (Gunawan Wiradi, 2009, *op.cit.*) keterangan tentang hal ini ditambahkan secara tertulis langsung olehnya.

kesempatan bertanya. Itulah ciri "komparatif" sesuai nama fakultas tersebut, dan itulah format perkuliahan program pasca sarjana.

Kedua, ciri komparatif itu juga dicerminkan oleh beragamnya dosen dari berbagai bangsa. Dosen-dosen Gunawan Wiradi terdiri dari 3 orang Amerika, 2 orang India, 2 orang Belanda, 1 orang Pakistan, 1 orang Jepang, 1 orang Prancis, dan 1 orang Guyana. Dengan demikian, suasana di kampus USM saat itu mirip "East-West Center" di Honolulu, Hawaii. Bukan hanya dosen, tetapi juga mahasiswanya berasal dari berbagai negara. Meski tidak banyak, ada juga mahasiswa dari Inggris, Australia, Thailand, Indonesia dan India.

Ketiga, barangkali ini ciri yang penting. Untuk mengambil program pasca sarjana, mahasiswa diberi tiga pilihan: (1) atas dasar *course work* saja, (2) atas dasar penelitian saja, atau (3) atas dasar dua-duanya. Gunawan Wiradi mengambil pilihan ketiga, yaitu di samping mengikuti kuliah, sekaligus membuat tesis atas dasar penelitian.

Gunawan Wiradi merasa beruntung memperoleh pembimbing Prof. Dr. Howard Beers dari Amerika (Ketua), Prof. Dr. Paul Kaplan dari Amerika, Dr. Kumbat dari India, dan Prof. Dr. Otomi Hutheesing, orang Belanda. Prof. Dr. Howard Beers telah dikenalnya dengan baik sebab pernah mengetuai Kenteam sewaktu membantu pengajaran di fakultasnya dulu di Bogor.

Ketika Gunawan Wiradi menulis tesis master-nya di Malaysia, ia tidak memasukkan masalah tanah sebab tidak ada data yang mendukung dari data SAE yang digunakan tersebut. Saat ujian bulan Mei 1978, tim penguji awal telah pulang semua, termasuk Prof. Beers yang telah kembali ke Amerika bulan Februari sebelumnya. Sehingga penggantinya yang tidak mengikuti sejak awal proses penulisan tesisnya bertanya, hal apakah yang menarik dalam melihat desa. Gunawan Wiradi menjawab *land tenure*! Ia ditanya terus dan dengan nada heran sang penguji bertanya, mengapa aspek itu justru tidak dianalisis. Akhirnya Gunawan Wiradi diberi kesempatan 2 minggu untuk melakukan

revisi. Pada "detik-detik terakhir" inilah ia sering berkonsultasi dengan Ben White.[85] Menyimak tesisnya yang berjudul ""Rural Development and Rural Institution: A Study of Institutional Change in Java" memang akan ditemukan satu kesan bahwa aspek *land tenure* dibiarkan dengan bahasa yang mengambang, tidak demikian jelas.

Gunawan Wiradi diwisuda pada bulan Juli 1978. Dengan itu ia resmi mendapat gelar Master of Social Science dari Universiti Malaysia. Meski demikian, ia sendiri merasa tidak puas dengan tesisnya, dan semakin sadar demikian pentingnya aspek *land tenure*. Ia merasa bahwa isu itu adalah hutang baginya, dan akan menekuninya lebih serius setiba di Indonesia.

3. Mendobrak kebekuan isu agraria

Upaya mendobrak kebekuan isu Reforma Agraria atau *landreform* pasca 1965 sebenarnya telah dirintis secara tidak langsung oleh Prof. Dr. Sajogyo dalam tulisan pengantarnya untuk buku Masri Singarimbun dan David H. Penny, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo* (1976). Bukan dengan cara redistribusi tanah kelebihan maksimal atau tanah-tanah terlantar, namun idenya adalah *landreform* itu dikenakan pada petani gurem. Mereka yang menguasai tanah kurang dari 0,2 hektar dibeli tanahnya oleh pemerintah dengan harga tertentu, kemudian tanah ini dititipkan oleh negara dan diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Buruh Tani (BUBT).

"Komunalisasi" atas tanah itu bukan berangkat dari pemikiran bahwa *small holder farm* itu tidak efisien (anti Chayanovian), melainkan ingin menempatkan petani pada posisi "pengusaha", dan tidak *melulu* dianggap sebagai buruh. Gagasannya selanjutnya adalah menjadikan BUBT sebagai badan usaha bersama (dengan anggota para petani yang tanahnya dibeli tadi), sebagai penyalur kredit dan modal usaha, serta pemborong pekerjaan proyek padat

[85] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 25 April 2008.

karya dan pasaran tenaga kerja di desa.[86] Ide ini berawal dari kritik Sajogyo yang merasa resah dengan program KUD (generalisasi dari pengalaman empirik di Yogyakarta oleh Prof. Dr. Soedharsono dari UGM) yang melakukan pengorganisiran dan pemberian kredit justru kepada petani lapis atas.[87] Sayang sekali gagasan ini tidak mendapat respons dari khalayak ilmuwan, terlebih pemerintah kala itu. Sebagaimana disebut dalam bab terdahulu, gagasan ini *socially and politically insensible*.

Pada tahun 1977, pemerintah Orde Baru mulai resah setelah mendapat banyak kritik dan demonstrasi besar-besaran. Pemerintahan presiden Soeharto saat itu merasa perlu menengok kembali isu pertanahan setelah didera berbagai protes dalam peristiwa Malari. Namun ternyata bukan untuk penataan ulang agar lebih berkeadilan yang menjadi perhatiannya, melainkan bagaimana pembangunan nasional (industri) mensyaratkan ketersediaan tanah. "Maksud dan sifat Laporan Interim dalam tingkat pertama ialah agar tersedia sebuah gambaran menyeluruh tetapi ringkas-padat yang mencakup permasalahan sekitar arti dan peranan tanah dalam rangka umum pembangunan nasional".[88]

Meski demikian tim yang dibentuk di bawah koordinasi Meneg Riset Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo dan Prof. Dr. Widjojo Nitisastro beranggotakan orang-orang yang cukup ahli di bidangnya. Di dalam tim terdapat nama Prof. Dr. Ir. Sajogyo, Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro, Prof. Dr. Ir. A.M. Satari (Rektor IPB), Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo (Rektor UGM), Prof. Drs. Iman Soetiknjo, Dr.

---

[86] M. M. Billah, dkk., menyebut ide BUBT ini merupakan "gagasan jalan keluar", lihat, M. M. Billah, dkk, "Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan Jawa (Tengah)", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (peny.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia/PT. Gramedia, 1984), hal. 278-282.

[87] Wawancara dengan Prof. Dr. Sajogyo, Bogor, 21 November, 2008.

[88] Surat Pengantar Menteri Negara Riset kepada Presiden, dalam *Masalah Pertanahan, Laporan Interim Menteri Negara Riset Republik Indonesia,* Jakarta, 4 Maret 1978, hal. 3.

Mubyarto, Prof. Dr. Ibrahim Hasan (Rektor Unsyiah), Dr. A.T. Birowo, Dr. Atje Partadiredja, Dr. Thee Kian Wie, dll.[89]

Di antara kesimpulan dan saran tim interim yang bekerja secara serius ini adalah: masih berlakunya UUPA 1960; perlunya penegasan tentang struktur panitia *landreform,* peradilan *landreform* dan anggaran pembiayaannya; dan perlunya peraturan-perundangan tentang *land to the tiller.*[90] Namun nasib pemikiran-pemikiran bernas dan solutif ini diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Sangat diragukan apakah dokumen laporan itu oleh Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo kemudian diteruskan kepada penggantinya, Dr. Eng. B. J. Habibie.[91]

Pemesan ternyata mempunyai logika berbeda dengan tim peneliti yang berpikiran bahwa keterlibatan dalam perumusan itu merupakan "peluang dan kesempatan politik" yang baik untuk mendesakkan kembali pemikiran-pemikiran dengan agenda kebangsaan yang tampak nyata.

---

[89] Menurut Gunawan Wiradi, dan dibenarkan oleh Sediono M.P. Tjondronegoro yang kala itu berperran sebagai sekretaris eksekutif Tim, dari 30 nama yang tercan-tum, 17 orang sebagai penasehat, 6 orang bagian administrasi, dan sisanya (7 orang) yang benar-benar melakukan penelitian. Tidak disebutkan siapa saja tujuh orang tersebut. Bahkan dalam SK pengangkatan, beberapa nama yang diputuskan sebagai angggota tim tertulis secara salah, termasuk nama Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo. Dalam tafsiran Gunawan Wiradi, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tim dan riset ini hanya berfungsi administratif belaka, menggugurkan syarat keterujian, terlebih penyusunan tim dilakukan secara *fait accompli*. Padahal naskah yang dihasilkan benar-benar solid, akademis, dengan rekomendasi yang berbobot.

[90] Simak, *Masalah Pertanahan, Laporan Interim Menteri Negara Riset Republik Indonesia,* Jakarta, 4 Maret 1978. Sebagaimana ditulis kembali oleh Sediono M.P. Tjondronegoro yang kala itu adalah juga Sekretaris Eksekutif Tim. Lihat, Sediono M.P. Tjondronegoro, "Strategi Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 [edisi revisi]), hal. 498. Laporan Interim Tim setebal 161 halaman disertai beberapa lampiran itu kemudian diringkas oleh Sediono M.P. Tjondronegoro, dengan judul "Ringkasan Laporan Interim, Gambaran tentang Permasalahan Tanah", dalam Soedjarwo Soeromihardjo, dkk (Ed.), *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pertanahan Indonesia, 2008), hal 3-62.

[91] Wawancara dengan Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro, Bogor, 20 November, 2008.

> "Walaupun laporan tersebut oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi sewaktu memimpin delegasi Indonesia menghadiri World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (WCARRD) yang diselenggarakan oleh FAO di Roma, Italia, pada hemat penulis pelaksanaan Reforma Agraria tak kunjung dilaksanakan di Indonesia. Bahkan pemerintah Orde Baru sebenarnya tidak ada niat untuk memberi landasan kuat bagi pembangunan nasional menuju ke arah industrialisasi dengan membenahi struktur agraria terlebih dahulu yang timpang sejak zaman penjajahan Belanda".[92]

Meski saran-saran dalam laporan tersebut tidak dijalankan, namun setidaknya ia mempunyai dua arti: *Pertama*, *landreform* tidak lagi identik dengan agenda komunis, secara implisit dinyatakan dalam TAP-MPR No. IV/1978. *Kedua,* ilmuwan-ilmuwan sosial yang sebelumnya "tiarap" mulai berani muncul berbicara tentang Reforma Agraria.[93]

Setahun berikutnya, Juli 1979, diselenggarakan Konferensi Internasional FAO yang membahas tentang pembangunan pedesaan dan pembaruan agraria.[94] Dari 145 negara, terdapat 6 negara yang mengirim delegasi besar, termasuk dari Indonesia dengan jumlah utusan lebih dari 40 orang. Di antaranya adalah Profesor Sajogyo, Dr. Sediono MP. Tjondronegoro, Dr. Rudolf Sinaga (IPB), Profesor Sukadji R (UGM), dan lain-lain. Gunawan Wiradi tidak turut dalam kongres ini.

Konferensi menghasilkan rumusan "Peasant Charter". Di dalamnya berisi tentang Deklarasi Prinsip dan Program Aksi. Di antaranya adalah bagaimana orang miskin di desa harus diberi ruang gerak untuk menjangkau tanah dan sumber-sumber air, input dan jasa di bidang pertanian, fasilitas-fasilitas yang tersedia di bidang penyuluhan dan penelitian; diperbolehkannya mereka

---

[92] Sediono M.P. Tjondronegoro, *Otobiografi Sediono M.P. Tjondronegoro: Mencari Ilmu di Tiga Zaman Tiga Benua* (Bogor: Sains Press, 2008), hal. 48.

[93] Wawancara dengan Gunawan Wiradi, 28 April 2008; bdk. Gunawan Wiradi, 2009, *op.cit,* hal. 103.

[94] Isi keputusan konferensi tersebut telah dilaporkan oleh Sajogyo, "Keputusan Konperensi Sedunia Perihal Perobahan Agraria dan Pembangunan Pedesaan", Jurnal *Agro Ekonomika*, No. 11, Tahun X, Oktober 1979, hal. 108-120.

turut merancang, melaksanakan, serta menilai program pembangunan desa, dan yang penting lagi adalah; struktur dan pola perdagangan internasional serta investasi asing harus disesuaikan dengan pelaksanaan strategi pembangunan pedesaan yang bertujuan menghilangkan kemiskinan.[95]

Sepulang dari Roma, sebagian delegasi dari Indonesia pergi ke Belanda membahas hasil pertemuan FAO tersebut. Dari pertemuan di Belanda itu lahir kesepakatan perlunya studi banding pelaksanaan Reforma Agraria di negara lain. Setiba di Indonesia, gagasan itu bersambut dengan Survey Agro Ekonomi (SAE). Segeralah dibuat persiapan untuk mendiskusikan hasil Konferensi Roma dan ide tentang studi banding tersebut. Berbagai pakar dari kampus dan lembaga pemerintah diundang dalam persiapannya.

Demikianlah, Kongres Internasional FAO 1979 merupakan angin segar bagi mengemukanya wacana Reforma Agraria di Indonesia. Terlebih delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian, Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro, menegaskan bahwa Indonesia harus meneruskan program Reforma Agraria dan UUPA 1960 yang masih berlaku di Indonesia.

Maka tidak aneh jika jurnal terkemuka *Prisma* edisi September 1979 mengangkat isu Reforma Agraria di bawah taajuk "Mencari Hak Rakyat atas Tanah". Dalam edisi ini, Gunawan Wiradi bersama Benjamin White menyumbang tulisan berjudul "Pola-pola Penguasaan Tanah di DAS Cimanuk Dahulu dan Sekarang: Beberapa Catatan Sementara". Sejak saat itu, wacana tentang Reforma Agraria semakin menemukan celahnya untuk

---

[95] *Piagam Kaum Tani, Deklarasi Mengenai Prinsip-Prinsip dan Program Aksi, Konferensi Dunia Mengenai Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan* (Jakarta: Bina Desa, 1983). Menyimak prinsip-prinsip itu, substansinya telah menyentuh dimensi yang luas baik dalam perpektif pembangunan pedesaan secara internal dan bagaimana memberi jaminan baik aset (tanah) maupun aksesnya (pasca penguasaan tanah) kepada kaum miskin pedesaan, maupun dimensi keluarnya dengan mengingat bahaya kekuatan neo-liberal/pasar. Suatu prinsip yang masih dianut oleh gerakan sosial (agraria) saat ini bahkan tidak jauh berbeda dengan desain Reforma Agraria versi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, *Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN),* yang dirumuskan dengan *Reforma Agraria = Land Reform + Access Reform* (RA=LR+AR).

hadir, meski masih dipandang secara menyelidik, tidak sering muncul di permukaan apalagi menjadi *mainstream*.

Sementara itu, ketika Gunawan Wiradi pulang dari studi master di Malaysia, tahun 1979 isu tentang penguasaan tanah mulai diangkat, meski belum diperlakukan dengan analisa yang mendalam. Ia yang merasa berhutang untuk menekuni tema *land tenure,* merasa menemukan kesempatan baru. Di semua sampel Studi Dinamika Pedesaan (SDP) yang penelitiannya sedang berlangsung, persoalan tanah dimasukkan dalam variabel penelitian.

Isu *land tenure* lalu diusung ke *Workshop on Rural History* (1979) yang disusul dengan *Training Workshop* khusus tentang *Land Tenure System* (1979-1981). Diadakan 5 kali pelatihan (Bogor, Solo, dan Makassar) yang diikuti oleh peserta dari kalangan peneliti di berbagai Bappeda di kabupaten dan lembaga penelitian kampus. Pelatihan yang disampaikan meliputi "Teori-teori tentang Pedesaan", "Teori-teori tentang *Landreform*", dan "Teori-Metodologi Penelitian". Selain mengorganisir sebagai ketua panitia, ia menjadi salah satu penyaji dalam pelatihan itu.

Di samping itu, ide tentang *study tour* yang telah digagas sejak tahun 1979 masih bergulir. Dari berbagai pertemuan akhirnya diputuskan Indonesia melakukan studi banding ke India, Belanda pergi ke Amerika Latin dan Filipina, sisanya ke beberapa negara lain. Pilihan Indonesia ke India didasarkan pada buku Wolf Ladejinsky yang mengatakan bahwa studi banding pengalaman *landreform* yang paling tepat adalah ke India, mengingat tingkat kemiripan secara budaya dan agronominya.[96] Pada bulan-bulan akhir 1980 dan bulan Januari 1981 dikirim tiga tim ke India. Tim pertama beranggotakan Profesor Parlindungan, Dr. Onghokham, dan Dr. Anwar Hafid dengan tujuan pergi ke Kerala dan India bagian Selatan. Tim kedua beranggotakan Prof. Iman Sutiknjo, Dr. Ir. Ari Lestaryo dan Drs. Sanyoto yang pergi ke

[96] Wolf Ladejinsky, "Too Late to Save Asia?", dalam L. Walinsky (Ed.) *Land Reform as Unfinished Business: Selected Papers of Wolf Ladejinsky* (Washington: The World Bank, 1977).

New Delhi dan Ghihar. Tim ketiga beranggotakan Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc., Dr. Parsudi Suparlan, dan Ir. Sutardja Sudrajat dari Ditjen Agraria dengan tujuan ke Punjab dan Bengal Barat. Berbagai hasil kunjungan tim dari Indonesia, Belanda, dan pakar-pakar lain itu kemudian dilokakaryakan di Selabintana, Sukabumi pada bulan Mei tahun 1981.

Dalam lokakarya di Hotel Selabintana Sukabumi yang menjadi tuan rumah adalah SDP-SAE. Sebagai ketua panitia adalah Gunawan Wiradi. Lokakarya yang berlangsung selama 2 minggu, mengambil tema *International Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspectives*. Gunawan Wiradi sendiri menyampaikan paper berjudul "Landreform in India: Report on The Visit of Indonesian Team to Punjab and West Bengal", yang merupakan hasil kunjungan lapangannya ke India. Keseluruhan hasil lokakarya ini diringkas oleh Benjamin White dan Gunawan Wiradi, dalam *Agrarian Reform in Comparative Perspective: Policy Issues and Research Needs,* SAE dan ISS, 1984.[97]

Pada saat itu wacana agraria masih menjadi momok pemerintah Orde Baru. Dikirim intel guna mengawasi pelaksanaannya dan melakukan pembatasan agar lokakarya itu tidak diliput oleh media. Mengenai lokakarya ini, Benjamin White mengenang,

> "*The general atmosphere in which that Workshop took place, at the height of the New Order period, was quite different from the present context: the preparations and execution of the workshop were closely followed by the Ministry of Home Affairs and the intelligence and security apparatus, and I recall that at one point in the workshop the number of security personnel hovering outside the workshop outnumbered the participants inside*." [98]

---

[97] Mengenai rangkaian Studi Tour dan Lokakarya Selabintana, disinggung sekilas dalam Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan KPA dan Pustaka Pelajar, 2000), hal. 144-148. Pada tahun 2009, bertepatan dengan penganugerahan Dr. HC oleh IPB kepada Gunawan Wiradi, naskah lengkapnya telah diterjemahkan dan diluncurkan. Benjamin White dan Gunawan Wiradi (Ed.), *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif: Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana* (Bogor: Brighten Press, 2009).

[98] Benjamin White, *Land and Resource Tenure: Brief Notes,* paper dalam konferensi "Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Masa Indonesia yang Sedang Berubah", Jakarta, 11 Oktober 2004, hal. 1.

Akan tetapi ketika *Kompas* menurunkan berita mengenai profil Dr. Onghokham yang hadir sebagai pembicara, disinggung pula acara ini. Hal itu membuat banyak pihak merasa khawatir. Gunawan Wiradi sebagai ketua panitia mendapat teguran dari beberapa pihak, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri. Lokakarya ini berhasil mengajukan rekomendasi kepada pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri RI. Isi rekomendasi antara lain, jika Indonesia konsisten dengan kesepakatan Konferensi Roma tersebut di atas, yakni ingin melaksanakan Reforma Agraria, perlu dibentuk sebuah Badan Otorita yang berfungsi: (a) mempercepat proses; (b) mengkoordinasikan semua sektor; dan (c) menangani konflik. Patut disesalkan, Orde Baru tidak sungguh-sungguh memperhatikan isu Reforma Agraria ini.

Lokakarya ini mencatatkan sekitar 44 nama baik sebagai peserta, pengamat, panitia pengarah, ditambah 8 bagian kesekretariatan. Mereka berasal dari universitas yang ada di Indonesia, Direktorat Jenderal Agraria, kantor gubernuran (Jawa Barat), dan dari luar negeri: ISS (Den Haag, Belanda), Pusat Studi Ilmu Sosial (Calcutta), Land Tenure Centre Wisconsin University (Madison, USA), Centre for Development Studies, Ullor, Trivandum (India), Nuffic (Belanda), Erasmus University (Belanda), IDRC, USAID dan Rockefeller Foundation.

Sebagai naskah akademis, hasil lokakarya itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang proses penetrasi kapitalisme di pedesaan (modernisasi dan komersialisasi pertanian), perubahan hubungan-hubungan sosial agraria, ketenaga-kerjaan dan relasi gender, migrasi, proses-proses deagrarianisasi, yang bukannya tidak lagi relevan untuk konteks sekarang, namun semakin ditemukan bentuk aktualnya.

Tidak banyak orang yang mengetahui dan mengingat keberadaan lokakarya tersebut, di saat dunia luar negeri memberi perhatian mendalam. Rezim Orde Baru membuat isu Reforma Agraria terpasung sebab diidentikkan dengan program komunis. Padahal penataan struktur agraria yang timpang warisan dari kolonial, menuju ke arah penataan yang berkeadilan sosial merupakan agenda yang diusung sejak mula oleh para pendiri

bangsa (*founding fathers*). Mereka menyadari benar bahwa kolonialisme di Indonesia bekerja melalui penguasaan atas sumber-sumber daya agraria di negeri Indonesia.

Dari beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Gunawan Wiradi, Prof. Dr. Ir. Sajogyo, Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro dan mereka yang telah berinteraksi melalui dan dari kelembagaan Survey Agro Ekonomi di Bogor, kajian agraria secara umum dan wacana Reforma Agraria secara khusus telah muncul kembali di hadapan publik. Reforma Agraria tidak lagi identik dengan agenda komunis sehingga ilmuwan-ilmuwan sosial yang sebelumnya "tiarap" dan enggan menyinggung isu tersebut, mulai berani membicarakannya.

Apa yang dilakukan oleh Gunawan Wiradi sampai dengan keyakinannya bahwa "Reforma Agraria seharusnya merupakan dasar strategi pembangunan nasional secara keseluruhan",[99] adalah upaya mengarusutamakan isu itu kembali ke tengah-tengah khalayak. Sejak tahun itu ia secara terus menerus menjadi juru bicara yang lugas tentang Reforma Agraria. Meski perhatian itu semula tanpa dimaksudkan, namun karena seringnya ia ditanya di dalam berbagai forum mengenai persoalan itu (sehingga ia terus menerus mencari jawabannya), semakin ia menyadari bahwa itulah persoalan mendasar yang dirasakan rakyat. Terbukti ia sering ditanya dalam forum ilmiah dan seringnya muncul berbagai konflik yang berbasis tanah di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.[100]

---

[99] Gunawan Wiradi, "Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan", makalah disajikan dalam Seminar "Pembangunan Pedesaan dan Masalah Pertanahan", diselenggarakan oleh PAU-Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 13-15 Februari 1990, hal. 3.

[100] Data BPN RI tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah sengketa agraria di Indonesia sampai dengan tahun 2007 sebanyak 4.581 kasus; konflik agraria sebanyak 858 kasus; dan perkara agraria yang sedang diproses di pengadilan sebanyak 2.052 kasus. Dari segi luasan, tanah produktif obyek sengketa yang tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan secara optimal seluas: 607.886 ha. Nilai ekonomi tanah yang menjadi obyek sengketa sebesar: 6.078.860.000 m^2 x Rp. 15.000 (NJOP tanah paling rendah) = Rp. 91.182.900.000.000. Sedangkan perkiraan *opportunity lost* dari tanah yang tidak termanfaatkan akibat status sengketa tersebut mencapai 146,804 triliun rupiah (melebihi angka APBN 2007). Nilai sosial, budaya, HAM dan politik, dari persengketaan dan konflik itu tentu

Demikianlah kiprah Gunawan Wiradi sampai dengan akhir tahun 1970-an bersama SAE. Walaupun SAE dibubarkan pada tahun 1982,[101] SDP sebagai salah satu unit SAE lalu berubah menjadi Yayasan SDP dan pernah melaksanakan dua macam kegiatan penting: studi tentang "pilot project" dari USAID mengenai "teras bangku" di daerah Panawangan, Kabupaten Tasikmalaya; dan membantu pelatihan penelitian bagi staf Unit Studi dan Evaluasi Sosial Ekonomi pimpinan Dr. Ir. Bungaran Saragih dalam proyek DAS Citanduy.

Pembubaran SDP-SAE disayangkan banyak pihak. Tiga tahun setelah berdiri (1968), SAE mendapat apresiasi dari laporan Profesor. Dr. Egbert de Vries. Ia menutup laporannya dengan saran (tepatnya dukungan),

> "*…for the promotion and use as a channel for development this seems highly important. This project should be continued.*"[102] Disusul apresisasi David H. Penny yang mengatakan bahwa "*The field studies of the Agro-Economic Survey have made a magnificient contribution toward a better understanding of Indonesia's 'agro-economy' and the formation of a sounder basis for policy making for development*".[103]

Penghargaan ini cukup bisa dipahami mengingat keberadaan SAE yang demikian strategis dalam memberikan perspektif sosial-ekonomi terhadap penelitan pertanian. Pada masa kolonial hingga pasca kemerdekaan, kedua aspek ini tidak mendapat tempat di dalam organisasi Departemen Pertanian.[104] Alan

---

lebih besar lagi. Endriatmo Soetarto dan Ahmad Nashih Luthfi, "Kekayaan Sumber Daya Alam sebagai 'Kutukan': Reaktualisasi UUPA dalam Mengatasi berbagai Konflik di Indonesia, *TOR,* tt, 2009, hal. 2.

[101] Dibubarkannya SAE terkait dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, J. B. Sumarlin, yang memerintahkan setiap departemen mendirikan badan litbang. Sebagai konsekuensinya, lembaga penelitian lintas departemen semacam SAE tidak lagi diperbolehkan.

[102] Egbert de Vries, *A Summary Report of Activities of The Agro Economic Survey in Indonesia, 1965-1968,* The Agro Economic Survey, 1968, hal. 54.

[103] David, H. Penny, "The Agro Economic Survey of Indonesia: An Appreciation", Jurnal *Indonesia,* No. II, April 1971, hal. 130.

[104] Wawancara dengan Prof. Dr. Sajogyo, Bogor, 19 November, 2008. Simak juga, Sajogyo, "Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Penerapannya", dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986).

Strout, setelah mengkritik kurangnya pendalaman pada *root causes* yang ditunjukkan dengan *"why question"* dalam riset-riset SAE-SDP, ia memperlihatkan kelebihan-kelebihannya. Riset SAE menyadarkan akan keragaman karakteristik sehingga perlunya kehati-hatian penerapan suatu program pemerintah. Para stafnya memiliki kemampuan dalam mensintesakan hasil studi-studi terdahulu, lalu melakukan revisit guna menguji kembali temuan sebelumnya dan melihat perubahan yang terjadi. Banyak disertasi dan tesis peneliti Indonesia maupun asing yang sedang studi di berbagai negara (Nebraska, Malaysia, Philippina, Belanda, Hawaii, Iowa, dll.) yang menggunakan data-data sensus SAE, bahkan juga dalam laporan-laporan Bank Dunia.[105] Menutup uraiannya, dengan nada sesal ia mengatakan bahwa justru ketika banyaknya studi SDP itu diakhiri, seharusnya itulah saatnya Indonesia memperbanyak lembaga semacam SDP-SAE.[106]

I. Pelembagaan Gagasan dan Rekognisi

Selama bekerja di SDP-SAE, Gunawan Wiradi juga sempat mengajar mata kuliah sosiologi di Universitas Mertju Buana (1982-1985). Kesempatan mengajar ini diperolehnya dari tawaran Dr. Ir. A.T. Birowo yang saat itu menjadi wakil rektor.

Setelah SAE dan SDP dilikuidasi, Gunawan Wiradi bergabung ke Pusat Studi Pembangunan (PSP-IPB) sebagai peneliti tamu dalam proyek jangka panjang *Rural Non Farm Employment*. Proyek ini merupakan kerja sama antara Institute of Social Studies (ISS) The Hague, PSP-IPB, dan PPLH-ITB.

Pada tahun 1992, Gunawan Wiradi diminta Prof. Dr. Sajogyo memberi kuliah mahasiswa S-2 Sosiologi Pedesaan, Fa-kultas Pertanian IPB, tepatnya untuk mata kuliah sosiologi pede-saan dan metodologi penelitian sosial. Selain itu, ia juga diminta membimbing penulisan tesis. Dua tesis bimbingannya mendapat anugerah "David H. Penny Award", yakni tesis karya Lala Kolo-

[105] Alan M. Strout, "Managing The Agricultural Transformation on Java: A Review of The Survey Agro Ekonomi", Jurnal *BIES,* Vol. XXI, No. 1, April, 1985, hal. 73-74.

[106] *Ibid.* hal. 76.

paking dan Moh. Amaluddin. Karya penulis terakhir diterbitkan oleh UI Press dengan judul *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*, (1987).

Pada tahun 1991, Gunawan Wiradi ikut mendirikan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Yayasan Akatiga-Pusat Analisis Sosial, yang berkedudukan di Bandung, sekaligus menjadi anggota Badan Pengurusnya sampai sekarang. Semenjak itu, posisi dan aktivitasnya di LSM semakin meluas, di antaranya sebagai anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Noer Fauzi, salah satu pendiri Konsorsium Pembaruan Agraria, mengakui bahwa buku yang disunting Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi berjudul *Dua abad Penguasaan Tanah* merupakan "buku wajib" bagi aktivis gerakan agraria. Dua nama itu beserta satu nama lainnya, Prof. Dr. Ir. Sajogyo, yang senantiasa menyertai perjalanan studi dan gerakan agraria yang ia jalani, menjadi jembatan penyambung yang menghubungkan pengetahuan agraria pasca kemerdekaan dengan periode yang dijalaninya (1980-an hingga kini), ketika mengalami keterputusan selama Orde Baru.[107]

Gagasannya tentang *landreform by leverage* seakan meniupkan roh perjuangan gerakan agraria. *Landreform by leverage* adalah suatu usaha perubahan struktur penguasaan tanah tertentu yang diprakarsai oleh petani secara terorganisir. Dalam konteks ketika negara tidak menunjukkan niat baiknya melakukan restrukturisasi penguasaan tanah yang berkeadilan, di saat "pasar politik" dikuasai oleh pemilik modal, "maka apa yang bisa dilakukan oleh rakyat adalah berupa dorongan dan tekanan untuk membuka mata penguasa politik agar sadar bahwa reformasi total tanpa Reforma Agraria adalah hampir tidak ada artinya". Sehingga lanjutnya, "Pembaruan yang didasarkan atas pemberdayaan rakyat harus dilakukan".[108]

---

[107] *Ibid*.

[108] Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir* (Bogor dan Bandung: Sajogyo Institute, KPA, dan AKATIGA, 2009 [cetakan ke-dua]), hal. 147.

Semenjak 1995 sampai sekarang ia menjadi anggota Pengurus Sekretariat Bina Desa, Jakarta. Gunawan Wiradi pernah tercatat sebagai anggota dari International Rural Sociologist Association (IRSA). Ia juga ikut dalam proses perumusan TAP MPR IX/ 2001 melalui keterlibatannya di Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA) bersama Prof. Dr. Sediono Tjondronegoro, Prof. Maria Soemardjono, Noer Fauzi, Dianto Bachriadi dan lainnya. Forum ini mengundang beberapa anggota MPR yang terlibat dalam perumusan ketetapan MPR tersebut. Kelompok studi ini secara intens mendesak wacana pembaruan agraria. Selain itu ia menjadi peneliti tamu pada Pusat Kajian Agraria IPB yang baru didirikan tahun 1999.

Sampai saat ini Gunawan Wiradi masih aktif di berbagai organisasi, menghadiri seminar, memberi ceramah, dan semacamnya. Perannya tercatat juga di Bina Desa, LPPI, dan Sajogyo Institute (SAINS). Dalam lembaga-lembaga itu, ia menjadi penasehat, pendamping, dan guru bagi mereka, generasi-generasi penerus di jalur gerakan. Meski saat ini tidak lagi terjun secara langsung/intens ke masyarakat pertanian dan pedesaan sebagaimana yang dilakukannya dulu sebagai peneliti, dengan pelibatannya di jalur tersebut, ia menjadi inspirasi bagi siapapun yang menekuni secara intens isu-isu agraria di Indonesia.

Tidak berlebihan jika Gunawan Wiradi disebut, sekali lagi, sebagai guru reforma agraria. Guru yang mengemban misi menjadi "sungai" yang selalu mewakafkan dirinya untuk terus-menerus "mengairi" siapapun yang ingin belajar, mereka yang dahaga. Suatu perumpamaan yang dibuat oleh Gunawan Wiradi sendiri untuk menjuluki peran yang dilakoninya.

Pada tanggal 28 Mei 2009 Gunawan Wiradi memperoleh penghargaan Dr. Honoris Causa (Dr. HC.) dari almamaternya, Institut Pertanian Bogor, untuk Bidang Sosiologi Pedesaan dengan fokus Kajian Agraria. Penghargaan ini diberikan karena Senat Akademik IPB menganggap Gunawan Wiradi telah,

> "Memberikan kontribusi besar dalam pengembangan IPTEK di bidang pembangunan pertanian dan pedesaan, *khususnya* di bidang agraria, melalui penelitian-penelitian longitudinal dan perumusan

> teoritis di bidang agraria yang terus kontinyu dilakukannya, serta peranannya yang aktif dalam menghidupkan kajian agraria dan kebijakan reforma agraria di berbagai fora"[109]

Penganugerahan itu disambut dengan penuh syukur dan bahagia oleh Gunawan Wiradi karena menurutnya hal itu menandakan bahwa pemikiran mengenai reforma agraria telah kembali diusung oleh almamaternya. Beberapa kalangan aktivis agraria memberi makna, secara lebih khusus bahwa penganugerahan ini dapat berarti juga pengakuan dan penebusan rasa bersalah mengeluarkan Gunawan Wiradi dari kampus IPB. Namun agenda lebih besarnya adalah bahwa wacana Reforma Agraria memerlukan dukungan dari kemauan politik dan inisiatif kelembagaan negara, dukungan dan kritik teoretis dari kalangan akademis, serta dorongan yang kuat dari gerakan sosial masyarakat.

Penganugerahan tersebut menjadi pertaruhan sejauh mana studi agraria dapat digalakkan kembali di IPB khususnya, dan perguruan tinggi pada umumnya. Penghargaan ini tentunya diharapkan mampu memanggil kembali mereka yang tidak hanya di ranah pembuat kebijakan dan ranah gerakan, namun terutama adalah dunia kampus sebagai arena di mana problem-probem agraria semestinya mendapat perhatian serius melalui studi-studi yang serius dan berkelanjutan.[110]

Setidaknya ada 6 komentar terhadap Gunawan Wiradi guna memberi dukungan penganugerahan gelar tersebut. Di antaranya adalah dari Dr. Jan Breman, Professor Emeritus dan Fellow of the Amsterdam School for Social Science Research, Amsterdam; Ben White, PhD., Professor of Rural Sociology of the Institute of Social Studies, Den Haag; Gillian Hart, Ph.D., Professor of Geographic and Chair of Development Studies, University of California, Berkeley, Berkeley; Nancy Lee Peluso, Ph.D. Professor and Chair, Division of Society and Environment, University of California, Berkeley; Anton Lucas, Ph.D., Professor at School of

---

[109] Sambutan Rektor IPB pada Penganugerahan DR. HC pada Ir. Gunawan Wiradi, M. Soc. Sc., Bogor, 28 Mei 2009

[110] Moh. Shohibuddin, komunikasi pribadi *via Yahoo Massanger*, 25 Mei 2009

Political and International Studies, The Flinders Asia Center, Flinders University, Adelaide, Australia; dan Hiroyoshi Kano, D.Ec. Professor at The Institute of Oriental Cul-ture, University of Tokyo, Tokyo. Ditambah dengan dukungan dari dalam negeri lainnya.

Sebagai contoh, Benjamin White menyatakan,

> "*Through his teaching, his writing and conference presentations, and through the numerous occasions on which he has been asked to supervise or advise the research activities of others, he has been an inspiration to a huge number of young scholars and activists, both Indonesian and foreign, since 1980s. he is respected and influential in both university, NGO activist and policy-making circles. I can not think of any major forum on Indonesian agrarian reform to which he has not been invited, as resources person and/or keynote speaker, to share his knowledge and insights*".[111]

Mengkaji sepak terjang Gunawan Wiradi tidak saja menyadarkan tentang pentingnya menekuni kembali persoalan agraria Indonesia, namun juga mengingatkan untuk menghimpun (lagi) warisan-warisan pemikiran terdahulu. Hal ini penting agar tuduhan bahwa sejarah kesarjanaan Indonesia berjalan terputus-putus (tidak terakumulasi, tidak juga menjadi himpunan pengetahuan yang otoritatif), menjadi tidak terbukti.[112] Jika tidak demikian, suatu pengetahuan akan tercerai berai dan akan menjadi tidak relevan sebelum ia kokoh. Ia akan hilang begitu saja.

Pengetahuan yang terakumulasi dan otoritatif akan berguna bagi komunitas semasanya dan dapat dihidupkan kembali (direvitalisasi) oleh generasi selanjutnya tatkala masih ditemukan urgensitas dan relevansinya.

---

[111] Surat *endorsement* yang ditujukan kepada Prof. Dr. Ir. Sajogyo tentang rencana penganugerahan DR. HC. Gunawan Wiradi. Surat tertanggal 22 Agustus, 2008.

[112] Sindiran tidak terakumulasinya pengetahuan keilmuan sosial di Indonesia sehingga wacana apapun dianggap baru dan para pemikir sibuk dengan kegelisahannya sendiri tanpa merujuk pada apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga pengetahuan tidak menjadi "kekuatan sejarah", adalah pernyataan Kuntowijoyo. Lihat, "Integritas Sains Sosial dan Nilai-nilai Islam: Sebuah Upaya Perintisan", dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1999 [cetakan ix]), hal. 322.

BAB VII
DUA PEMIKIRAN AGRARIA DARI BOGOR

Bab ini merupakan sintesa pemikiran Sajogyo dan Gunawan Wiradi yang diletakkan dalam konteks pembangunan nasional. Dengan sintesa ini diharapkan diperoleh semesta pengetahuan tentang Mazhab Bogor dan posisi kritis yang dikembangkannya baik dari segi kritik kebijakan maupun kritik pengetahuan (metodologi).

A. Adakah Mazhab Itu?

Keberadaan aliran pemikiran dapat disebut sebagai "Mazhab" atau "School of Thought" ketika ia memiliki prasyarat tertentu: kelembagaan, sosok intelektual otoritatif, manifesto, dan *outlet* gagasan. Pemikiran agraria tokoh Bogor memenuhi prasyarat itu, sehingga layak disebut sebagai sebuah mazhab: Mazhab Bogor.

Pemikiran mereka tumbuh, berproses, dan berkembang mula-mula melalui kelembagaan Survey Agro Ekonomi, kemudian di Pusat Studi Pembangunan dan Institut Pertanian Bogor. Sajogyo, Sediono M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, dan Pudjiwati Sajogyo telah berkiprah dalam konteks kelembagaan tersebut. Perintisan kelembagaan dan pemikiran Mazhab Bogor dilakukan oleh Sajogyo. Ia berperan sebagai sosok yang kharismatik, otoritatif, baik dari segi pencetus maupun pengorganisir gagasan dan kelembagaan, serta kerja-kerja ilmiah lainnya. Sajogyo yang memiliki ciri empiris dan mikroskopis dalam riset-risetnya, men-

dapat perimbangannya melalui Sediono M.P. Tjondronegoro yang cenderung teoretis, dan Gunawan Wiradi yang lebih makro serta dapat mengartikulasikannya ke ranah publik, serta kepekaannya terhadap isu-isu aktual. Sementara Pudjiwati memberi sumbangan pada perluasan perspektif gender dan dimensi pada ranah agraria.

Gagasan tentang stratifikasi sosial (*the notion of social stratification*) dihidupkan oleh para tokoh ini dalam kelembagaan SAE, meskipun justru dihilangkan oleh kebijakan rezim. Pernyataan Sajogyo mengenai *Modernization without Development* mencerminkan nosi itu, sebagai kritik terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Demikian juga strategi *landreform by leverage yang* diwacanakan oleh Gunawan Wiradi. Kedua pernyataan itu dapat dianggap sebagai manifesto akademis pemikiran Mazhab Bogor.

Nosi tersebut mempertemukan keduanya dalam studi agraria, sehingga paradigma yang dianutnya kemudian adalah populisme. Paradigma ini menitik-beratkan pentingnya penguasaan aset produksi pada usaha tani skala rumah tangga. Penguasaan hak atas aset itu berguna sebagai modal transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Maka tidak mengherankan jika mereka senantiasa meyakini perlunya pelaksanaan reforma agraria. Gagasan-gagasan kedua tokoh secara khusus terbit dan beredar melalui terbitan berkala SAE yang kemudian berkembang menjadi jurnal *Agro Ekonomika.* Lebih dari itu, gagasan mereka juga banyak tersebar sebagai makalah/paper di forum-forum ilmiah, forum resmi pemerintah, artikel di media massa, laporan penelitian, dan buku-buku. Dalam kerja ilmiah, hal terpenting mengenai publikasi adalah menempatkannya sebagai bagian dari "daur pengelolaan pengetahuan" yang bersiklus terhadap produksi pengetahuan—proses—analisa—diversifikasi akan hasil—dokumentasi dan penyebaran pengetahuan.[1] Publikasi

[1] Moh. Shohibuddin, "Knowledge Sharing and Networking through Website and E-Library Development", *Proposal,* Sajogyo Institute, 2008, hlm. 2

tidaklah hadir demikian saja, lepas dari keterkaitan satu dengan tahapan lainnya.

Jika teori tanpa realitas empiris akan menjadi abstraksi, dan refleksi tanpa aksi akan menjadi verbalisme, maka sebaliknya, aksi atau realitas empiris tanpa teori dan refleksi akan menjadikan aktivisme-anarkis dan naïfisme. Hanya dengan dialoglah keduanya terjembatani. Dengan dialog proses emansipasi dapat terjadi. Para tokoh Mazhab Bogor terlihat saling melengkapi posisi ini.

B. Reaksi dan Kreasi atas Pembangunan Nasional

Proses pelembagaan Mazhab Bogor dapat ditelusuri mulai dari akhir Orde Lama. Secara kronologis proses pelembagaannya dapat dilihat dalam matriks di bawah. Matriks ini berusaha menyandingkan antara konteks pembangunan nasional dan peran Mazhab Bogor dalam rangka berkontribusi gagasan, baik melalui kritik atas pembangunan maupun kritik metodologi.

Tabel 13. Konteks Pembangunan Nasional dan Kritik Mazhab Bogor

Tahun	Pembangunan Nasional	Kritik ala Mazhab Bogor	
		Kritik Kebijakan Pembangunan	Kritik Metodologi
1969/70- 1973/74	Pelita I: Mencari *tracee* baru pembangunan nasional. Peningkatan Produksi Pangan melalui pelaksanaan Revolusi Hijau (RH) – Bimas – Bulog – Kredit Bank	– Mendirikan Survey Agro Ekonomi memunculkan realitas petani gurem (1963/67) – Manifesto *modernization without development* (1972/3) – Maraknya sistem tebasan, adanya sistem kedokan (perubahan sistem panen) (1973) – Mendirikan SDP (1973) – Menghadiri World Conference on Agrarian Reform and Rural Development FAO di Roma (1979)* – Melakukan studi	– *Notion on rural social structure* (*subaltern sociology*) – sda. – *Social impact on change production and market institution (GR Impact)* – *Tenurial system studies, metode-metode kualitatif* – Perubahan struktural (internal) dalam pembangunan pedesaan dan kewaspadaan terhadap struktur global – Perubahan struktural yang kontekstual berdasar problem lokal – Reforma Agraria (RA)

		komparatif tentang *landreform* di negara lain (1980-1981)* – Lokakarya Selabintana, "International *Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspectives*" (1981)*	dan bukan RH sebagai dasar bagi Pembangunan Nasional dan alas bagi transformasi sosial
	Developmentalisme	– Pendirian Pusat Studi Pembangunan-IPB (1972)	– *Interdisiplinary approach and emic perception*
	Basic needs	– Evaluasi UPGK (1972/1973) – Garis Kemiskinan Sajogyo (1977)	– *Food early warning system by organizing people* – Bukan pendapatan namun kondisi aman pangan/gizi dan pemenuhan pangan lokal sebagai ukuran kesejahteraan
1974/75-1978/79	Pelita II: munculnya berbagai kritik hingga terjadinya peristiwa Malari, membuat pemerintah merespon isu Pemerataan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa : SD Inpres,Inpres Kesehatan, BUUD/KUD, Keluarga Berencana, Transmigrasi	– Lintas Sektoral Bappemka (1974-1978) – Ide BUBT (1976)	– *Interdependential sectors/actors* – Komunalisme-Populis
1979/80-1983/84	Pelita III: Pemerataan melalui Trilogi Pembangunan, dijabarkan kedalam "8 Jalur Pemerataan" 1. Pemenuhan kebutuhan pokok 2. Kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan 3. Pembagian pendapatan 4. Kesempatan kerja. 5. Kesempatan berusaha. 6. Kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (generasi muda wanita) 7. Penyebaran pembangunan di daerah 8. Kesempatan memperoleh keadilan	– Indeks Mutu Hidup atau "8 Jalur pemerataan Plus" ala Sajogyo (1984)	– Membuat alternatif "alur logika" yang menempatkan "kesempatan kerja dan berusaha" sebagai "jalur utama pembuka peluang" kesempatan dan pemenuhan lainnya

Tahun	Pembangunan Nasional	Kritik ala Mazhab Bogor	
		Kritik Kebijakan Pembangunan	**Kritik Kebijakan Pembangunan**
1984/85-1988/89	Pelita IV: Industrialisasi Pedesaan – PIR – HPH – Urbanisasi, *Off-farm sector*	– PIR (dan transmigrasi) adalah contoh mengenai "konflik adalah anak kandung dari *landreform*" – Hutan dan pekarangan sebagai sumber kehidupan rakyat – PukLuTan (1986-1991)	– *State-led and market-led landreform* yang menimbulkan masalah – Kritik atas Kehutanan Masyarakat sebagai *cultuurstelsel* jilid baru – Teori permintaan tenaga kerja: *off farm* sebagai survivalitas, konsolidasi, dan akumulasi
1990	Pelita V: Industrialisasi Lanjut – Substitusi impor – Perluasan basis massa pemerintah: IDT dan PPK	– *Land reform by leverage* (1995) – Jitin IDT (1994-96) dan Jisam PPK (1999)	– Ideologi anti-negara yang telah dikuasai pasar modal – Kaji Tindak Partisipatif (*participatory Research* dan Kaji Bersama (*Cooperative Inquiry)*

* Keterangan: Kritik ini dari segi waktu mestinya masuk dalam periode Pelita setelahnya, namun dari segi tema ia masih dalam konteks periode sebelumnya

Kebijakan Revolusi Hijau secara umum yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan BIMAS di Indonesia, serta secara kasuistik pasca pelaksanaan Sensus Pertanian 1963, mendorong pendirian Survey Agro Ekonomi pada tahun 1963. Lembaga yang bertugas melakukan evaluasi ini mulai bekerja sejak tahun pertama, namun menjadi lebih intens saat memasuki tahun 1967. Di sinilah peran Sajogyo dikukuhkan. Mulai tahun pertama ini pula Sediono M.P. Tjondronegoro turut terlibat.

Ketika kebijakan peningkatan pangan dilakukan melalui uji coba teknologi baru, perluasan areal tanam, dan berbagai upaya modernisasi lainnya, riset-riset SAE, walaupun menggunakan metode survei, menemukan realitas struktur sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan yang diferensiatif. Temuan kritis ini muncul melalui tulisan Sajogyo pada tahun 1973 yang berjudul "*Moderni-*

zation without Development in Rural Java". Naskah ini memberi landasan perspektif penelitian-penelitian SAE.

Dampak sosial dan ekonomi pedesaan akibat pelaksanaan Revolusi Hijau semakin intens dikaji melalui pendirian Studi Dinamika Pedesaan pada tahun 1973. Studi ini mengkaji tiga tema besar: pendapatan, kesempatan kerja, dan kelembagaan desa. Pada periode ini metode penelitian mengalami perkembangan dengan digunakannya metode etnografi, sejarah desa, dan metodologi kualitatif lainnya. Metode survei merupakan siasat di awal periode SAE sebab minimnya dana. Perkembangan selanjutnya ke arah metode-metode kualitatif tidak terlepas dari keberadaan Sajogyo sebagai ahli sosiologi yang etnografis dalam pengalaman riset disertasinya, dan Benjamin White ketika menjadi konsultan SAE/SDP.

Suara kritis mulai bermunculan pada pertengahan tahun 1970-an. Peristiwa Malari menandai hal ini. Demikian juga kritik terhadap pembangunan pedesaan yang telah berjalan melalui pelaksanaan revolusi Hijau. Pemerintah berupaya menilik kembali kebijakan pertanahannya. Dalam kaitan ini, Sajogyo menghadiri WCARRD-FAO di Roma tahun 1979. Hasil pertemuan internasional tersebut menandaskan pentingnya pelaksanaan reforma agraria dan kewaspadaan atas struktur global. Upaya pembacaan atas kondisi internal dalam perspektif perbandingan serta konteks globalnya dilanjutkan melalui studi komparatif tentang *landreform* di beberapa negara. Gunawan Wiradi bertugas ke Punjab dan Bengal Barat (1980-1981). Hasil kajian itu dilokakaryakan pada "International *Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspectives*" (1981). Pada masa inilah, studi agraria melalui peran para tokoh Mazhab Bogor memasuki episode kebangkitan.

Pendirian Pusat Studi Pembangunan pada tahun 1972 menandai perkembangan penting dalam disiplin ilmu sosial, khusunya di IPB. Melalui lembaga ini ideologi *modernisme* dikri-

tisi dengan sudut pandang *emic,* yaitu berupaya menghadirkan suara dan kepentingan tineliti, serta didekatinya persoalan sosial ekonomi secara interdisipliner.

Sajogyo ditugaskan melakukan evaluasi program pemenuhan nutrisi (*ANP Evaluation Study*) yang dilanjutkan dalam UPGK. Penugasan ini terkait pergeseran strategi global pembangunan dari pemenuhan peningkatan kebutuhan pangan ke pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*). Kegiatan ini memungkinkannya melakukan pengorganisasian masyarakat (kader perempuan). Hasil riset evaluasi dan pengorganisasian ini direfleksikan Sajogyo dalam bentuk pembuatan standar ukur kemiskinan dan kerawanan pangan masyarakat. Sajogyo kemudian melahirkan konsep *Garis Kemiskinan* pada tahun 1978 yang didasarkan atas tingkat konsumsi setara beras bagi masyarakat kota dan desa.

Gagasan BUBT Sajogyo tahun 1976 berupaya memecahkan kesunyian wacana *land reform.* Ide komunalisasi sistem penguasaan tanah ini sayangnya tidak bersambut sama sekali, baik di tingkatan gagasan (akademis) maupun wacana (kebijakan).

Memasuki Pelita III, masih dengan perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan nasional diarahkan pada upaya pemerataan 8 kebutuhan dan kesempatan, atau yang disebut dengan "8 jalur pemerataan". Delapan komponen ini dalam perspektif kebijakan adalah jukstaposisi kebutuhan atau hubungan asosiatif. Sementara Sajogyo melihatnya sebagai relasi sebab akibat antar satu komponen dengan lainnya. Menurutnya, "kesempatan kerja" dan "kesempatan berusaha" adalah "jalur utama pembuka peluang" bagi kesempatan-kesempatan lainnya. Dua komponen ini adalah sebab (syarat) bagi keenam komponen lainnya. Demikianlah alur logika yang diajukan oleh Sajogyo, yang kemudian dikenal dengan "8 jalur pemerataan plus" (1984).

Swasembada pangan disusul dengan *booming* minyak yang dicapai pada tahun 1983/1984 memberi kepercayaan diri bagi Indonesia melakukan percepatan industrialisasi. Sebagian keuntungan dari sektor minyak dialihkan ke sektor lainnya. Sektor

perkebunan dan kehutanan ditekan percepatan produksinya. Dirancanglah skema Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan perluasan areal hutan (HPH-lahan gambut). Industrialisasi pedesaan dirancang melalui skema perluasan kerja sektor non-pertanian.

Riset PSP-IPB melihat bahwa proyek PIR rentan terhadap eksploitasi terhadap "mitra kerja" perusahaan, yakni rakyat. Lemahnya posisi mereka menempatkan kedudukan "inti" ada pada perusahaan. PIR yang dapat disebut sebagai *market-led landreform* justru mengandung potensi konflik. Selain itu, peluang kerja luar pertanian menurut temuan tim PukLuTan yang melibatkan kepemimpinan Sajogyo dari PSP-IPB, terkait dengan tingkat penguasaan atas aset produksi masyarakat desa di sektor pertanian mereka.

Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, taraf industrialisasi ditandai dengan upaya deregulasi dan debirokratisasi ekonomi di level makro. Sentralisme ekonomi Orde Baru dikendorkan bahkan didobrak oleh kalangan swasta dalam negeri dan asing. Di level sosial politik, pemerintah sedang memperluas basisnya dari yang semula mengandalkan dukungan elit tertentu ke basis massa yang lebih luas. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Penanggulangan Kemiskinan (PPK) pada tahun 1990-an menjadi pilihan atas strategi itu.

Dalam konteks itulah Gunawan Wiradi agaknya geram akibat tidak dijalankannya reforma agraria. Padahal konflik berbasis agraria atau konflik akibat pelaksanaan pembangunan melalui skema-skema yang telah disebut di atas justru semakin meningkat. Dalam suatu kesempatan di tahun 1995, ia menyerukan perlunya pelaksanaan *landreform* atas inisiatif rakyat (*landreform by leverage*).

Di lain pihak, Sajogyo melakukan evaluasi program IDT dan PPK melalui Kaji Tindak (Jitin) dan Kaji Bersama (Jisam). Kajian di kawasan Indonesia Timur ini menghasilkan temuan-temuan kritis, di antaranya adalah gugatan terhadap profesionalisme

pendamping yang hanya menempatkan diri sebagai penyuluh dan inspektur, bukan pengorganisir; bias pendekatan proyek; program diposisikan dan dipersepsi sebagai hibah atau bahkan hutang. Di satu sisi sasaran program tidak harus merasa bertanggung jawab mengembalikannya, di sisi lain mereka justru takut memanfaatkannya. Selain itu adalah problem egoisme sektoral; dan peran aparat yang intervensif bergaya "instruktif" yang justru memandulkan inisiatif rakyat; serta sasaran program yang diposisikan sebagai "obyek".[2] Partisipasi atau emansipasi jauh dari pelaksanaan kedua program tersebut.

C. Antara Gagasan dan Diskursus

Melacak pemikiran dan terbentuknya Mazhab Bogor dalam konteks pembangunan nasional Indonesia membawa kita untuk menguji serangkaian gagasan mereka, apakah bernilai kebahasaan belaka ataukah bersifat diskursif, sebagaimana menurut penilaian Alexander Irwan.[3]

Dapat dikatakan bahwa sebagian ide hanya bernilai gagasan (kebahasaan), yakni ide BUBT, Kolaborasi kritis dalam Bappemka, pembangunan kelembagaan lokal secara interdisiplin dan multi-aktor, dan 8 Jalur Pemerataan plus. Sebagian lain yang berhasil menjadi diskursus adalah UPGK, Garis Kemiskinan Sajogyo, dan IDT yang gagasan di belakangnya adalah ekonomi kerakyatan. Tema ini diangkat sebagai GBHN tahun 1993. Artikulasi tema ini sebenarnya lebih lantang disuarakan oleh Mubyarto. Meski gagasannya turut berkontribusi terhadap program IDT, pada akhirnya program ini oleh Sajogyo sendiri dinilai tidak berjalan dengan baik.

---

[2] Simak, Mukhtar Sarman dan Sajogyo, *Masalah Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia* (Jakarta: Puspa Swara untuk P3ER-YAE, 2000).

[3] Alexander Irwan "Dalil Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya" dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, (Ed.), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia* (Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia, 2006) hlm. 32.

Sebagian ide Gunawan Wiradi yang bermetamorfosa menjadi diskursus adalah gagasan tentang reforma agraria. TAP-MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam merupakan institusionalisasi gagasan tersebut. Gagasan ini bukan diusung olehnya pribadi namun secara bersama-sama dengan pihak lain. Meski demikian, Gunawan Wiradi akhirnya tidak setuju dengan klausul-klausul yang berbunyi di dalam TAP tersebut. Ada upaya pihak-pihak lain yang memelintir, membelokkan, bahkan memandulkan TAP itu dengan cara memisahkan antara payung hukum pembaruan agraria dan payung hukum pengelolaan sumberdaya alam.

Ide *landreform by leverage* Gunawan Wiradi semakin membenarkan pilihan perjuangan gerakan tani yang telah ada. Akan tetapi idenya tentang pendirian Badan Otorita Reforma Agraria tidak bersambut.

Proses mendesakkan gagasan menjadi diskursus atau ide diresepsi menjadi kebijakan berjalan melalui serangkaian tahapan, rute, dan strategi. Antara kritik dan negosisasi tidak jarang dilakukan. Dua ilmuwan yang dikaji tidak hanya memberi "reaksi" atau "respon" terhadap isu pembangunan, terlebih melakukan afirmasi terhadapnya, akan tetapi juga melakukan "kritik" bahkan "aksi kreatif" atau "ide alternatif", dan "*counter argument*" terhadap *mainstream* pembangunan. Hal ini sangat disadari, sebab jika tidak maka tidak ubahnya mereka akan berperan sebagai konsultan. Akan tetapi detail-detail proses tersebut berada di luar jangkauan penelitian ini.

Uraian berikut, disertai tabel, menjelaskan posisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi Mazhab Bogor.

Tabel 14. Peta Paradigma Pembangunan

	Karitatif/ Konformisme	Reformatif	Transformatif
Sebab-sebab masalah	- Keadaan rakyat setempat - Takdir Tuhan - Nasib buruk	- Lemahnya pendidikan - Penduduk yang berlebihan - Nilai-nilai tradisional - Korupsi	- Eksploitasi - Struktur yg timpang - Hegemoni kapitalis
Sasaran	- Mengurangi penderitaan - Mendoakan - Mengharap-kan	- Meningkatkan produksi - Membuat struktur yang ada bekerja - Mengubah nilai-nilai rakyat	- Menentang eksploitasi - Membangun struktur perekonomian/politik baru - Kontra diskursus
Program	- Perawatan anak - Bantuan kelaparan - Klinik - Rumah panti	- Pelatihan teknis - Bisnis kecil - Pengembangan masyrakat - Bantuan hukum - Pelayanan suplementer	- Penyadaran - Pembangunan ekonomi alternatif - Serikat buruh - Koperasi
Tipe perubahan & asumsi	- Fungsional keseimbangan	- Fungsional keseimbangan	- Kritik struktural
Tipe kepemimipinan	- Percaya pada pemerintah - Konsultatif	- Partisipatif - Memiliki tanggung-jawab bersama	- Fasilitator partisipatif - Disiplin yang kuat
Tipe pelayanan	- Memberi derma kepada yang miskin - Kesejahteraan	- Membantu rakyat utk menolong diri sendiri - Revolusi hijau - Pembangunan komunitas - Pendidikan non formal - Pendidikan kejuruan	- *Land reform* - Riset partisipatif - *Popular education*
Inspirasi	- Konformasi	- Reformasi	- Emansipasi - Transformasi

Sumber: Diadopsi dari Mansoer Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 122.

Mazhab Bogor menaruh perhatian pada *the notion of social structure.* Ini adalah ontologi pengetahuan mereka. Pengetahuan itu ditempuh melalui perspektif kritis, emansipatoris, yang melihat persoalan sosial dalam konteks relasi antara *natura* dan *humana*. Epistemologi semacam ini tumbuh dan berkembang dari pentradisian ilmu ala Belanda, dan bukan ala Amerika, yang mereka peroleh sewaktu mereka kuliah, serta imajinasi sosiologis yang tumbuh dari kekhasan personalitas mereka. Pengetahuan yang ditempuh secara demikian bertujuan agar subyek kajiannya, yakni lapis terbawah masyarakat itu dapat mengalami transformasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya (aksiologi). Epistemologi partisipatif dan emansipatoris menghasilkan suatu "sosiologi terapan". Dengan demikian, paradigma pembangunan mereka adalah transformatif, bukan reformisme, apalagi karitatif/konformisme.

Bab VIII
Kesimpulan

Modernisasi merupakan gagasan utama dalam sejarah pembangunan pedesaan di Indonesia sejak masa kolonial hingga Orde Baru. Pajak atas tanah, menghidupkan aset yang mati, industrialisasi, kebijakan etis, hingga Revolusi Hijau masa Orde Baru, dengan berbagai bentuk dan caranya, merupakan pengejawentahan dari gagasan itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dari kekayaan alam, termasuk sumber-sumber agraria di wilayah pertanian-pedesaan. Berbagai kebijakan dalam periode itu, terkecuali masa pasca kemerdekaan hingga Orde Lama ketika ada upaya untuk melakukan *landreform*, meyakini bahwa peningkatan produksi akan membawa perembesan kesejahteraan pada semua lapis masyarakat.

Peningkatan produksi itu dalam kenyataannya tidak berkoinsidensi dengan menurunnya angka kemiskinan. Lebih parah lagi, paradigma itu ditandai dengan pencerabutan rakyat terhadap akses atas alat produksinya, *expropriation of the agricultural population from the land*. Dengan kata lain, yang terjadi bukanlah pembangunan pedesaan, namun adalah pembangunan *di* desa. Modus produksi kapitalis telah berlangsung dalam pembangunan tersebut.

Berbagai pertumbuhan yang pernah dicapai yang ditandai dengan munculnya ribuan pabrik masa kolonial, terbukanya kelembagaan modern pada masa Etis, hingga swasembada pangan [beras] pada masa Soeharto, pada akhirnya menjadi kesempatan

yang hilang (*missed opportunity*) bagi masyarakat luas menuju transformasi agraria ke arah masyarakat industrial. Jikapun terjadi industrialisasi, ia ditandai dengan pengerahan tenaga kerja dari pertanian dengan harga murah, yang tercerabut dari ruang hidup pedesaannya. Industrialisasi merupakan cerita dari nilai lebih (*surplus value*) yang didapat dari proses pencerabutan tersebut. Cara-cara yang ditempuh itu telah mengakibatkan kerusakan agraria yang akut (kriris agraria). Diperlukan beberapa dekade lagi guna mendapati peluang yang sama, dengan catatan, rangkaian gagasan modernisasi yang pernah ada dan cenderung *betting to the strong* itu harus dirombak guna mengarah pada kelompok mayoritas rakyat lemah dan dilemahkan.

Agraria atau tanah, di mana di atas atau di bawahnya terkandung tetumbuhan, air, mineral, bahan tambang dan lain-lain, adalah tempat manusia membangun ruang hidupnya. Hubungan antara manusia dengan sumber-sumber daya agraria itu tidak semata-mata *man to nature relationship*, namun lebih-lebih adalah *man to man relationship*. Dengan demikian, agraria adalah "panggung sejarah". Di atas panggung itu "rakyat" sebagai pelaku dalam lakon sejarah, justru seringkali *ignored* baik oleh ilmuwan, pengambil kebijakan, dan bahkan kesadaran publik.

"Kesadaran mengagraria" itulah yang menjadi inti dari pemikiran dua tokoh Mazhab Bogor. Sebagai inti, akar, dan hulu dari segenap aktivitas manusia, menurut mereka, sudah semestinyalah mengurus agraria dengan merestrukturisasinya dijadikan agenda utama bangsa.

Persoalan redistribusi dalam Reforma Agraria adalah bukan pada "mengapa untuk kaum tani" namun justru sebaliknya, "mengapa tidak untuk kaum tani", yang notabene adalah mayoritas masyarakat Indonesia. Jika mereka diabaikan, hal itu suatu *ignorance* yang luar biasa. Jika kemerdekaan Indonesia adalah suatu "jembatan emas" bagi kelompok elitenya, maka lebih-lebih bagi jumlah terbesar masyarakatnya. Dengan memperkuat fondasi sosial ekonomi masyarakat tani melalui Reforma Agraria, maka kuat pula kewarganegaraan mereka (*citizenship*). Kuatnya

kewarganegaraan menjadi kunci dan cita-cita bagi eksisnya suatu negara pasca kolonial.

Cita-cita dan cara pandang Mazhab Bogor adalah menempatkan Reforma Agraria sebagai agenda bangsa berkesinambungan (*continue*) dengan cita-cita para pendiri bangsa (*founding peoples)*. Mereka telah berperan menjadi jembatan penghubung antar generasi dari kelangkaan pengetahuan tentang masalah-masalah agraria di Indonesia. Dengan peran mereka tersebut, disertai kemampuan berdialog dengan segenap pihak yang memberi pengaruh pada perubahan agraria di Indonesia (studi, kebijakan, dan gerakan), studi agraria di Indonesia dapat direvitalisasi kembali.

Dengan demikian, "Mazhab Agraria Bogor" adalah suatu aliran keilmuan yang menaruh perhatian pada lapis terbawah masyarakat pertanian pedesaan dan senantiasa menyarankan pentingnya penataan ulang atas ketimpangan struktur agraria Indonesia. Dengan pilihan inilah mereka mendobrak elitisme pembangunan pedesaan di Indonesia. Para perintis aliran itu adalah Prof. Dr. Sajogyo, Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro, dan Dr. Hc. Gunawan Wiradi.

Dengan tetap meyakini bahwa aset produksi harus tetap ada di tangan masyarakat tani dan dijamin oleh negara, serta satuan usaha tani keluarga tetap dapat disebut sebagai "bisnis atau perusaha-an", maka pandangan mereka terhadap arah transformasi agraria adalah populis, bukan kapitalis, sosialis, ataupun komunis.

Yang tidak menjadi perhatian pemikiran Prof. Dr. Ir. Sajogyo dan Dr. HC. Gunawan Wiradi, M.Soc. Sc. dalam studi agraria mereka adalah melihat relasi kekuasaan dalam pengertian relasi modal. Mereka hanya melihat bagaimana posisi dan peran rakyat di satu sisi, ilmuwan, dan kekuasaan negara di sisi lain. Bagaimana modus dan proses kapitalisasi menggurita, membelit berbagai pihak, hingga masuk ke konsumsi rumah tangga dengan cara-cara yang baru pula, menjadi "*the new agrarian questions"* bagi para pemikir agraria generasi selanjutnya.

Di saat kampus, LSM, dan pemerintah memiliki kelemahannya yang tipikal, yakni pembedaan yang tegas antara ranah studi, aksi/pendampingan, dan kebijakan (*policy*), maka kedua tokoh hadir menembus ketiga ranah itu. Prof. Dr. Ir. Sajogyo memiliki "sosiologi terapan" yang mampu menjadi "titik temu" berbagai kepentingan: bagaimana agar ilmu relevan secara sosial baik dalam definisi masyarakat (pemberdayaan) maupun pemerintah (kebijakan). Sosiologi terapan Sajogyo bukanlah dalam arti fungsional. Lebih tepat ia disebut sebagai sosiologi (kritis) terapan. Ia memang berorientasi klinis dan *problem solving*, namun hal itu dalam rangka emansipatoris terutama menyangkut lapisan masyarakat paling bawah.

Tidak cukup mengherankan jika sosiologi terapan Sajogyo dapat bersesapa dengan *apllied science* yang saat itu dibutuhkan oleh pemerintah. Fokus dan tema gagasan Sajogyo tidak pernah keluar dari kerangka pembangunan yang diagendakan pemerintah, namun justru masuk dan berusaha mempengaruhi arah dan perhatiannya, dan tentu saja: mengkiritiknya.

Agar tidak tersubjugasi menjadi sosiologi yang semata-mata mendukung kekuasaan dalam melaksanakan pembangunan yang saat itu menjadi ideologi *mainstream*, maka dibutuhkan bangun pengetahuan yang kokoh. Di sinilah sosiologi terapannya mendasarkan diri pada sosiologi empiris. Empiris ala Prof. Dr. Ir. Sajogyo yang ditunjukkan melalui alat survei dan statistika yang ketat, dalam kenyataannya berhasil menghindarkan diri pada *positivisme*. Metode empiris itu berhasil menjadi metode yang bervisi emansipatoris: ditunjukkannya kenyataan empiris (nyata) tentang masyarakat lapis bawah yang selalu diabaikan bahkan menjadi korban dari berbagai kebijakan dan produk pengetahuan *status quo*, agar selanjutnya dapat diposisikan sebaga subyek.

Selain otoritas pengetahuan, dari sisi personalitas dibutuhkan karakter yang kuat, keuletan, stamina yang tangguh, tanpa prasangka, tidak mudah tergoda oleh materi, dan senang berbagi, agar mampu senantiasa mengajak ketiga ranah itu terus-menerus berinteraksi dan menciptakan *critical collaboration*.

Salah satu kesinambungan mengenai profil *founding people* yang ditampilkan oleh keduanya adalah terepresentasinya Sajogyo dan Gunawan Wiradi sebagai sosok yang mempraktikkan *critical collaboration* tersebut. Istilah ini bisa jadi tidak ditemukan pada masa generasi sebelumnya, sesuatu yang barangkali di luar logika mereka dan kepentingan bangsa saat itu. Ranah studi, kebijakan, dan gerakan dalam pengalaman para *founding people* dan kedua tokoh ini adalah sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan: saling bersinergi.

Istilah itu muncul dalam kondisi ketika semuanya saling menyimpan prasangka pada suatu masa dan konteks tertentu: ketika ranah studi asyik duduk di menara gading; di saat setiap kebijakan berdampak pada kesejahteraan rakyat bahkan menimbulkan resistensi; dan dalam kedua kondisi itulah dinamika gerakan cenderung anti gagasan dan anti negara. *Critical collabortion* baru dapat dilakukan jika terlebih dahulu masing-masing ranah memahami dan mengakui problematika tersebut.

Berpengaruh dan bersambutnya gagasan Reforma Agraria sebagai agenda bangsa beberapa tahun terakhir yang digelorakan oleh Gunawan Wiradi, bukan hanya karena adanya kesempatan politik yang terbuka, runtuhnya keyakinan terhadap ideologi pembangunan ala kapitalis, dan tumbangnya rezim otoritarian, namun pertama-tama karena tidak henti dan lelahnya ia terus menyuarakan pendiriannya itu, memproduksi basis pengetahuan tentangnya, kemauan dan kerendah-hatiannya dalam berbagi pengetahuan. Sebab, ketika semua kesempatan itu terbuka namun tidak ada basis pengetahuan tentang Reforma Agraria yang kokoh, maka revitalisasi gagasan tersebut tidak mungkin terjadi. Hal-hal inilah yang menjadi kunci dari keberhasilan pelembagaan gagasan itu. Bagaimanapun, sebuah gagasan terwadahi oleh *habitus* pemiliknya.

Selain hal di atas, gagasan Prof. Dr. Ir. Sajogyo dan Dr. HC. Gunawan Wiradi, M.Soc. Sc. menjadi "*distinctive*" bukan karena kecanggihan teoretisnya (*sophisticated theory*), namun karena demikian kuat vokasionalitasnya. Keberpihakanlah (vokasional

menurut Max Weber) dan bukan profesionalisme, yang dalam pengalaman mereka memberi kerangka kerja, proses, dan tujuan bagaimana sebuah gagasan itu seharusnya diproduksi. Sikap keberpihakan itulah yang sekaligus membedakan apakah tujuan tadi hanya berupa "dalih" ataukah "galih". Posisi dan kesadaran akan posisi (*positionality*) mempengaruhi isi dan cara pengetahuan disajikan sangat disadari keduanya.

Jika profesionalisme mendasarkan diri pada sikap netralitas, tergantung pada siapa yang memesannya (penguasa), maka vokasional melekatkan diri pada siapa yang seharusnya dibela (pihak yang lemah). Vokasionalitas itu ditempuh dengan cara memberi perhatian pada struktur paling lemah dalam kelas sosial pedesaan. Jika prinsip ini diterima, kelangkaan atau absennya analisa Marxis pada suatu periode yang diyakini mampu membongkar ketimpangan struktural masyarakat dan konteks pembangunan yang menjadi ideologi ekonomi pertumbuhan Orde Baru, tidak lantas menjadi persoalan bagi mereka dalam mengembangkan ilmu yang relevan. Dengan itu mereka terbebas dari tuduhan "kemandegan ilmu-ilmu sosial".

Vokasionalitas itu tidak lantas buta terhadap kritik ilmiah, mengingat keduanya juga seorang *expertise* dalam teori, metode dan metodologi, dan kritik menjadi bagian darinya. Maka yang menjadi persoalan bukanlah benar-salahnya netralitas (tidak berpihaknya) ilmu pengetahuan, namun dalam kondisi dan suasana macam apa klaim netralitas itu lahir, dikukuhkan, disebarluaskan, lantas dianut oleh kelompok tertentu. Inilah tugas ilmu sosial, lebih-terutama ilmu sejarah.

EPILOG

Dari Bogor untuk Rakyat Indonesia

Francis Wahono, Ph. D
Direktur Yayasan Cindelaras Paritrana, Yogyakarta.

Buku sejarah pemikian agraria ini sejatinya bertutur mengenai Mazhab Bogor di bidang ilmu sosial terapan. Mazhab Bogor ini sebetulnya mewarisi pemikiran sosialisme kerakyatan. Tradisi pemikirannya bisa dilacak sejauh Kitab Taurat, Injil dan Al Qur'an. Pemikirannya juga dibakukan oleh para Bapak Gereja, sebagaimana dirumuskan dalam diktum berikut: hak kepemilikan pribadi hanya dapat dibenarkan sejauh mempunyai fungsi sosial, atau ke *bonum commune* (kesejahteraan bersama atau umum). Semua yang didiskusikan oleh para pelaku Mazhab Bogor adalah bahwa penyelesaian masalah kemiskinan dan ketimpangan, khususnya yang terkait dengan masalah agraria, kuncinya adalah pada penguasaan sarana-sarana produksi keagrariaan. Sarana produksi itu bisa berarti tanah, air, keanekaragaman hayati, udara, dan sebagainya. Apapun positifnya intervensi negara maupun swasta dan swadaya rakyat dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, atau dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat, jika penguasaan sarana-sarana produksi masih timpang, akhirnya *toh* tidak membawa kepada penyelesaian sejati, atau bahkan semakin memperparah ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, diskusi tentang keadilan, pertanian, dan pembangunan, pokok kunci persoalannya selalu kem-

bali pada siapa yang menguasai sarana produksi, berapa dan bagaimana, serta untuk atau dinikmati oleh siapa. Kumpulan siapa bilamana mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu akan menjadi kelompok kelas. Maka, acapkali analisisnya disebut analisis kelas. Sementara aksinya dikatakan konflik kelas. Kelas itu oleh para pemikir sosialis dimengerti sebagai kelas sosial. Maka, relasinya disebut relasi kelas sosial. 'Sosial' artinya hubungan eksistensi dan fungsional antar kelas. Secara ekstrim, kelas dipolarisasi menjadi antara 'kelas majikan' dan 'kelas buruh', 'kelas tuan tanah' dan 'kelas buruh tani'. Kalau Karl Marx masih berbicara mengenai kelas majikan dan kelas buruh, Vladimir Ilyic Lenin—untuk kasus Rusia yang lebih dominan pertaniannya dari pada Eropa Barat yang sudah masuk era industri pabrik—berbicara mengenai kelas tuan tanah dan kelas buruh. Lebih jauh lagi, di Cina, Mao Zedong (Mao Tse-Tung)—di antara kelas tuan tanah dan kelas petani buruh—menambahkan 3 kelas lainnya.

Menerapkan, atau lebih tepatnya melahirkan pemikiran sosial khas Indonesia, khususnya ekologi Jawa-Madura-Bali-Lampung, Mazhab Bogor yang dirintis oleh Prof Dr. Ir. Sajogyo, Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro, Dr. Hc. Gunawan Wiradi, yang berdialog secara internasional dengan Dr. D.H. Penny, Dr. William Collier dan Prof Dr. Benjamin White—dalam pendulum kerangkawi analisis kelas tradisi sosialisme, dengan inspirasi *insight* dari populisme-baru a la A.V. Chayanov dan para pengikutnya—menambahkan kelas sosial 'petani gurem' (kurang lebih penguasa lahan sawah subur 0.05 sampai 0.5 hektare) di antara kelas petani buruh (proletarnya daerah pertanian) dan kelas penguasa tanah luas (paling maksimum 2 hektar; artinya, tidak sempai disebut sungguh sebagai 'tuan tanah'). BUMN seperti PTP yang menguasai tanah sangat luas, kendati bersaing dalam mendapatkan tanah dengan para petani kecil, tidak serta merta muncul dalam radar mereka sejak awal. Pada paruh kedua kekuasaan Orde Baru Soeharto, penguasaan tanah dan air oleh swasta secara besar-besaran untuk pertambangan maupun Hak Penguasaan Hutan, juga Hutan Tanaman Industri, dan pada akhirnya untuk

Perkebunan Sawit dan lainnya—sebagai 'musuh' program pengadaan tanah cukup untuk petani gurem dan buruh tani—akhirnya juga menjadi perhatian Mazhab Bogor.

Keadilan sosial itu adalah utamanya bukan sebagai penyelesaian akhir dari proses atau hasil, seperti pembagian pendapatan, jaminan sosial, tetapi lebih sebagai penyelesaian awal atau dasariah, atau akariah, seperti hak atas penguasaan tanah, penguasaan air, penguasaan keanekaragaman hayati, penguasaan udara, dan lain sebagainya. Penyelesaian awal atau dasariah demikian yang secara tak lelah-lelahnya disuarakan oleh Mazhab Bogor adalah untuk mendesakkan Reforma Agraria sebagaimana dimandatkan oleh Undang Undang No. 5 mengenai Pokok Agraria tahun 1960 atau dikenal sebagai UUPA 1960.

Sebagai pembanding, kalau Mazhab Bulaksumur, yang antara lain dimotori oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdja, Prof. Dr. Mubyarto, Prof. Dr. Masri Singarimbun, Prof. Dr. Lukman Soetrisno, dan Prof. Dr. Dibyo Prabowo—kendatipun berbicara mengenai petani gurem dan buruh tani—namun tidaklah begitu getol memperjuangkan diberlakukannya Reforma Agraria, bahkan berhadapan dengan rezim otoriter yang alergi terhadap PKI (pendukung aksi sepihak untuk pelaksanaan Reforma Agraria). Ada dari mereka yang anti Reforma Agraria, seperti Prof Dr. Mubyarto. Sebenarnya Prof. Dr. Sartono Kartodirdja dan Prof Dr. Ir. Sajogyo, berguru pada guru besar yang sama, yakni Prof. Dr. W.F. Wertheim, yang terkenal sebagai pewaris Mazhab Sosialisme dalam pemikiran sosial. Namun, berkaitan dengan isu Reforma Agraria, Prof. Sartono kurang intens, meskipun bukan berarti tidak melihat signifikansinya. Karena perbedaan ini, meskipun antar Mazhab Bogor dan Bulaksumur mereka berkawan akrab dalam Yayasan Agro Ekonomika (YAE)—pelanjut Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) otentik, namun dalam mengutarakan solusi-solusi terhadap masalah kemiskinan dan ketidakadilan agraria, atau pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan swasembada

pangan khususnya beras, tidak jarang berbeda nuansa dan bahkan esensinya.

Sebagai misal, dalam sebuah pernyataan di harian *Kompas* (22 Juli 1983) Prof. Dr. Mubyarto berkesimpulan—mengutip hasil penelitian BPS—bahwa "Buruh tani, walaupun kenyataannya merupakan kelompok masyarakat tanpa punya tanah, nasibnya justru lebih baik daripada petani gurem". Menanggapi kesimpulan tersebut, sebagai salah satu cendekiawan Mazhab Bogor, Dr. Hc. Gunawan Wiradi menulis dalam *Kompas* (21 Oktober 1983) sebagai berikut: "Keterangan Mubyarto itu sangat mengejutkan, kalau benar buruh tani lebih makmur dari petani kecil, segala pembicaraan mengenai *landreform,* kekhawatiran tentang terjadinya polarisasi masyarakat pedesaan berdasar penguasaan tanah, dsb., tidak relevan lagi.". Sebagai contoh lainnya, bilamana Mazhab Bogor mempersoalkan keberhasilan program modernisasi pertanian Revolusi Hijau dengan keberhasilan swasembada beras tahun 1984 yang menyisakan ketimpangan pembagian keuntungan dari keberhasilan produksi di antara petani berlahan luas dan gurem, serta buruh tani, karena tidak terlaksananya Reforma Agraria; maka Mazhab Bulaksumur—seraya memberikan tepuk-tangan keberhasilan swasembada beras, menanggapi ketimpangan pedesaan sebagai akibat dari semakin sempit peluang kerja di sektor pertanian—mengusulkan diperbanyaknya penciptaan peluang kerja di pedesaan dan pada sektor non-pertanian di perkotaan, terlebih untuk penduduk muda. Program Instruksi Presiden tentang Desa Tertinggal (IDT) awal tahun 1990-an, yang terhenti, tentu gagal, setelah habis subsidi pemerintah, sebagai contoh dari pelaksanaan usulan tersebut. Memang secara kebijakan dan materi, program tersebut jauh lebih baik dari program zaman Reformasi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), dan sebangsanya. Bahkan mungkin setingkat dengan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Namun, tetap saja, tanpa Reforma Agraria, program-program tersebut hanya bersifat tambal sulam dan pemadam kebakaran, dan tidak pernah tuntas menye-

lesaikan permasalahan dari akarnya, yakni ketimpangan sarana produksi. Artinya, untuk petani yang sebagian besar dapat diklasifikasikan sebagai petani gurem dan buruh tani adalah pemerataan penguasaan tanah, yang untuk ukuran UUPA 1960, adalah seorang petani dengan keluarga berjumlah 7 anggota adalah seluas 2 (dua) hektar sawah subur, atau kalau tanah kering dua kali lipatnya, dengan kriteria di daerah padat penduduk seperti misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai ikutan dari itu, yang tentu tidak konsisten dengan kesuburan sawah atau tanahnya, adalah program transmigrasi. Program transmigrasi mengacu pada ukuran 2 (dua) hektar tanah (bukan sawah subur di daerah padat penduduk) untuk rumah dan ladang di daerah transmigrasi bagi tiap keluarga transmigran, dengan awalan jatah hidup dari pemerintah tiga bulan sampai satu tahun pertama. Fakta di lapangan, tanah bukan sawah subur, bukan saja ladang kering, tetapi lahan bekas tebangan kayu hutan yang masih penuh dengan *pokol* (sisa pokok) kayu dan boleh jadi tanahnya berpasir atau berasam tinggi alias berhara rendah. Transmigrasi yang seyogyanya menjadi solusi kepadatan penduduk di tanah Jawa jika Reforma Agraria dilakukan, justru menjadi "ekspor" tenaga kerja murah ke perkebunan Luar Jawa yang akhirnya menjadi perataan kemiskinan sebagaimana transmigrasi model "kolonialisasi" (bukan kolonisasi) zaman penjajahan Belanda. Warisan zaman "perkoelian" masa penjajahan Belanda tersebut, pada anak turunnya, masih dengan mudah kita saksikan di daerah perkebunan-perkebunan negara maupun swasta di Sumatera Utara—antara lain di Labuhan Batu, daerah transmigrasi Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Barat, Ketapang misalnya. Tanpa Reforma Agraria, bukan hanya program pensejahteraan petani Jawa, Madura, Bali, Lombok, Lampung, dan anak-keturunannya yang terancam dan hanya bersifat tambal sulam, tetapi juga program transmigrasi sebagai turunannya.

Sajogyo dan kawan-kawan dari Mazhab Bogor—yang di satu pihak berhadapan dengan rezim yang semi otoriter, dan di lain

pihak berhadapan dengan realitas konkret di lapangan—mengusulkan solusi terhadap kemiskinan, ketimpangan sosial, ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada diri Reforma Agraria terbatas, yakni koperasi usaha tani dari kelas petani menengah ke bawah hingga ke petani gurem. Artinya, kelas petani tersebut dipastikan mendapatkan tanah dan sarana agraria lainnya (air, keanekaragaman hayati, dan asupan lainnya), sehingga mereka mampu menghasilkan produk usaha mereka, utamanya berupa keanekaragaman pangan, dan sekaligus menciptakan pekerjaan bagi mereka sendiri. Mengapa mempunyai pekerjaan dan bekerja menjadi penting, karena harkat manusia juga ditentukan oleh ada tidaknya pekerjaan, di mana mereka dapat mengaktualisasikan segenap potensi yang melekat dalam dirinya sebagai manusia citra Allah sebagai pencipta dan penyelenggara.

Oleh karena itu, membuat gradasi garis kemiskinan, dari tingkat terendah "kesrakat" sampai tertinggi dalam tataran tengah, yakni "kecukupan" dengan ukuran setara pangan pokok seperti beras menjadi sangat penting. Barangkali detail seperti ukuran setara beras, yang tentunya terinspirasi dengan ukuran setara gandum yang dipakai di India Utara, menegaskan bahwa Mazhab Bogor sangat suntuk dengan penelitian emperis ekologis yang dibingkai kelembagaan tradisi metodis yang diikuti H. Ten Dam, Karl Pelzer dan di kemudian hari Norman Uphoff. Akibat dari itu, rekomendasi mereka soal kebijakan pengurangan kemiskinan atau peningkatan kemakmuran rakyat selalu sarat dengan pertimbangan keadilan sarana produksi dan mendarat pada penyelesaian sederhana namun kunci.

Buku Luthfi ini, dengan jelas dan cermat, mampu membawa pembaca, para peneliti, dan pengambil kebijakan ke dalam alur pemikiran dan pendekatan Mazhab Bogor tersebut. Buku ini sangat penting bagi mereka yang punya niat dan kehendak baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan pekerjaan, serta keadilan bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana diuraikan dalam

buku ini, di masa Orde Baru, modernisasi pertanian yang dikenal dengan nama Revolusi Hijau, kendatipun mampu membawa Indonesia pada pencapaian swasembada beras (tahun 1984), tetapi tanpa Reforma Agraria, yang terjadi adalah semakin parahnya ketimpangan sosial di daerah, khususnya di ranah pertanian.

Pada zaman rezim Reformasi ini, semakin hari pemerintah dengan kebijakannya justru, berkebalikan dengan semangat Mazhab Bogor, berhenti pada titik berwacana tentang Reforma Agraria, dan berlanjut dengan mulus baik lewat DPR maupun Presiden dan menteri-menterinya, mengobarkan semangat anti-Reforma Agraria. Yakni, antara lain dengan Undang-Undang Penanaman Modal yang bisa sampai mendapatkan hak sewa 95 tahun bagi investor, Undang-Undang Privatisasi Air, program sertifikasi tanah hanya melulu untuk tujuan mempermudah transaksi tanah dan kepastian mendapat lahan bagi investor, membolehkan Taman Nasional ditambang alias dilakukan penebangan hutannya, izin penangkapan ikan oleh perusahaan perikanan asing dengan pukat harimau (asal bayar), dan lain sebagainya. Melihat kecenderungan yang melawan penyelesaian tuntas dan dasariah Reforma Agraria, maka pemikiran dan rekomendasi Mazhab Bogor akan semakin relevan dan menjadi daya tarik besar bagi generasi muda dan mereka yang ingin melihat tegaknya masyarakat adil dan makmur di bumi Indonesia semakin terealisir, bukan malah tersingkir. Buku ini sangat penting dan bermandat untuk tujuan tersebut. Dan tentunya menjadi rantai penghubung generasi pencinta keadilan dan rakyat terpinggir, khususnya petani gurem dan anak-keturunanya dari abad-20 dengan abad-21.

Yogyakarta, 8 Juli 2011

DAFTAR PUSTAKA

Artikel, Buku, Jurnal

á Campo, J.N.F.M, "Munculnya Perusahaan Korporat di Indonesia pada Masa Kolonial 1893-1913", dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: PSSAT-UGM dengan Pustaka Pelajar, 2002).

Ahmad Nashih Luthfi dan Amin Tohari, "Moch. Tauchid: Tokoh Pendiri Bangsa, Gerakan Tani, dan Pendidikan Taman Siswa", dalam Moch Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia.* (Yogyakarta: STPN Press, 2009).

Ahmad Nashih Luthfi, "Sajogyo, Pembangun Studi Agraria Indonesia", *Jurnal Nasional,* 19 Juli 2008.

Akram-Lodhi, Haroon, "(Re)imagining Agrarian Relations? The World Development Report 2008: Agriculture for Development", dalam *Development and Change*, The Hague: Institut of Social Studies, 2008.

Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan (Ed.), *Kemiskinan Struktural:* Suatu *Bunga Rampai* (Jakarta: Pulsar/YIIS/HIPIS,1980).

Anderson, Benedict, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946* (Jakarta: Sinar Harapan,1988).

Andi Achdian, *Tanah bagi Yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi terpimpin 1960-1965* (Bogor: Kekal Press dan STPN, 2009).

Anonim, "Green Revolution Curse or Blessing?", kertas kerja *International Food Policy Research Institute*, 2002.

Arief Budiman, "Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Ahistoris", *Prisma,* 6 Juni, 1983.

Aris Arif Mundayat, *Ritual and Politics in New Order Indonesia: A* Study *of Discourse and Counter-Discourse in Indonesia,* Disertasi pada School of Social and Life Science, Swinburne University of Technology, 2005.

Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, *Almanak Pertanian 1954* (Jakarta, 1954).

Bambang Purwanto, *Kepemimpinan dan Masalah Pertanahan di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Nampu dan Desa Ngandagan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1985).

Banzon-Bautista, Cynthia, "The Saudi Connection: Agrarian Change in A Pampagan Village, 1977-1984", dalam Gillian Hart, Andrew Turton, dan Benjamin White (Eds.), *Agrarian Transformation, Local Processes and the State in Southeast Asia* (California: University California Press, 1989).

Bastin, John "The Working of The Early Land Rent System in West Java", Jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 116 (1960), No. 3.

Bastin, John Sturgus, *The Development of Raffles' Ideas on The Land Rent System in Java* (The Hague: s'Gravenhage: 1954).

Beddu Amang, "Prof. Sajogyo: Tokoh Pencetak Kader Peneliti dan Pemikir dalam Bidang Sosial Ekonomi Pertanian di Indonesia", dalam Mubyarto dkk. (Ed.), *Sajogyo, Bapak, Guru, dan Sahabat* (Bogor: Yayasan Agro Ekonomika, 1996).

Ben White, "Economic Diversification and Agrarian Change in Rural Java", dalam Paul Alexander, Peter Boomgaard, Benjamin White (Eds.), *In the Shadow of Agriculture: Non-farm Activities in the Javanese Economy Past and Present* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991).

Bernstein, Henry, "Land Reform: Taking A Long(er) View", *Journal of Agrarian Change* 2(4), 2002.

Boedi Harsono, *Hukum* Agraria *Indonesia:, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1* (Jakarta: Djambatan, 2007[edisi ke-11]).

Boeke dan Burger, *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger* (Jakarta: Bhratara, 1973).

Boeke J. H, "Dualistic Economics", dalam Wertheim (Ed.), *Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Policy* (The Hague: van Hoeve Publisher Ltd, 1961).

Boomgaard, Peter "The Making and Unmaking of Tropical Science Dutch Research on Indonesia, 1600-2000", Jurnal *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (BKI),* 162-2/3 2006.

Boomgaard, Peter, "The Making and Unmaking of Tropical Science Dutch Research on Indonesia, 1600-2000". Jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI),* 162-2/3, 2006.

Booth, Anne, "Poverty and Inequality in the Soeharto Era: an Assessment", *BIES,* Vol 36, No. 1, April 2000.

Borras Jr, Saturnino M, Cristóbal Kay dan A. Haroon Akram Lodhi, "Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and Current Issues," dalam Akram-Lodhi, A.H.; S.M. Borras Jr. and C. Kay (Eds), *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries* (London, 2006)

Breman, Jan, "The Village in Focus", dalam Breman, P. Kloos dan A. Saith (Eds.), *The Village in Asia Revisited* (J.C. Delhi: Oxford University Press, 1997).

Breman, Jan dan Gunawan Wiradi, *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa:* Studi *Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20* (Jakarta: LP3ES-KITLV, 2004).

Breman, Jan, *The Village on Java and The Early Colonial State* (Rotterdam: CASP, 1980).

Budget Commission, *Living Condition of Plantation Workers and Peasant in Java in 1939-1940*—diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh Robert van Niel (New York: Modern Indonesia Project, Cornell University,1956).

Budiawan, "Seeing the Communist Past through the Lens of a CIA Consultant: Guy J. Pauker on the Indonesian Communist Party before and after the '1965 Affair'", *Inter-Asia Cultural Studies,* Volume 7, Number 4, 2006.

Burger, D. H, *Sedjarah Ekonomi Sosiologis Indonesia, Djilid Pertama* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1960).

Caldwell, Malcolm & Ernst Utrecht, *An Alternative History of Indonesia* (Sidney: Apcol, 1979).

Clifford Geertz, "Recollection of an Itinerant Career" dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies,* Vol. 24, No. 3, 1988.

Collier, W.L, Gunawan Wiradi, dan Soentoro, "Recent Changes in Rice Harvesting Methods", *Buletin of Indonesian of Indonesian Economic Studies* (*BIES*), Vol. IX, No. 2, July, 1973.

Collier, W.L, Soentoro, Gunawan Wiradi, dan Makali, "Sistem Tebasan Bibit Unggul dan Pembaharuan Desa di Jawa", *Prisma*, No. 6, 1974.

D. N. Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948-Peristiwa Sumatera 1956* (Jakarta: Jajasan Pembaruan, 1958).

D.N. Aidit, *Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa: Laporan Singkat tentang Hasil Riset Mengenai Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani Djawa Barat* (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964).

Dam, H ten "Cooperation and Social Structure in the Village of Chibodas", dalam W. F. Wertheim (Ed.), *Indonesian Economics, the Concept of Dualism in Theory and Practice* (The Hague: W. van Hoeve, 1961).

Daquila, Teofilo C, *The Economic of Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand* (New York: Nova Science Publisher, 2005).

de Soto, Hernando,"Listening to the Barking Dogs: Property Law Agains Poverty in the non-West", *Focaal-European Journal of Anthropology,* No. 41, 2003.

De Vries, Egbert, *A Summary Report of Activities of The Agro Economic Survey in Indonesia, 1965-1968* (Bogor: SAE, 1968).

Dibyo Prabowo dan Sajogyo, "Sidoarjo, East Java, and Subang, West Java", dalam Gary E. Hansen (Ed.), *Agricultural and Rural Development in Indonesia* (Colorado: Westview Press, 1981).

Dick, H. W, "Industrialisasi Abad ke-19: Sebuah Kesempatan yang Hilang?", dalam Thomas J. Lindblad (Ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES, 2000).

Dick, H. W, "Nineteenth-century Industrialization: A Missed Opportunity?", dalam J. Thomas Lindblad (Ed.), *New Challenges in The Modern Economic History of Indonesia: Proceeding of the First Conference in Indonesia's Modern*

Economic History, Jakarta, October 1-4, 1991 (Leiden: Programme of Indonesian Studies, Leiden University, 1993).

Dingley, S, *Gerakan Petani di Indonesia*—penerjemah: Ruslani, tt., tt.

Dingley, S, *The Peasant's Movement in Indonesia* (Berlin: R.L. Prager, 1927).

E. A. Roekasah dan David H. Penny, "BIMAS: A New Approach to Agricultural Extension in Indonesia", *BIES,* No. 7, Juni 1967.

Eka Budianta, *Bertemu Sajogyo,* draf versi 2009 (Bogor: BRI, Agro Ekonomi, dan SAINS, 2009).

Eko Cahyono dan Moh. Shohibuddin, "Pembangunan yang Baik: Cukup Pangan dan Gizi Baik, Wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Sajogyo", *Basis,* No. 05-06, Mei-Juni, 2008

Endang Suhendar, dkk., *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi* (Bandung: AKATIGA, 2002).

Endang Suhendar, "Sekelumit Tentang Gunawan Wiradi", dalam Endang Suhendar, dkk., *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi* (Bandung: AKATIGA, 2002).

Foulcher, Keith, *Social Commitment in Literature and Arts: The Indonesian "Institute of People Culture" 1950-1965* (Victoria: Monash University Press, 1986).

Francis Wahono, "Dinamika Ekonomi Sosial Desa sesudah 25 tahun Revolusi hijau", *Prisma,* Maret 1994.

Francis Wahono, "Pendahuluan: Teori Terbentuk karena Aksi", dalam Sajogyo, *Ekososiologi, Deidologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi: Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus Uji* (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, bekerjasama dengan Sains, dan Sekretariat Bina Desa, 2006).

Gibson, Joyce, "Rice Production and Import", *Bulletin of Indonesian Economic Studies,* No 1, Juni 1965.

Goenawan Mohamad, dkk., *Menyambut Indonesia: Lima Puluh Tahun bersama Ford Foundation (1953-2003)* (Jakarta: Ford Foundation dan Equinox Publishing, 2003).

Gunawan Wiradi, "Land Reform in a Javanese Village: Ngandagan", AES-RDS. Occational Paper No. 4, 1981, (versi bahasa Inggris dari Skripsi 1961).

Gunawan Wiradi, "Landreform in India: Report on The Visit of Indonesian Team to Punjab and West Bengal", paper

dipresentasikan dalam *Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective*, Sukabumi, 17-30 Mei, 1981.

Gunawan Wiradi, "Revolusi Hijau Ditinjau Kembali", *Suara Pembaruan*, 24 September, 1987.

Gunawan Wiradi, "Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan", makalah disajikan dalam Seminar "Pembangunan Pedesaan dan Masalah Pertanahan", diselenggarakan oleh PAU-Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 13-15 Februari 1990.

Gunawan Wiradi, "Penelitian Empiris Mengenai 'Struktur Kekuasaan dalam Masyarakat Pedesaan: Belajar dari Pengalaman", *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin KRITIS*, No. 4, Tahun VII, UKSW, 1993.

Gunawan Wiradi, "Karya Chayanov ditinjau Kembali", paper diskusi, ISI Bogor, 7 Juli 1993, tidak diterbitkan.

Gunawan Wiradi, "Aspek Metodologi dalam Pengembaraan Ilmiah Prof. Dr. Ir. Sajogyo", dalam M. T. Felix Sitorus, dkk. (Ed.), *Memahami dan menanggulangi Kemiskinan di Indonesia: Prof. Dr. Sajogyo 70 Tahun* (Jakarta: Gramedia, 1996).

Gunawan Wiradi, "Prof. Dr. Ir. Sajogyo: Temanku, Guruku, dan Bapakku", dalam Mubyarto, dkk. (Ed.), *Sajogyo: Bapak, Guru, dan Sahabat* (Bogor: Yayasan Agro Ekonomika, 1996).

Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta dan Bandung: Insist, KPA, dan Pustaka Pelajar, 2000).

Gunawan Wiradi, "Politik Pertanian dari Masa ke Masa", makalah disampaikan dalam acara "Workshop Pertanian YLBHI" bertema *Tantangan dan Masa Depan Pertanian*, di Hotel Seruni, Cisarua, tanggal 2 Mei 2005.

Gunawan Wiradi, "Agrarian Reform Movement in Indonesia: Past and Present", tt, 2005

Gunawan Wiradi, *Dilemma Reforma Agraria,* makalah tidak diterbitkan, (29 hlm), 2008.

Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria* (Bogor: Sajogyo Institut dan IPB, 2009).

Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir* (Bogor dan Bandung: Sajogyo Institute, KPA, dan AKATIGA, 2009 [cetakan ke-dua]).

Haas, Peter, *Introduction: Epistemic Community an Policy Coordination*, International Organization 46, 1, Winter 1992.

Hansen, Gary "Episodes in Rural Modernization: Problems in the BIMAS Program", *Indonesia,* No. 11, April 1971.

Harsya W. Bachtiar (Ed.), *Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan Karangan untuk Prof.Dr.Selo Soemardjan* (Jakarta: 1988).

Hayami, Yujiro dan Vernon W. Ruttan, *Agricultural Development: An International Perspective* (Baltimore dan London: The John Hopkins Press, 1971).

Hayami, Yujiro, "Ecology, History, and Development: A Perspective from Rural Southeast Asia", *The World Bank Research Observer,* Vol. 16, No. 2, 2002.

Hilmar Farid, "Pramoedya dan Historiografi Indonesia", dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (Ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta dan Bali: YOI, KITLV, dan Pustaka Larasan, 2008).

Houben, Vincent J. H, "Perkebunan-perkebunan Swasta di Jawa Abad ke-19", dalam J. Thomas Lindblad, (Ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES, 2000).

Husken, Frans, *Cycles of Commercialization and Accumulation in a central Javanese Village,* dalam Gillian Hart, Andrew Turton, dan Benjamin White (Ed.), *Agrarian Transformation, Local Processes and the State in Southeast Asia* (California: University California Press, 1989).

Husken, Frans, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980* (Jakarta: Grasindo, 1998).

Ignas Kleden, "Teori Ilmu Sosial sebagai Variabel Sosial: suatu Tinjauan Filsafat Sosial", dalam Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik kebudayaan* (Jakarta: LP3ES, 1987).

Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (Jakarta: LP3ES, 1988).

Imam Yudotomo, *Kakung-Uti: Moch. Tauchid-Kastariyah, Catatan untuk Cucu-cucunya,* tidak diterbitkan, 2004.

Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: UGM Press, 1994 [cetakan keempat]).

Iman Soetiknjo, *Proses Terjadinya UUPA: Peran serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: GMU Press, 1987).

Irlan Soejono, *Program "Bimas" Sebagai Pendorong Modernisasi Usahatani* (Bogor: SAE, 1968).

Iskandar P. Nugraha, *Mengikis Batas Timur dan Barat, Gerakan Theosofi dan Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2001).

Ivanocich Agusta, "Realisme Sosiologi Pembangunan Desa, Membaca Paradigma dan teori Sajogyo", dalam Sajogyo, *Ekososiologi, Deidologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus Uji)* (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, bekerjasama dengan Sains, dan Sekretariat Bina Desa, 2006).

Jaspan, M. A, "Persoalan Transmigrasi: Obat Mujarab atau Jalan Buntu", dalam Jaspan, M. A, *Social Stratification and Social Mobility in Indonesia*, *A Trend Report and Annotated Bibliography* (Jakarta: Penerbit Gunug Agung, 1960).

Jaspan, M. A. *Social Stratification and Social Mobility in Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1960).

Jurnal *Sosiografi dan Hukum Adat*, Yogyakarta, Pembina Hukum Adat, Tahun III, No. 1 & 2, 1961.

Kahin, George McTurnan, "Preface", dalam Wertheim, "The Coolie Budget Report", *Pacific Affair,* Vol. 26, No. 2. Juni, 1953.

Kampto Utomo, "Prakata" dalam Irlan Soejono, *Program "Bimas" Sebagai Pendorong Modernisasi Usahatani* (Bogor: SAE, 1968).

Kampto Utomo, "Research Sosiologi Pedesaan di Indonesia, 1945-1965", dalam Sadikin Soemintawikarta (Ed.), *Research di Indonesia, 1945-1965, Bidang Pertanian (III)* (Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia, 1965).

Kampto Utomo, *Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah W. Sekampung (Lampung)* (Yogyakarta: GMU Press, 1975).

Kano, Hiroyoshi, "Pemilikan Tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa", dalam Sediono M. P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Peny.), *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Obor, 1984).

Kano, Hiroyoshi, "Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa pada Abad XIX", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Peny.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984).

Kenji Tsuchiya, *Demokrasi dan kepemimpinan, Kebangkitan Gerakan Taman Siswa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Ken Suratiyah, "Gender dan Pertanian", dalam Sih Handayani dan Yos Soetiyoso (Ed.), *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender* (Yogyakarta: Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta, 1997).

Kikuchi, Masao dan Yujiro Hayami, "Technological and Institutional Response and Income Shares under Demographic Pressure: A Comparison of Indonesian and Philippine Villages", dalam Geoffrey B. Hainsworth, *Village-Level Modernization in Southeast Asia, The Political Economy of Rice and Water* (Columbia University of Columbia Press, 1982).

Klatt, W., "Agrarian Issues in Asia". *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs), Vol. 48, No. 3 (Jul., 1972).

Krimerman, Leonard, "Participatory Action Research Should Social Inquiry Be Conducted Democratically?", *Philosophy of the Social Sciences*, Vol. 31 No. 1, Maret 2001.

Kuntowijoyo, "Integritas Sains Sosial dan Nilai-nilai Islam: Sebuah upaya perintisan", dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1999).

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara wacana, 2003 [cet. 2]).

Ladejinsky, Wolf, "Too Late to Save Asia?", dalam L. Walinsky (Ed.) *Land Reform as Unfinished Business: Selected Papers of Wolf Ladejinsky* (Washington: The World Bank, 1977).

Laporan Seminar Sejarah (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1958).

M. M. Billah, dkk, "Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan Jawa (Tengah)", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Peny.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di*

Jawa dari Masa ke Masa (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia, 1984).

Mack, Andrew, *Rethinking the Dynamics of Capital Accumulation in Colonial and Post-Colonial Indonesia: Production Regulation,* Disertasi Ph.D. pada Departemen Ekonomi, Universitas Sydney, 2001.

Mahfud MD., "Mosi Integral Natsir dan Sistem Ketatanegaraan Kita", makalah disampaikan pada seminar *Refleksi 58 Tahun Mosi Integral Mohammad Natsir-Merawat NKRI Menghempang Potensi Disintegrasi,* di Universitas Jenderal Soedirman, Poerwokerto, tanggal 9 Juli 2008.

Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan ideology LSM di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 [cetakan keempat]).

Masalah Pertanahan, Laporan Interim Menteri Negara Riset Republik Indonesia, Jakarta, 4 Maret 1978.

McCawley, Peter, "Some Suggestions for Aid to Indonesian Universities", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 10, No. 3, November 1974.

Mestika Zed, "Ilmu Sosial Indonesia dalam Wacana *Methodenstreit*", dalam Taufik Abdullah, *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

Moch Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: Pewarta, 2009).

Moch Tauhid, *Mengenang Pahlawan Sjahrir* (Yogyakarta: Jajasan Sjahrir,1966).

Moch. Tauchid, "Mentjapai Kemakmoeran dengan Modernisasi Pertanian", *Barisan Tani Indonesia,* 1947.

Moch. Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Djakarta: Tjakrawala, 1952 dan 1953).

Moh. Ali, "Beberapa Masalah tentang Historiografi Indonesia", dalam Soedjatmoko, dkk. (Ed.), *Historiografi Indonesia, sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1995).

Moh. Sadli, "20 Tahun Perkembangan Ilmu Ekonomi di Indonesia" dalam Widjojo Nitisastro (Ed.), *Research di Indonesia, 1945-1965, Bidang Sosial Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IV).* (Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia, 1965).

Mosher, Arthur T, *Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization* (New York: Praeger Publishers for the Agricultural Development Council, 1965).

Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty untuk PSPK, 1990).

Mubyarto dkk., *Sajogyo, Bapak, Guru, dan Sahabat* (Jakarta: Yayasan Agro-Ekonomika,1996).

Mubyarto, "Prof Sajogyo: Sosiolog yang Ekonom, atau Bapak Ekonomi-Sosiologi Indonesia", dalam Mubyarto dkk., *Sajogyo: Bapak, Guru, dan Sahabat* (Jakarta: Yayasan Agro-Ekonomika,1996).

Munandir (Ed.), *PTM Sebagai Bentuk Perjuangan Mahasiswa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa* (Yogyakarta: UGM Press, 2001).

Noer Fauzi, "Desentralisasi dan Community Driven Development dalam Konteks Pembangunan Kapitalis: Suatu Kajian Teoritis", 2009, tt., tt.

Noer Fauzi, "Perjalanan sebuah Gagasan: Pengantar Penyunting", dalam Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta dan Bandung: Insist, KPA, dan Pustaka Pelajar, 2000).

Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: Insist dan KPA, 1999).

Oudejans, Jan H.M, *Perkembangan Pertanian Indonesia.* (Yogyakarta: GMU Press, 2006).

P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis* (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Kompas, 1995).

Pathy, Jagannath, "The United States Intervention in Third World Rural Policies", *Social Scientist*, Vol. 14, No. 4.(Apr), 1986.

Penny, David, H, "The Agro Economic Survey of Indonesia: An Appreciation", Jurnal *Indonesia,* No. II, April 1971.

Perkins, John H, *Geopolitics and the Green Revolution: Wheat, Genes and the Cold War* (Oxford: Oxford University Press, 1997).

Piagam Kaum Tani, Deklarasi Mengenai Prinsip-Prinsip dan Program Aksi, Konferensi Dunia Mengenai Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan (Jakarta: Bina Desa, 1983).

Pincus, Jonathan, "The Post-Washington Consensus and Lending Operations in Agriculture: New Rhetoric and Old Operational Realities", dalam Ben Fine, Costas Lapavitsas dan Jonathan Pincus (Eds), *Development Policy in the 21st Century* (London: Routledge, 2001).

Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: Rajawali,1983).

Pramoedya Ananta Toer, *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels* (Jakarta: Lentera Dipantara, 2005).

Raffles, Thomas Stamford, *The History of Java* (Yogyakarta: Narasi, 2008 [terjemahan]).

Raymond Firth, *Elements of Social organization, Essay on Social Organization and Value* (Boston: Beacon Press, 1967).

Razavi, Shahrashoub dan Carol Miller, "From WID to GAD: Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse", *Occasional Paper,* 1, February 1995, United Nations Research Institute for Social Development, United Nations Development Programme.

Ricklefs, M. C, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004,* Jakarta: Serambi, 2008.

Rigg, Jonathan, "Rural-urban Interactions, Agriculture and Wealth:a Southeast Asian Perspective", *Progress in Human Geography,* 22, 4,1998.

Rigg, Jonathan, "The New Rice Technology and Agrarian Change: Guilt by Association?", *Progress in Human Geography,* 1989.

Rigg, Jonathan, *Southeast Asia, The Human Landscape of Modernisation and Developmen* (London: Routledge, 2003).

Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992* (Jakarta: KPG, 2002).

Roche, Frederick C, "The Technical and Price Efficiency of Fertilizer Use in Irrigated Rice Production, *Bulletin of Indonesian Economic Studies,* Vol 30 No 1, April 1994.

Ross, Eric B, "The Malthus Factor Poverty, Politics and Population in Capitalist Development", *The Corner House Briefing 20: Poverty, Politics and Population,* July 2000.

Saito, Kazuo, "On Green Revolution", *The Developing Economies*, Vol. 8, No. 1, Maret, 1971.

Sajogyo, "Modernization without Development in Rural Java", paper pada seminar *Agrarian Transitions* FAO di Bangkok, 1973.

Sajogyo, *Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, ANP-Evaluation Study 1973* (Bogor: LPSP-IPB, 1975)

Sajogyo, "Pertanian, Landasan Tolak bagi Pengembangan Bangsa Indonesia", Pengantar dalam Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, diterbitkan untuk LPSP-IPB dan Yayasan Obor, 1975).

Sajogyo, "Kata Pengantar Pada Buku 'Desa Srihardjo', dalam Masri Singarimbun, dan D. H. Penny, *Penduduk dan Kemiskinan, Kasus Desa Srihardjo* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1976).

Sajogyo, "Pokok-pokok Pemikiran tentang Sistem Ekonomi di Indonesia: Ke Arah Partisipasi Lebih Nyata Golongan yang Masih Tersisihkan dalam Pembangunan Desa", Naskah 38 hlm., tp., Oktober, 1976.

Sajogyo, "Masyarakat Desa dan Hutan", tt, 1976.

Sajogyo, "Keputusan Konperensi Sedunia Perihal Perobahan Agraria dan Pembangunan Pedesaan", Jurnal *Agro Ekonomika*, No. 11 Tahun X, Oktober 1979.

Sajogyo, "Modernization without Development in Rural Java", *Journal of Social Sciences*, University of Dhaka, Bangladesh, 1982.

Sajogyo, "Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Penerapannya", dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986).

Sajogyo, "Pangan dari Hutan dan Pekarangan", *Jawa Pos,* 15 Oktober 1991.

Sajogyo, "Mengembangkan Suatu Pusat Studi Pembangunan: Kasus di IPB", makalah ceramah umum di PSP-IPB, 16 Desember, 1993.

Sajogyo, dkk., *Menuju Gizibaik yang Merata di Pedesaan dan di Kota* (Yogyakarta: GMU Press, 1994 [edisi V]).

Sajogyo, "Kata Pengantar, Panen Dua Puluh Tahun SPD di IPB, Bogor", dalam Sajogyo, dkk., *Panen 20 tahun: Ringkasan Tesis-Disertasi 1975-1994; Studi Sosiologi Pedesaan Program Pasca Sarjana IPB* (Bogor: Dokis, ISI Bogor, PERHEPI, dan YAE, 1996).

Sajogyo, "Struktur Agraria, Proses Lokal dan Pola Kekuasaan", dalam Endang Suhendar, dkk., *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi* (Bandung: AKATIGA, 2002).

Sajogyo, "Refleksi Sajogyo: Dari Praktek ke Teori dan ke Praktek yang Berteori", refleksi pada sebuah acara yang diadakan oleh Survey Agro Ekonomika di Jakarta, 2004, Sajogyo, "Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Pemberdayaan", draf makalah untuk seminar AIPI, 2004.

Sajogyo, *Dari Praktek ke Teori dan ke Praktek yang Berteori* (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 2004).

Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan, Jilid 1* (Yogyakarta: GMU Press, 2005).

Sajogyo, "Modernisasi tanpa Pembangunan", dalam Sajogyo, *Ekososiologi, Deidologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus Uji)* (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, bekerjasama dengan Sains, dan Sekretariat Bina Desa, 2006).

Sajogyo, "Desaku, Desa Kalian, Desa Kita", esai yang disiapkan untuk acara penganugerahan Bakrie Award 2009.

Sajogyo, "Pembangunan dan Kemiskinan Struktural", tt, 4 halaman.

Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*—Terjemahan Hersri Setiawan (Jakarta: Garba Budaya, 1999).

Schrieke, B, *Indonesian Sociological Studies, Selected Writing I.* (Bandung: W. Van Heve Ltd, 1955).

Scott, James C, *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).

Sediono M.P. Tjondronegoro, "Penelitian Ilmu Sosial dan Penentuan Kebijakan", *Prisma,* 6, Juni 1983.

Sediono M.P. Tjondronegoro, "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa", makalah untuk Seminar *Perubahan Sosial dan Demokrasi Pedesaan*, PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 11-13 Desember 1989.

Sediono M.P. Tjondronegoro, "Strategi Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Peny.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 [edisi revisi]).

Sediono M.P. Tjondronegoro, *Otobiografi Sediono M.P. Tjondronegoro: Mencari Ilmu di Tiga Zaman Tiga Benua* (penyunting A. N. Luthfi) (Bogor: Sains Press, 2008).

Sediono M. P. Tjondronegoro, *Negara Agraris Ingkari Agraria, Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2008).

Sediono M.P. Tjondronegoro, "Ringkasan Laporan Interim, Gambaran tentang Permasalahan Tanah", dalam Soedjarwo Soeromihardjo, dkk. (Ed.), *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pertanahan Indonesia, 2008).

Selo Soemardjan, "Perkembangan Ilmu Sosiologi di Indonesia, dari 1945 sampai 1965", dalam dalam Widjojo Nitisastro (Ed.), *Research di Indonesia, 1945-1965, Bidang Sosial Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IV)* (Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia, 1965)

Selo Seomardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1981).

Selo Soemardjan, "*Land Reform* di Indonesia", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Peny.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* [edisi revisi] (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Shigero Sato, *War, Nationalism, and Peasants: Java Under the Japanese Occupation 1942 – 1945* (Australia: Allen & Unwin, Ltd., 1994).

Soegijanto Padmo, "Perkembangan Kesempatan Kerja Non-Pertanian di Karesidenan Cirebon, 1830-1930", dalam Thomas J. Lindblad (Ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES, 2000).

Soekarno, "Kapitalisme Bangsa Sendiri", dalam *Dibawah Bendera Revolusi* (Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964).

Soekarno, "Marhaen dan Marhaeni", dalam *Dibawah Bendera Revolusi* (Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964).

Soekarno, "Marhaen dan Proletar", dalam *Dibawah Bendera Revolusi* (Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964).

Soekarno, "Menuju Indonesia Merdeka", dalam *Dibawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964).

Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa* (Yogyakarta: Sumur Bandung, 1965 [cetakan kedua]).

Sritua Arif, *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan, dan Kemiskinan Massal* (Jakarta: LSP, 1979).

Stoler, Ann Laura, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979* (Yogyakarta: KARSA, 2005).

Strout, Alan M, "Managing The Agricultural Transformation on Java: A Review of The Survey Agro Ekonomi", Jurnal *BIES,* vol. XXI, No 1, April, 1985.

Suratmin, *Prof. Dr. Ir. Sayogyo, Hasil Karya dan Pengabdiannya.* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983).

Tan Bock Thiam dan Shao er Ong (Ed.), *Reading in farm Management* (Singapore: Singapore University Press, 1979).

Taufik Abudullah dan Edi Sedyawati (Ed.), *Sejarah Indonesia, Penilaian Kembali Karya Utama Sejarawan Asing* (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Indonesia, 1997).

Teko Sumodiwirjo, *Sekolah Tinggi Rakjat* (Djakarta: Pusat Djawatan Rakjat, 1954).

Turton, Andrew, "Thailand: Agrarian Bases of State Power, dalam Gillian Hart, Andrew Turton, dan Benjamin White (Ed.), *Agrarian Transformation, Local Processes and the State in Southeast Asia* (California: University California Press, 1989).

Uphoff, Norman, *Local Institutional Development: an Analytical Sourcebook with Cases* (West Hartford: Kumarian Press, 1986).

Utrecht, Ernst, "Land Reform and Bimas in Indonesia", *Journal of Contemporary Asia*, 3:2 (1973).

Van Deventer, C. Th, "A Welfare Policy for The Indies", dalam W.F. Wertheim (Ed.), *Indonesian Economics, The Concept of Dualism in Theory and Practice* (The Hague: W. Van Hoeve, 1961).

van Niel, Robert, "Fungsi Sewa Tanah pada Masa Sistem Tanam Paksa di Jawa", dalam Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa* (Jakarta: LP3ES, 2003).

van Niel, Robert, "Warisan Sistem Tanam Paksa bagi Perkembangan Ekonomi Selanjutnya", dalam Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa* (Jakarta: LP3ES, 2003).

Wertheim, "The Coolie Budget Report", *Pacific Affair,* Vol. 26, No. 2. Juni, 1953.

Wertheim, W. F, *Elite vs Massa* (Yogyakarta: Resist dan LIBRA, 2009).

Wertheim, W. F, *Indonesian Society in Transition, A Study of Social Change* (Bandung: Sumur Bandung, 1964 [cetakan kedua]).

Wertheim, W. F, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial* [terjemahan] (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

White, Ben "Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transition and Scholarly Engagement in Indonesia", dalam Vedi R. Hadiz dan D. Dhakidae (Eds.), *Social Science and Power in Indonesia* (Jakarta: Equinox bekerjasama dengan ISEAS, 2005).

White, Ben, "Agrarian Debates and Agrarian Research in Java: Past and Present", dalam E. Suhendar, dkk. (Ed.), *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi* (Bandung: AKATIGA, 2002).

White, Benjamin dan Gunawan Wiradi (Ed.), *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif: Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana* (Bogor: Brighten Press, 2009).

White, Benjamin, "Gunawan Wiradi, The Agro Economy Survey and Indonesia's Green Revolution", dalam Gunawan Wiradi, *Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris* (Yogyakarta: STPN, 2009).

White, Benjamin, "Land and Resource Tenure: Brief Notes", paper dalam konferensi "Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Masa Indonesia yang sedang berubah", Jakarta, 11 Oktober 2004.

Wiggershaus, Rolf, *The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significane* (Oxford: Politiy Press,1986).

Zanden, Luiten van, *Colonial State Formation and Pattern of Economic Development*, artikel tidak diterbitkan, 2002. Dikutip seizin pengarang (20 April 2009).

Majalah, Koran, Internet, dll

"IRRI History", dalam www.irri.org, diakses tanggal 9 Juli, 2009

www.irri.org, diakses tanggal 9 Juli 2009

Basis, No 05-06, Mei-Juni, 2008.

www.tokohindonesia.com/koesnadihardjasoemantri, diakses pada tanggal 18 Juni 2007, 8:08:58.

Bernstein, Henry, *Development Studies and The Marxists,* dalam: http://repositories.cdlib.org/cgirs/CGIRS-2004-8, diakses tanggal 23 Juli 2006.

Harian Rakjat, Kamis 19 Desember 1957.

Hersri Setiawan, dalam "Surat Pembaca", *Tempo,* 10 Mei 2004.

Hersri Setiawan,"Prof. W.F. Wertheim: Masalah Demokrasi, Sosialisme dan Dunia Ketiga", Wawancara 16 November 1997, dari: http://www.geocities.com/edicahy, diakses tanggal 10 September 2007.

Kog Yue Choong, *A Green Revolution-Southeast Asia, dari:* www.berkshirepublishing.com/rvw/015/015smpl2.htm, diakses pada 23 Juni 2009.

Kompas, "Cendekiawan Berdedikasi", Jumat 27 Juni 2008.

Kompas, Bambang Ismawan "70 Tahun Bambang Ismawan: 'Kesetiaanlah Satu-satunya yang Saya Miliki dan Pertahankan'", 8 Maret, 2008.

Kompas, St. Sularto, "Cendekiawan Berkomitmen", Jumat, 27 Juni 2008.

Slamet Widodo, "Struktur Sosial Masyarakat Desa: Cibodas Dari Masa Ke Masa", lihat, www.learning-of.slametwidodo.com/?p=76, diakses tanggal 1 Februari 2008.

Shiva, Vandhana, *Women Ensure Survival,* dari: *www.metafro.be/leisa/1989/5-4-7.pdf,* diakses tanggal 23 Juni 2009.

Suara Pembaruan, "Landbouw Hogeschool Cikal IPB", 30 November 2004.

Surat *endorsement* yang ditujukan kepada Prof. Dr. Ir. Sajogyo tentang rencana penganugerahan DR. HC. Gunawan Wiradi. Surat tertanggal 22 Agustus, 2008.

Surat Pengantar Menteri Negara Riset kepada Presiden, dalam *Masalah Pertanahan, Laporan Interim Menteri Negara Riset Republik Indonesia,* Jakarta, 4 Maret 1978, hlm. 3.

Surat Prof. Dr. Sajogyo kepada penulis (Ahmad Nashih Luthfi) tertanggal, 24 Mei, 2007.

Tempo, "Sebuah Pertanyaan Di Desa Made", 28 Desember 1985.

Tempo, "Wawancara Sajogyo: 'Ukuran Garis Kemiskinan Yang Telah Dipakai 20 Tahun Harus Direvisi'",edisi 29, September 1997.

Tempo, 19 Februari, 1983.

Tempo, edisi 14/V 07 Juni 1975

Tergas, G. C. W, "Vergrooting van de Indonesische Landbouw in het Bijzonder op Java en Madura", *Landbouw,* tahun ke-22, 1950.

Sumber Lisan

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 3 Juni 2007.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 21 April 2008.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 25 April 2008.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 28 April 2008.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 5 Mei 2008.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 18 Juli 2008.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 25 Juli 2008.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 9 September 2008.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 19 November 2008.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 28 Februari, 2009.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, *via* telepon 20 Mei 2009.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 17 Juli 2009.

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Yogyakarta, 10 Agustus 2009.

Wawancara Noer Fauzi dan Ratna Saptari dengan Gunawan Wiradi, Leiden, 13 Februari 2005.

Wawancara Noer Fauzi dan Ratna Saptari dengan Gunawan Wiradi, Leiden, 16 Februari 2005.

Wawancara Noer Fauzi dengan Gunawan Wiradi, Bandung, 2 Maret 2005.

Wawancara Moh. Shohibuddin, A. N. Luthfi, dan Eko Cahyono dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 9 Februari 2008.

Wawancara dengan Imam Yudhotomo (68 tahun) Yogyakarta, 13 Agustus 2009.

Wawancara dengan Imam Yudhotomo, Yogyakarta, 16 Agustus 2009.

Wawancara dengan Imam Yudhotomo, Yogyakarta, 6 September 2009.
Wawancara dengan Sediono M.P. Tjondronegoro, Bogor, 20 November 2008.
Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 2 Oktober, 2007.
Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 16 November 2008.
Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 18 November 2008.
Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 19 November 2008.
Wawancara dengan Sajogyo, Bogor, 21 November, 2008.
Wawancara dengan Sajogyo oleh Eka Budianta dan Dian Ekowati, Bogor, 30 Juli 2008.
Wawancara Wimar Witoelar dengan Hardoyo dalam acara "Perpektif Baru" yang disiarkan secara *on air,* Maret 2000. Transkripsi kaset no. 1 TDK 90.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto-foto terkait Prof. Dr. Ir. Sajogyo

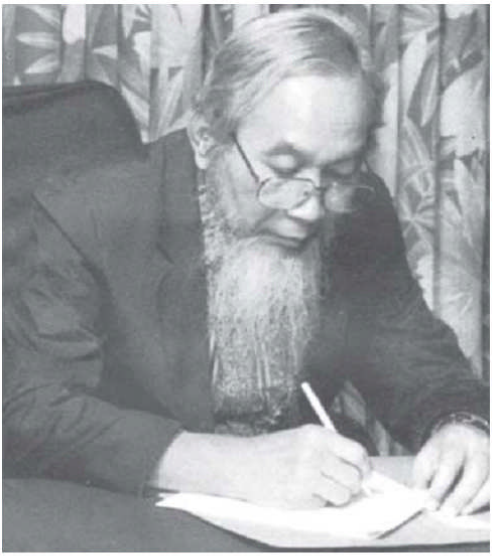


Foto 1. Prof. Dr. Ir. Sajogyo
Sumber: Istimewa



Foto 2. Di kampus inilah unsur *natura* dan *humana* dipelajari Kampto Utomo (Sajogyo). Fakultas Pertanian UI di Bogor, tahun 1960-an. Sumber: koleksi Gunawan Wiradi



Foto 3. Kampto Utomo saat dinyatakan lulus ujian disertasi dan berhak menyandang gelar Doktor untuk studi Pertanian (bukan studi sosiologi!). Tampak Prof. Wertheim menyerahkan penilaian kepada promovendus, 1958. Sumber: Mubyarto dkk. (ed.), Sajogyo, Bapak, Guru, dan Sahabat, (Bogor: Yayasan Agro Ekonomika, 1996)



Foto 4. Kampto Utomo semasih menjalani tahap kandidat Ir. berada di tengah-tengah kaum tani yang menempati lereng kawasan hutan di Cibodas, Lembang, Bandung. Foto diambil oleh H. ten Dam yang saat itu diasistensinya, 1954. Sumber: Koleksi Sajogyo Institute



Foto 5. Hetty Wertheim ketika bersama suaminya dan Kampto Utomo di sebuah sekolah kampung Transmigran di Lampung. Sumber: Wim Wertheim, Terug in Asië



Foto. 6. Di rumah inilah Kampto Utomo tinggal semasa menjabat sebagai rektor, Rumah di jl. Malabar no. 22 Bogor ini sampai sekarang didiami olehnya dan sebagian bangunan ditempati sebagai perpustakaan dan kantor Sajogyo Institut. Sumber: Koleksi Sajogyo Institute



Foto. 7. Sajogyo bersama Bambang Ismawan, Mubyarto, dan Masri Singarimbun, sesaat setelah upacara pemberian David Penny Award kepada mahasiswa IPB.
Sumber: Koleksi Sajogyo Institute



Foto 8. Sajogyo dengan para peneliti Pusat Penelitian Perekonomian Rakyat (P3R) berdiskusi di kantornya, jl. Malabar 22, Bogor. Sebagian anggota diskusi telah terlibat sejak di lembaga Survey Agro Ekonomi yang berkantor di tempat yang sama. Sebelah kiri berkacamata adalah Gunawan Wiradi. Foto tahun 1990-an. Sumber: Koleksi Sajogyo Institute



Foto. 9. Sajogyo masih memberi bimbingan pada "generasi cicit" di Malabar 22, Bogor. Pada bulan Ramadhan 1428 H/2007 M. ia mengadakan "Ngaji Bareng Sajogyo", telaah atas "problem kemiskinan". Ia sendiri yang menyusun kurikulum dan menyiapkan bahan-bahannya. Sumber: Sajogyo Institute



Foto 10. Sebagian Karya oleh dan tentang Sajogyo.
Sumber: koleksi pribadi

Lampiran 2. Foto-foto terkait Dr. Hc. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc.



Foto 9. Gunawan Wiradi saat menyampaikan pidato penganugerahan Dc. Honoris Causa pada Institut Pertanian Bogor, 28 Mei 2009. Tampak duduk di sebelah kirinya adalah kawan abadinya, Sediono M.P. Tjondronegoro. Sumber: Koleksi pribadi



Foto 10. Sekolah Arjuna Solo. Di sinilah Gunawan Wiradi pernah bersekolah. Sumber: Iskandar P. Nugraha, Mengikis Batas Timur dan Barat, Gerakan Theosofi dan Nasionalisme Indonesia, Jakarta: Komunitas Bambu, 2001



Foto 11. Gunawan Wiradi mengenakan baret khusus Gerakan Mahasiswa Indonesia (kemudian menjadi CGMI) dan pertemuan dies natalis GMI Bogor ke-3. Tampak Sjamso'oed Sadjad (kini Prof. Dr.) duduk di tengah, depan rangkaian bunga meja Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi



Foto 12. Gunawan Wiradi juga tercatat sebagai anggota Indonesia Muda terutama untuk oleh raga badminton dan bridge. Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi

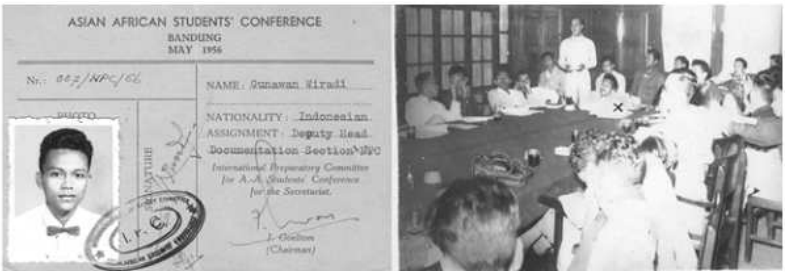


Foto 13. Kartu Anggota Gunawan Wiradi dalam kepanitian KAA Mahasiswa dan salah satu rapat persiapannya, 1956
Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi



Foto 14. Gunawan Wiradi bersama panitia seksi dokumentasi KAA Mahasiswa, Bandung, 1956. Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi



Foto 15. Pelaksanaan KAA Mahasiswa. Tampak di depan Gunawan Wiradi adalah Ibrahim Alfian dari UGM yang saat itu mewakili Consentrasi Mahasiswa Djogja (CMD)
Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi



Foto 16. Gunawan Wiradi saat mahasiswa mengadakan praktik selama sekitar 3 bulan di Djawatan Pertanian Rakjat, Pekalongan. Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi



Foto 17. Gunawan Wiradi ketika dinobatkan menjadi Insinyur dari Fakultas Pertanian UI di Bogor, 1963
Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi



Foto 18. Pada tahun 1963 itu pula Fakultas Pertanian UI di Bogor resmi berganti menjadi Institut Pertanian Bogor. Pendiriannya dihadiri oleh Presiden Soekarno. Tampak Gunawan Wiradi yang saat itu telah menjadi dosen. Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi



Foto 19. Jan Breman dan istri saat menghadiri pernikahan sepupu Gunawan Wiradi. Sumber: Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi

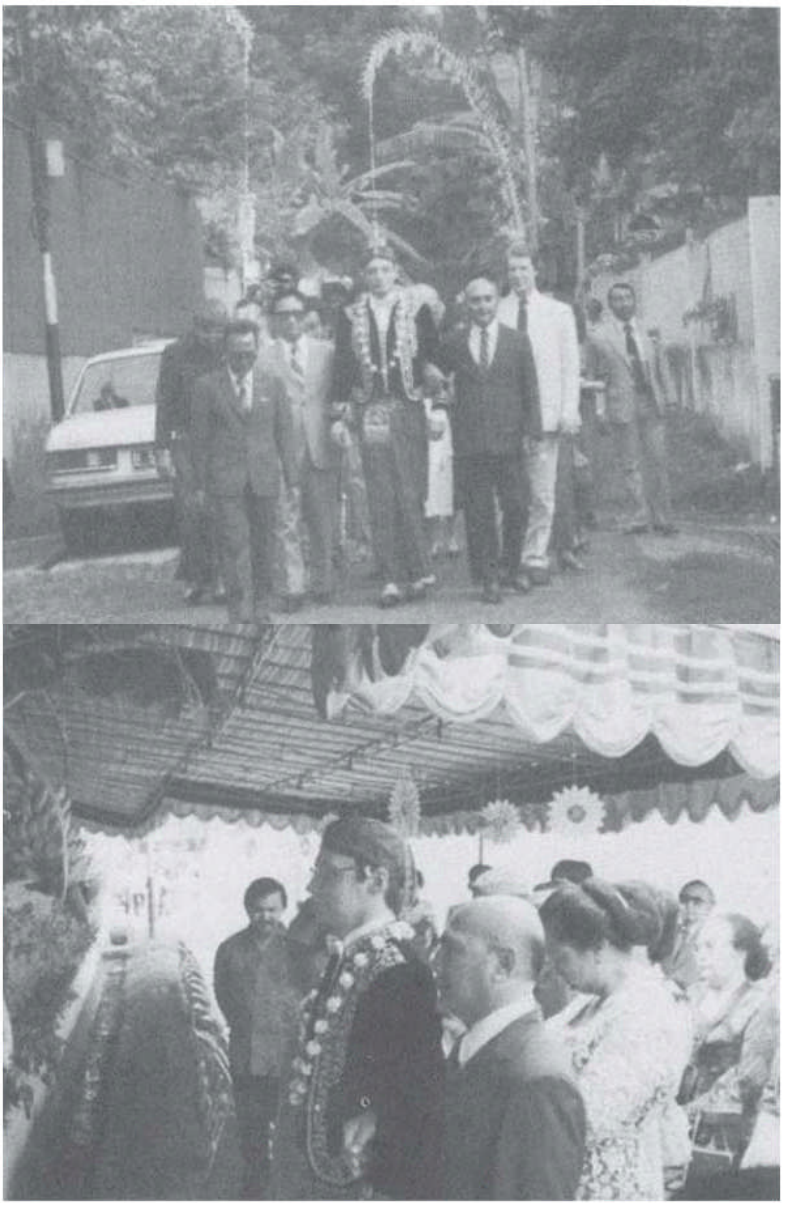


Foto 20. Gunawan Wiradi dan Sediono M.P. Tjondronegoro mewakili keluarga, saat mendampingi Benjamin White menyunting Ratna Saptari, Kemang, 1986
Sumber: Sediono M.P. Tjondronegoro, Negara Agraris Ingkari Agraria, (Bandung: AKATIGA, 2008)



Foto 21. Gunawan Wiradi dan Sediono M.P. Tjondronegoro melakukan revisit pada tahun 1994 di Ngandagan, desa yang pernah menjadi lokasi penelitian skripsinya tahun 1963
Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi



Foto 22. Gunawan Wiradi dan Sediono M.P. Tjondronegoro menghadiri konferensi ICCARD di Porto Alegre, 2006
Sumber: Koleksi Gunawan Wiradi



Foto 23. Gunawan Wiradi di Malabar 22 saat berbuka puasa bersama , 2008
Sumber: Koleksi Sajogyo Institute



Foto 24. Gunawan Wiradi berbincang dengan sahabat, guru, dan "bapak"-nya, Sajogyo, di Malabar 22, Bogor.
Sumber: Koleksi Sajogyo Institute



Profesor Martin Doornbos mewakili Rektor ISS Den Haag memberi sambutan pembukaan "Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective", Sukabumi, 17-30 Mei, 1981



Gunawan Wiradi sebagai Ketua Panitia
sedang menyampaikan sambutan



Suasana pada sidang biasa, terlihat beberapa orang
bukan ilmuwan yang berseragam



Diskusi peserta saat rehat

Lampiran 3.

Daftar Karya Tulis Prof. Dr. Ir. Sajogyo

No	Judul Artikel	Tahun
1.	Politik Pembangunan dan Pembangunan Politik	
2.	Upaya Mengatasi Kemiskinan	
3.	Pola Tata Cara Penguasaan Tanah	
4.	Data BPS Untuk Menjabarkan Indikator Perkembangan "Pertumbuhan, Pemerataan dan Partisipasi"	
5.	Lapisan Masyarakat yang Paling Lemah di Pedesaan Jawa	
6.	Pembangunan dan Kemiskinan Struktural	
7.	Modernization Without Development In Rural Java	1972-73
8.	Land and Labour In Indonesia	1970
9.	Tanggapan atas Herman Soeawrdi: "Respons Masjarakat2 Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian".	1970
10.	Pengantar Sosiologi: Pedoman Kuliah ke-1	1971
11.	The Agro-Economic Survey: A case Study of Appled Research in Indonesian Agricultural Development Efforts	1971
12.	Koperasi Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat Desa Rural Development Programs In Indonesia Village Solidarity and Other Goals	1972
13.	Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. ANP - Evaluation Study, 1973. With an English Summary of Findings and Recommendations	1975
14.	Pokok-pokok Pemikiran Tentang Sistem Ekonomi Di Indonesia: Ke Arah Partisipasi Lebih Nyata Golongan	1975
15.	Yang Masih Tersisihkan Dalam Pembangunan Desa	1976
16.	Masyarakat Desa dan Hutan	1976
17.	Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan	1977
18.	Pedoman untuk Kader di Desa dalam Membina Taman Gizi	1977
19.	Pedoman untuk Kader di Desa dalam Pembinaan Tanaman Gizi	1977
20.	Status of Social Science Teaching in Agricultural Education in Indonesia	1977
21.	Masalah Penguasaan Tanah	1978

22.	Catatan pada "Country Methodology, Indonesia" pada diskusi ASEAN/UNFPA/FAO/BKKBN Technical Meeting on Concepts, etc	1978
23.	Penelitian Atas Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kecukupan Pangan, 1977/78	1978
24.	Tingkat Pendapatan Rumahtangga dan Kecukupan Gizi (Setelah dikoreksi/ diberi catatan Sept 1978)	1978
25.	Pola Penguasaan Tanah: Aspek-aspek Sosiologis	1979
26.	Pemanfaatan Data Susenas dan Sakernas	1979
27.	Meningkatkan Martabat Petani Buruh	1979
28.	Mengatasi Masalah Agraria Kita	1980
29.	Penelitian Aksi Perihal Partisipasi dalam Pembangunan Pedesaan (Pembinaan Proyek Action - Oriented Research in Rural Development)	1980
30.	Labour Absorption in Agriculture in Three Villages, West Java, 1980: Some Preliminary Findings	1980
31.	Mencari Data Indikator "Potensi" dan "Kualitas Hidup" dalam Menilai Sampai Mana Kebutuhan Dasar Tercukupi	1980
32.	Penelitian Aksi Perihal Partisipasi dalam Pembangunan Pedesaan (Pembinaan Proyek Action-oriented Research in Rural Development): Laporan Kemajuan 1979/1980	1980
33.	Membanding Tingkat Kesejahteraan Rakyat Antar Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel dan Sumbar, 1980	1980
34.	Sosiologi Pedesaan Jilid 1	1980
35.	Menemukan Landasan dan Tujuan Suatu Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan di Institut Pertanian Bogor.	1981
36.	Tempe di Dalam Pola Makanan Indonesia, Tahun 1981	1981
37.	Menuju Kecukupan Pangan: Satu Kerangka Kebijakan dan Evaluasi	1981
38.	Pola Produksi dan Konsumsi Hasil Hortikultura	1981
39.	Peranserta Lewat Jalur Kelompok	1982
40.	Poverty and Livelihood Opportunities in Indonesia	1982
41.	Bunga Rampai Perekonomian Desa	1982
42.	Masalah Agraria	1982
43.	Keterpaduan dalam Pembangunan Desa	1982
44.	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan	1982

45.	Perkembangan Pembangunan Desa	1982
46.	Sensus Pertanian 1983: Profil Rumahtangga Pertanian, Pola Pemilikan Tanah, dan Masalah Petani Berlahan Sempit. Buku 1	1983
47.	Pangan dan Gizi dalam Pembangunan Semesta	1983
48.	Data BPS untuk Pengarahan "Delapan Jalur Plus" Pemerataan	1983
49.	Sensus Pertanian 1983: Analisis Pendapatan Petani. Buku 7	1983
50.	Mengenang Pengalaman Masa Setahun Pergolakan Pancaroba 1965-66.	1983
51.	Catatan Pertama: Tinjauan atas Kebijakan dan Pelaksanaan Program Transmigrasi	1983
52.	Rural Poverty and Efforts for Its Alleviation in Indonesia	1984
53.	Penelitian Evaluasi Pembangunan Desa: Laporan Akhir Tahun 1981/1982	1984
54.	Sosiologi Pedesaan Jilid 2	1984
55.	Peluang Berusaha, Peluang Bekerja dan Lembaga Sosial Pedesaan	1984
56.	Indikator Pemerataan Pendapatan dan Pemilikan	1985
57.	Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Sistem Pelayanan Data untuk Monitoring Perkembangan Wilayah Kecil	1985
58.	Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Desa dan Pelestarian Lingkungan	1985
59.	Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil	1985
60.	Indeks Mutu Hidup: Indikator Sosial Hasil Pemerataan Pembangunan	1985
61.	Pola Pemilikan Tanah pada Rumahtangga Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan Darat Umum dan Peternakan	1986
62.	Analisa Kesejateraan Penduduk Berdasarkan Data Sensus Penduduk 1980	1986
63.	Laporan Penelitian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan, 1983/84 - Kegiatan: Peningkatan Pusat Studi Pengembangan Pedesaan. Kegiatan 1.3.9 Tolok Ukur: Pengembangan Sistem Pendidikan.	1986
64.	Masalah Konsumsi Pangan di Indonesia	1986
65.	Tinjauan Tentang Perkembangan Ilmu-ilmu Sosial di	1986

	Indonesia dan Maknanya bagi Pembangunan Nasional	
66.	Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial	1986
67.	Menuju Gizi Baik yang Merata di Pedesaan dan di Kota Budidaya Padi di Jawa	1986
68.	Sumberdaya Manusia Indonesia dan Modernisasi dalam	1986
69.	Kelembagaan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (SMI dan Modernisasi LBTD)	1987
70.	Konflik Sosial dan Persoalan Tanah	1987
71.	Citra Indonesia di Mata Pengusaha Dunia, 1987	1987
72.	Prospek Membina Kemandirian Masyarakat Desa	1987
73.	Ilmu Sosial dalam Mendukung Ilmu Koperativisme	1987
74.	Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai	1987
75.	Garis Kemiskinan dan Ukuran Tingkat Kesejahteraan Penduduk	1988
76.	Social Issues in Agricultural Development	1989
77.	Socio Economic Aspects of Nutrition	1989
78.	Membina Muatan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan di SLTP dalam Kaitannya dengan Kehidupan Sosial Ekonomi	1990
79.	Upaya Pemerataan dalam Pembangunan dan Memerangi Kemiskinan	1990
80.	Women in Social Forestry; A Study of Two Cases of the Social Forestry Programmes in Java: The Purwakarta-Case in West Java and The South-Kedu Case in Central Java, Indonesia	1990
81.	Polemik tentang Demokrasi Ekonomi: Politik Pembangunan dan Pembangunan Politik, Tanggapan untuk Prof Dr Sarbini Sumawinata	1990
82.	Industrialisasi Pedesaan: Dilengkapi Dengan Memorandum Bersama Tentang Industrialisasi Pedesaan	1990
83.	Masalah dan Kebijakan Pembangunan Pedesaan dalam Perspektif Pancasila	1991
84.	Laporan Pertama: Studi Dampak Deregulasi, Debirokratisasi dan Desentralisasi Terhadap Perkembangan Keuangan Daerah di Kabupaten-Kabupaten "Minus"	1991
85.	Laporan Pertama: Pengkajian Pasar Perkreditan Pedesaan di Indonesia; Studi Kasus di Pedesaan Jawa Timur	1991

86.	Sosiologi Terapan	1991
87.	Pengembangan Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan Masyarakat Desa	1991
88.	Pertemuan Kerja PPL Perkembangan Penduduk Indonesia PJP Pertama: Indeks Mutu Hidup	1991
89.	Pangan dari Hutan dan Pekarangan	1991
90.	Penilaian IGGI Tentang Penurunan Kemiskinan di Indonesia: Kemiskinan, Kecupuan dan Kesenjangan	1991
91.	Studi Kemiskinan di NTT, 1991	1991
92.	Agriculture and Industrialization in Rural Development	1991
93.	Kasus Petani Ladang Pindah dalam Pembangunan Desa	1991
94.	Memasang Rambu-rambu dalam Mengembangkan Perekonomian Rakyat	1991
95.	Laporan Akhir: Dampak Deregulasi, Debirokratisasi dan Desentralisasi Terhadap Perkembangan Keuangan Daerah di Kabupaten-Kabupaten Minus	1992
96.	Kemiskinan dan Pembangunan di Nusa Tenggara Timur	1992
97.	Sejumlah Implikasi Penelitian	1992
98.	Perspektif Petani Dalam Masa PJP II	1992
99.	Beberapa Makalah Perihal Hak dan Penguasaan Tanah di Kalimantan/Borneo	1992
100.	Lampiran 1: Catatan Kepustakaan Masalah Kemiskinan dan Pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Lampiran pada Laporan Studi Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi NTT	1992
101.	Kebijaksanaan Pangan dalam Masa PJP II	1992
102.	Sosiologi Pedesaan Jilid 2	1992
103.	Analisa Determinan Dengan Menggunakan data sensus Penduduk Indonesia 1990: Analisis Kesejahteraan Rakyat	1993
104.	Human Dimensions in Global Change	1993
105.	Partisipasi Petani	1993
106.	Mengembangkan Suatu Pusat Studi Pembangunan: Kasus di IPB	1993
107.	Backward Villages and Poor People: Some Notes on Methods	1993
108.	Masalah Kemiskinan	1993
109.	Alternatif (2) Pendekatan ... untuk Program Pengentasan	1993

	Kemiskinan	
110.	Bentuk-bentuk Kemiskinan dan Sejumlah Indikator	1993
111.	Perekonomian Rakyat yang Berkembang	1993
112.	Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Mengentaskan Kemiskinan	1993
113.	Siapa yang Disebut Penduduk Miskin?	1993
114.	Manfaat Penumbuhan dan Pengembangan Orsos/LSM dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Desa	1993
115.	Studi Peningkatan Sistem dan Mekanisme Pendataan Dept. Sosial RI.	1993
116.	Kata Pengantar	1993
117.	Menyongsong Pelaksanaan Kebijaksanaan TSM: Upaya Keterpaduan Fungsi "Fasilitator" yang Membina Kemandirian pada Gerakan Masyarakat.	1993
118.	Konsep dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia	1993
119.	Memajukan Masyarakat Pedesaan yang Mandiri: Prospek Modernisasi Pertanian, Industrialisasi, dan Demokratisasi	1994
120.	Program IDT dan Gerakan Masyarakat	1994
121.	Antara Program (Inpres Desa Tertinggal: IDT) dan Gerakan Masyarakat.	1994
122.	Final Report: Pengkajian Peranan dan Hubungan Kelembagaan Perusahaan Inti, Kelompok Tani/ Koperasi dan Petani Peserta dalam Kaitannya dengan Mekanisme Pengembalian Pinjaman dan Pemupukan Dana Cadangan Replanting	1995
123.	Panen 20 Tahun Ringkasan Tesis dan Desertasi 1975-1994; Studi Sosiologi Pedesaan Program Pasca Sarjana IPB.	1995
124.	Program IDT: Penelitian Data Dasar Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal Sulteng, Maluku, Irja	1995
125.	Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan	1996
126.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan Pertanian dan Perdesaan	1997
127.	Poverty Alleviation in Indonesia Towards Year 2005	1997
128.	Menciptakan Visi: Mendukung Pengembangan Swadaya Mandiri dalam Gerakan Nasional PPK	1997

129.	Krisis Ekonomi dan Perekonomian Gugus Nusa Tenggara	1998
130.	Masalah Penanggulangan Kemiskinan	1998
131.	Krisis Ekonomi dan Perekonomian Gugus Nusa Tenggara	1998
132.	Memacu Perekenomian Rakyat	1999
133.	Memacu Perekenomian Rakyat: Metodologi Kaji Tindak Partisipatif	1999
134.	Menuju PMD-Reformasi: Belajar dari Kaji Tindak Partisipatif Masyarakat Desa Tertinggal di Propinsi Sulteng dan Irja, 1997-1999	1999
135.	Ekososiologi, Deidologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus Uji),	2006

Lampiran 4

Daftar Karya Tulis Dr. Hc. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc.*

No	Judul	Tahun
1	Mengenal sebagian dari tanah air kita di Irian Barat : berisikan: pertanian; peternakan; kehutanan	1962
2	Hyv's Tebasan and rural change : an example in Java	1973
3	Rice harvesting and selling changes in Central Java which have serious implications	1973
4	Seasonal rice prices in Indonesia, 1953-69: an anticipatory price analysis	1974
5	Proses panen dan alat-alat yang digunakan; suatu catatan; survey agro ekonomi sebuah badan penelitian antardepartemen untuk analisa kebijaksanaan dalam bidang ekonomi pertanian	1974
6	Rural development and rural institutions : a study of institutional changes in West Java	1978
7	Patterns of land tenure in the Cimanuk River basin: some preliminary notes	1979
8	Aspek-aspek kelembagaan dalam pembangunan pertanian studi kasus di DAS Cimanuk, Jawa Barat, penelitian tahap IV, tahun 1978/1979= Institutional aspects of agricultural development : a case study in the Cimanuk River basin, West Java, report of year IV, 1978/1979	1979
9	Sejarah sebuah desa berdasarkan penuturan lisan (oral history) : suatu eksperimen	1979
10	Koperasi Simpan Pinjam: Penyelamat atau Penghisap	1979
11	Laporan hasil diskusi mengenai "Petani Buruh", 13 September 1979 di Bogor	1979
12	Aspek-aspek penguasaan tanah dan hubungan agraris : kasus satu desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 1979	1979
13	Pola-pola Penguasaan Tanah di DAS Cimanuk Dulu dan Sekarang	1979
14	Notes on some aspects of land tenure in Indonesia	1980
15	Land reform: antara harapan dan kenyataan	1980
16	Aspek-aspek penguasaan tanah dan hubungan agraris: kasas satu desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 1979	1980

	=Aspects of land tenure and agrarian relationships : case study in one village in District of Cirebon, West Java, 1979	
17	Pranata sosial dalam pembangunan pertanian (penelitian tahap I, Pelita III, 1979/1980) masalah pola penguasaan tanah = Rural social institutions in agricultural development (report of phase I, Pelita III, nstitutions in agricultural development (report of phase I, Pelita III, 1979/1980) : problems of land tenure pattern	1980
18	Perkembangan koperasi di pedesaan Jawa	1980
19	Landreform in a Javanese village, Ngandagan: a case study on the role of "Lurah" in decision-making process	1981
20	Land tenure in West Java: a regional overview, with some historical notes and a case-study from the Cimanuk river basin	1981
21	Landreform in India : report on the visit of Indonesian team to Punjab and West Bengal	1981
22	Sarjana Jepang tentang Desa Kita: Tinjauan Asian Village at the Crossroad	1982
23	Acceleration of Rural Development of Java	1982
24	Reforma agraria dalam perbandingan di beberapa negara	1982
25	Land Tenure in Java: Some Findings of Case Studies in Ten Sample Villages	1982
26	Konsep dan Istilah: Aplikasinya dalam Penelitian Masyarakat di Pedesaan Jawa	1982
27	Landlessness, Tenacy & Off-Farm Employment in Rural Java, A Case of Twelve Villages	1983
28	Data BPS Untuk Pengarahan "Delapan Jalur Plus" Pemerataan	1983
29	Changes in the Kedokan system institutional adaptation or exploitation	1983
30	Nasib Buruh Tani—Benarkah Lebih Baik daripada Petani Gurem?	1983
31	Kuli Kenceng di Pedesaan—Apa Masih Ada?	1983
32	Pemilik Sawah Sempit Terimpit Banyak Utang	1983
33	Piagam Petani, Piagamnya Rakyat Miskin	1984
34	Lima Tonggak Sejarah dalam Masalah Agraria di Indonesia	1984

35	Keragaman Kerja Ganda	1984
36	Landownership, tenancy and sources of household income : community patterns from a partial recensus of eight villages in rural Java	1984
37	Dua abad penguasaan tanah: pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa	1984
38	Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria dalam Dua Abad Penguasaan tanah	1984
39	Lumbung Desa: Mungkinkah Dihidupkan Kembali	1985
40	Rural poverty and efforts for its alleviation in Indonesia: a sociological review	1985
41	Kepenguasaan tanah dalam perspektif transformasi structural	1986
42	Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa dalam Peter Hagul (ed), Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat	1986
43	Penyerapan Tenaga Kerja Oertanian di Pedesaan Menurun: Petani Tak Bertanah Jumlahnya Makin Banyak	1986
44	Revolusi Hijau Ditinjau Kembali	1987
45	Notes on Resettlement in Some Asian Countries	1987
46	Mengenal Desa dalam Waktu Singkat	1987
47	Mengenal Desa dan Perkembangannya Secara Selayang Pandang	1988
48	Masalah pertanahan dalam konteks pembangunan	1989
49	Transformasi Pertanian: Quo Vadis?	1989
50	Transformasi Agraris	1989
51	Industrialisasi dan Transformasi pedesaan	1989
52	Rapid Rural Apparaisal (RRA): Suatu Pengantar	1989
53	Agrarian and non-agrarian bases of inequality in nine Javanese villages dalam G Hart, A Thurton and B White (eds), Agrarian Transformation: Local Processes and the State in Southeast Java	1989
54	Transformasi (Sosek) Pedesaan	1990
55	Relevansi Masalah Pertanahan Menjelang Era Tinggal Landas	1990
56	Identifikasi dan Informasi Permasalahan dalam Penguasaan dan Penggunaan Tanah di Pedesaan (Suatu Kajian Sosiologis)	1990

57	Perspektif Sosial Pedesaan- Suatu Catatan Ringakasan	1990
58	Motivasi Masyarakat Desa dalam Menciptakan Usaha Bersama untuk Menghadapi Pasar	1990
59	Reforma Agraia & Pembangunan Pedesaan	1990
60	Rural Capital Formation & Credit in West Java	1991
61	Industri gula di Jawa dalam perspektif model inti-satelit: kasus di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	1991
62	Aspek Metodologi dalam Pengembaraan Ilmiah Prof. Sajogyo dalam Gunardi dan Bambang SU (ed), Merintis Jalan Menanggulangi Kemiskinan: Kenang-kenangan Purna Bhakti Dr. Sajogyo	1991
63	Masalah dan Kebijakan Pertanahan dalam Perspektif Pancasila: Dengan Acuan Utama Masalah Transformasi Sosial-ekonomi Pedesaan	1991
64	Tinjauan Sosial Ekonomi Terhadap Pemilikan Tanah: Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua	1991
65	Pembentukan modal di pedesaan kasus kabupaten Cirebon	1991
66	Beberapa Butir Dasar Rapid Rural Appraisal	1992
67	Aspek Sosial dalam Penelitian Sosial	1992
68	Alokasi Tanah Pertanian Sebagai Sumberdaya Primer untuk Pembangunan Pedesaan	1992
69	Mengulas Kembali Teori Chayanov	1993
70	Masalah Kemiskinan: Sebuah Ulasan Ringkas	1993
71	Rekayasa Sosial Dalam menghadapi Era Industrilisasi Pertanian: Suatu Tinjauan Pembanding	1996
72	Reforma Agraria dalam Perspektif Transisi Agraris	1998
73	Reforma Agraria (Agrarian Reform): Salah satu sendi Reforma Total	1998
74	Kebijakan Agraria/Pertanahan Yang Berorientasi Kerakyatan dan Berkeadilan	1998
75	Rural Java in a Time of Crisis: With Special Reference to Curug Village Cirebon, West Java	1998
76	Tinjauan ulang istiqarah/wacana agraria	1999
77	Reforma Agraria dalam Menghadapi Era Globalisasi	1999
78	Pembaharuan Agraria dan Otonomi Daerah	1999
79	Reforma Agraria sebagai Basis Pembangunan dalam Era	1999

	Otonomi Daerah	
80	Kontekstualisasi 'Land Reform'	1999
81	Memahami Kebijakan Sosial-Ekonomi dan Implikasinya terhadap Masalah Pertanahan	1999
82	Gerakan Pembaruan Agraria Berbasis Rakyat (PABR)	1999
83	Konflik Agraria dan Pembangunan Perkebunan Di Indonesia	2000
84	Pembangunan Pedesaan dalam Konteks Implementasi Good Governance Menghadapi Globalisasi	2000
85	Program Reforma Agraria dan Metodologi Penelitian Agraria	2000
86	Reforma Agraria: Perjalanan Belum Berakhir	2000
87	Masalah Pembaruan Agraria (Dampak Land Reform terhadap Pembaruan Agraria)	2001
88	Tonggak Kebijakan Agraria di Indonesia dalam Prinsip-prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat	2001
89	Memperkuat Posisi Masyarakat dalam Pendayagunaan Sumberdaya Alam	2001
90	Pembaruan Agraria: Masalah yang Timbul Tenggelam dalam Prinsip-prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat	2001
91	Politik Pembangunan dan Pembaruan Agraria	2001
92	Struktur Penguasaan Tanah dan Perubahan Sosial di Pedesaan Selama Orde Baru: Perdebatan yang Belum Selesai	2001
93	Strategi Reforma Agraria dalam Konteks Otonomi Daerah	2001
94	Reforma Agraria sebagai Basis Pembangunan	2001
95	Memperingati Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria	2001
96	Catatan Ringkas tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah	2001
97	Reforma Agraria Tuntutan bagi Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia	2001
98	Tanggapan atas Konsep BPN: "Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan dalam rangka Otonomi Daerah: Sebuah Keyakinan"	2001
99	Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria;	2002

	Konflik Agraria Anak Kandung "Pembaruan" Agraria	
100	Menuju keadilan agraria: 70 tahun Gunawan Wiradi	2002
101	Rural and Agriculture Development with Special Focus on Land Issues	2002
102	Tinjauan Aspek Politik Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	2002
103	Masalah Agraria dan Reforma Agraria (Sebuah Tanggapan)	2002
104	Posisi UUPA 1960 dalam "Hiruk-Pikuk"nya Wacana Pembaruan Agraria	2002
105	Tantangan Gerakan Pembaruan Agraria "POSTA" TAP-MPR No. IX/2001	2002
106	Dampak "Dekonsentrasi" terhadap Hubungan-hubungan Agraria: Suatu Telaah Hipotesis	2002
107	Pembaruan Agraria sebagai Basis Pembangunan Sosial	2002
108	Pikiran Awal Sekilas: Departemen Pertanian POSTA TAP MPR RI No. IX/2001	2002
109	Konflik Agraria dan Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan Kritis Atas Amandemen UUD 1945	2003
110	Konsep Umum Reforma Agraria	2003
111	Mengapa Diperlukan Reforma Agraria	2003
112	Konflik Agraria dan Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan Kritis atas Amandemen UUD 1945	2003
113	Reforma Agraria dan Masa Depan Kaum Tani Indonesia	2003
114	Penguasaan Tanah Pertanian yang Optimal	2003
115	Catatan Ringkas Konflik Agraria Topik Relevan untuk Diteliti	2003
116	Sejarah UUPA 1960 dan Tantangan Pelaksanaannya selama 44 Tahun	2004
117	Land Reform di Indonesia	2004
118	Masalah Agraria: Masalah Penghidupan dan Kedaulatan Bangsa	2004
119	Catatan Ringkas Tentang: Penyempurnaan UUPA-1960 dan RUU tentang Hak-hak Atas Tanah dalam Konteks Pembaruan Agraria	2004
120	Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosial-Ekonomi di Dua Desa	2004

	Menjelang Akhir Abad Ke-20	
121	Politik Pertanian/Agraria di Indonesia	2005
122	Peran Kaum Tani Memperjuangkan Reforma Agraria di Era Globalisasi untuk Merealisasi Cita-cita Revolusi Agustus 1945	2005
123	Dinamika Kebijakan Pembaruan Agraria dan Pertanian Nasional 1979 - 2005	2005
124	Masalah Perkebunan dalam Konteks Reforma Agraria: Mencari Pegangan di Tengah Ketidakpastian	2005
125	Reforma agraria untuk Pemula	2005
126	Tanah dan Air Indonesia	2005
127	Safari Gerakan Reforma Agraria: Oleh-oleh dari Eropa	2005
128	Revisiting Villages in Java: A Study of Long Term Dynamics in Socio Economic Indikators (Step 1-Exploration)	2005
129	Agrarian Reform Movement in Indonesia: Past and Present	2005
130	Politik Pertanian/Agraria di Indonesia: Dari Masa ke Masa	2005
131	Memahami Kemiskinan dan Penanggulangannya	2006
132	Latar Belakang Lahirnya UUPA-1960 dan Eksistensinya Selama 46 Tahun: Antara Gagasan dan Tindakan	2006
133	Masalah Pembaruan Agraria (Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara)	2007 (?)
134	Pengantar Ringkas untuk Presentasi dan Diskusi Mengenai Tema Classical Agrarian Debate (CAD) dan The Agrarian Question (TAQ)	2008
135	Relevansi Hari Kebangkitan Nasional Terhadap Masalah Reforma Agraria	2008
136	Dilemma Reforma Agraria	2008
137	Metodologi Studi Agraria	2009
138	Ranah Studi Agrari	2009
139	Seluk Beluk Masalah Agraria, Penelitian Agraria, dan Reforma Agraria	2009

---

* Daftar tulisan lebih lengkap dapat dilihat di Gunawan Wiradi, *Dari Desa Menuju Agenda Bangsa: Ngandangan di Jawa Tengah hingga Porto Alegre, Brazil* (Naskah PidatoDoktor Honoris Causa Gunawan wiradi, Penyunting Moh. Shohibuddin), Bogor: IPB Press, 2009

INDEKS

A

Aceh, 97
Adam Smith, 30
action research, xxxviii, 7, 127, 187, 281,
Adriani, 87
administratur, 86,
agrarian unrest, xxxiii, 67, 94
Agrarische Wet 1870, xxxiii, 4, 43, 85,
agricultural ladder, 153
Agriculture Development Council (A/D/C), 151
agro-ekonomi, 155
agronomi sosial,132
A. Haroon Akram Lodhi, 6, 271, 273
Ahyani, 142
aid agencies, 58
AID, 156
Aidit, xxxi, 7, 102, 104, 115-16, 121, 124, 203-04, 275
Akademi Gizi, 160
Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, 138
Akhmat Satari, 228-9
Alan M. Strout, 155-6, 248
Alfian, 169, 271
Amartya Sen, 175, 180
Amels, 123
Amerika, xxxv, xxxix, 5-6, 56, 58, 67, 70, 78-9, 81, 86, 137, 142, 171, 207, 212-13, 223, 225, 228, 232, 236-7, 243, 264
Amin Tjokrosuseno, 131
Amris Makmur, 149
Amsterdam, 85, 99, 133, 136, 137, 178, 251, 273
Andjar Siswojo, 146
Andrew Mack, 41
Anglo-Saxon, 158
Anne Booth, 167-8
antikolonial, 64
Anwas Adiwilaga, xxx, 108-9
Applied Nutrition Programs, 164
Arief Budiman, 18, 272
Arifin Mukaddas, 146
Arthur.T. Mosher, 69, 70, 151, 228, 283
Asia Tenggara, xxx, 89, 336

B

Bachtiar Rifai, 114, 137
Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), xliii, 174-5, 243
Badan Perencana Masyarakat Kabupaten (Bapemka), xliii, 174
Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, 120, 122, 125, 162, 272
Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD), xliii, 162,
Balfour, Marshall C., 57
Bambang Ismawan, 187, 293,
Bandung, 37, 44, 95, 99, 106, 108, 109, 129, 133, 135, 152, 179, 194-5, 198, 208, 210, 211, 215-16, 235, 249, 252
Bangladesh, 152
Bank Dunia, 58-9, 69, 156, 166-8, 248, 336
Banyumas, 105
Banten, 27, 32, 33, 77

bank perkebunan (*cultuur banken*), 48
Bappenas, xliii, 146, 174
Barabai, 129-30
Bardosono, 138
Basuki Gunawan, 137
Bataviaasch Genootschap, 35
Baturaden, 130
Beddu Amang, 156, 272
Belanda, vii, 49, 51, 83, 84, 85, 87-9, 94, 96, 102, 104-6, 108-9, 112, 122-4, 133, 135-6, 138, 145-6, 156, 179, 195-6, 199-202, 204-6, 208, 212-13, 236-7, 241-3, 245, 248, 264
Benih Pendjenis, 61
Benih Unggul Nasional (Ungnas), 61
Benjamin White, 17, 63, 67, 70, 76, 150, 178, 232, 242, 244, 252, 258
Ben White, i, xi, 6, 7, 8, 17, 69, 83, 88, 95, 99, 104, 106, 111, 116, 156, 164-5, 168, 172, 173, 178, 182-3, 237, 251
BIMAS, xliii, 8, 141
Bina Swadaya, 187
birokratisme ekonomi, 21
Biro Urusan Sosial Ekonomi, 146
Blitar, 101
Bloembergen, 132
BLT (Bantuan Langsung Tunai), 180
Boeke, xxxv, 3, 25, 30, 45, 87
Bogor, vii, xv, xxvi, xxxii, xliii, xliv, 3, 8, 10, 12, 17, 18, 60, 83, 85-6, 106, 108-9, 115, 122, 131, 133-9, 141-6, 148, 153, 155-6, 158, 160, 162, 164, 170, 172, 177, 180,183, 193- 6, 198, 200-1, 205, 208, 210-20, 223-8, 234-5, 237, 239-41, 243-445, 247, 249-51, 253, 307, 335;
Mazhab Bogor, 22, 128, 189, 253-4, 255, 258, 261-2, 264, 266-7
Borneo, 85
Botanical Garden (Kebun Raya), 85
BPMD, xliii, 162
BPS, 12, 145, 148-9, 153, 165-7, 231
Breman, Jan, 24-6, 76, 98, 251
BTI, 95, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125
BUBT (Badan Usaha Buruh Tani) , xliii, 164, 238, 256, 259, 261
BP-SAE, 150, 157
BPMD, 43, 162
BPU, xliii, 146
BUBT (Badan Usaha Buruh Tani), xliii, 164, 238, 256
Budget Rekonstruksi, 147
Budiawan, 68
Bulog, 255
Bulugede, 183
Burger, D. H, 3, 27, 33, 39, 131
buruh tani, xxxiv, 7, 75, 109, 110, 115, 133-4, 152-4, 164, 232, 238,

C

Carol Miller, 171
Celebes, 85
Cepu, 129,
Chayanov, 2-3, 238
changes without progress, xxxiv, 41
C. Gerretson, 39
CGMI, xxxii, xliii, 142-3, 211, 214-18, 226, 228, 307
Christobal Kay, 6, 273
Chairul Saleh, 144
Chairani, 147
Chamidah, 129
China, 57
CIBA, 151
Cibodas (Lembang, Bandung), xxx, 108-10, 134, 176, 185-6
Cigelereng, 99
Cilegon, 97
Cirebon, 27, 33-5, 76, 77, 118, 177, 235
civil society, 43, 11
civil society organization (CSO), xliii
Clifton Wharton, 55
Clifford Geertz, 6, 93, 112, 127, 134, 179
Clive Day, 39
colonial apologetic, xxxiv, 87,
constant pie, 179

Consentrasi Mahasiswa Djogjakarta, 135, 215
Coolie Budget Commission, xxxiv, 88-90, 95
Consentrasi Mahasiswa Bandung, 135, 215
Corps Mahasiswa Bogor, xliii, 135

Cornets de Groot, 38
Council on Economic and Cultural Affairs (*CECA*), xliii, 69
Creutzberg, 39
Cultuurstelsel, xxx, xxxiv, 38, 41-2, 44, 51, 257
cultuurtuin (tatanan ekonomi), 85

D

Dam, H. Ten, xxx, 108-10, 133-4
Daendels, xxix, 18, 19, 28-9, 30, 32, 50, 51
Darmadi, 142
DAS Cimanuk, 235, 242
David Ricardo, 30
David H. Penny, 132, 141, 151, 154, 155, 157, 164, 238, 247-8, 276
D. Dhakidae, 7, 69, 83, 156, 261
deagrarianisasi, vi, xxx, 75, 80, 155
Debat Agraria Pertama, 40
defeodalisasi, 2, 39
de Kat Angelino, 39
dekolonisasi, 2, 103, 124, 125, 211
de Locomotief , 130
Departemen Agraria, 4, 106-7
Departemen Dalam Negeri, 171
Departemen Kesehatan, 12, 160-1, 171
Departemen Pekerjaan Umum, 146
Departemen Pertanian, 12, 86, 104, 140, 143, 145-8, 171, 231, 247
Departemen Pertanian dan Urusan Agraria, 60
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 130, 222, 272
Departemen Perkebunan, 146
Departemen Urusan Perumahan, 146
Departemen Transkopnaker, 171
Deptan, 145-6, 147, 157, 214,
Dept. Transmigrasi dan Koperasi, 146
de-peasantization, xxxiv, 99,
deregulasi, 21, 260
developmentalisme, 20, 34, 58, 169, 256
Dewan Keamanan, 144
Dewey, Alice, 112,
Dian Ekowati, 141
difusion model and international technology transfer
Dini Harmita, 139
Diponegoro, 97
Dirk van Hogendorp, 27
Djadi, 118
Djawatan Agraria, 104
Djawatan Pertanian Rakjat, 104
Djojodigoeno, 87, 110
Djokosutono, 137
domein theory, 32
domein verklaring, xxx, xxxv, 42, 43
domestic pressure, xxxv, 20
dual economy, xxxv, 3
Donald Fagg, 112
DPR-GR, 4, 107
Dr. Kuyper, 47

E

E. A Roekasah, 141
Edi Sedyawati, 137
een eere schuld, xxxv
efek domino, xxxv, 67
Egbert de Vries, 141, 145-6, 149-50, 155, 247
Eisenhower, Presiden Amerika, 68
eigendom, xxxv, 32, 42, 212
Eka Budianta, 130, 139, 141
Eko Cahyono, 139, 171, 210, 215-17, 223, 225, 227,
Emil Salim, 209, 210,
enclave, xxxv, 44, 92
Endang Suhendar, 17, 152, 195-6, 198, 200, 208, 230, 232,
Engel, B. Sahetapy, 123
Enlightenment, 35-6,
epistemic community, xxxv, 16, 20
erfpacht, xxxv, 4, 42, 50, 105
Ernest Utrecht , 18, 51, 337
Esmara, 167-8, 203
etnografi, 127, 186, 258
eugenics, xxxv, 55, 68

exemplary scientist, xxxv, 10
exploitation of unused land, xxxv, 72
extraction of capital surplus, xxxv, 41
expropriation of the agricultural founding peoples, 265

F

FAO, 65, 66, 80, 143, 145, 148-9,152, 164, 172, 240-2, 255, 258,
Fakultas Pertanian Wageningen, 132
Fakultas Pertanian UI, 109, 128, 138, 181, 210
fasisme, 16
Fasseur, 39, 41
feminis, 74
feodal, 3, 27, 29, 36, 37, 96, 194
feodalisme, 100, 120
Filipina, 57, 60, 62-3, 65-66, 70-1, 73-4, 76, 80, 147, 151
filsafat, 20
filsafat sejarah, 19, 101,
filsafat sosial, 185
floating mass, xxxvi, 68, 125
food security, xxxvi, 53
food sovereignity, xxxvi
food self-sufficiency, 58
FPPM, 12
Ford Foundation, xliii, 59, 60, 67, 113, 144-7, 172, 176, 212, 235
Formosa (Taiwan), 57
Fosdick, Raymond, 57
founding peoples, 36, 267
fungisida, 54, 79
Francis Wahono, 9, 11, 132, 183, 187
Frank Miller, 144-5, 171
Frans Seda, 147

G

Garis Kemiskinan, xxxi, 159, 163, 165, 167
Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum, 165
Garis Kemiskinan ala Sajogyo, xxxvi, 11, 159, 166-7, 168, 256, 259, 261
Gary Hansen, 141
Gay J. Pauker, 68
Gelderen, van, 87
Gerakan Tani Indonesia (GTI), xliii, 122, 125
G. J. A. Terra, 132, 162
GMI (Gerakan Mahasiswa Indonesia), 142
GMKI, 209, 210
GMNI, 142, 209, 214, 217
Goenawan Mohamad, 113, 144, 151, 212
Goerge McTurnan Kahin, 95
Goeritno, Mr. Pandam, 111
Gramsci, xxxvii, 128
Grote Postweg, 29
Gunawan Wiradi, vii, x, vii, xxiv-xxvi, xxxii, 3, 6, 10,12, 15, 17, 22, 31-2, 42, 54, 58, 60, 67, 70, 76, 83, 99, 105, 106, 115, 120, 124, 125, 128, 134-6, 141-3, 144, 151-2, 179, 183, 193-54, 262, 267, 269, 336

H

HAM, 19, 52, 246
habitus, xvii, xxvi, xxxvi, 17, 269
Hadiwignjo, Mr. Soemardjo, iii
Hamid Algadri, 123
Hardjosubroto, Ngadiman, 123
Harsya W. Bachtiar, 173
Harsono, Boedi, 106,
Hassan Sadily,138, 144
Hatta, Mohamad, 110, 122, 202-4
Hayami, Yujiro, 65, 70-72
Hazairin, 1, 87,
Hendon, 111,
Hendra Esmara, 167-8
Hendro Suwarno, 142, 228
herbisida, 54, 74, 79
Hernando de Soto, 36
Hesti, 130, 136
Hidir, 142
Hilderd Geertz, 112
Hindia Belanda, xxx, 23, 25, 40, 44-46, 49, 51, 83-87, 89, 131, 137, 139, 198-9
Hindia Timur, 42, 50-51
Hirschman, 70
Hiroyoshi Kano, 42-3, 179, 252

HIS, 129-30, 195, 197-8
historical imperative, xxxvi, 54, 68
historiografi, 38, 101-2
historiografi Indonesia, xxvii, xxxiv, 1, 25, 96, 98, 101-3, 119, 189, 217
HMI, 142, 208, 210, 214, 217
Hoechst, 151
Horkheimer, 16
Howard Dick, 40
H. S Dillon, 232
H ten Dam, xxx, 108, 109, 110, 133, 134
hukum adat, 1, 2, 3, 27, 38, 86, 87, 110, 111, 136, 212
hukum agraria, xxxiii, 4, 105-6, 211
hukum pembaruan agraria, 262
Hukum Tanah Nasional (HTN), 105
humana, xxxi, xxxvi, 131, 132, 264
Human Development Index, xxxvi, 12
Hurgronje, Snouck, 1, 87, 157
Husken, Frans, 75

I

Ibnu Sudjono, 146
Ida Bagus Teken, 140
Idenburg, 46
Ideologi xiii, xxiii, xxv, xxxvii, 5, 21,45, 52, 54, 58, 100, 101, 125, 156, 169, 203, 216, 217, 257, 258, 263,268, 269, 270,
ideological broker 16, 189,
IDS, 175
Ignas Kleden, 84, 185, 188
ilmu sosial Indonesia, 15, 18, 22, 85, 128, 186
ilmuwan public, 191
ilmuwan proyek, 191
ilmuwan birokrat, 191
imajinasi sosiologis, 99, 103, 158, 184, 186, 188, 264,
Iman Soetiknjo, 5, 106, 107, 239,
India, xl, 30, 31, 36, 57, 62, 63, 79, 164, 236, 237, 243, 244, 245,
Industrialisasi, xxiv, xxvii, 58, 240, 259, 265, 266,
industrialisasi pedesaan, 40, 49, 257, 260
Indologi, xxxvi, 84, 85
Indonesiasentris, 18, 19, 25, 98, 102, 103,
Indigenisasi, 1
Indonesianisasi, xxii, xxv, xxxi, xxxvii, 1, 180, 187, 188, 189,
Indonesian agrarian studies, v, xxxvii, 84,
induced development model, xxxvii, 71,
induced institutional innovation, xxxvii, 71
Inggris, 30, 31, 33, 58, 86, 95, 144, 175, 180, 196, 201, 206, 207, 219, 221, 223, 232, 233, 237
Insektisida, 150
Institute of Social Science (ISS), v, xliv, 148, 177,
Institut Pertanian Bogor (IPB), xliv, 83,
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), xliii, 74,
International Center for Maize and Wheat Improvement (CIMMYT), xliii, 60
International Health Division, 57
intelektual organis, xxxvii,
intertekstualitas, 16, 19
invention of tradition, xxxvii, 23,
involusi pertanian, 6, 178, 179, 186, 228
irigasi, xxxix, 47, 49, 59, 64, 69, 72, 78, 114, 146, 150, 222
IRRI, xliv, 56, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 74, 80, 140, 151,
Irlan Soejono, 145, 148, 280,
Ismael, J.E., 113,
Iso Reksohadiprojo, 112, 136,
Ivanovich Agusta, 183,
Iwa Kusumasumantri, 4

J

Jan Breman, 24, 25, 76, 98, 251
Jalan Daendels, 29,
Jakarta, 3, 43, 77, 86, 89, 106, 121, 132, 133, 145, 155, 196, 208, 210, 212, 214, 216, 225, 226, 227, 229, 249,
James Stuart Mill, 30,

Jember, 86, 125,
Jepang, xxii, 57, 58, 87, 94, 104, 117, 118, 119, 123, 130, 147, 195, 200, 201, 236,
Jerman, 55, 86, 206, 207, 212,
J.N.F.M. á Campo, 40,
John Echols, 144
John Sturgus Bastin, 30, 31
Jonathan Rigg, 62, 63, 76, 167
Journal of Social Sciences, 152,
J. Thomas Lindblad, 40, 44, 46,
Jurgen Habermas, 185, 188
Jukstaposisi, 259,
Jurnal *Agro Ekonomika*, 241, 254

K

Kabinet AMPERA, 146
kader gizi, 163
Kaharkoesman, Mr. iii,
kajian *tenurial*, xxv
Kalimantan, 85, 107, 111, 129, 149,
Kapitalisme, vi, ix, xviii, 2, 13, 18, 21, 23, 36, 50, 51, 52, 68, 82, 93, 95, 99, 100, 101, 245,
Karanganyar, 11, 129,
Karl Kautsky, 99, 100
kaum tani, xxxi, xxxiv, xxxviii, 7, 8, 11, 77, 90, 98, 100, 104, 107, 109, 113, 115-119, 121, 124, 126, 266,
Keat, 183,
Kebumen, 11, 129,
Kebun Raya Bogor, 85,
Kediri, 112, 130,
Keluarga Berencana (KB), 172, 256
Kendal, xviii, 34, 183
Kepulauan Seribu, 132
Kerajaan Banten, 27
Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM), 142
Kesultanan Cirebon, 27
K. J. Pelzer, xxxi, 135, 176,
KITLV (*Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde*), vii, xliv, 76, 85, 217,
KKN, xliv, 9,
KMAA, 208, 209,
Koentjaraningrat, 141, 247
Koesnadi Hardjasoemantri, 9
Koloniaal Instituut, 85
Komersialisasi, 179, 245
Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), 118
Komunalisme, 256
Komunisme, 52, 56, 67, 68, 203, 204, 214
Konferensi Meja Bunda (KMB), 95, 123, 124, 212
Konformisme, 263, 264
kontrol kelahiran, 55, 57
koperasi, 59, 109, 110, 115, 120, 131, 133, 134, 145, 146, 149, 166, 170, 263
Koperasi Petani, 141
Koperasi Unit Desa (KUD), 170, 238, 256
Korea, 57, 58
Korn, 87
Kota Baru, 130
Kotrar, 142
KPM-IPB, 187
krisis agraria, 170
Kruyt, 87
KSPA, 250
Kudus, 34, 101,
Kuli, 91, 92, 93, 94
Kuntowijoyo, 8, 19, 252

L

Laguna, 71
Landbouw, 2-4, 105, 131, 145, 181, 224, 294
Landbouw Hogeschool, 131, 294
landless population, 25
Landreform, xxxiv, xxxvii, 31, 56, 60, 69, 72, 81, 107-108, 124, 164, 220-222, 224, 238, 240-241, 243-244, 249, 254, 256-258, 260, 262, 265, 272, 277, 337
Landrente, 123
Land rent, xxix, 30, 33, 60, 272
landreform by grace, xxxiv
landreform by leverage, xxxiv, 221, 249, 254, 260, 262
land tenure, 182, 235, 237-238, 242-243, 245
Lampung, 114-115, 136-137, 174, 176, 185, 281

Laweyan, 101
Leiden, 40, 85, 95, 137, 196, 208-209, 211, 213, 216, 218, 276, 295
Lembaga Penelitian Benih, 60
Lembaga Penelitian Pertanian Bogor, 85
Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan (LPSP), xxxi, xliv, 170
Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), 187
Lembaga Survey Agro Ekonomika, 12
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), xliv, 12, 20, 187
Leonard Krimerman, 127
Leur, Van, 86
letter C, 111
LIBBRA, x, xliv
Liberalisasi, 4, 14, 20-21, 44
liberalisasi ekonomi, 14, 20
liberalisasi pertanian, 4
Lord Minto, 31
Los Banos, 60
Loekman Soetrisno, 222
Lembaga Pengembangan Masyarakat IPB, xliv
LPSP, xliv, 160, 170, 172, 174-175, 179, 185, 286
LP3ES, 38, 40 76, 84, 178, 185, 274-275, 279, 289, 291
LSM, xliv, 12, 14-15, 169, 176, 187, 180, 191, 249, 263, 268, 282
Luiten van Zanden, 26, 28, 32, 37
Luzon Tengah, 17

M

Machmoed Effendhie, 178
M. A. Jaspan, 49, 86, 280
Mackenzie, 31
Mahasiswa Masyarakat Bogor (MMB), 44, 135, 142, 210, 215
malaise, 30, 88
Malari, 29, 239, 256, 258
Malcolm Caldwell, 18, 51, 337
Mallincrockdt, 87
Malthusian, xxx, 55, 57, 59, 68, 81, 82
Malthusianisme, 82
Malthus, Thomas Robert, xxxvii, 30, 55, 66, 81, 286
manifesto akademis, 158, 254
Mansour Fakih, 169, 282
Mansvelt, 39
man to nature relationship, 266
man to man relationship, 266
Marhaen, 98, 99, 100, 101, 290
Marhaenisme, xxxvii, 98
Marion J. Levy, 173
Margono, Slamet, 174
marjinalisasi, xxx, 19, 52, 74-5
market-led landreform, 257, 260
Marxis, xxxix, 18, 19, 58, 99, 101-3, 270, 293
Marxian, xxxiii, xl, 6, 15, 186
Marjanto, 111
Masao Kikuchi, 71
maskulinis, 74
Masri Singarimbun, 164, 238, 286, 337
Massachusetts Institute of Technology (MIT), xliv, 6, 101, 112, 134
Mataram, 27, 101
Matthes, 87
Chabot, 87
Max Weber, 270
Mazhab Bogor, x, xiv-xv, xvii-viii, xxiv-v, xxix, 8, 10-11, 14-15, 22, 128, 189, 253-5, 258, 261-2, 264, 266-7
McCawley, Peter, 70, 283,
Mely G. Tan, 169, 234, 271
Menko Perekonomian, 144
Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 172
migrasi, xxx, xxxiv, 75-6, 81-2, 245
misionaris, 86
Mitsubishi, 151
mixed farming, 223-4
modernitas, 3, 54
modernisme, xxx, 55, 125, 140, 156, 258
Modernization without Development (MwD), xxxvii, xliv, 9, 42, 152, 158, 163, 254-5, 286- 7
Moh. Shohibuddin, xi, 171, 210, 215-7, 223, 225, 227, 251, 254, 276, 295, 335-6

mortalitas, 57
modernisasi pertanian, xxiii, 125, 150, 152, 154, 283
Moh. Amaluddin, 183, 248
Mojokuto, 134
moneterisasi, 3, 179
MULO, 130-1
M. T. Felix Sitorus, 115, 151, 277
Moh. Ali, 101, 102, 283
M. Tauchid, xxxi, 43, 106, 116-25, 218, 224, 271, 279, 283, 336
Mubyarto, 17, 145, 148, 156, 186, 211, 222, 239, 261, 272, 278, 283-4, 337
Munandir, 9, 284
M. Yamin, 52, 206

N

Nasakom, 142, 217-218, 225
Nasionalis, xxii, 100, 101, 105, 121, 144, 189, 198-199, 225, 280
Natalitas, 57
nation-state, 49
natura, xxxi, xxxvii-xxxviii, 126, 131, 132, 154, 254
Nazi Jerman, 55
negara agraris, 30, 128, 208, 289
N. F. S. Grundtvig, 162
Neoklasik, 71,
Neo-Malthusian, 55, 57
Neo-Populis, xli, 53, 81
Neo-populisme *landreform*, 81
New Guinea, Papua, 85
Ngandagan, 220-222, 272, 277, 313, 337
Nitisastro, Widjojo, 21, 112-113, 137, 239, 283, 289
Non-Government Organization (NGO), xliv, 187
No prospects for feeding the people, 57
Norman Uphoff, 158
Notestein, Frank, 57
Notonagoro, 106
Nusa Tenggara, 107
plasma nutfah, xxxix, 79

O

off farm, xxxiv, 257
Onghokham, m8, 25, 202, 243-244
Orde Baru, xvii, xxiv-xxv, 8-9, 11, 13-14, 18-21, 51-52, 83, 107, 113, 123, 128, 141, 159-151, 158, 168, 174, 180, 193, 209, 214, 217-218, 222, 226, 239-240, 244- 245, 249, 260, 265, 270
Orde Lama, xvii, 14, 255, 265
Otoritarianisme, 21
over-population, xxxviii, 55

P

Padi Bibit Unggul (PBU), xliv, 150
Padi Kerdil, 61
Padi Unggul Baru (PUB), xliv, 62
Pajak Tanah, 31, 32, 33, 97, 113
Pakis Baru, 229
Panitia Agraria Yogya, 4, 106
Panitia Agraria Jakarta, 106
Panitia Soewahjo, 106
Pantai Timur Sumatera, 95
Partai Komunis Indonesia (PKI), 7, 19, 68, 102, 119, 121, 122, 203, 204, 217, 218
Pare, 112
Participatory Action Research (PAR*)*, xxxviii, 7, 127, 187
Parakitri T. Simbolon, 30
Pati, 34, 75, 114
Paul Alexander, 178
Paulo Freire, 162
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), 144
Peasant Charter, 241
peasant economy, xxxviii, 3
peasant studies, 186
Pekanbaru, 131
Pelita, 255-7, 259
Peluang Usaha/Kerja di Luar Pertanian (PukLuTan), xliv,

177, 179, 257, 260
Pembangunanisme, 14, 58, 82
pembangunan berkelanjutan, xliv
pembangunan pedesaan, 175, 176, 193, 222, 241, 242, 246, 255, 258, 265, 257
Pendapatan Asli daerah (PAD), 174
Perang Dingin, xxx, xxxix, 5, 6, 20, 54, 55, 56, 58, 68, 112, 125, 175, 218
Perang Dunia II, xxii, 22, 55, 57, 81, 125, 195, 200
Perang Jawa, 37, 97
Perang Padri, 96
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), xliv, 12, 156, 159, 180
perkebunan swasta, 37, 40, 43, 44, 45, 124, 146
Perkins, 54, 55, 72
Perpustakaan Pertanian dan Biologi, 148
Persatuan Mahasiswa Bandung, 135
Persatuan Mahasiswa Bogor, 135
Pertanian Bergerak, xxx, 67
petani gurem, xxxi, xxxviii, 143, 152, 153, 164, 173, 231, 238, 255,
Peter Boomgaard, 35, 85, 178
Peter Haas, 20
Pidi, Blang, 97
Pierson, 38
Plan Kasimo, 162
PMKRI, 209, 210
PNI, 119, 123, 143, 144
Politik Etis, xxx, 18, 45, 48, 50, 51
Population-National Security Theory, xxxix, 56
Populisme, 81, 254
Positivisme, 268
Posyandu, xliv, 11, 161, 162
Pestisida, 54, 79, 150
Plantentuin, 86
Pramoedya Ananta Toer, 29
Praptodihardjo, Singgih, 105, 146
prelimenary grant, 145
previous accumulation, xxxix, 13, 51, 68
primitive accumulation, xxxix, 13
Prisma, 18, 112, 151, 178, 233, 242,
Prof. Seers, 175
Program Penanggulangan Kemiskinan, 260
Priangan, 27, 29
Program Masagana 99, 65,
PSP-IPB, 172, 248, 260
PSPK UGM, xliv
PTIP, 11, 143
Public Health Programs, 57
Pudjiwati Sajogyo, xvii, 10, 110, 133, 172, 173, 253
Punjab, 31, 243, 244, 258
Purwokerto, 118, 130, 131
Pusat Studi Pembangunan, xv, xxxi, xliv, 12, 172, 175, 248, 253, 256, 258
Pusat Studi Wanita, 171, 172

R

Raffles, xxix, xl, 18, 28, 30-7, 50-1, 60, 272, 285
Ransom, David, 113
rapid growth, 70
rapid diffusion, 70
rasionalisasi, 29, 204
Ratu Adil, 52, 100,
Ratu Wilhelmina, 46
Raymond Firth, 115, 285
Raymond Fosdick, 57
Rechthogeschool, 86
redistribusi, xxii, 39, 81, 107, 164, 221, 223, 238, 266
Reforma Agraria, iii, xvii, xxv, xxxii, xxxiv, xliv, 5, 6, 12-3, 22, 32, 42, 58, 104-5, 106, 126, 128, 164, 168, 193, 194, 221, 238, 240-2, 244-5, 249-51, 256, 258, 260, 262, 266-7, 277-8, 284, 292, 336
reformisme, 264
Regerings Regelmen, 42
Reinwardt, C. G., 85
Reksodihardjo, Sarimin, 4,

105-6
Reksohadiprojo, Prof. Iso, 112, 136
religious propagation, 87
Renville, 202, 204
resource exhaustion, xxxix, 56
Revolusi Hijau, xxvii, xxx-xxxiii, xxxv, xl, xliv, 9, 13, 20, 21, 53-6, 58-9, 60, 61, 63-9, 71-9, 81-2, 141, 148, 150-6, 179, 231-4, 255, 257-8, 263, 265, 276, 277, 288, 336
Revolusi Perancis, 28, 37
International Rice Research Institute (IRRI), xliv, 56, 60-2, 66-7, 69, 74, 80, 140, 151, 286, 292-3
Ricklefs, 28, 119, 230, 285
Richard Franke, 151
Rizal Mallarangeng, 20, 286
Robert Cribb, 24
Robert Jay, 112
Robert van Niel, 38-41, 274, 291
Rockefeller Foundation, 56-8, 60, 67, 81, 245
Rockefeller III, John D., 57, 69, 163
Roland N. Stromberg, 19
Rolf Wiggershaus, 16
Rostow, 40, 70
Rostowian, 40, 70, 79
R. Schiekele, 165
R. S. Sinaga Faisal Kasryno, 149
Rudolf Sinaga, 169, 232, 234, 241
Rukun Tani Indonesia (RTI), 120
Ryan, Edward , 112
Ryot, xl-xli, 31
Ryotwari, xl, 30-1

S

Sadikin Sumintawikarta, 146
Sadjarwo, 106, 144
SAE, xxxi, xliv, 141, 143-146, 148-159, 168-169, 172, 184-185, 231-232, 234-237, 242-244, 246-248, 254, 257-258, 275, 280
SDP, 169, 234-235, 243, 246-248, 255, 258
Sahertian, 148
Said, Edward W., 71
SAINS, x, 9, 12, 56, 77, 130, 132, 138, 236, 241, 250, 252, 276-277, 280, 282, 288-289, 335
Sajogyo, x, xv-xvii, xxiv-xxvi, xxix, xxxi, xxxvi, xxxviii, 8-11, 15-18, 22, 42, 60-61, 83-84, 106, 110, 114-115, 127-130, 132-133, 136, 139-145, 148, 150-154, 156-189, 193, 210-211, 220, 231-239, 241, 245, 247-250, 252-254, 256-261, 267-269, 271-272, 275-278, 280, 284-288, 294-296, 301, 335-337
Sakirman, 123
sanitasi, 93,
Saprotan, 59, 69
S. Sardjono, 118-119
Sarekat Tani Indonesia (Sakti), 121
Sartono Kartodirdjo, 8, 52, 98, 137, 222, 239, 283, 336-337
Sarwono, Mr., 111
Saturnino M. Borras Jr., 6
Satyawan Sunito, 183
Saudi Arabia, 76
Sawah Irigasi, 114
S. B Martokusumo, 137
School for Adult, 162
school of thought, xv, xl, 8, 16, 253
Schrieke, 25, 37, 86, 288
Scientific Revolution, xl, 85
Scott, James C., 77-78
sejarah ilmu pengetahuan, xxvi, 181
Selo Soemardjan, xxxi, 113, 120, 137-138, 169, 173, 234, 271, 278, 289
Sekolah Tinggi Rakjat, 169, 291

Selamatan, 93-94
Selep, 75
Sjahrir, 117-119, 121, 283
Siradjudddin Abbas, 123
Sekolah Arjuna, 198-200
Selo Soemardjan, xxxi, 113, 120, 137-138, 169, 173, 234, 271, 278, 289
Sensus Pertanian, 1963, 144, 152, 179, 231, 257
Setan Desa, xxxi, 7, 115-116, 124, 275
Sexava Nubila, 79
Sexava Carne, 79
Shahrashoub Razavi, 171
shared poverty, 179
Sinclair, 30
Singgih Praptodihardjo, 146
Sintesa, xvii, 22, 156, 247, 253
Siregar, Ir., 60
Sistem Tanam Paksa, xxxiv, 24, 38-41, 291
Sistem tenurial, 32, 43, 337
Sistem Neraca Sosial Ekonomi Nasional (SNSE), 153
sistem penyakapan (tenancy system), 153
sistem tebasan, xxxii, 232-233, 255, 275
Slamet Riyadi, 131, 202, 204
Slamet Widodo, 133, 293
SOBSI, xliv, 95
Soebadio Sastrasatomo, 123
Soedarso, Mr., 111, 149, 240, 242
Soediono M.P. Tjondronegoro, x, xvii, xxv, 10, 21, 30-31, 42, 55, 112, 120, 137-138, 148, 164, 179, 183, 232, 238-241, 245, 249, 253-254, 257, 267, 281-282, 288-289, 295, 235
Soegijanto Padmo, 177-178, 289
Soeharto, Presiden RI Kedua, 65, 154, 166, 168, 239, 265, 273
Soekarno, Presiden RI Pertama, xxx, xxxvii, 4, 60, 98-101, 139, 203-204, 208-209, 214, 219, 226, 290
Soekamto, 136
Soekemi, 130
Soenario Kolopaking, 138
Soenarjo, 106
Soepomo, 1, 87
Soewahjo, 106
Snouck Hurgronje, 1, 87, 157
Solo, 12, 97, 131, 194-196, 198, 200-207, 243
sosiologi pedesaan, xxiv, xxxi, xliv, 11-12, 15, 18, 22, 103, 108, 110, 127-128, 133, 135, 138, 170, 174, 180-184, 189, 213, 220, 225, 248, 250, 280, 287-288
sosiologi terapan, 182, 186, 188, 264, 268
Sosped-IPB, 185
Srihardjo, 164, 286
Sri Langka, 62
Sri Kusumo Kampto Utomo, 129
Sri Sultan Hamengku Buwana IX, 119
Sritua Arif,168, 290
Staadsblad, 43
Stamford Raffles, 28, 31,33, 35
state formation, 19, 26, 50-51, 292
state led land reform, 105
state of the art, ix, xl, 15
static expantion, xl, 45
Stoler, Ann Laura, 95, 290
Strode, George K., 57
St. Sularto, 128, 293
stelsel feudal, 27
strukturalisme (Marxian), 6, 173
struktur feudal, 27
strukturalisme fungsional Parsonian , 173
studi etnologi, 132
studi agraria Indonesia, x, xxx, 10, 22, 131, 271
subaltern sociology, 255
Subang, 61, 71, 76, 177, 275
Sudarto, 146
Suhaedi, 142

Suhartono W Pranoto, 8
Sukindro, 139
Suleman Krisnandhi, 142
Sumantoro Martowijoyo, 153
Sumira Dingley, 95
Sundep, 79
Sundrum, 167-168
super-land lord, 32
Surakarta, 50, 118, 195, 198, 200, 203
Suratmin, 130-131, 138, 290
surplus value, xl, 13, 100, 266
Survey Agro Ekonomi, xxxi, xliv, 114, 132, 143, 155, 231, 242, 245, 248, 253, 255, 257, 287, 290
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 166
Sussex University, 175
Sutomo Brojo, 142
Swasembada Beras, 64-65
swasembada pangan, 259, 265
swastanisasi, 21
Syaref Thayib, 11, 143

T

Taman Gizi, 11, 161-162
Tambunan, AM., 123
Tanah, x, xiii-xiv, xviii-xix, xxi-xxiv, xxx, xxxiii-xli, 2-5, 9, 23, 26-44, 46-48, 40, 54, 58, 60-61, 67, 72-77, 80, 82, 90-92, 95-97, 99, 104-111, 103-114, 117-118, 120-123, 126, 134, 144, 152-154, 162, 164, 169, 177, 179, 183, 197, 199, 205, 219, 221-222, 224, 230-231, 234-244, 246, 249, 258-259, 265-266, 272, 277, 279, 281-282, 288-289, 291-292, 294, 335-336
tanam paksa, xxxiv, 24, 27, 29, 38-41, 94, 176, 291
Tan Malaka, 102, 121
Tauchid, Moch. Xxxi, 106, 116-125, 218, 271, 279, 283, 236
Taufik Abdullah, 85, 283
Teknokrat, 15
Teko Soemodiwirjo, 136
Teluk Tomini, 79
Tempo, 64, 72, 128, 141, 154, 159, 165, 195, 215, 291, 293-294
ter Haar, 1, 87
Tergast, 223-224
Ternate, 96
Terra, 132, 162
territorial state, xli, 27
Thailand, 54, 63-64, 66, 73, 147, 237, 275, 291
The Agricultural Development Council (A/D/C), 69
Thee Kian Wie, 21, 128, 239
the new agrarian questions, 267
the notion of social structure, 264
Thomas J. Lindblad, 40, 177, 275, 289
Thomas Munro, 31
Thoyib Hadiwidjaja, 139
Tidore, 96
Timmer, 132, 181
Tirtawinata
Tjiptodarsono, Asmoe , 118
Tjokronegoro, 123
Tjoet Ali, 97
Togean, 79
Toha Oemar, 97
transformasi agrarian, xli, 53, 83, 266-267, 336
transmigrasi,12, 49, 256-257, 280
transisi agrarian, xxx, xli, 17, 21, 53, 193
Treub, Melchiour, 86
Tri Bangun Asih, 139
trickle down effect, xli, 45
tunakisma (*landless),* 7, 76, 77, 80
Tuton, 75

U

UC Berkeley, 113, 212, 251
UDC, 155
UDKP, 178
Universitas Gadjah Mada (UGM), xxxi, xlv, 102-3, 106-7, 110,112, 145, 160, 178, 207, 212, 222, 238, 239, 241, 271, 335

UKSW, 160, 221, 270
UNDP, 166
UNUD, 160
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), xxii, xvii, xxx, xlv, 5, 104, 106-7, 144, 153, 211, 224, 240, 242, 246, 273, 280
Undang-Undang Pengadaan Tanah, xiii
under production, 49
Universitas Harvard, 111
Universitas Indonesia (UI), 12
Universitas Lampung, 174
Universitas Padjadjaran (Unpad), 9, 108
Universitas Wageningen, 109, 133
University of Dhaka, 152, 289
United Nations Development Programme, 172, 285
Uni Soviet, 79, 144
Urbanisasi, 257
Urry, 183
Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), 159
USAID, xlv, 53, 67, 171, 245, 247
Rutgers, S. J., 102-103
UUPA 1960, 144, 211, 240, 242
UUPBH 1960, 153

V

van Aartsen, 132
van Den Bosch, 39, 41
van Der Capellen, xxix, 18, 36-7, 51
van der Kolff, 87
van Deventer, 38, 47, 291
van Soest, 38
van Vollenhoeven, 1, 25, 38
Vedi R. Hadiz, 7, 38, 69, 83, 156, 261, 292
verbalisme, 255
Vergouwen, 87
Vietnam Selatan, 62
Vincent J. H. Houben, 44, 279
vokasionalitas, xxv, 269-70
VOC, 18, 27-30, 35, 50-51
vorstenlanden, 40, 43, 120, 195

W

Wahjoeddin Widjaja, 111
Way Sekampung, 137
World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (WCARRD), 240, 258
Weberian, 28, 169
Werdojo. K, 123
wereng, 79
Wijono Suryokusumo, 118, 121
Wilken, 86
Williams, Lea, 112
Women in Development (WiD), xlv, 171, 172, 285
wong cilik, xxx, xli, 75, 98-99
Wongso, 97
Woods, George, 58
World Development Report, xlv, 59, 271
Widjojo Nitisastro, 21, 112-113, 137, 239, 283, 289
Bambang Widodo, 146, 218
William Collier, 153, 232, 235
Wirjadi Prawirodihardjo, 148
W. F Wertheim, xxxi, 3, 11, 29, 25, 29, 44-5, 47-9, 71, 87, 89-90, 94, 99, 108-110, 114, 133-7, 156, 273, 275, 280, 291-3, 336
W. Hardjanto, 148

Y

Yayasan Agro Ekonomi, 17, 284
Yogyakarta, 97, 105, 113, 118-121, 123, 130-1, 151, 204, 210, 213, 216, 218, 238

Z

Zainal Arifin, KH, 106
Zamindari, 32
Zwaan, Kleiweg de, 87

TENTANG PENULIS



Ahmad Nashih Luthfi, lahir di Tuban, Jawa Timur, 16 Januari 1981. Pada tahun 2000-2002 ia pernah menjadi ketua umum Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI). Lulusan sarjana dan pascasarjana Ilmu Sejarah UGM ini kini tinggal bersama istri dan seorang putrinya di Godean, Sleman, Yogyakarta. Ia saat ini adalah staf pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, sekaligus peneliti di Sajogyo Institute, Bogor. Email: anasluthfi@yahoo.com.

Beberapa publikasinya adalah:

1. Ahmad Nashih Luthfi, "Mencari Bentuk Perfilman Nasional: Umar Kayam dan Perfilman Indonesia (1966-1969)", dalam Ashadi Siregar dan Faruk HT., *Umar Kayam Luar Dalam*, Yogyakarta: Pinus, 2005.
2. Ahmad Nashih Luthfi, *Manusia Ulang-alik, Biografi Umar Kayam*, *Bogor*, Eja Publisher dan Sajogyo Inside, 2007.
3. Ahmad Nashih Luthfi (penyunting), dalam Sediono M. P. Tjondronegoro, *Mencari Ilmu di Tiga Zaman dan Tiga Benua, Otobiografi Prof. Dr. Sediono M. P. Tjondronegoro,* Bogor: Penerbit SAINS, 2008.
4. Ahmad Nashih Luthfi dan Moh. Shohibuddin, "Lumbung Paceklik, Budaya Tani yang Lestari", dalam Majalah *Basis*, edisi Mei-Juni 2008.

5. Ahmad Nashih Luthfi, "Cerita dari Warung Ulan", dalam Astuti Ananta Toer (ed.), *1000 Wajah Pram dalam Kata dan Sketsa,* Jakarta: Lentera Dipantara, 2009.
6. Ahmad Nashih Luthfi (penerjemah), "Kampanye Global untuk Reforma Agraria Kertas Kerja: Komentar terhadap Kebijakan Pembangunan Pedesaan dan Pertanahan Bank Dunia", Fian dan La Via Campessina, dalam Dian Yanuardy (ed.), *Reforma Agraria, Dinamika Aktor dan Kawasan,* Yogyakarta: STPN Press, 2009.
7. Ahmad Nashih Luthfi, "Sosok Gunawan Wiradi: Sang Guru Studi Agraria", dalam Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria, Karya Terpilih Gunawan Wiradi,* (penyunting Moh. Shohibuddin), Bogor: Institut Pertanian Bogor dan Sajogyo Institute, 2009.
8. Ahmad Nashih Luthfi, dkk., *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan,* Yogyakarta: STPN Press, 2009.
9. Ahmad Nashih Luthfi , "Pengantar LIBBRA", dalam W. F. Wertheim, *Elite vs Massa,* Yogyakarta: Resist Book dan LIBBRA, 2009.
10. Ahmad Nashih Luthfi dan Amin Tohari "Mochammad Tauchid: Tokoh Pendiri Bangsa, Gerakan Tani, dan Pendidikan Taman Siswa", dalam Moch. Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia,* Yogyakarta: STPN Press dan Pewarta, 2009.
11. Ahmad Nashih Luthfi, "Revolusi Hijau di Asia Tenggara dan Transformasi Agraria Indonesia", dalam Sri Margana dan Widya Fitrianingsih, (ed.), *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global (Persembahan 70 tahun Prof. Djoko Suryo),* Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM dan Penerbit Ombak, 2009.
12. Ahmad Nashih Luthfi (penyunting), dalam Djoko Suryo, *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern*, Yogyakarta: STPN Press, 2009.
13. Ahmad Nashih Luthfi, "Membaca Ulang Pemikiran Sartono Kartodirdjo: Telaah Awal", dalam Endriatmo Soetarto (ed.),

Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto, (Yogyakarta: STPN Press, 2010.

14. Ahmad Nashih Luthfi dan Moh. Shohibuddi, *Landreform Lokal a La Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964,* Yogyakarta: STPN Press, 2010.
15. Ahmad Nashih Luthfi (penyunting penerjemahan) dalam Malcolm Caldwell dan Ernest Utrecht, *Sejarah Alternatif Indonesia,* Yogyakarta dan Bogor: Djaman Baroe bekerjasama dengan Sajogyo Institute, 2011.
16. Ahmad Nashih Luthfi, Razif, dan M. Fauzi, *Kronik Agraria Indonesia,* Yogyakarta, Bogor, Jakarta: STPN, Sajogyo Institute, ISSI, 2011.